

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022



"Pemberdayaan Ekosistem
Ekonomi Syariah dan Digitalisasi
untuk Penguatan Keuangan
Syariah dalam Mendukung
Ketahanan Ekonomi Nasional"

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia

2022

“Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional”

Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro, Lantai 21
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

(021) 2960 0000
www.ojk.go.id

Daftar Isi

BAB 1:					
Keuangan Syariah					
Overview Makro Ekonomi	9	Penyederhanaan Kebijakan Sinergi Perbankan Syariah dengan Induk	42	Perkembangan <i>Project Financing</i> Sukuk	69
Profil Keuangan Syariah Global	14	Kebijakan OJK Tentang <i>Stimulus Targeted</i> Bagi Perbankan Syariah	43	Kontribusi Nyata Sukuk Negara untuk Indonesia	70
<i>Landscape</i> Keuangan Syariah Indonesia	15	Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023	45	Kebijakan Strategis Pasar Modal Syariah	72
Aset Keuangan Syariah Indonesia Tumbuh	16	Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2022	46	Penerbitan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2022	73
		Implementasi <i>Roadmap</i> Pengembangan Perbankan Syariah (RP2SI) di Tahun 2022	47		
BAB 2:		BAB 3:		BAB 4:	
Perbankan Syariah		Pasar Modal Syariah		Industri Keuangan Non-Bank Syariah	
Overview Perbankan Syariah	19	Overview Pasar Modal Syariah	49	Overview Industri Keuangan Non-Bank Syariah	75
Perkembangan Perbankan Syariah	20	Perkembangan Pasar Modal Syariah	50	Statistik dan Perkembangan IKNB Syariah	76
Pertumbuhan Bisnis Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	22	Perkembangan Saham Syariah	53	Asuransi Syariah	79
Kinerja Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional	24	Perkembangan Sukuk Korporasi	56	Dana Pensiun Syariah	81
Perkembangan dan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah	25	Perkembangan Reksa Dana Syariah	57	Perusahaan Pembiayaan Syariah	82
Bank Syariah Berdasarkan Modal Inti	26	Layanan di Pasar Modal Syariah	58	Perusahaan Modal Ventura Syariah	84
Perkembangan dan Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah	27	<i>Fintech</i> Pasar Modal Syariah	59	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah	85
Perkembangan dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah	30	Perkembangan Sukuk Negara	60	Lembaga Keuangan Syariah Khusus	86
Kinerja Industri BPRS Tahun 2022, Terus Bertumbuh Sejak Pandemi	34	<i>Summary</i> Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2022	61	Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah	88
Pembiayaan Menggunakan Akad Salam	36	Penerbitan Sukuk Ritel Tahun 2022	62	Pengaturan IKNB Syariah	91
Pendirian Modal Ventura Syariah oleh Perbankan Syariah	37	Penerbitan <i>Green Retail</i> Sukuk Seri ST009 Pilihan Berharga Bersama Jaga Bumi Kita	63	Dampak dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan	92
Tabungan Ukhuwah BPRS	37	Penerbitan CWLS Ritel seri SWR003: Pilihan Investasi, Berkah Tiada Henti	64	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022	93
Konversi Bank Konvensional dan Perluasan Jaringan Internasional Perbankan Syariah	38	Realisasi Penerbitan SBSN Ritel	65	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2022	93
Penerbitan Pengaturan Perbankan Syariah oleh OJK	40	Sukuk Global (SNI) Tahun 2022: <i>Sovereign Green</i> Sukuk di Pasar Global	66		
				BAB 5:	
				Financial Technology Syariah	
				Overview <i>Fintech</i> Syariah	95
				Indonesia Raih Peringkat-3 dalam <i>Global Islamic Fintech Index 2022</i>	96
				Perkembangan <i>Fintech</i> IKD Syariah	98
				Overview <i>Financial Technology</i> Syariah: <i>Fintech Peer-to-Peer Lending</i>	99
				Kebijakan Strategis <i>Fintech</i> Syariah	99
				Perkembangan <i>Fintech P2P Lending</i> Syariah	100
				Perkembangan <i>Fintech Securities Crowdfunding</i> (SCF)	101
				BAB 6:	
				Ekonomi Syariah	
				Overview Ekonomi Syariah	103
				Kebijakan dan Perkembangan Moneter Syariah	105
				Kebijakan dan Perkembangan Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah	106
				Kebijakan dan Perkembangan Makroprudensial Syariah	107
				Pengembangan Ekosistem <i>Halal Value Chain</i>	109
				BAB 7:	
				Islamic Financial Awareness	
				Overview Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keuangan Syariah	113
				Sosialisasi dan Seminar Nasional IKNB Syariah 2022	114

Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah	116	KNEKS Gaungkan Investasi Syariah di Yogyakarta	131	Edukasi dan Penyelarasan Kurikulum Ekonomi Syariah di Kalimantan Timur	143	Pengembangan Asuransi Syariah Indonesia	165
<i>Launching</i> Video Edukasi dan Sejarah Pasar Modal Syariah	117	Sinergi Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM	132	<i>Workshop Securities Crowdfunding</i> (SCF) Syariah: Semakin Mudah UMKM Menerbitkan Saham	144	BAB 9: Posisi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global	
Roadshow Pasar Modal Syariah <i>Go International</i>	118	Alternatif Investasi UMKM Lewat <i>Securities Crowdfunding</i> Syariah	133	<i>Training of Trainers</i> Industri Keuangan Non-Bank Syariah 2022	145	Posisi Indonesia Dalam Keuangan Syariah Global	167
Edukasi Keuangan Syariah	119	Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Peningkatan Ekspor Produk Halal	134	Strategi Peningkatan Kompetensi Ekonomi Syariah pada Pelajar Sekolah Menengah	146	Capaian Global	169
Edukasi Sukuk Negara Melalui <i>Launching</i> SBSN Ritel 2022	120	Hijrah Finansial dengan Instrumen Keuangan Syariah	135	Literasi dan Inklusi	147	Partisipasi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global	171
iB Vaganza	121	<i>Focus Group Discussion & Workshop</i> <i>Ijtima' Sanawi</i> DPS 2022	136	<i>Online Roadshow</i> Asuransi Syariah	148	BAB 10: Prospek Keuangan Syariah 2023	
Gebyar Safari Ramadhan (GSR) <i>Learning Management System</i> (LMS) Edukasi Keuangan	122	<i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan <i>Roadmap</i> untuk Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia	137	Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	149	Arah Kebijakan OJK atas Implementasi UU P2SK terkait Keuangan Syariah	175
Kegiatan Edukasi Melalui <i>Talkshow</i> Radio Nusantara	123	<i>Focus Group Discussion</i> Wakaf Produktif CWLS: Mampukah Menjadi <i>Booster</i> Wakaf Produktif di Indonesia?	138	Kegiatan Literasi dan Inklusi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	150	Arah Kebijakan Prioritas OJK Tahun 2023	175
Edukasi Keuangan Syariah Melalui Konten Media Sosial Sikapiuangmu	124	Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek SBSN pada <i>Stakeholders Gathering</i> Kementerian Keuangan Tahun 2022	139	<i>Digital Financial Literacy</i> (DFL)	151	Arah Pengembangan Perbankan Syariah di Tahun 2023	176
Evaluasi Kegiatan Edukasi Keuangan Syariah	124	<i>Workshop</i> Sukuk Daerah dan KPBU Syariah kepada Pemerintah Kota Bandung	140	Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH)	153	Arah Pengembangan Industri Keuangan Non Bank Syariah	177
Sosialisasi SimPel iB kepada Pelajar di Kepulauan Riau	125	<i>Workshop</i> BPD <i>to the Next Level: Strategi Aksi Korporasi Menjelang Kewajiban Spin-off</i> 2023	141	ISEF 2022	154	Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah	178
<i>Webinar Outlook</i> Industri Keuangan Syariah Indonesia 2022	126	<i>Workshop</i> Penguatan Bisnis BPD Syariah di Bandung	141	Pelaksanaan Indonesia <i>Sharia Economic Festival</i> (ISEF) 2022	156	Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Penerbitan Efek Berupa Sukuk berlandaskan Keuangan Keberlanjutan dan Sukuk Daerah	180
<i>Webinar</i> Penguatan Bisnis Syariah BPD di Indonesia	127	KNEKS Mendukung BAZNAS dalam Menguatkan Digitalisasi Pelaporan Zakat Nasional	142	Sinergi OJK dengan <i>Stakeholder Business Matching</i> IKNB Syariah dengan UMKM	160	Peluang Penerbitan Efek Daerah Berupa Sukuk Daerah	181
KNEKS Bersama BSI, MUI, dan Laznas BSMU Meluncurkan Buku Kultum Ekonomi Syariah	128				161		
Komitmen Produk Halal Indonesia Untuk Dunia	129			BAB 8: Riset Keuangan Syariah 2022			
KNEKS, MES, dan BSI Ajak PMII Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah	130			Pengembangan Indikator Kinerja dan Manajemen Risiko Terhadap Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah	163		
Kolaborasi BRIN-KNEKS Dalam <i>Halal Tech Expo</i> Dan <i>Halal Tech Forum</i> 2022	130						

Kata Pengantar Ketua Dewan Komisioner OJK



Mahendra Siregar

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menerbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI). Dalam menghadapi dinamika global serta adanya perubahan kondisi pemulihan pasca pandemi COVID-19, Industri Jasa Keuangan (IJK) Syariah banyak memanfaatkan optimalisasi keberadaan ekosistem syariah dan pemanfaatan digitalisasi untuk dapat terus bertumbuh. Perekonomian Indonesia juga kembali pulih seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dari sisi konsumsi dan juga investasi. Untuk merangkul kondisi tersebut, tahun 2022 ini kami mengusung tema LPKSI yaitu **"Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Digitalisasi untuk Penguatan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional"**.

Secara global, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus mendapat apresiasi. Hal tersebut terlihat pada peringkat Indonesia dalam *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) 2022 yang menduduki peringkat ke-3. Indonesia juga meraih peringkat ke-3 dalam *Global Islamic Fintech Index* 2022. Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, yang mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya telah mampu memanfaatkan momentum pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan menyusun berbagai strategi sebagai bentuk adaptasi. Hal ini terlihat pada tahun 2022, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun atau tumbuh positif sebesar 15,87% (yoy). Ketahanan dan kinerja positif IJK syariah juga didukung dengan sejumlah kebijakan dan stimulus yang diterbitkan oleh OJK melalui koordinasi dengan regulator terkait.

Kebijakan ekonomi dan keuangan syariah juga terus diarahkan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah pada pemulihan ekonomi nasional sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif, di antaranya melalui pengembangan ekosistem di sektor prioritas ekonomi syariah. Untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap keuangan syariah, pemerintah telah bersinergi dalam melakukan literasi dan edukasi melalui forum keuangan syariah bersama *stakeholders* terkait yang terangkum secara lengkap dalam LPKSI 2022.

Penulisan LPKSI ini merupakan wujud komitmen kita bersama dalam menguatkan industri keuangan syariah di Indonesia di masa pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun ini, kami tetap melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan RI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam menyajikan potret IJK syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Sebagai penutup, atas nama Dewan Komisiner OJK, kami menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penguatan keuangan syariah. Kami berharap, laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat luas sekaligus meningkatkan semangat kolaborasi seluruh pihak dalam mendorong pemberdayaan ekosistem ekonomi syariah dan memperkuat keuangan syariah dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahendra Siregar
Ketua Dewan Komisiner

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2022-2027

- 1. Mahendra Siregar**
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- 2. Mirza Adityaswara**
Wakil Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- 3. Dian Ediana Rae**
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- 4. Inarno Djajadi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- 5. Ogi Prastomiyono**
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan



- 6. Sophia Isabella Wattimena**
Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- 7. Friderica Widyasari Dewi**
Kepala Eksekutif Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
- 8. Suahasil Nazara**
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Kementerian Keuangan
- 9. Doni Primanto Joewono**
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Bank Indonesia

01

Keuangan Syariah



Overview Makro Ekonomi

Ekonomi global di 2022 tumbuh 3,4%, di tengah pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut.

Aktivitas global berangsur normal dengan mayoritas negara mulai mencabut kebijakan-kebijakan restriktif yang sebelumnya diterapkan selama masa pandemi.

Namun demikian, dampak pandemi terhadap produksi global yang belum sepenuhnya pulih mendorong terjadinya ketidakseimbangan pada *supply* dan *demand*, sehingga mendorong kenaikan inflasi global.

Tantangan ekonomi di 2022 bertambah berat pasca serangan militer Rusia ke Ukraina. Penerapan sanksi dan embargo oleh negara-negara Eropa dan AS terhadap minyak dan gas produksi Rusia mendorong kenaikan harga minyak dan gas global secara signifikan. Selain itu, harga komoditas pangan juga sempat meningkat pasca invasi Rusia ke Ukraina mengingat Ukraina merupakan salah satu produsen jagung dan gandum terbesar di dunia.

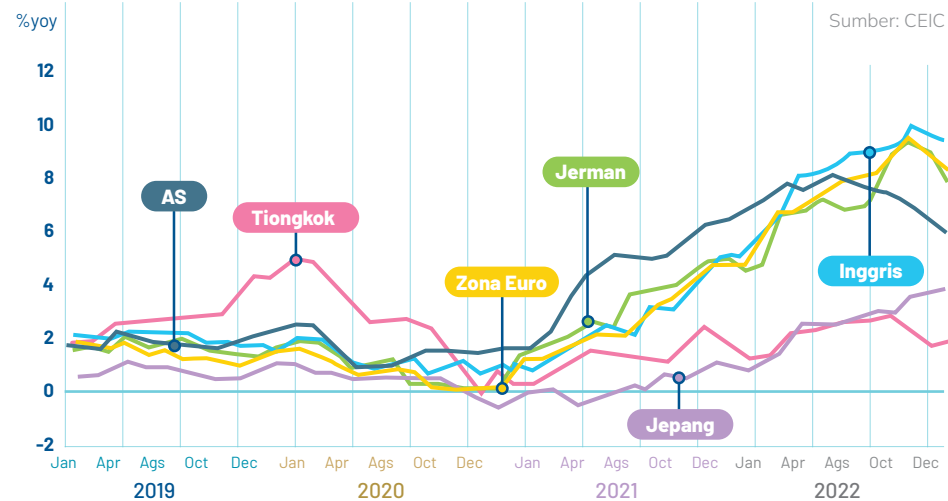
Inflasi global mencapai puncaknya di 2022. Inflasi Zona Eropa dan Inggris pada Oktober 2022 mencetak rekor tertinggi masing-masing di level 10,6% yoy dan 11,1% yoy. Inflasi AS juga meningkat ke level tertinggi dalam 40 tahun dan mencapai puncaknya pada Juni 2022 di level 9,1% yoy.

Pertumbuhan Ekonomi Global

Negara	2021	2022					Proyeksi ¹
	Tahunan (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan (%)	2023 (%)
		(%yoy)					
Global	6,1					3,4	2,9
Advanced Economies	5,2					2,7	1,2
Amerika Serikat	5,9	3,7	1,8	1,9	0,9	2,1	1,4
Zona Euro	5,3	5,5	4,2	2,3	1,9	3,5	0,7
Jepang	2,1	0,5	1,7	1,5	0,6	1,1	1,8
Inggris	7,6	10,5	3,9	1,9	0,4	4,0	-0,6
Emerging Markets	6,6					3,9	4,0
Tiongkok	8,4	4,8	0,4	3,9	2,9	3,0	5,2
India	8,7	4,1	13,5	6,3		6,7	6,1
Brazil	5,0	2,4	3,7	3,6		4,4	1,2
Indonesia	3,7	5,0	5,4	5,7	5,0	1,9	4,8

Catatan: IMF *World Economic Outlook* – Januari 2023
Sumber: CEIC

Tingkat Inflasi Global

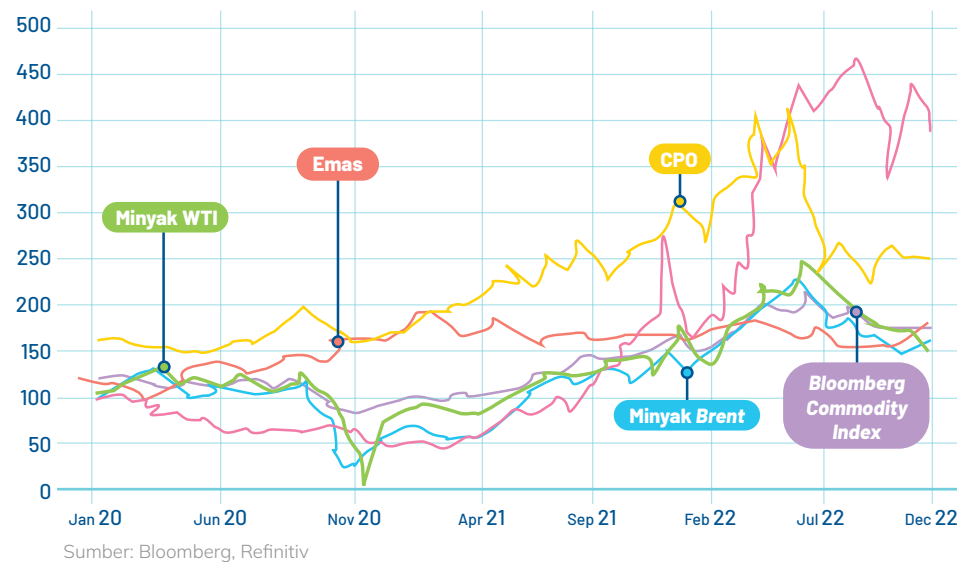


Kebijakan Moneter Global

Negara	Policy Rate 2022		Proyeksi 2023
	%	Δ ytd	
AS	4,50%	425 bps	5,00%
Euro Area	2,00%	250 bps	2,25%
Inggris	3,50%	340 bps	4,25%
Jepang	-0,10%	0 bps	-0,10%
Korsel	3,25%	275 bps	3,50%
Brazil	13,75%	450 bps	11,00%
India	6,25%	225 bps	6,50%
Tiongkok	2,75%	20 bps	2,55%
Afsel	7,00%	325 bps	7,35%
Indonesia	5,50%	200 bps	5,25%

Catatan: Bloomberg Central Bank Outlook
Sumber: Berbagai sumber

Harga Komoditas



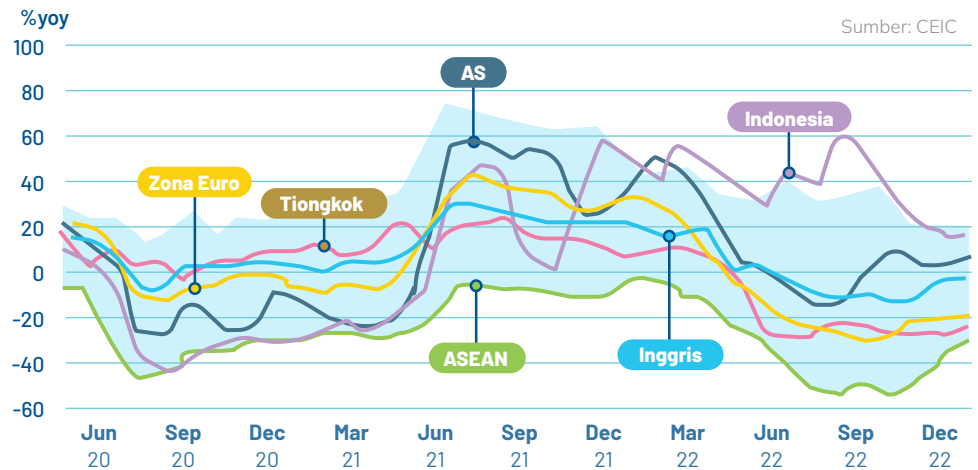
Merespon tingkat inflasi yang tinggi, Bank Sentral melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif, baik melalui peningkatan suku bunga acuan maupun melalui metode *quantitative tightening*.

Tingginya inflasi yang diikuti pengetatan kondisi keuangan global, mendorong turunnya aktivitas ekonomi global. Di sisi produksi, PMI Manufaktur negara-negara ekonomi utama tercatat kembali berada di

zona kontraksi (PMI Manufaktur < 50) pada semester II-2022. Di sisi konsumsi, indeks keyakinan konsumen dalam tren menurun hingga berada di zona negatif.

Ke depan, ekonomi global di 2023 diproyeksikan akan termoderasi mengingat tingkat inflasi yang masih tinggi serta kondisi keuangan yang pengetat seiring pengetatan kebijakan moneter global yang masih berlanjut.

Indeks Keyakinan Konsumen Global

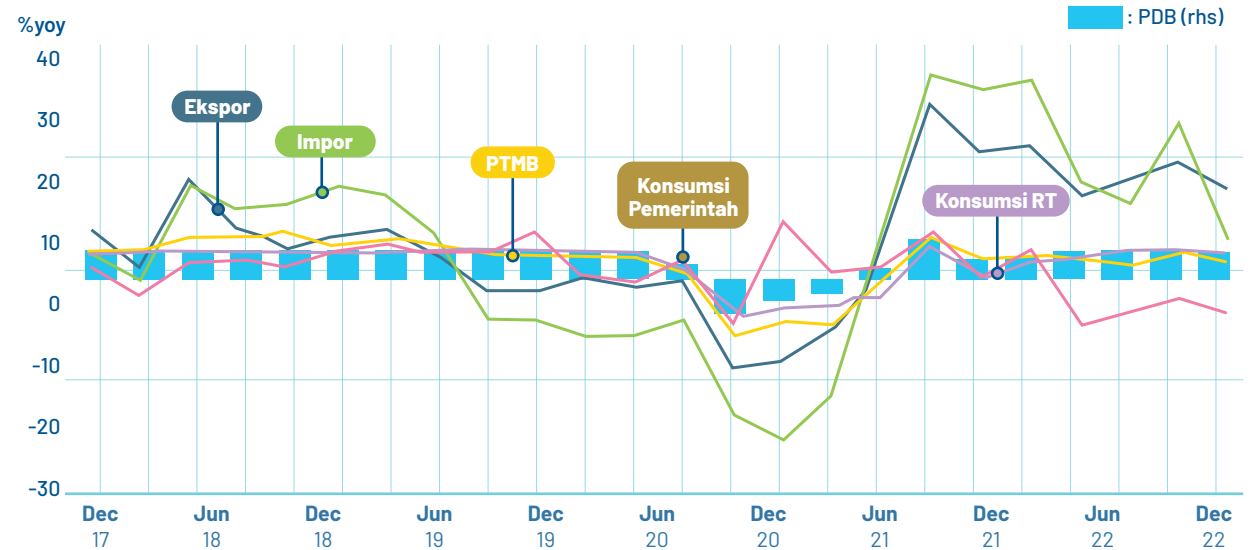


Ekonomi Domestik

Ekonomi Indonesia sepanjang 2022 terpantau resilien di tengah berlanjutnya pemulihan ekonomi pasca pandemi. PDB Indonesia tumbuh 5,3% pada 2022, didorong oleh komponen konsumsi rumah tangga serta investasi (PMTB).

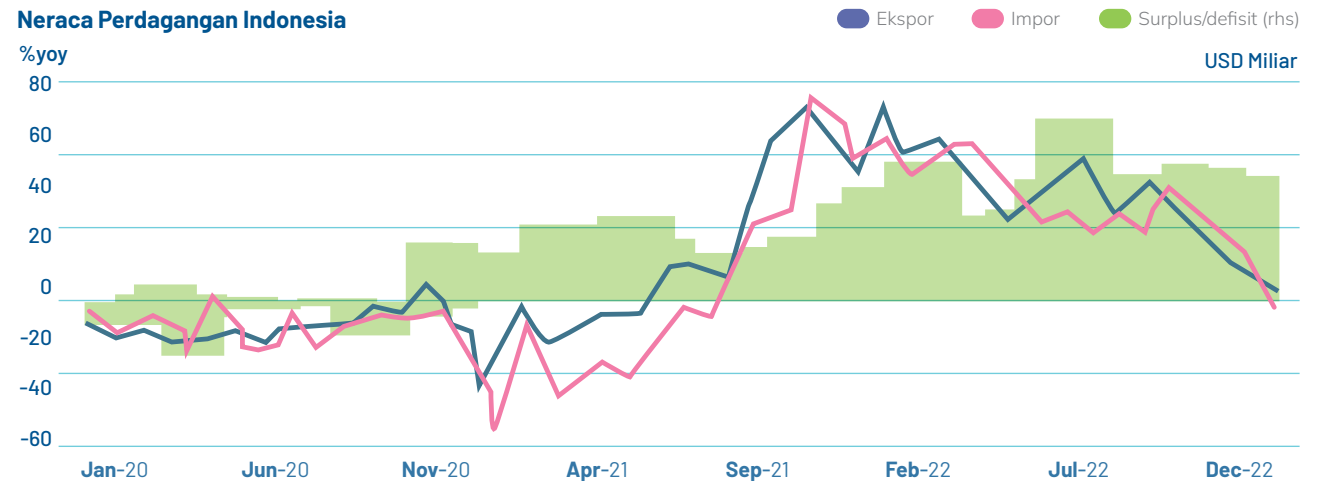
Selain itu, ekonomi Indonesia juga didorong oleh positifnya kinerja ekspor Indonesia. Neraca Perdagangan Indonesia mencatatkan net surplus sepanjang 2022 seiring dengan kenaikan harga komoditas global, termasuk pada komoditas ekspor utama Indonesia, yaitu batu bara.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



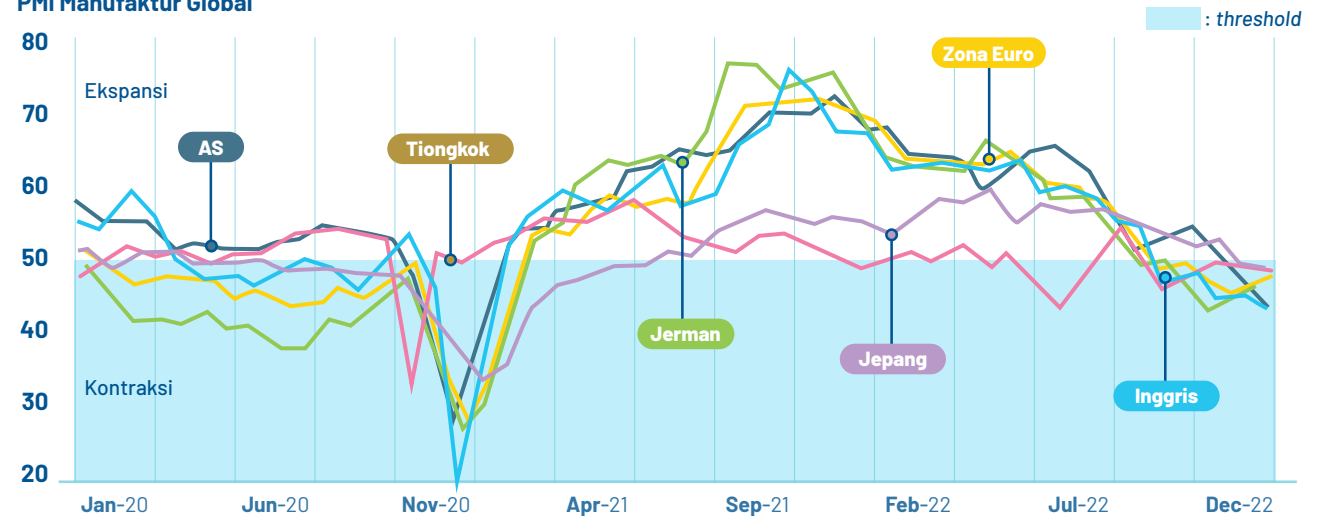
Sumber: BPS Indonesia

Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: BPS Indonesia

PMI Manufaktur Global

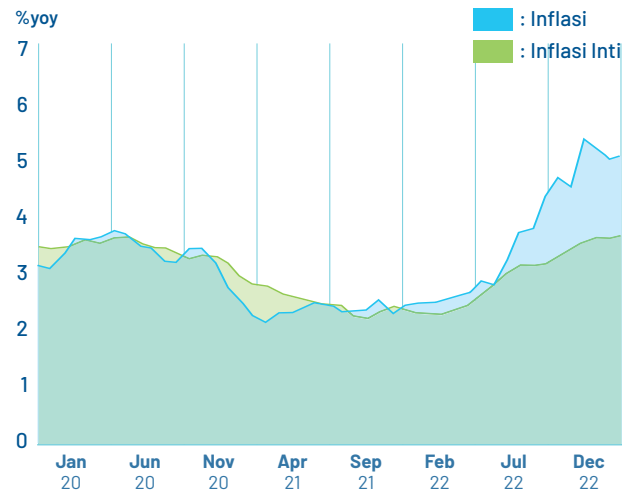


Catatan: Purchasing Managers' Index (PMI)
Sumber: S&P Global

Inflasi Indonesia tercatat meningkat pada 2022 ke level 5,51% yoy didorong terutama oleh kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan pada komponen makanan, minuman, dan tembakau. Kenaikan inflasi yang terjadi pada komoditas-komoditas kebutuhan primer, mendorong permintaan sektor ritel yang sedikit menurun. Namun demikian, secara umum konsumen tetap optimis terhadap kondisi ekonomi tercermin dari indikator Indeks Keyakinan Konsumen yang berada di zona optimis (IKK >100) sepanjang 2022.

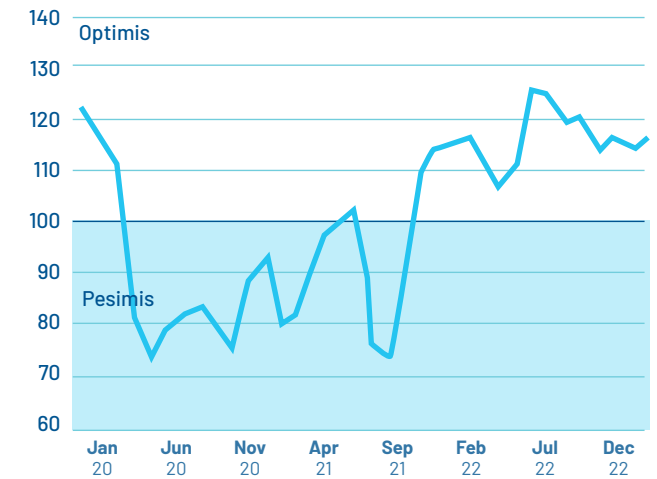
Di sisi produksi, kegiatan ekonomi relatif stabil meskipun sedikit melemah menjelang akhir tahun seiring pelemahan ekonomi global. PMI Manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansif (PMI Manufaktur > 50), sementara survei SKDU (Survei Kegiatan Dana Usaha) juga mencerminkan kondisi kegiatan usaha yang solid.

Tingkat Inflasi Indonesia



Sumber: BPS Indonesia

Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia



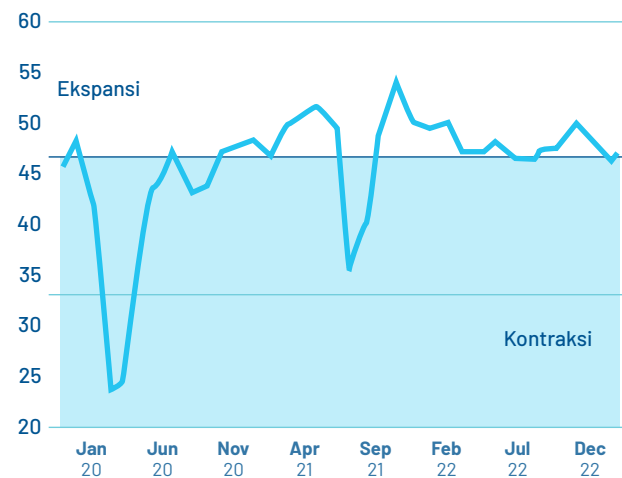
Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan Penjualan Ritel Indonesia



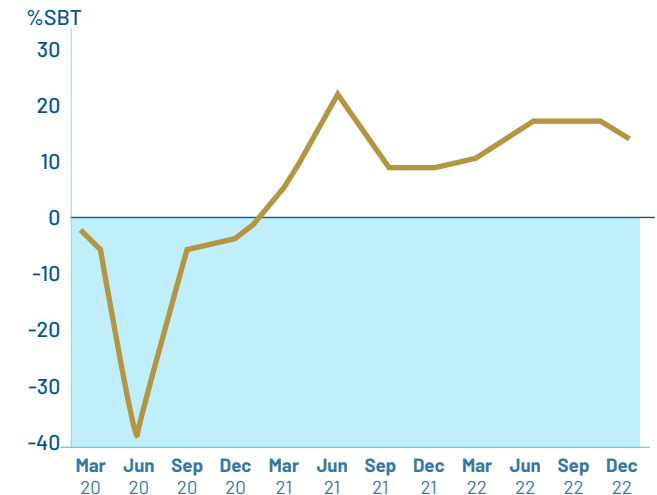
Sumber: Bank Indonesia

PMI Manufaktur Indonesia



Catatan: Purchasing Managers' Index (PMI)
Sumber: S&P Global

Survei Kegiatan Dana Usaha (SKDU)



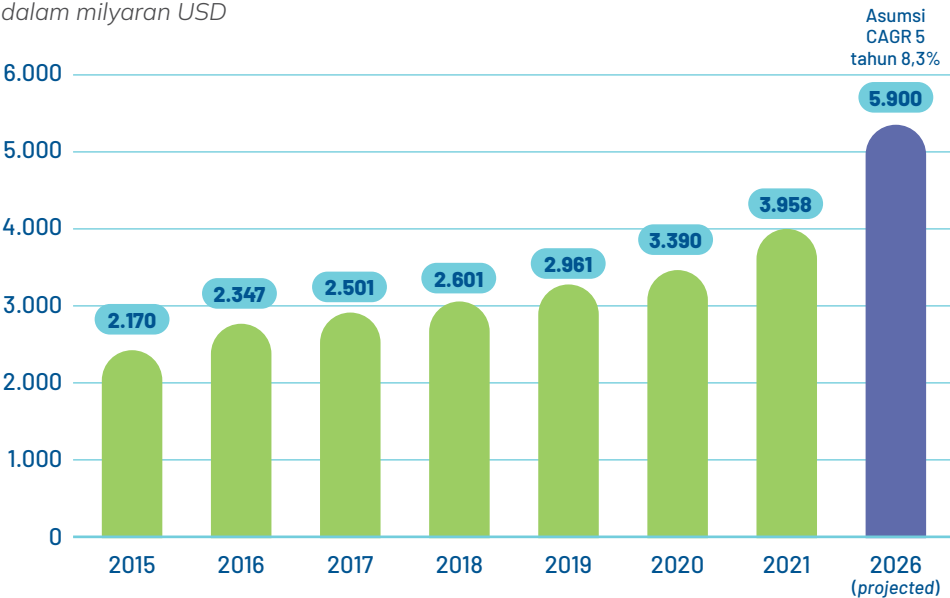
Catatan: Saldo Bersih Tertimbang (SBT)
Sumber: Bank Indonesia

Profil Keuangan Syariah Global

Aset keuangan syariah global telah mencapai US\$3,96 triliun pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat 16,76% dari tahun sebelumnya yaitu US\$3,39 triliun yang menandakan bahwa industri keuangan syariah global semakin tumbuh dengan tangguh seiring dengan pemulihan ekonomi global.

Pertumbuhan ini juga didukung dari perkembangan positif di pasar-pasar baru dan berkembang seperti Asia Tengah dan Afrika Utara, misalnya Kazakhstan, Tajikistan, dan Aljazair. Dengan terus terbukanya ekonomi global, industri keuangan syariah global diperkirakan dapat terus tumbuh hingga US\$5,90 triliun pada tahun 2026.

Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Global
dalam milyar USD



Sumber: Islamic Finance Development Report 2022

	Perbankan Syariah	Sukuk	LKS Lainnya	Dana Syariah	Takaful
Total Aset (Miliar USD)	2.765	713	169	238	73
Porsi (%)	70%	18%	4%	6%	2%
Jumlah Institusi/ Instrumen	566	4.426	778	1.903	335

Pertumbuhan masing-masing sektor keuangan syariah tercatat *double-digit* di tahun 2021 seperti tahun sebelumnya. Sektor dana syariah (*Islamic Funds*) mencatatkan pertumbuhan paling besar dibandingkan sektor lainnya dengan peningkatan 33,7% dilanjutkan dengan sektor Takaful dengan peningkatan 17,7% pada tahun 2021. Meskipun memiliki pertumbuhan paling besar, 81% dari total aset dana syariah hanya terfokus pada 3 negara yaitu Iran, Saudi Arabia, dan Malaysia.

Sementara itu, sektor perbankan syariah dengan porsi 70% dari total aset keuangan syariah mencatatkan pertumbuhan 17% pada tahun 2021. Selain perbaikan kinerja, sektor perbankan syariah juga menghadirkan pasar baru dengan pertumbuhan yang tinggi seperti Tajikistan (84%), Burkina Faso (27%), dan Ethiopia (26%).

Digitalisasi perbankan syariah terus berlanjut di 2021 seperti contoh Bank Negara Malaysia yang menyetujui pendirian 2 (dua) bank syariah digital. Selain itu, tren digitalisasi pun bergerak ke sektor asuransi syariah seperti Pakistan yang sedang mengkaji pendirian takaful digital.

Meskipun industri keuangan syariah berhasil melampaui perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, namun invasi Rusia terhadap Ukraina yang mengakibatkan peningkatan harga komoditas global juga merupakan tantangan tersendiri bagi industri keuangan syariah. Beberapa negara dengan industri keuangan syariah yang signifikan seperti Iran, Pakistan, Sudan, dan Turki, mengalami depresiasi mata uang. Dengan pengetatan anggaran negara, penerbitan sukuk menjadi instrumen pilihan bagi negara-negara di Asia Tenggara dan Pakistan.

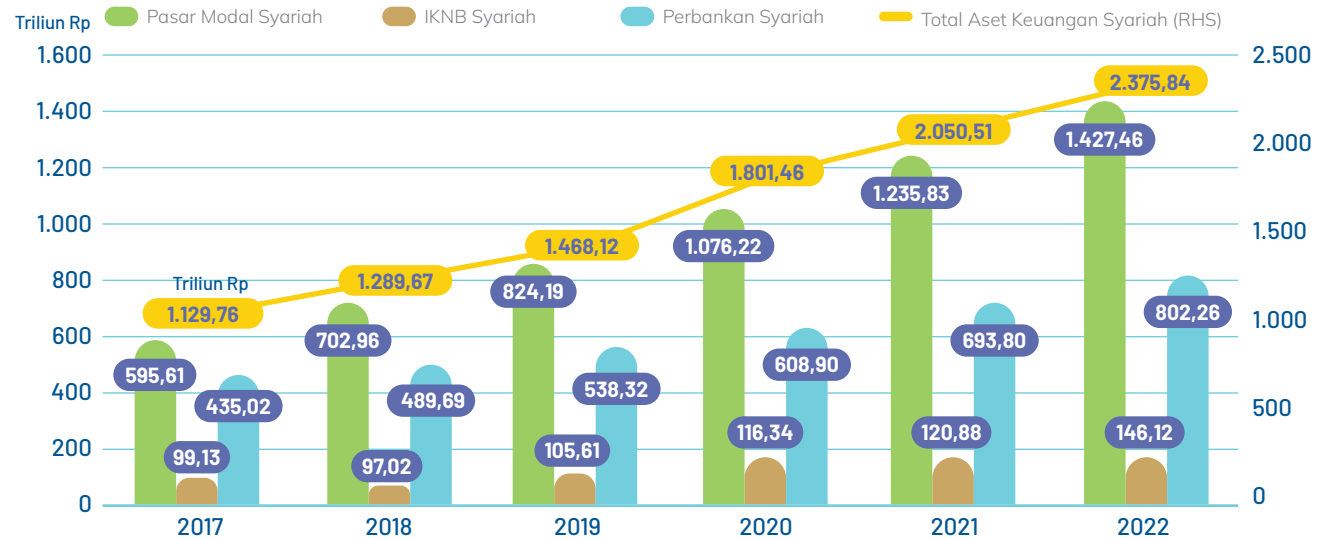
Landscape Keuangan Syariah Indonesia

Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia terdiri atas 3 subsektor yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah).

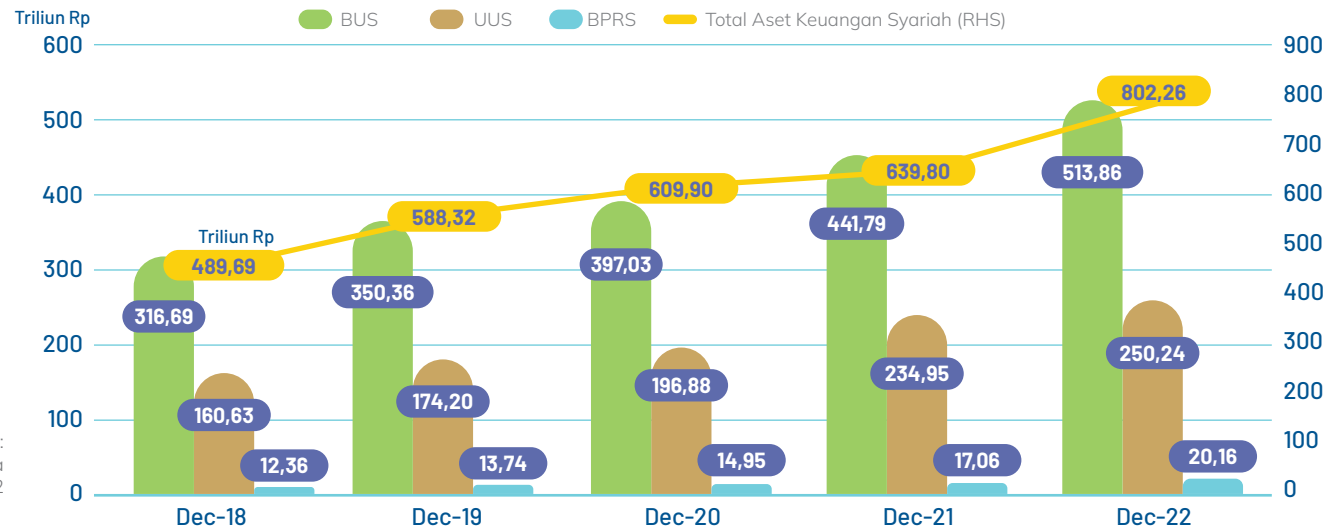
Per Desember 2022, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp2.375,84 triliun atau US\$151,03 miliar (Kurs Tengah BI per 30 Desember 2022 = Rp15.731/ US\$).

Sumber:
Otoritas Jasa
Keuangan, 2022

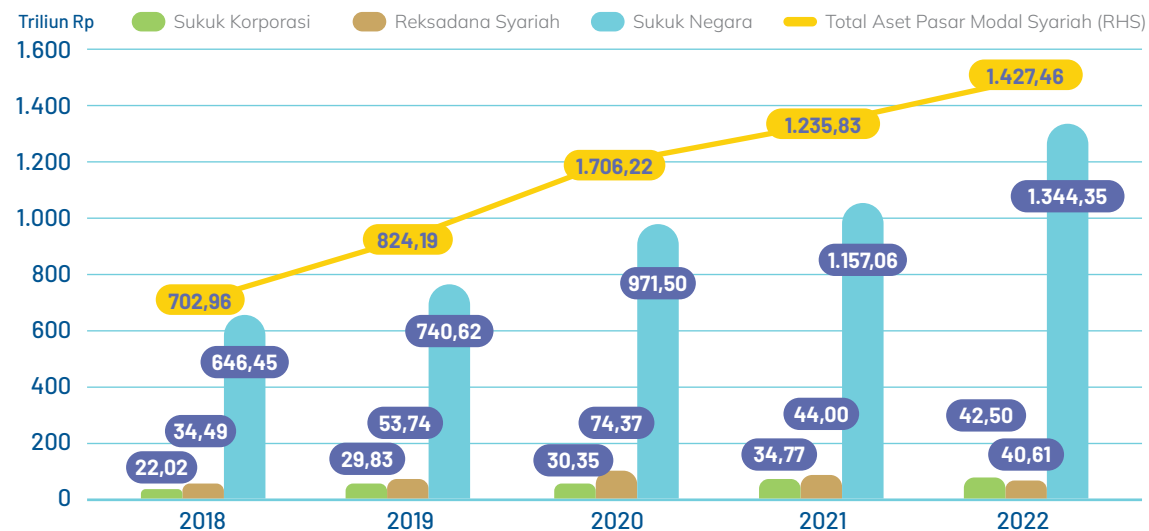
Perkembangan Total Aset Industri Keuangan Syariah



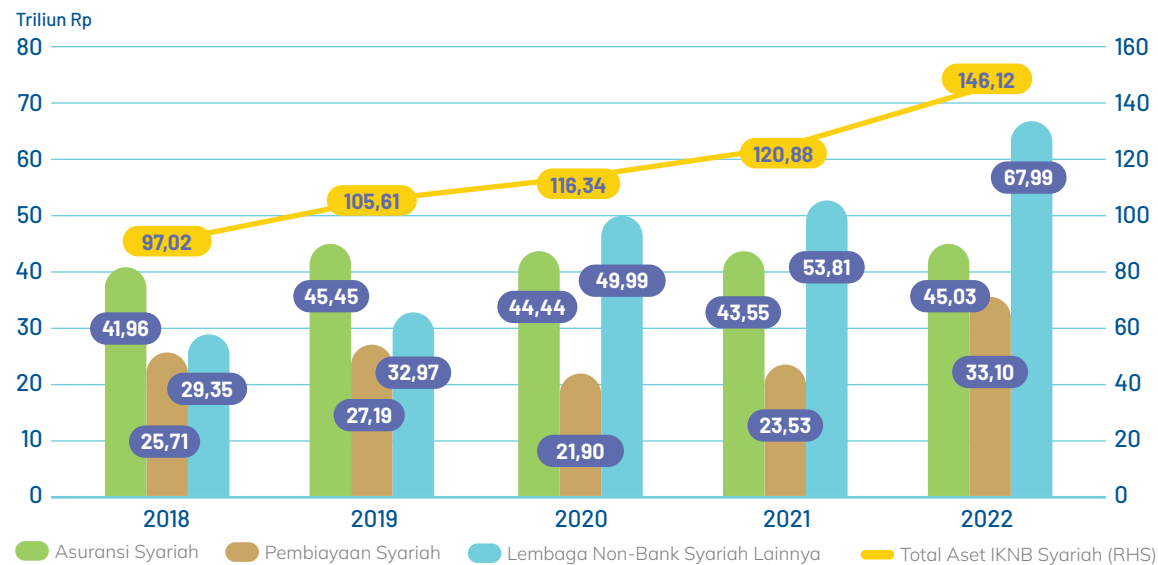
Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah



Perkembangan Total Aset Pasar Modal Syariah



Perkembangan Total Aset IKNB Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Aset Keuangan Syariah Indonesia Tumbuh

Di tahun ketiga pandemi COVID-19, aset keuangan syariah Indonesia mampu tumbuh 15,87% (yoy) menjadi Rp2.375,84 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.050,44 triliun.

Pasar Modal Syariah yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,08%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 15,51% (yoy). Perbankan Syariah dengan pangsa pasar 33,77% dari keuangan syariah tumbuh sebesar 15,63% (yoy). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 6,15% dari total aset keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 20,88% (yoy).

Total Aset Keuangan
Syariah Indonesia 2022

**Rp 2.375,48
Triliun**



Jumlah Institusi
Keuangan Syariah

473

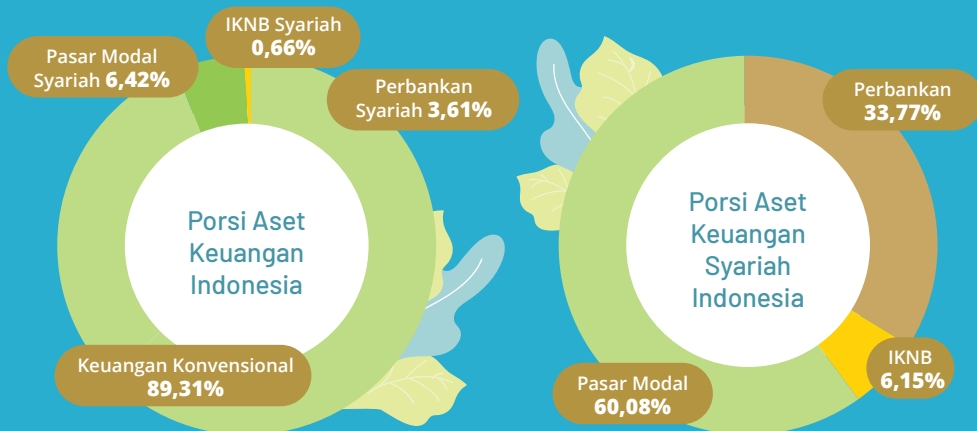


**"Market Share Keuangan Syariah Capai
10,69% terhadap Keuangan Nasional."**

Market Share (%) terhadap Industri Nasional

Industri	Market Share (%)
Perbankan Syariah	7,09%
IKNB Syariah	4,74%
Pasar Modal Syariah	18,27%

Porsi Aset Keuangan Indonesia



Industri	Jumlah Institusi/Instrumen
Perbankan Syariah	13 Bank Umum Syariah
	20 Unit Usaha Syariah
	167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
IKNB Syariah	58 Asuransi Syariah
	31 Perusahaan Pembiayaan Syariah
	7 Modal Ventura Syariah
	10 Dana Pensiun Syariah
	7 Fintech Syariah
	98 IKNB Syariah Lainnya
Pasar Modal Syariah	1 Manajemen Investasi Syariah
(Tidak Termasuk Saham Syariah)	61 Unit Pengelola Investasi Syariah
	78 Sukuk Negara (Outstanding)
	221 Sukuk Korporasi (Outstanding)
	274 Reksadana Syariah (Outstanding)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

02

Perbankan Syariah



Overview Perbankan Syariah

Pada tahun 2022, perbankan syariah membuktikan resiliensinya dan mampu tumbuh positif, tercermin dari perkembangan total aset yang mencapai Rp802,26 triliun, atau tumbuh sebesar 15,63% (yoy).

Pencapaian ini juga mendorong peningkatan *market share* perbankan syariah dan menembus level di atas 7%. Pencapaian positif lain tercermin dari kinerja Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh *double digit*, yaitu masing-masing sebesar 20,44% (yoy) dan 12,93% (yoy).

Indikator permodalan CAR BUS mengalami peningkatan menjadi 28,09%. Kualitas penyaluran pembiayaan semakin baik, tercermin dari NPF BUS-UUS yang ditekan rendah menjadi 2,31%. Indikator rentabilitas tetap tumbuh positif, tercermin dari pertumbuhan ROA BUS-UUS yang sebesar 1,90%. FDR BUS-UUS yang naik menjadi 81,10% menunjukkan bahwa proses intermediasi perbankan syariah terus membaik di tengah pemulihan domestik. Perkembangan ini juga didukung oleh rasio BOPO BUS-UUS yang turun dan berada di level 77,48%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan strategi efisiensi yang baik.

Pandemi COVID-19 yang melanda selama 2020-2022 menjadi periode yang menantang bagi perkembangan bisnis perbankan syariah. Namun, perbankan syariah dapat mengatasinya dengan strategi yang baik, sehingga perlahan kembali ke kondisi bisnis normal.

Fenomena digitalisasi yang semakin meluas mengakibatkan terjadi pergeseran perilaku yang sedang dialami oleh dunia bisnis, tak terkecuali perbankan syariah, sehingga perbankan perlu mencari cara baru berinovasi agar tetap relevan di dunia yang semakin digital. Penciptaan ekosistem digital dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bank syariah untuk menarik nasabah dan memenuhi kebutuhan nasabah. Digitalisasi dan inovasi diharapkan mampu mendukung akselerasi perbankan syariah dan dapat digunakan untuk menciptakan ekosistem dan bersinergi dengan sektor keuangan lain, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih efisien. Di sisi lain, sinergi antara induk dan anak perusahaan merupakan strategi lain yang perlu dioptimalkan dalam membantu pertumbuhan perbankan syariah.

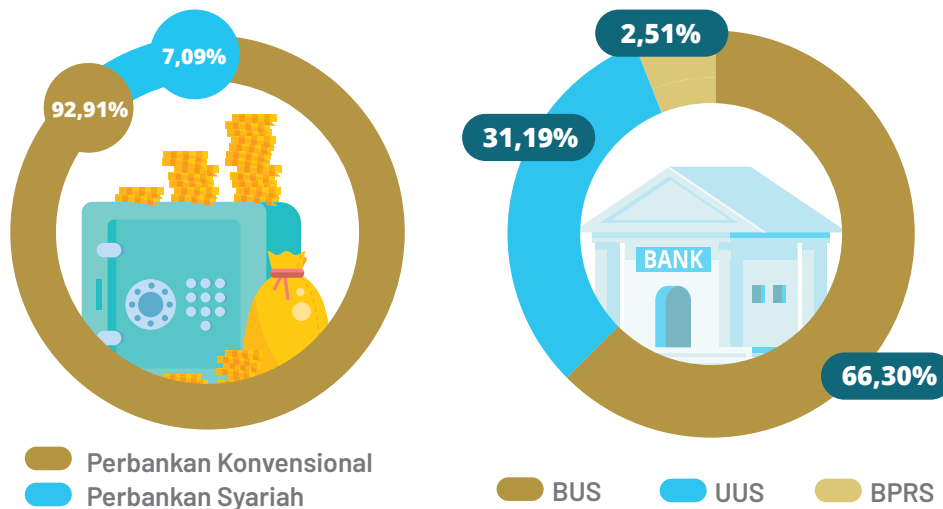
Implikasi positif dari adanya sinergi diharapkan mampu mendorong perbankan syariah lebih efisien, karena mampu meminimalisir biaya operasional melalui pembagian sumber daya dan keahlian dari perusahaan induk yang memiliki sumber daya yang relatif lebih baik. Dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI), OJK mendukung percepatan pengembangan perbankan syariah melalui pemanfaatan ekosistem digital, termasuk melalui sinergi.

Perkembangan Perbankan Syariah

Indikator Utama Perbankan Syariah

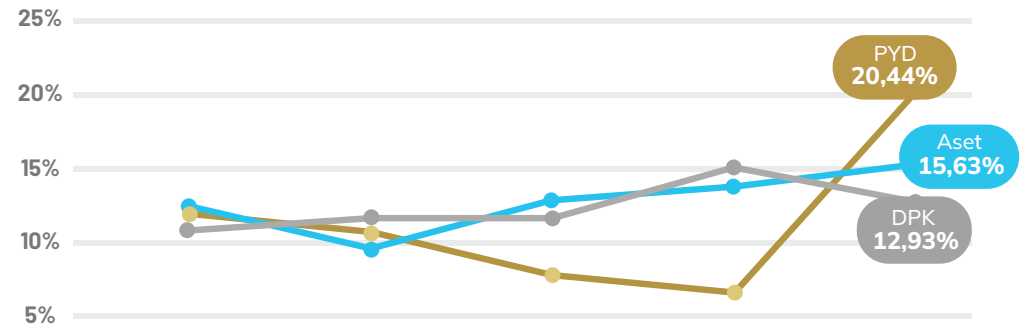
Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset	PYD	DPK
			(dalam miliar)		
BUS	13	2.007	531.859,89	322.599	429.029
UUS	20	438	250.239,67	171.028	177.034
BPRS	167	668	20.156,90	14.448	13.446
Total	200	3.113	802.256,46	508.075	619.509

Market Share Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pertumbuhan Perbankan Syariah



	2018	2019	2020	2021	2022
Aset	12,57%	9,93%	13,11%	13,94%	15,63%
PYD	12,17%	11,01%	8,08%	6,90%	20,44%
DPK	11,93%	11,88%	11,88%	15,30%	12,93%



Indikator Kinerja Perbankan Syariah

Indikator		BUS-UUS	BUS	UUS	BPRS
Permodalan	CAR		26,28%		24,42%
Kualitas Aset	NPF Gross	2,31%	2,35%	2,23%	5,91%
	NPF Net	0,75%	0,64%	0,97%	4,92%
Rentabilitas	ROA	1,90%	2,00%	1,69%	1,92%
Efisiensi	BOPO	77,48%	77,28%	77,97%	86,02%
Likuiditas	FDR	81,10%	75,19%	95,40%	107,45%
	AL/NCD		133,23%		
	AL/DPK		27,56%		

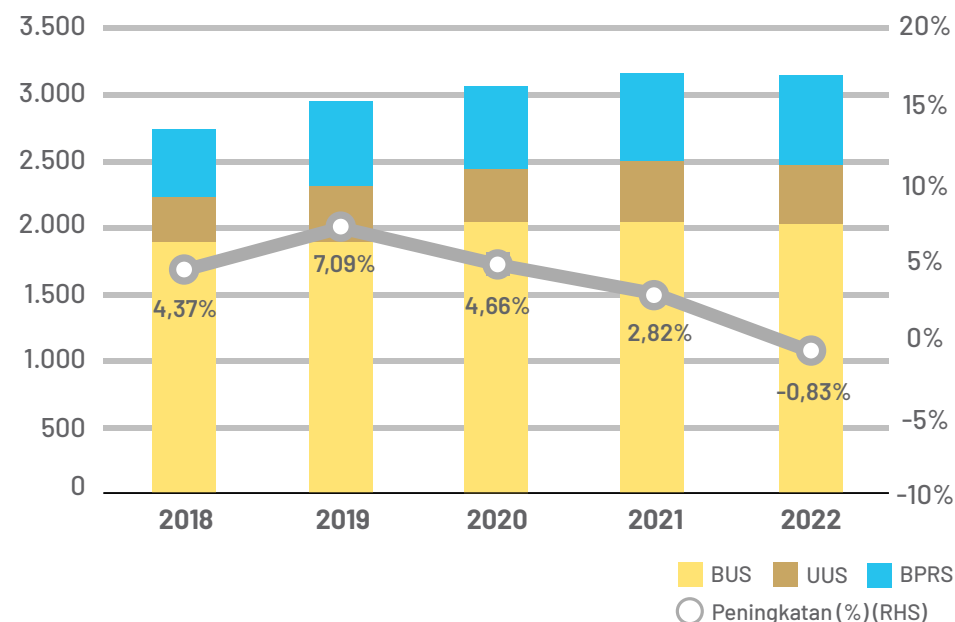
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Jumlah Kantor Perbankan Syariah

Jumlah Kantor	2018	2019	2020	2021	2022
BUS	1.875	1.919	2.034	2.035	2.007
UUS	354	381	392	445	438
BPRS	495	617	627	659	668
Jumlah	2.724	2.917	3.053	3.139	3.113
Peningkatan (n)	114	193	136	86	-26
Peningkatan (%)	4,37%	7,09%	4,66%	2,82%	-0,83%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah



Sejak 2020, pertumbuhan jumlah kantor fisik perbankan syariah mengalami perlambatan yang diakibatkan perubahan pola masyarakat pasca pandemi COVID-19 dan percepatan digitalisasi perbankan syariah.

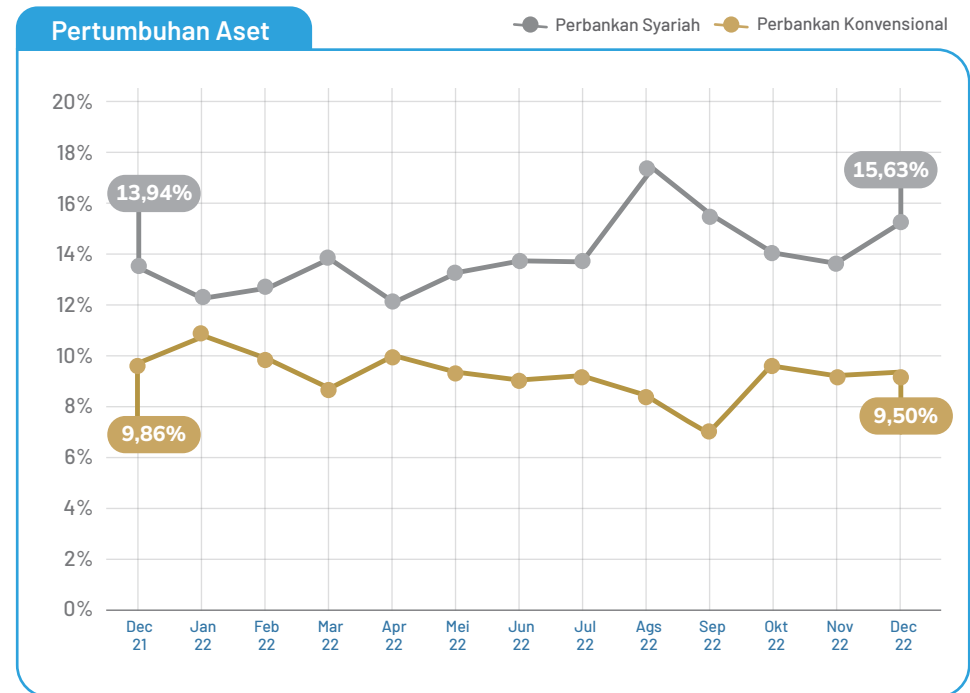
Pertumbuhan Bisnis Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Masa Pemulihan Pascapandemi COVID-19

Kinerja perbankan syariah dalam beberapa indikator menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. **Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2022 sebesar 15,63% (yoy)** lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 9,50% (yoy) selama tahun 2022.

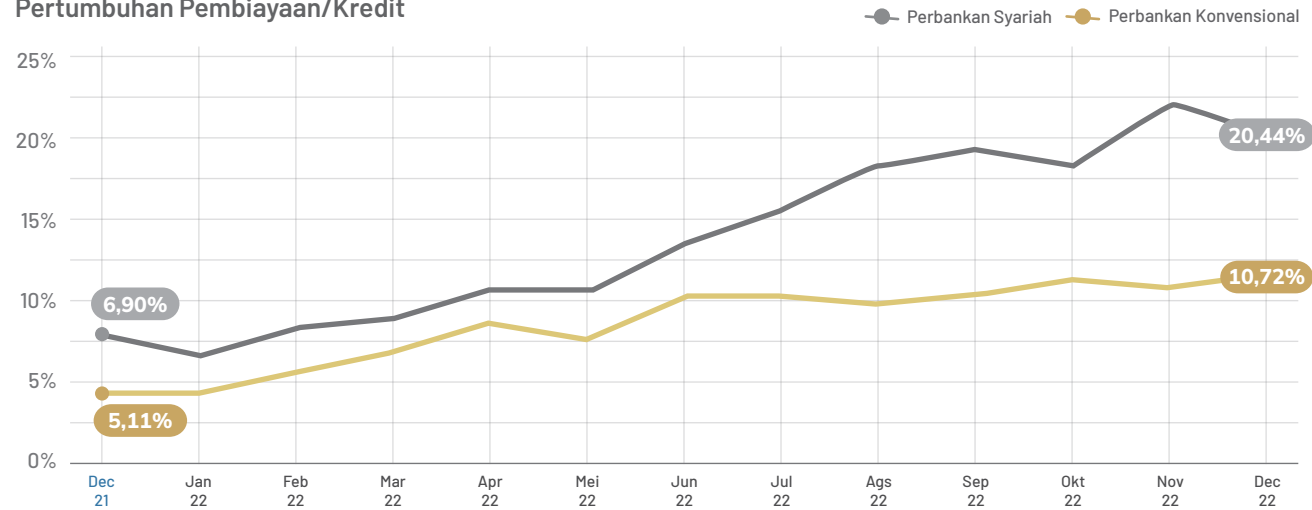
Demikian pula pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, menunjukkan tren positif yang lebih baik dibanding dengan perbankan konvensional dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 20,44% (yoy) di bulan Desember 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional sebesar 10,72% (yoy).

Pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil di masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan *market share* yang terus meningkat menunjukkan layanan perbankan syariah yang resilien dan pulih lebih cepat dari masa krisis. Namun demikian, pertumbuhan DPK perbankan syariah tumbuh lebih lambat dibandingkan perbankan konvensional.

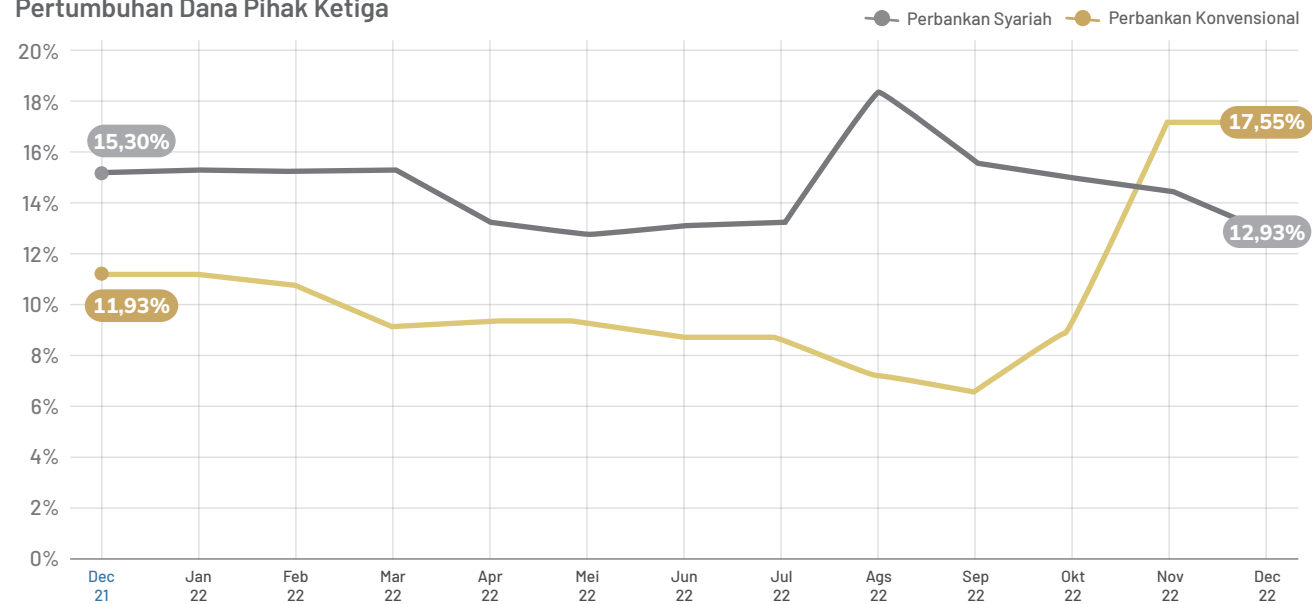


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pertumbuhan Pembiayaan/Kredit



Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

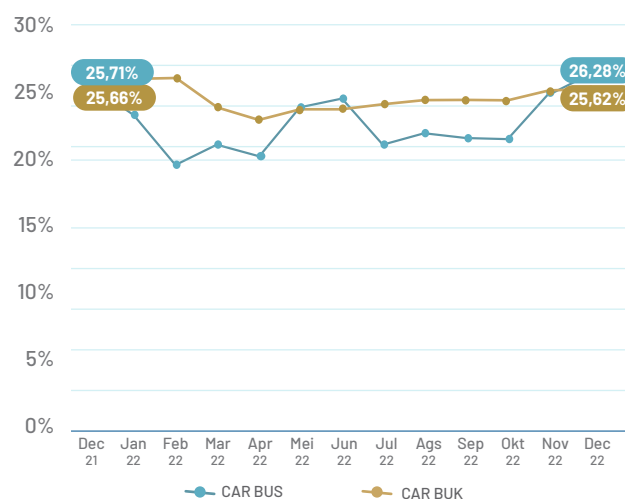
Kinerja Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional

Masa Pemulihan Pascapandemi COVID-19

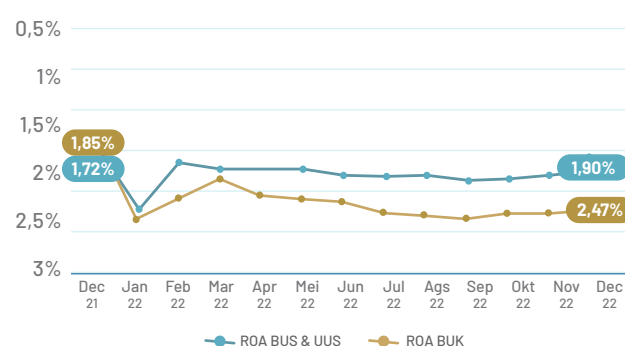
Tingkat permodalan perbankan syariah tetap terjaga, tercermin dari indikator CAR yang berada di level 26,28%. Hal ini menunjukkan tingkat ketahanan perbankan syariah tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi global dan domestik. Indikator likuiditas menunjukkan tren yang positif, tercermin dari rasio FDR BUS sebesar 81,10% dan lebih tinggi dari BUK sebesar 78,60%. Dari sisi efisiensi, BOPO BUS dan UUS menunjukkan kinerja yang lebih efisien, di mana BOPO hingga akhir tahun 2022 mencapai 77,48%, lebih baik dibanding BUK sebesar 78,71%.



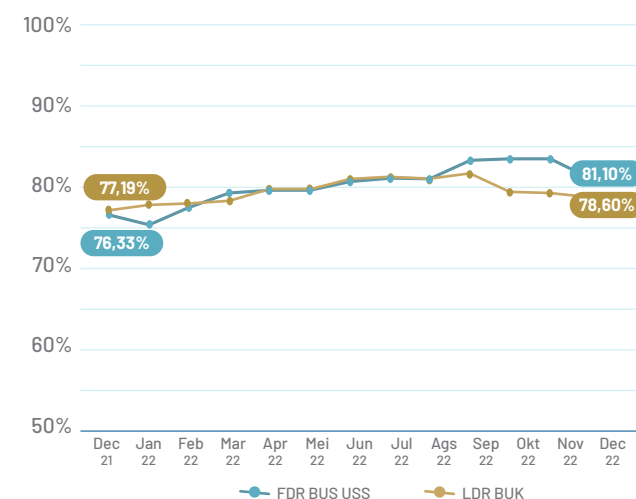
Permodalan



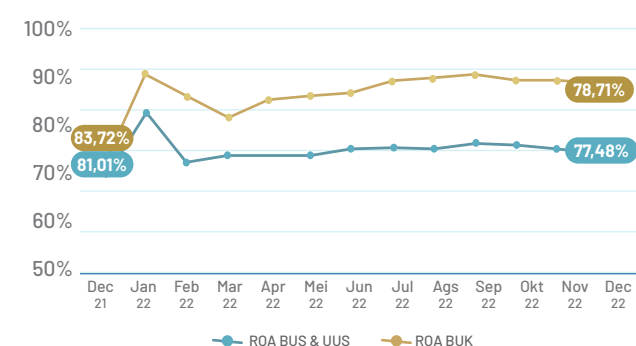
Profitabilitas



Likuiditas



Efisiensi



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

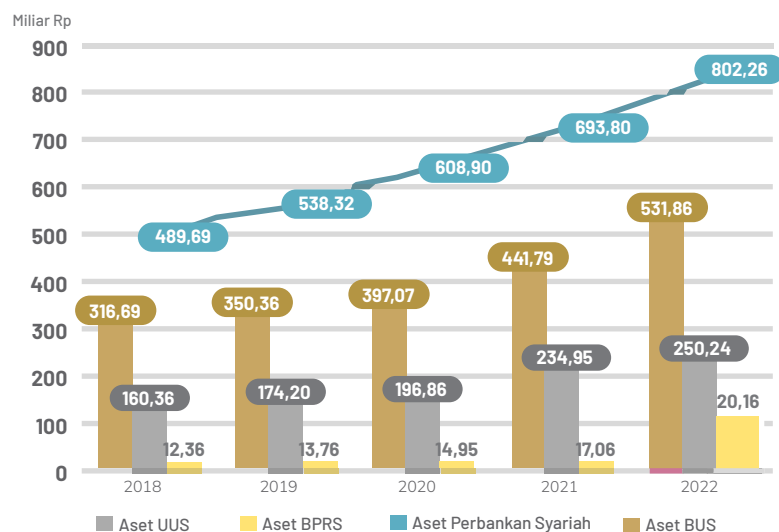
Perkembangan dan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

Perbankan syariah membuktikan resiliensi terhadap krisis dan mampu terus tumbuh positif sebagai industri senilai Rp802,26 triliun, yang terus berekspansi dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata masih terjaga *double digit*. Dibandingkan dengan perbankan nasional, pangsa aset perbankan syariah pada 2022 berhasil menembus batas atas 7 persen, yakni 7,09%, semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,74%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

Namun demikian, 28 dari 33 bank syariah (8 BUS dan 20 UUS) masih berinduk pada Bank Umum Konvensional (sebagai *parent/sister company*). Perbankan syariah dengan *share* aset lebih dari 15% dibanding induknya berjumlah 4 BUS dan UUS. Peningkatan *share asset* ini diharapkan dapat terus dilanjutkan sehingga pada akhir tahun 2022, telah terdapat 12 UUS dan 3 BUS yang memiliki *share asset* melampaui 10% aset BUK induknya.

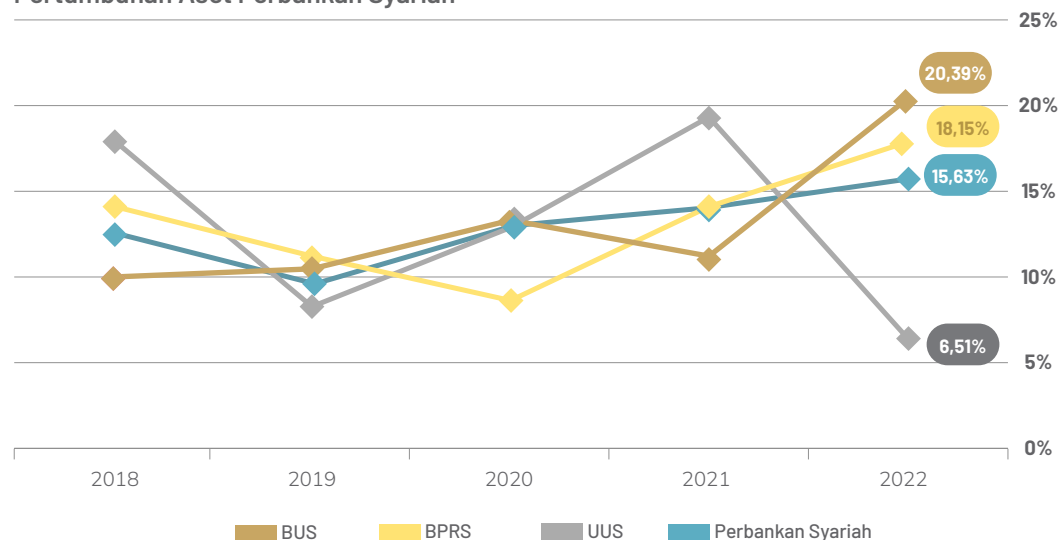
Share Aset Terhadap Aset Induk	Jumlah	
	BUS	UUS
Share Asset	<5%	1
	5-10%	4
	10-15%	2
	>15%	1
Tidak memiliki Induk/Sister Company BUK		5
Total BUS/UUS		13
		20

Perkembangan Aset Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah





Bank Syariah Berdasarkan Modal Inti

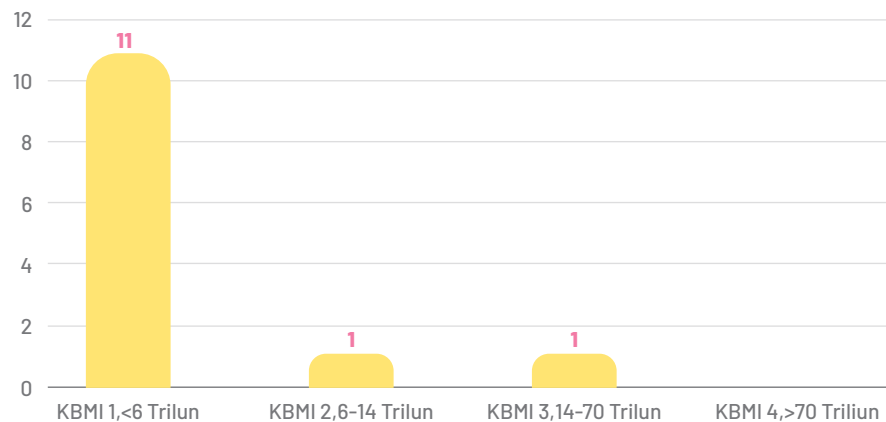
Dari sisi permodalan, dengan klasifikasi Bank Umum berdasarkan Modal Inti (KBMI), sampai dengan akhir tahun 2022, BUS masih didominasi kategori Bank dengan Modal Inti sampai dengan Rp6 triliun sebanyak 11 BUS.

Pada awal tahun 2022, terdapat konversi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, sehingga terdapat

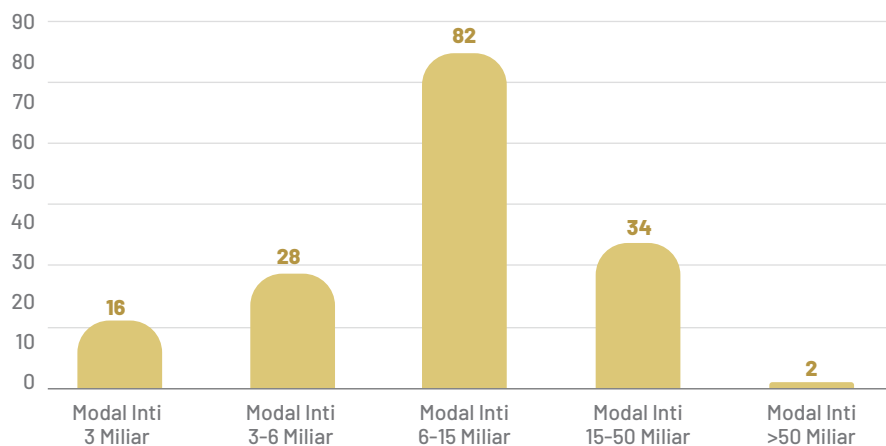
1 Bank Syariah yang masuk ke dalam kategori KBMI 1. Melalui penambahan jumlah BUS diharapkan Bank Syariah di Indonesia menjadi semakin tangguh.

Sedangkan untuk industri BPRS, ditinjau dari aspek permodalannya, sampai akhir tahun 2022, didominasi kategori Modal Inti di bawah Rp15 Miliar dengan komposisi sebanyak 126 BPRS dari 167 BPRS.

Jumlah BUS Berdasarkan Modal Inti



Jumlah BPRS Berdasarkan Modal Inti



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Perkembangan dan Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah

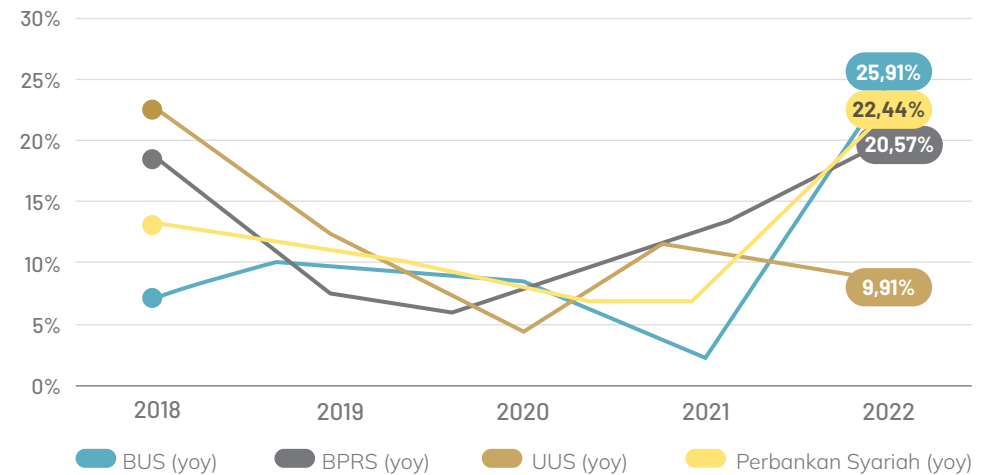
Penyaluran pembiayaan perbankan syariah berdasarkan Jenis Penggunaan pada 2022 tumbuh 19,93% (yoy), **berekspansi sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,90% (yoy).**

Ekspansi ini didorong oleh akselerasi pertumbuhan pembiayaan modal kerja yang naik menjadi 11,28% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar -1,49% (yoy) dan pembiayaan konsumsi bertumbuh menjadi 23,35% yoy dari tahun sebelumnya 13,88% (yoy). Ekspansi pertumbuhan yang impresif dari pemulihan atas pandemi COVID-19 menunjukkan perbankan Syariah memiliki tingkat pemulihan yang tinggi.

Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah yang positif juga ditopang oleh

pembiayaan investasi yang tumbuh sebesar 23,15% (yoy), atau lebih tinggi dari tahun lalu sebesar 3,57%. Selain itu, penurunan rasio *Non-Performing Financing* (NPF) dengan NPF Gross dan NPF Net tercatat sebesar 2,31% dan 0,75% lebih rendah dari tahun lalu sebesar 2,57% dan 0,92%. Pembiayaan dengan akad murabahah menjadi salah satu produk pilihan debitur pada umumnya, sedangkan pertumbuhan tertinggi sebesar 30,93% yoy pada multijasa, dan akad salam yang berhasil dipasarkan oleh Perbankan Syariah pada 2022 sebesar Rp 2,14 triliun.

Tren Pertumbuhan Pembiayaan



Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan

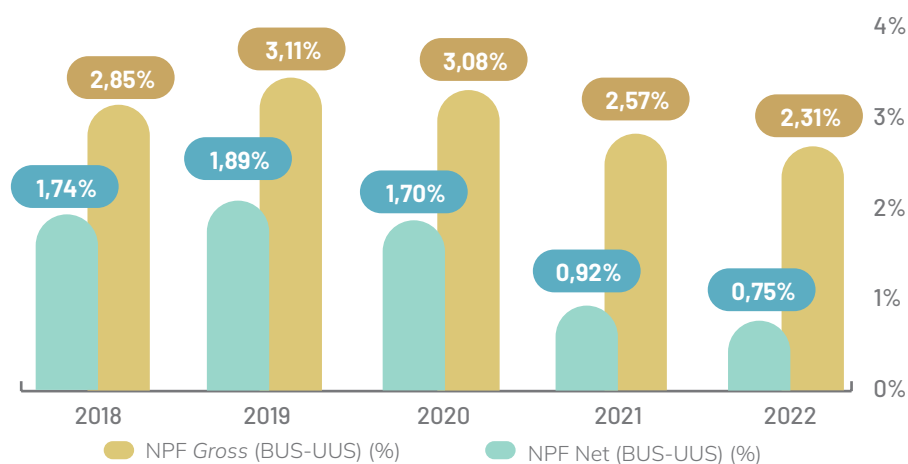
Jenis Penggunaan	Nominal (dalam triliun)	Pertumbuhan (yoy) 2022	Pertumbuhan (yoy) 2021
Konsumsi	261,62	23,35%	13,88%
Modal Kerja	131,28	11,28%	-1,49%
Investasi	113,04	23,15%	3,57%
Total	505,94	19,93%	6,90%

Jumlah Rekening Pembiayaan

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Rekening PYD (dalam Jutaan)	5.672	6.162	6.248	7.173	8.198

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Rasio NPF



Akad	Nominal (Miliar Rp)	Pertumbuhan 2022 (yoy)	Pertumbuhan 2021 (yoy)
Murabahah	242.229	21,71%	9,39%
Musyarakah	226.787	19,54%	7,50%
Mudharabah	10.572	1,51%	-14,03%
Qardh	13.872	13,94%	0,66%
Ijarah	8.132	15,92%	-19,26%
Istishna	3.141	20,87%	6,67%
Multijasa	1.205	30,93%	5,52%
Salam*	2.138	-	-
Total	508.075	20,44%	6,90%

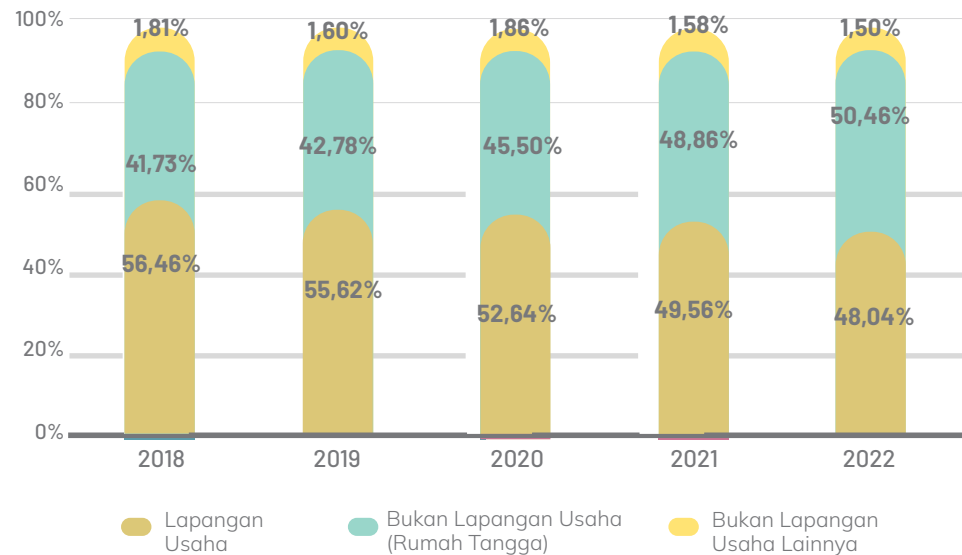
*Akad salam terdapat pada Neraca dan berada di luar Pos Pembiayaan (pada SPS OJK)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

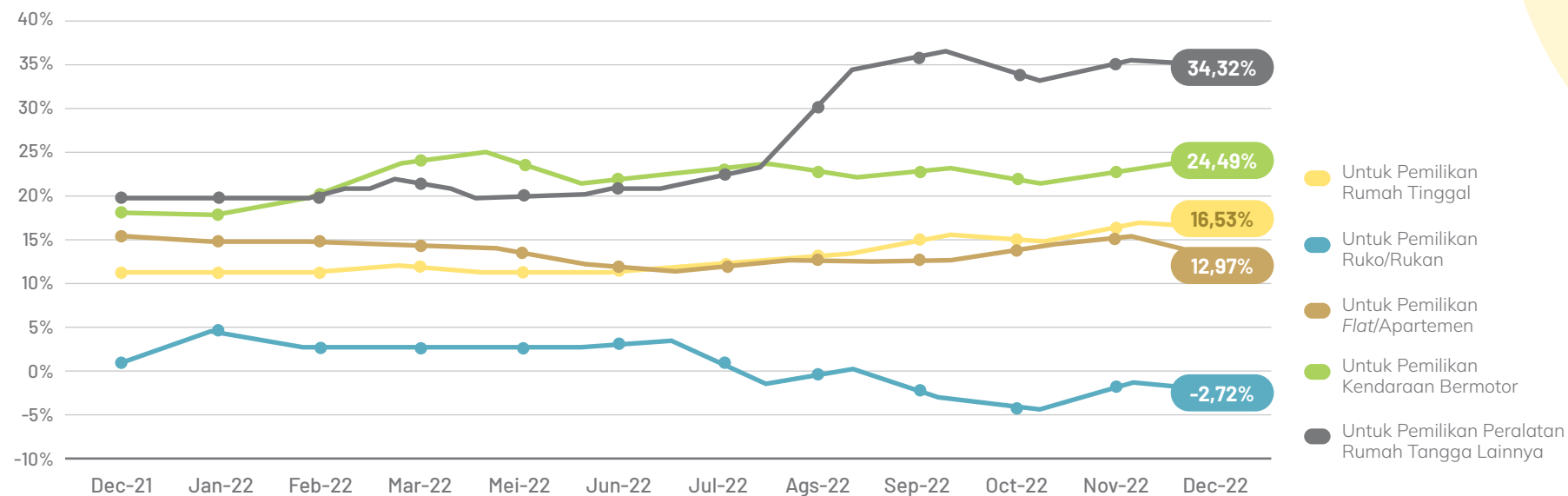
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Sektor Industri pada tahun 2022 mengalami perubahan proporsi. Pembiayaan kepada sektor lapangan usaha yang sejak 4 tahun terakhir mendominasi porsi pembiayaan kini digantikan oleh sektor nonlapangan usaha (rumah tangga). Berdasarkan sektor industri, perbankan syariah telah menyalurkan 48,04% dari total pembiayaan pada sektor lapangan usaha. Sejak 5 tahun terakhir, porsi pembiayaan kepada sektor lapangan usaha menunjukkan tren yang menurun. Adapun porsi penyaluran

pembiayaan terbesar disalurkan pada sektor bukan lapangan usaha (rumah tangga) yaitu sebesar 50,46%. Di sisi lain pertumbuhan pembiayaan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada sektor Perdagangan besar dan eceran, *real estate*, perantara keuangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Adapun pertumbuhan pembiayaan pada sektor rumah tangga didominasi oleh pertumbuhan pembiayaan untuk kepemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk multiguna) dan kepemilikan kendaraan bermotor.

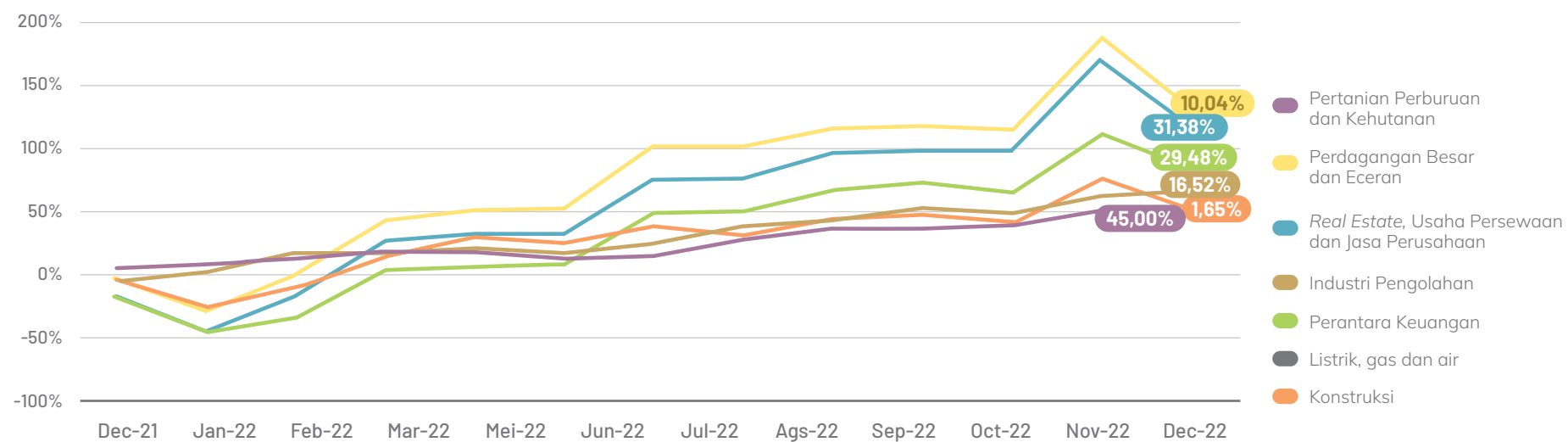
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Sektor Industri



Pertumbuhan Pembiayaan pada Sektor Bukan Lapangan Usaha



Pertumbuhan Pembiayaan pada Sektor Usaha



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Perkembangan dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

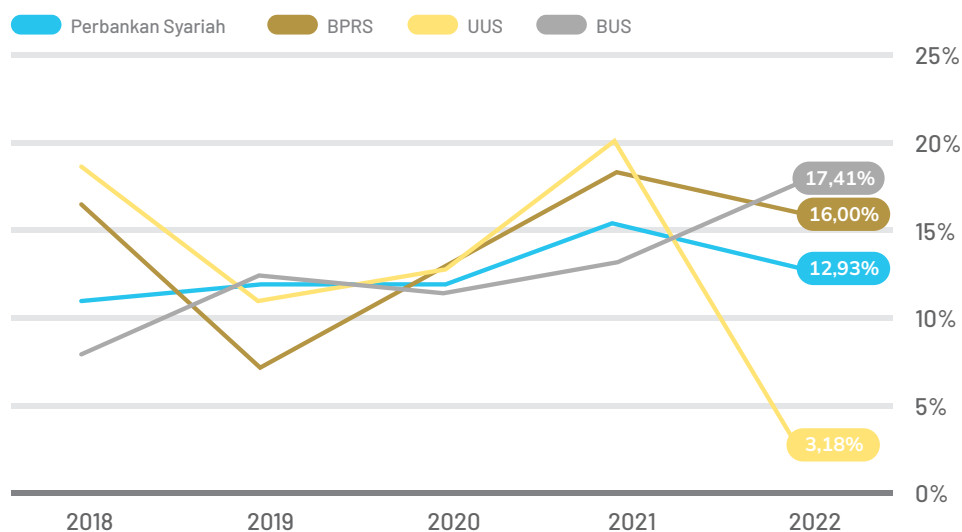
Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah mengalami kontraksi, namun tetap **tumbuh positif sebesar 12,93% (yoy)** dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar **15,30% (yoy)**.

Pertumbuhan DPK pada BUS membaik dengan laju sebesar 17,41% (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar 13,19%, bagi BPRS laju pertumbuhan cenderung stabil yaitu sebesar 16,00% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 18,05% (yoy). Namun terjadi perlambatan pertumbuhan pada DPK UUS yang melambat menjadi 3,18% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 19,88%. Hal ini merupakan dampak adanya konversi BPD Riau Kepri menjadi BRK Syariah.

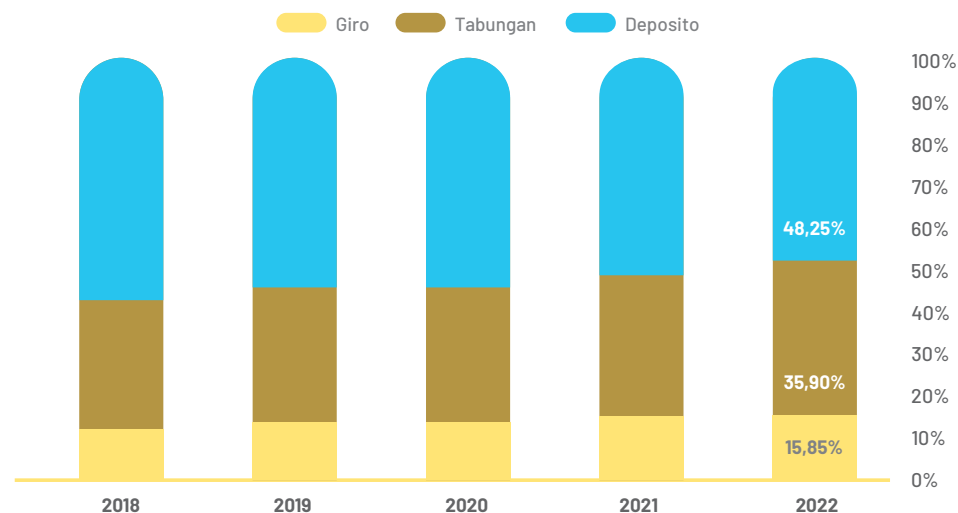
Pertumbuhan DPK pada perbankan syariah secara umum stabil. Perlambatan pertumbuhan DPK terjadi pada deposito, yang memiliki porsi sebesar 48,25% terhadap total DPK, mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 6,25% (yoy) di mana lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 14,67% (yoy). Bank Syariah pun semakin meningkatkan

sumber dana murah, hal ini terlihat dari pergeseran peningkatan porsi dana murah yang ditunjukkan rasio CASA (persentase Giro dan Tabungan terhadap total DPK) yang telah mencapai 51,75% pada akhir tahun 2022, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 48,72%. Pertumbuhan CASA ini didorong oleh pertumbuhan giro dan tabungan yang baik. Saat ini DPK perbankan syariah masih didominasi oleh deposito (dana mahal) sebesar 48,25%. Namun demikian, perbankan syariah terus berupaya dalam meningkatkan dana murah yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah rekening Giro dan Tabungan. Hal tersebut ditunjukkan oleh komposisi giro dan tabungan yang meningkat terhadap DPK menjadi sebesar 15,85% dan 35,90% dari tahun sebelumnya 14,51% dan 34,20% yang menunjukkan minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah semakin tinggi.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (% yoy)



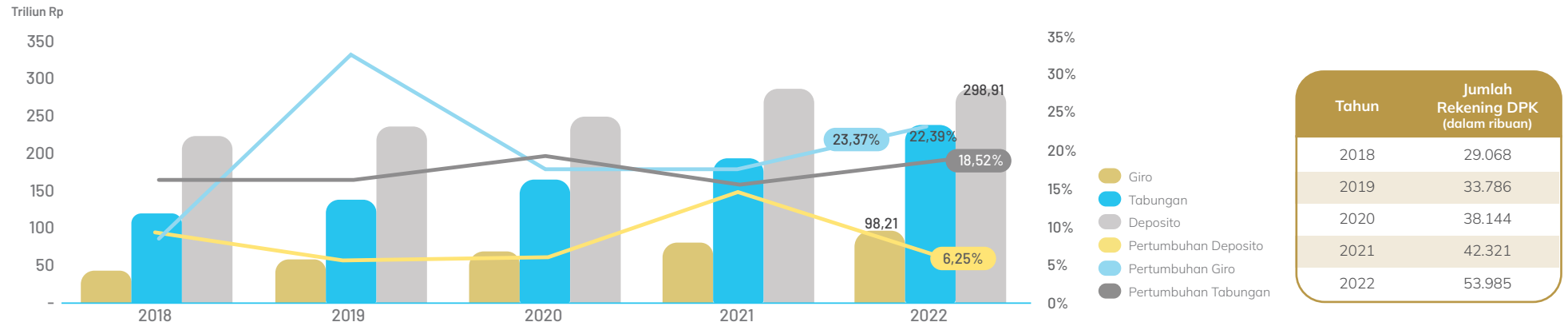
Perkembangan Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Porsi



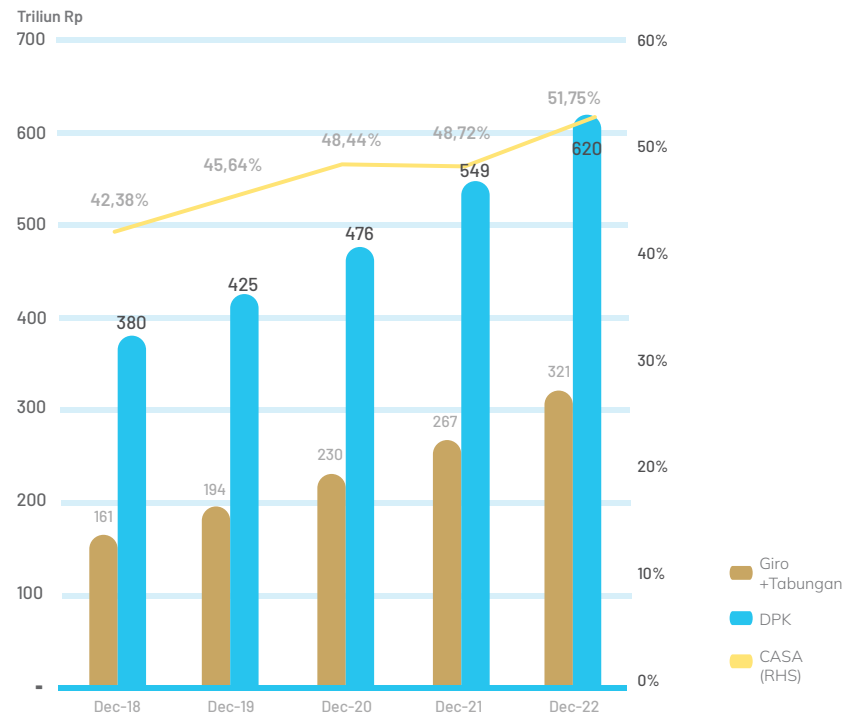
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Tren Pertumbuhan DPK berdasarkan Jenis Instrumen

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

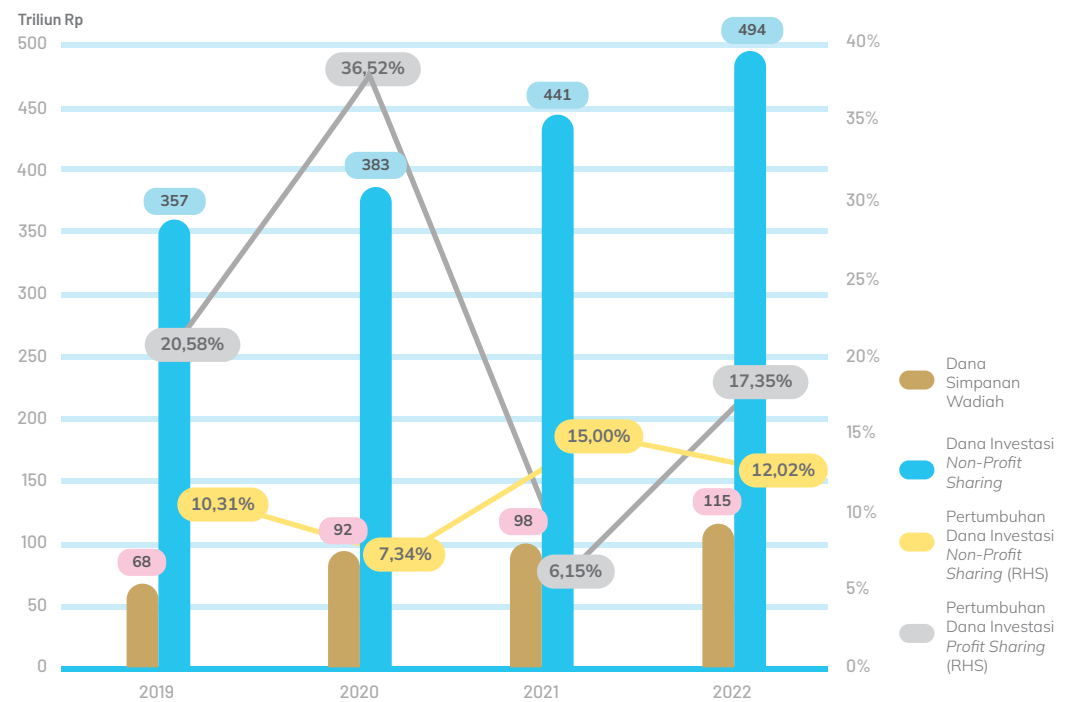


Rasio Current Account Saving Account (CASA)



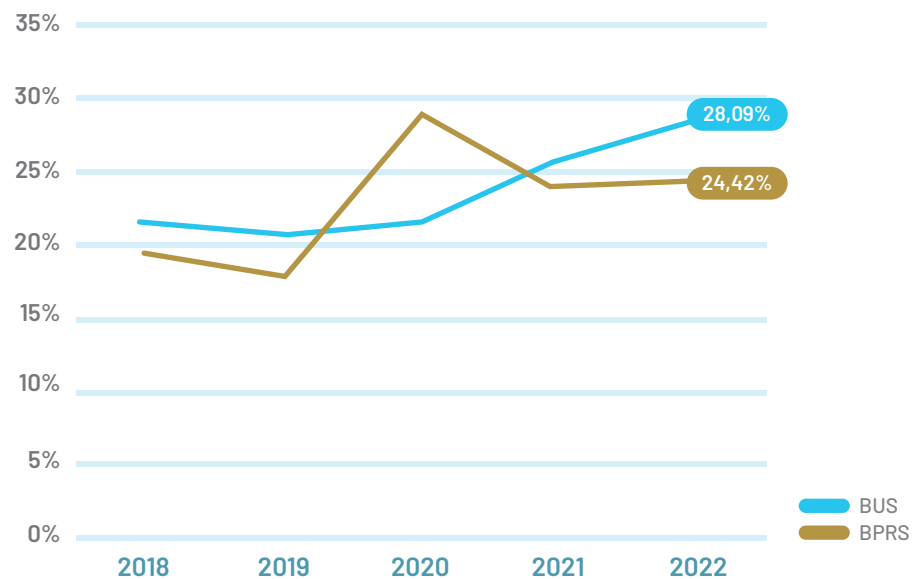
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Tren Perkembangan DPK berdasarkan Akad

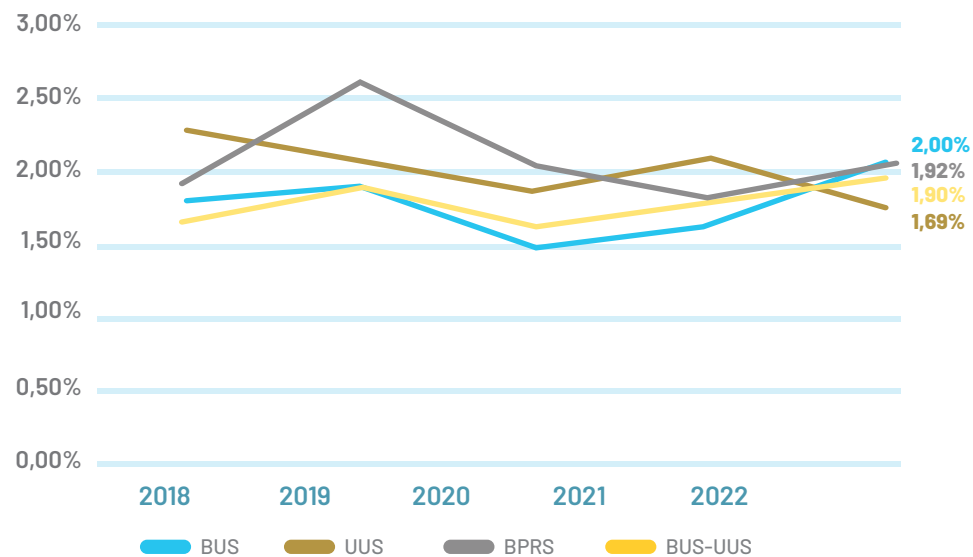


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

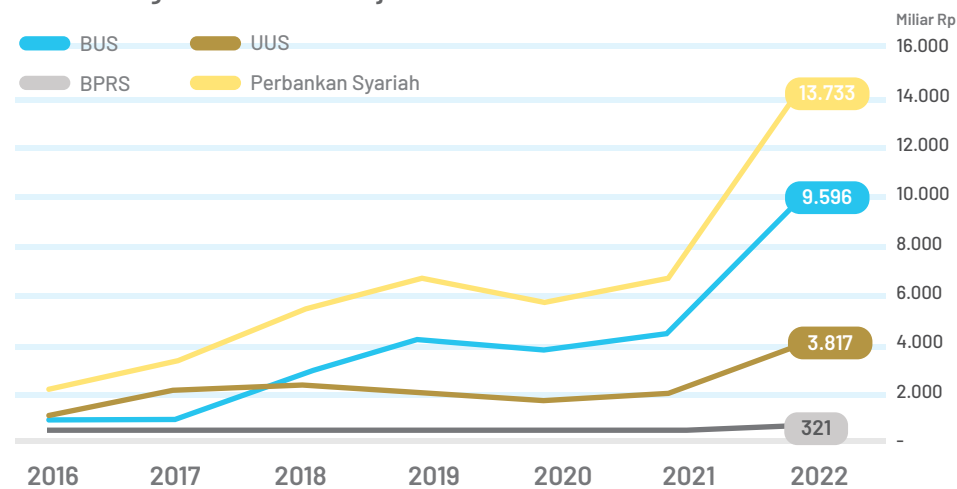
Permodalan Bank Syariah Capital Adequacy Ratio (CAR)



Rasio ROA

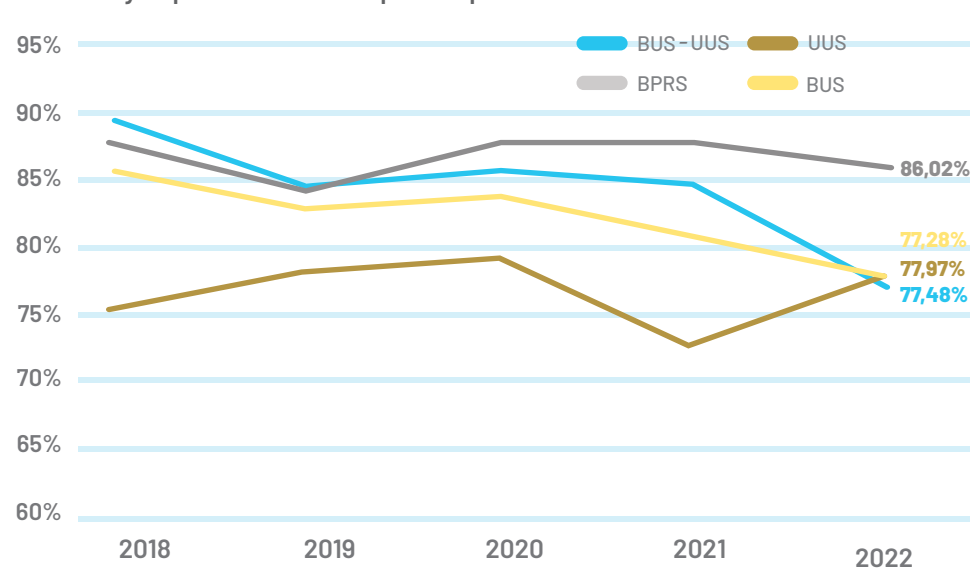


Perkembangan Laba Tahun Berjalan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Rasio Biaya Operasional/Pendapatan Operasional



Permodalan

Sepanjang tahun 2022, OJK berupaya untuk menjaga tingkat permodalan perbankan syariah agar dapat stabil. CAR BUS pada akhir tahun 2022 mencapai 28,09% meningkat 238 bps dari tahun sebelumnya yang sebesar 25,71%. Peningkatan ini didukung oleh

inisiatif bank untuk terus memperkuat permodalan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan. Di sisi lain, peningkatan CAR juga didukung oleh pencapaian laba tahun berjalan yang tetap positif.

Profitabilitas dan Efisiensi

Profitabilitas BUS-UUS semakin membaik, tercermin dari peningkatan ROA pada 2022 sebesar 1,90% dari tahun sebelumnya 1,72%. Hal ini juga didukung oleh peningkatan

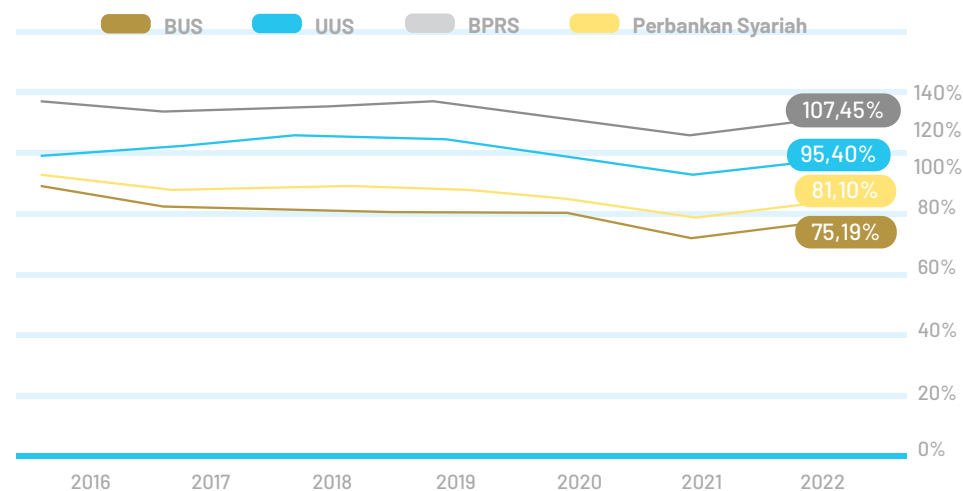
efisiensi dengan menurunnya nilai BOPO BUS-UUS sebesar 353 bps (yoy) dari tahun 2022 menjadi 77,48% dari BOPO BUS UUS sebesar 81,01%.

Likuiditas

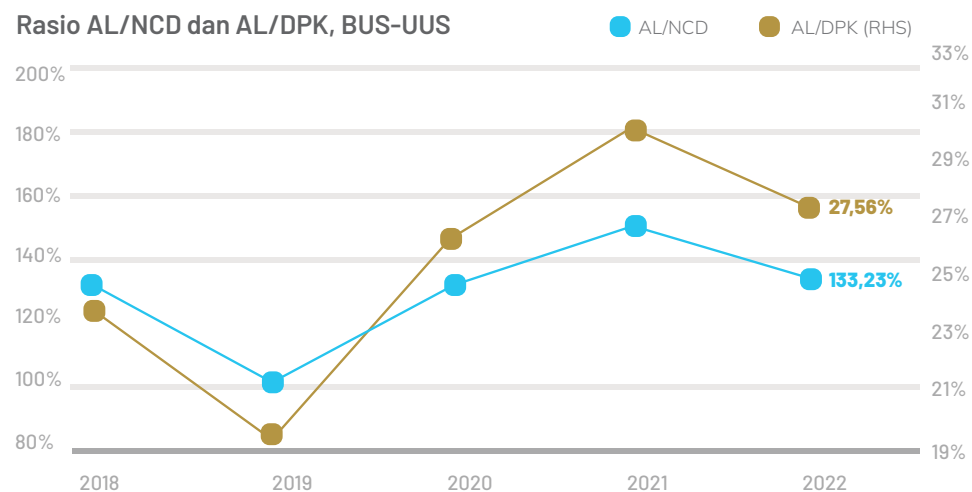
Rasio FDR BUS-UUS tercatat sebesar 81,10%, atau meningkat sebesar 477 bps (yoy) dari 2021 sebesar 76,33%. Peningkatan FDR sejalan dengan perkembangan FDR BUS, UUS, BPRS yang masing-masing mencatatkan kenaikan sebesar 624 bps (yoy), 645 bps (yoy), 540 bps (yoy) menjadi sebesar 75,19%, 95,40%, dan 107,45% pada tahun 2022. Rata-rata

likuiditas harian selama tahun 2022 cukup memadai, tercermin dari rasio alat likuid AL/NCD dan AL/DPK yang berada di atas *threshold*. Indikator AL/NCD tercatat sebesar 133,23%, atau lebih tinggi dari *threshold* sebesar 50%. Sementara indikator AL/DPK sebesar 27,56%, atau lebih tinggi dari *threshold* sebesar 10%.

Financing to Deposit Ratio (FDR)



Rasio AL/NCD dan AL/DPK, BUS-UUS



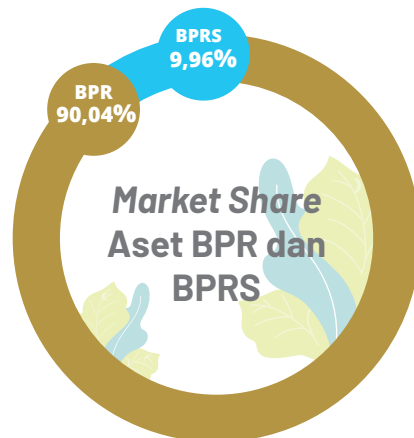
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Kinerja Industri BPRS Tahun 2022, Terus Bertumbuh Sejak Pandemi

“BPRS mampu tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir.”

BPRS menunjukkan kinerja terbaik pada tahun 2022 sejak terdampak pandemi COVID-19 pada 2020 lalu. Bahkan, BPRS mampu mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan *year-on-year* 5 tahun terakhir yang sebesar 12,19% (Aset), 12,13% (Pembiayaan), dan 13,28% (Dana Pihak Ketiga).

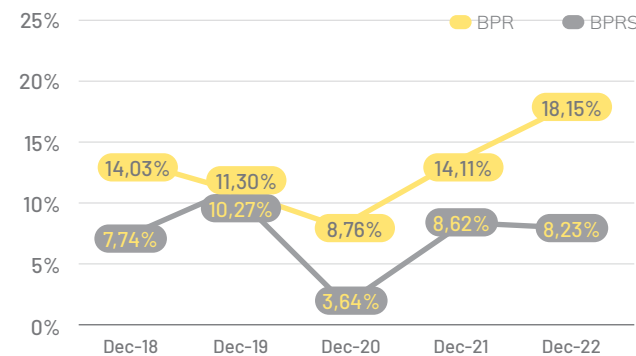
Intermediasi industri BPRS berjalan baik dengan pertumbuhan DPK sebesar 16,00% (yoy) dan Pembiayaan sebesar 20,57% (yoy). Tingginya laju pertumbuhan DPK dan pembiayaan mendorong pertumbuhan aset hingga mencapai 18,15% (yoy).



Di sisi sumber dana, pertumbuhan DPK BPRS terutama didorong oleh pertumbuhan deposito sebesar 18,29% (yoy). Tabungan BPRS mampu tumbuh 11,47% (yoy) yang diantaranya didorong oleh produk Tabungan Ukhuwah sebagai upaya industri BPRS dalam memperbesar porsi dana murah.

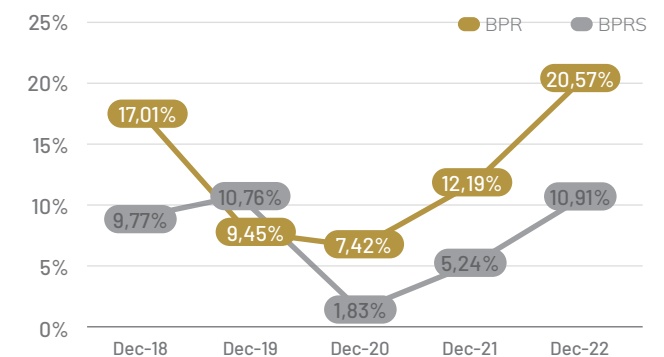
Tingginya penyaluran pembiayaan didorong oleh meningkatnya pembiayaan pada sektor UMKM sebesar 31,51% (yoy), sementara berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan modal kerja mampu tumbuh 28,25% (yoy), pembiayaan konsumtif tumbuh 16,88% (yoy), dan pembiayaan Investasi tumbuh 9,13% (yoy).

Pertumbuhan Aset

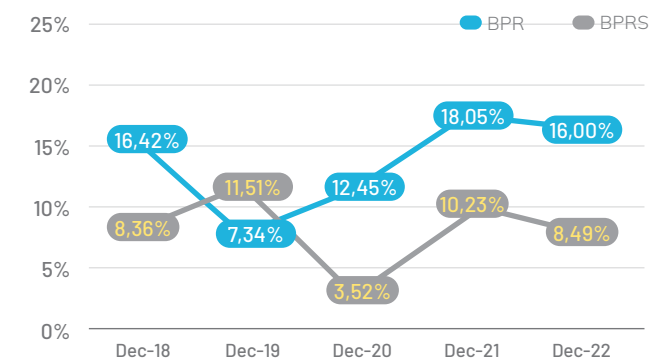


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pertumbuhan Pembiayaan/ Kredit



Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

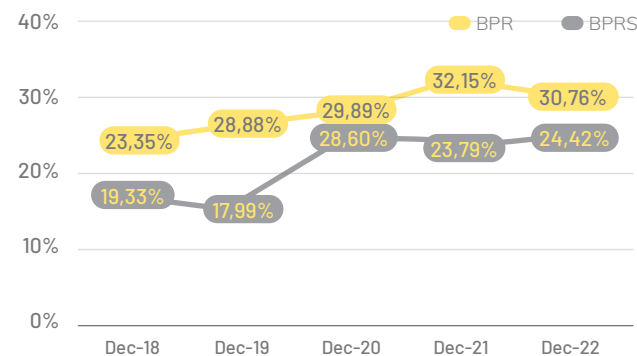


Sejalan dengan pertumbuhan aset BPRS, risiko kredit BPRS mengalami perbaikan, hal ini tercermin dari rasio NPF gross yang turun -104 bps (yoy) menjadi sebesar 5,91%. NPF net juga mengalami penurunan sebesar -84 bps (yoy) menjadi 4,92%.

Efisiensi yang ditunjukkan oleh rasio BOPO mengalami perbaikan, turun -162 bps (yoy) menjadi sebesar 86,02%. Profitabilitas BPRS juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang naik +18 bps (yoy) menjadi 1,92%. Permodalan BPRS masih solid dengan CAR sebesar 24,42% dibanding tahun sebelumnya sebesar 23,79%. CAR BPRS dinilai masih cukup memadai dalam menyerap potensi risiko yang sedang dihadapi oleh BPRS saat ini.

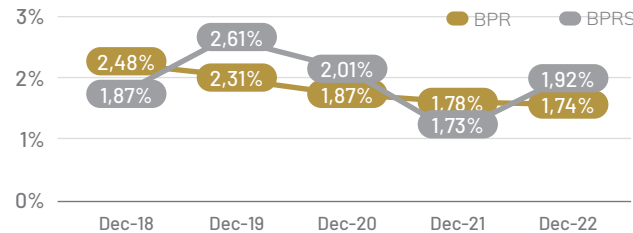
Secara umum, BPRS mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan BPR. Pembiayaan, dan DPK BPRS jauh di atas pertumbuhan BPR. BPRS juga mencatatkan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan BPR dengan rasio ROA BPRS sebesar 1,92% (ROA BPR 1,74%).

CAR

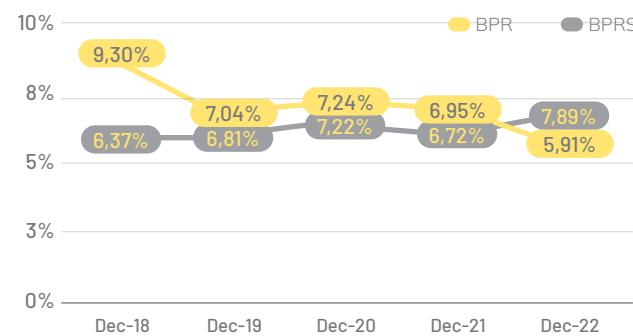


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

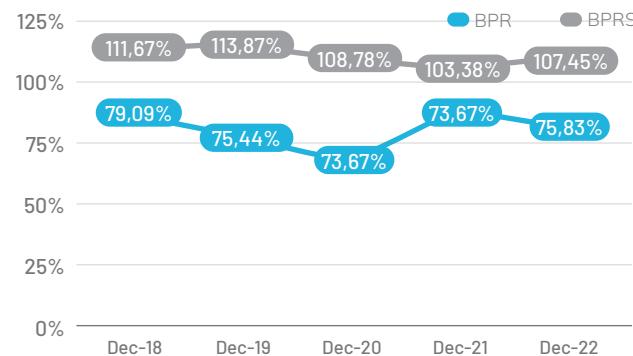
ROA



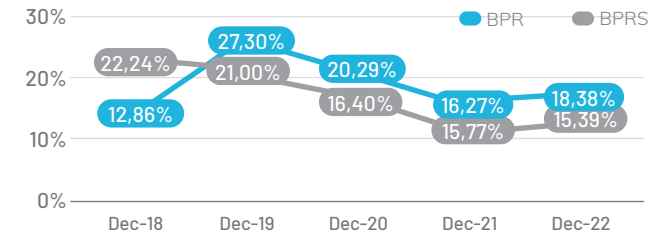
NPF/NPL Gross



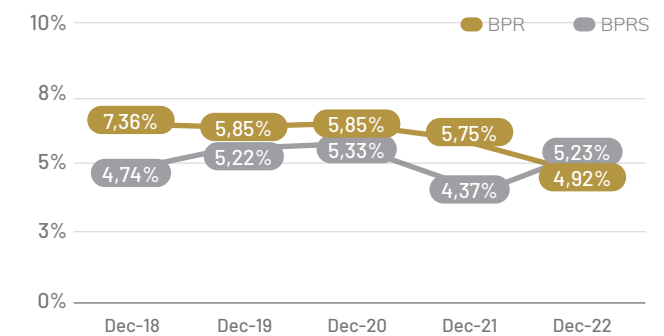
FDR/LDR



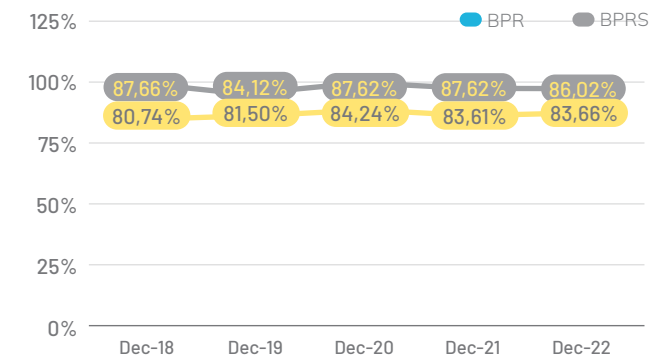
ROE



NPF/NPL Net



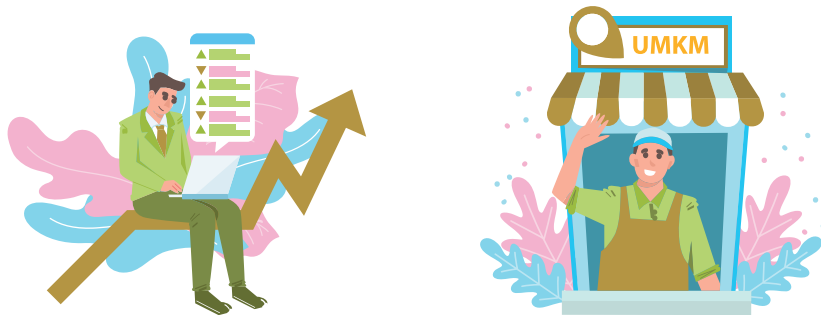
BOPO



Pembiayaan Menggunakan Akad Salam

Pada tahun 2022, regulator dan industri secara bersama-sama telah menggali potensi penggunaan akad salam pada sektor *trade finance* dan pembiayaan kepada UMKM. Pada tahun 2022 tersebut telah terdapat Bank yang mengimplementasikan akad salam pada pembiayaan *trade finance* dengan *outstanding* sebesar Rp2,13 triliun.

Pembiayaan Menggunakan Akad Salam



Trade Finance

UMKM



Pembiayaan Rp2,13T





Pendirian Modal Ventura Syariah oleh Perbankan Syariah

Pendirian modal ventura syariah oleh Bank Syariah merupakan salah satu bentuk sinergi antara sektor perbankan dan industri keuangan non bank dalam rangka membentuk ekosistem keuangan syariah. Pada tahun 2022, telah terdapat perbankan syariah yang menginisiasi pendirian modal ventura syariah dengan memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dilakukan pembentukan modal ventura syariah oleh Bank Syariah adalah untuk menunjang kegiatan usaha Bank Syariah dalam mewujudkan digital ekosistem bagi segmen yang dilayani bank.

“Modal ventura syariah memiliki total aset sebesar Rp313 miliar dengan total ekuitas Rp311 miliar.”

Tabungan Ukhuwah BPRS

Sebagaimana arah pengembangan perbankan syariah yang tertuang dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah (RP2SI) 2020-2025, terdapat Pilar Pertama (Pilar 1) yaitu Penguatan Identitas Perbankan Syariah yang terdiri dari beberapa inisiatif strategis di dalamnya. Salah satu inisiatif strategis tersebut adalah mendorong digitalisasi perbankan syariah. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan dunia yang semakin borderless, menuntut perbankan syariah untuk selalu mengembangkan infrastruktur teknologinya agar dapat melayani nasabahnya dengan lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih baik. Digitalisasi produk dan layanan untuk mendukung pelayanan dan operasional perbankan syariah dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan perbankan syariah.

BPRS sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penghimpunan dana masyarakat dituntut harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Tantangan lainnya yang dihadapi oleh BPRS adalah memperbesar portofolio sumber dana murah. BPRS memiliki keunggulan yaitu dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah. Namun, mengingat mayoritas *size* BPRS

masih dapat dikatakan cukup kecil, maka diperlukan branding yang lebih kuat agar dapat menarik masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas untuk menggunakan produk atau layanan yang dimiliki oleh BPRS.

ASBISINDO Kompartemen BPRS menginisiasi hadirnya produk bersama yang bernama Tabungan Ukhuwah. Tabungan Ukhuwah merupakan tabungan BPR syariah dengan prinsip akad *mudharabah mutlaqah* dengan fitur dan asesoris tambahan adanya hadiah yang penentuan pemenangnya melalui mekanismeundi dalam periode tertentu dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan.

Pada tahun 2022, telah dilakukan *pilot project* produk Tabungan Ukhuwah pada 46 BPRS dan diharapkan pada tahun berikutnya dapat diterapkan oleh seluruh BPRS di Indonesia. Jumlah NOA Tabungan Ukhuwah sampai Desember 2022 sebanyak 7.603 rekening dengan nominal tabungan Rp51 miliar. Ke depan, produk ini akan disempurnakan sehingga seluruh BPRS akan saling terkoneksi dan mampu diakses oleh nasabah BPRS di seluruh Indonesia.



Konversi Bank Konvensional dan Perluasan Jaringan Internasional Perbankan Syariah

Sepanjang tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah pada bank syariah (BUS dan BPRS) yaitu menjadi 13 BUS dan 167 BPRS. Hal ini terjadi karena adanya konversi yang dilakukan oleh 1 BPD dan 3 BPR, antara lain menjadi BPD Riau Kepri Syariah (BRK Syariah), BPRS Kedung Arto, BPRS Lumbung Pitih Ngarai (LPN) Taeh Baruh, dan BPRS Artha Aceh Sejahtera.

Konversi Bank Riau Kepri Menjadi BRK Syariah

Sejak April 2021, BPD Riau Kepri memutuskan untuk melakukan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah atau melakukan proses konversi. Setelah menyelesaikan proses konversi, pada tanggal 4 Juli 2022, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan selaku Anggota Dewan Komisiner OJK, BRK Syariah telah menyelesaikan proses *go live* untuk migrasi sistem, IT dan operasionalnya pada Senin, 22 Agustus 2022.

Sejalan dengan dukungan Bapak Wakil Presiden RI terhadap pengembangan industri perbankan syariah Indonesia, peresmian BRK Syariah telah dilakukan langsung oleh Bapak Wakil Presiden RI pada Kamis, 25 Agustus 2022. BRK Syariah sendiri merupakan BPD ke-3 yang melakukan konversi selama 5 tahun terakhir.

Konversi BPR LPN Taeh Baruh menjadi BPRS

Pada Juni 2022, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan selaku Anggota Dewan Komisiner OJK, PT BPRS LPN Taeh Baruh telah mendapatkan izin perubahan kegiatan dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah.



Konversi BPR Kedung Arto menjadi BPRS

Pada Juli 2022, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan selaku Anggota Dewan Komisiner OJK, PT BPRS Kedung Arto telah mendapatkan izin perubahan kegiatan dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah.



Konversi BPR Artha Aceh Sejahtera menjadi BPRS

Pada November 2022, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan selaku Anggota Dewan Komisiner OJK, PT BPRS Artha Aceh Sejahtera telah mendapatkan izin perubahan kegiatan dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah.



Pembukaan Jaringan Kantor Bank Syariah Indonesia: Dubai



Setelah melakukan *merger* pada 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melakukan ekspansi jaringan dan bisnis secara global. Pada awal tahun 2022, BSI telah resmi mendirikan kantor perwakilan di Dubai dan pada bulan November 2022, BSI telah mendapatkan izin OJK untuk pembukaan Kantor Cabang di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Langkah ini diharapkan dapat mendukung adanya ekspansi bisnis global, mengingat UEA merupakan salah satu negara pusat keuangan syariah global.

Penerbitan Pengaturan Perbankan Syariah oleh OJK

POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah

POJK mengenai Bank Umum Syariah (BUS) ini diterbitkan dalam rangka:

- Penguatan kelembagaan dan daya saing BUS dalam menjalankan peran intermediasi untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
- Mewujudkan harmonisasi dengan peraturan mengenai kelembagaan bank umum konvensional, sehingga diharapkan dapat memberikan *playing field* yang sama, menghindari arbitrase regulasi antara bank konvensional dengan syariah, dan adanya penyesuaian dengan peraturan mengenai pelaporan dan perizinan bank maupun penyelenggaraan TI oleh bank umum.

Pokok-pokok yang diatur dalam POJK ini kurang lebih memuat:

- Ketentuan Umum: Peraturan ini berlaku bagi Bank Umum Syariah, serta terdapat pengaturan bagi Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KPBLN)
- Rencana Korporasi: Bank wajib menyusun rencana korporasi (*corporate plan*) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menyampaikannya kepada OJK
- Pendirian Bank: Modal disetor untuk mendirikan Bank ditetapkan paling sedikit Rp10 triliun (dapat ditetapkan berbeda dengan pertimbangan tertentu), didirikan oleh WNI dan/atau BHI, atau WNI dan/atau BHI dengan WNA dan/atau BHA secara kemitraan, atau Pemerintah Daerah, melalui perizinan pendirian Bank yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha
- Bank Digital: Bank Digital dapat beroperasi melalui pendirian Bank baru sebagai Bank Digital; atau transformasi dari *Bank existing* menjadi Bank Digital
- Kepemilikan dan Perubahan Modal Bank: Persyaratan bagi pihak yang dapat menjadi pemilik Bank, perubahan permodalan serta perubahan komposisi kepemilikan saham Bank

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Pejabat Eksekutif Bank, serta Pemimpin KPBLN: Terkait tugas dan tanggung jawab, jumlah, dan rangkap jabatan

Kantor Bank: Bentuk jaringan kantor Bank, termasuk mekanisme dan tata cara pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, penutupan, dan kewenangan OJK dalam penundaan atau pembatalan jaringan kantor Bank

Perubahan Nama, Logo, dan Anggaran Dasar Bank

Pencabutan Izin Usaha

Lain lain & Ketentuan Peralihan

KPBLN: Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KPBLN harus menempatkan deposito di bank paling sedikit Rp3T.

Sinergi Perbankan: berupa Bank dalam kelompok usaha bank, PSP berupa Bank dengan Bank atau bank umum konvensional, dan Bank sebagai perusahaan induk terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak

Penyampaian Perizinan dan Laporan diutamakan melalui daring

Pengelompokan Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI)

*Untuk penjelasan yang lebih lengkap terkait dua ketentuan di atas dapat diakses melalui website ojk.go.id

POJK Nomor 26/POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sejalan dengan penerbitan POJK BUS, OJK kembali menerbitkan ketentuan sebagai komitmen dalam mendorong penguatan perbankan syariah melalui Penerbitan POJK Nomor 26 /POJK.03/2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penerbitan ketentuan (POJK BPRS) ini merupakan upaya penyempurnaan ketentuan kelembagaan BPRS

(POJK No.3/POJK.03/2016 tentang BPRS) yang dilakukan terhadap tujuh aspek kelembagaan BPRS yang bertujuan untuk mewujudkan kebijakan pendirian BPRS secara selektif, proses perizinan yang lebih efektif dan efisien, maupun penataan kelembagaan dan penguatan BPRS dalam rangka mendukung kebijakan konsolidasi industri BPRS.

Adapun pokok-pokok penyempurnaan dimaksud, antara lain:

- Upaya peningkatan kontribusi BPRS terhadap perekonomian daerah melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian
- Penambahan mekanisme perizinan bagi BUS/BUK yang akan berubah status menjadi BPRS
- Penyesuaian mekanisme perubahan kepemilikan dan penambahan modal disetor
- Peningkatan efektivitas pengawasan Dewan Komisaris dan DPS, optimalisasi pelaporan pengurus dan PE, serta pemanfaatan TI dalam pelaksanaan PKK
- Evaluasi kebijakan terhadap jaringan kantor BPRS di era digital, pemenuhan modal inti tertentu dan perizinan dalam keadaan kahar
- Penyempurnaan kriteria dan persyaratan dokumen bagi BPRS yang akan melakukan *self-liquidation*
- Mengakomodasi perihal Sinergi BPRS

*Untuk penjelasan yang lebih lengkap terkait dua ketentuan di atas dapat diakses melalui website ojk.go.id

Penyederhanaan Kebijakan Sinergi Perbankan Syariah dengan Induk

OJK telah menerbitkan POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah (POJK BUS) pada tanggal 31 Agustus 2022 yang salah satu cakupannya adalah Sinergi Perbankan. POJK BUS mencabut ketentuan terkait sebelumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah (PBI BUS) dan ketentuan pelaksanaan eksternal serta ketentuan mengenai sinergi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah (POJK Sinergi) dengan penyempurnaan.

Sinergi Perbankan adalah kerja sama antar bank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak, untuk tujuan efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan kerja sama.



Kebijakan OJK Tentang *Stimulus Targeted* Bagi Perbankan Syariah

Kebijakan OJK dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 ("POJK Stimulus COVID-19") akan berakhir pada Maret 2023.

Meskipun kondisi perekonomian nasional secara umum membaik, terdapat daerah dan sektor yang memerlukan waktu lebih panjang untuk pemulihan pasca berakhirnya kebijakan POJK Stimulus COVID-19.

Mempertimbangkan kondisi tersebut dan sejalan dengan strategi kebijakan yang

mengarah pada normalisasi stimulus COVID-19 dengan tetap mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi dalam rangka mengatasi *scarring effect* akibat pandemi serta menjaga kinerja fungsi intermediasi, OJK menerapkan respons kebijakan yang lebih *stringent* namun tetap memperhatikan sektor dan daerah yang masih memerlukan waktu pemulihan lebih panjang.

Melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) OJK pada tanggal 25 November 2022, OJK berupaya untuk mendukung pemulihan kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di daerah dan sektor tersebut dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit bank maupun pembiayaan perbankan syariah.

"POJK Stimulus COVID-19 berakhir Maret 2023, namun masih terdapat sektor dan daerah yang memerlukan waktu pemulihan lebih panjang."

1. *Quick Response* OJK

Sebagai *quick response* atas dampak COVID-19, OJK telah menerbitkan:

- POJK Nomor 11/POJK.03/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021; dan
- POJK Nomor 34/POJK.03/2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2021 yang akan berakhir pada 31 Maret 2023.



2. Stimulus Targeted OJK

OJK melalui Keputusan Dewan Komisiner (KDK) OJK pada tanggal 25 November 2022 menetapkan sektor dan daerah yang memerlukan perlakuan khusus terhadap kredit bank maupun pembiayaan bank syariah sebagai berikut:



Sektor Ekonomi

Akomodasi dan Makan Minum, Tekstil dan Produk Tekstil, serta Alas Kaki



Segmen

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



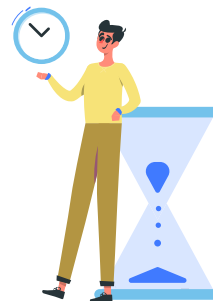
Manajemen Risiko

- Bank perlu menerapkan manajemen risiko antara lain mencakup penilaian kemampuan bertahan debitur yang akan di restrukturisasi
- Perhitungan cadangan berdasarkan kondisi dan kinerja debitur sesuai standar akuntansi



Berlaku Bagi Bank

BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS



Batas waktu

Berlaku sejak 1 April 2023 s.d 31 Maret 2024



Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan – Pemisahan Unit Usaha Syariah pada Perbankan Syariah

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan BUK untuk melakukan pemisahan UUS menjadi BUS ketika:

- nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya; atau
- 15 tahun sejak berlakunya UU ini.

Dengan diubahnya Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, **persyaratan pemisahan UUS menjadi kewenangan OJK yang akan diatur dalam POJK dan diterbitkan pada tahun 2023.**

Pasal 56 UU P2SK merubah ketentuan Pasal 68 menjadi:

- Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan UUS menjadi BUS setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK.
- OJK dapat meminta pemisahan UUS menjadi BUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan konsolidasi, serta sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan diatur dalam POJK setelah dikonsultasikan dengan DPR.
- POJK harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak UU ini diundangkan.

Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2022



Semenjak peluncurannya pada tanggal 25 Februari 2021, *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) menjadi langkah strategis OJK dalam menyelaraskan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah serta menjadi katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

RP2SI merupakan *roadmap* lanjutan dari *Roadmap* Perbankan Syariah tahun 2015-2019 yang selaras dengan arah pengembangan perbankan nasional yang tertuang dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I).

Sepanjang tahun 2022, OJK turut aktif mendorong program pengembangan perbankan syariah Indonesia, yang terbagi ke dalam 3 pilar pengembangan, yaitu:

- I. Penguatan identitas perbankan syariah,
- II. Sinergi ekosistem ekonomi syariah,
- III. Penguatan perizinan, pengaturan dan pengawasan.



Implementasi *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah (RP2SI) di Tahun 2022

Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3
Penguatan Identitas Perbankan Syariah - Telah disusun Kajian Dewan Pengawas Syariah dalam rangka memperkuat implementasi fungsi kepatuhan dan audit <i>intern</i> atas kepatuhan prinsip syariah - Telah diterbitkan POJK Kelembagaan BPR Syariah Nomor 26 Tahun 2022 pada 26 Desember 2022 7 BUS yang memiliki Bank Induk telah membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) - Telah terdapat BUS yang memiliki modal inti lebih dari Rp30 triliun. Peningkatan <i>share</i> BUS dan UUS terhadap induknya - Terdapat BUS yang melakukan Sinergi Perbankan dalam rangka peningkatan efisiensi - Telah diluncurkan produk Tabungan Ukuwah oleh Asbisindo BPR Syariah yang telah diterbitkan oleh 37 BPRS - Terdapat BUS yang melanjutkan pengembangan/implementasi modul pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan karakteristik akad syariah	Sinergi Ekosistem Ekonomi Syariah - Terdapat 3 BUS dan 7 BUS yang menyalurkan KUR syariah dengan total Plafon Rp10,18 triliun - Terdapat 2 BUS sebagai media transaksi <i>marketplace</i> - Peningkatan peran bank syariah dalam aktivitas pasar modal syariah - Bank Syariah berperan sebagai penampung dana emisi sukuk dan IPO 1 BUS dan 8 UUS merupakan Bank Kustodian 1 BUS dan 6 UUS sebagai Wali Amanat 2 BUS dan 5 UUS merupakan administrator RDN 1 BUS sebagai APERD dan 1 BUS menjalankan fungsi gerai reksadana - Sinergi dengan LJK Syariah Non Bank 1 BUS dan 1 BPRS melakukan kerja sama dengan penyelenggara <i>fintech</i> P2P <i>lending</i> 12 Bank Wakaf Mikro bekerjasama dengan 1 BUS sebagai agen laku pandai - Peningkatan integrasi fungsi sosial bank syariah: terdapat 34 LKS-PWU yang terdiri dari 7 BUS, 15 UUS, 12 BPRS - Kegiatan Literasi Keuangan Syariah, termasuk Bank Syariah kepada 550 Peserta Pimpinan Pusat Fatayat NU - Beragam kegiatan dalam Meningkatkan Awareness Masyarakat dalam Kerangka Ekosistem Ekonomi Syariah - Tingkat literasi perbankan syariah sebesar 8,19% dan tingkat inklusi perbankan syariah sebesar 5,87%	Penguatan Perizinan, Pengaturan, dan Pengawasan - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK telah menghadiri kegiatan <i>IFSB Council Meeting</i> di Islamabad, Pakistan dalam rangka menyelaraskan ketentuan dengan perkembangan <i>best practice</i> dan/atau standar internasional - Pada 29 Maret 2022 telah diluncurkan OJK <i>Suptech Integrated Data Analytics</i> (OSIDA), yaitu implementasi pengembangan <i>Supervisory Technology</i> (<i>Suptech</i>) yang mengotomasi analisis data laporan IJK - Sepanjang tahun 2022, insan OJK yang terkait dengan fungsi pengaturan, perizinan, pengembangan dan pengawasan bank syariah telah mengadakan maupun terlibat dalam peningkatan kapasitas SDM, termasuk update standar perbankan syariah yang diselenggarakan Lembaga internasional seperti AAOFI dan IFSB - Pada tahun 2022 telah diterbitkan 14 ketentuan eksternal yang berkaitan dengan Perbankan Syariah - POJK 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset BUS dan UUS - SEOJK 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan atas SEOJK 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS - POJK 2/POJK.03/2022 tentang BUS - POJK 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif - POJK 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS - POJK 5/POJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan - POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di SJK - POJK 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum - SEOJK 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS - POJK 18 tahun 2022 tentang Perintah Tertulis - POJK 19 tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Pelaku Jasa Keuangan pada Daerah dan/atau Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana - POJK 22 tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum - POJK 23 tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank - POJK 24 tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas SDM

03

Pasar Modal Syariah



Overview Pasar Modal Syariah

Di tengah kondisi geopolitik global yang memanas serta kondisi ekonomi domestik yang tengah berangsur pulih setelah pandemi COVID-19, perkembangan pasar modal syariah selama tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan kinerja yang positif.

Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan yang terjadi pada sisi produk maupun nilai dari saham syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara.

Jumlah saham syariah yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) pada akhir tahun 2022 mencapai 552 saham.

Pada 30 Desember 2022, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada level 217,73 poin atau meningkat sebesar 15,19% dibandingkan indeks ISSI pada 30 Desember 2021 sebesar 189,02 poin. Sejalan dengan hal tersebut, kapitalisasi pasar ISSI juga meningkat sebesar 20,14%, dari sebelumnya sebesar Rp3.983,65 triliun menjadi Rp4.786,02 triliun. Persentase peningkatan indeks dan kapitalisasi pasar ISSI di tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks dan kapitalisasi pasar IHSG pada periode yang sama.

Selain saham syariah, nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum meningkat 22,24% (yoy) menjadi sebesar Rp42,50 triliun dari sebelumnya sebesar Rp34,77 triliun di tahun 2021.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi Informasi, telah terdapat pembiayaan dengan melakukan penerbitan efek oleh penerbit menggunakan skema *Securities Crowdfunding* (SCF) di pasar modal syariah. Pada akhir tahun 2022, terdapat 89 penerbit yang merupakan usaha kecil menengah telah menerbitkan efek syariah berupa saham dan sukuk melalui skema SCF dengan nilai sebesar Rp180 miliar.

Setelah sukses dalam penerbitan *Green Sukuk* pasar perdana internasional dan di pasar domestik untuk individu WNI, Pemerintah Indonesia pertama kalinya menerbitkan *Green Sukuk* seri PBSG001 melalui lelang di pasar domestik pada tanggal 20 September 2022. Tingkat imbalan (kupon) ditetapkan sebesar 6,625% dengan total realisasi penerbitan s.d. akhir Desember 2022 sebesar Rp6,73 triliun. PBSG001 memiliki tenor 7 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2029.

Pemerintah mengalokasikan seluruh dana hasil penerbitan instrumen PBSG001 untuk membiayai belanja negara yang memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai belanja lingkungan (*Environment Focus*) berdasarkan *SDGs Government Sovereign Securities Framework*. *Debut* penerbitan PBSG001 ini mengokohkan komitmen pemerintah atas aksi perubahan iklim sekaligus guna mewujudkan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Penerbitan ini juga selaras untuk memenuhi kebutuhan industri perbankan nasional terhadap instrumen pembiayaan hijau yang dapat diperhitungkan dalam rasio pembiayaan inklusif makroprudensial.

Selain itu, nilai *outstanding* sukuk negara mengalami peningkatan sebesar 16,19%, dari Rp1.157,06 triliun di tahun 2021 menjadi Rp1.344,35 triliun di akhir tahun 2022.

Selanjutnya, secara umum, NAB reksa dana syariah per akhir tahun 2022 sebesar Rp40,61 triliun, mengalami penurunan sebesar 7,72% dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini seiring dengan kinerja reksa dana yang masih mengalami tekanan yang disebabkan beberapa faktor, antara lain terkait kebijakan *shifting* unit link ke instrumen keuangan lain di luar reksa dana.

Pada 31 Oktober 2022, PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks baru, yaitu *IDX Sharia Growth*. Indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.

Perkembangan Pasar Modal Syariah

Produk Pasar Modal Syariah

Produk	Jumlah	Nilai Efek Syariah (Triliun Rp)	%Market Share Nilai Efek
Saham	552	4.786,02	50,41%
Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum	221	42,50	9,47%
Reksa Dana	274	40,38	8,01%
Surat Berharga Negara*	78	1.344,35	19,60%

*Sukuk Negara. Data per per 30 Desember 2022

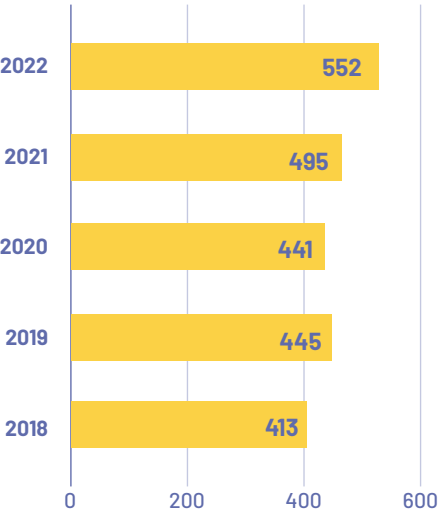
Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Seiring dengan mulai meredanya dampak pandemi COVID-19, serta sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional, kebutuhan akan permodalan serta pembiayaan oleh pelaku pasar melalui sektor pasar modal juga meningkat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2022, kinerja pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produk syariah, yaitu saham syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara yang mengalami kenaikan.

Jumlah saham syariah di akhir tahun 2022 sebanyak 552 saham. Jumlah *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mengalami peningkatan sebesar 16,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah sukuk negara *outstanding* meningkat 13,04% (yoy). Sementara itu, jumlah reksa dana syariah aktif di tahun 2022 sejumlah 274, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 5,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

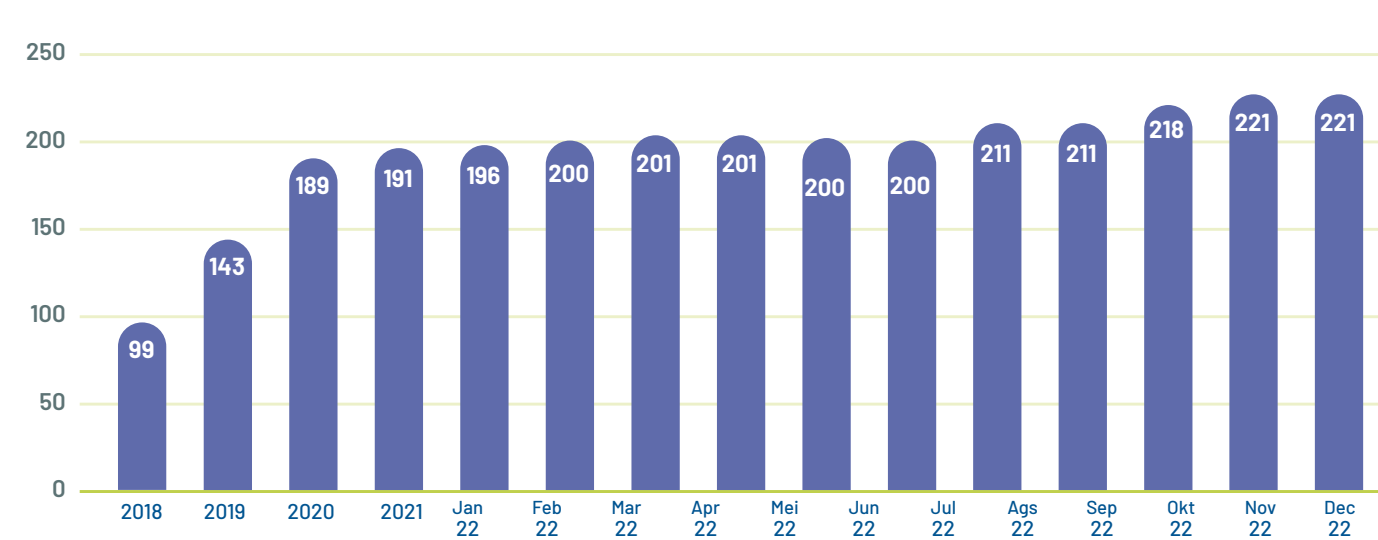
Perkembangan Jumlah Produk Pasar Modal Syariah

Saham Syariah



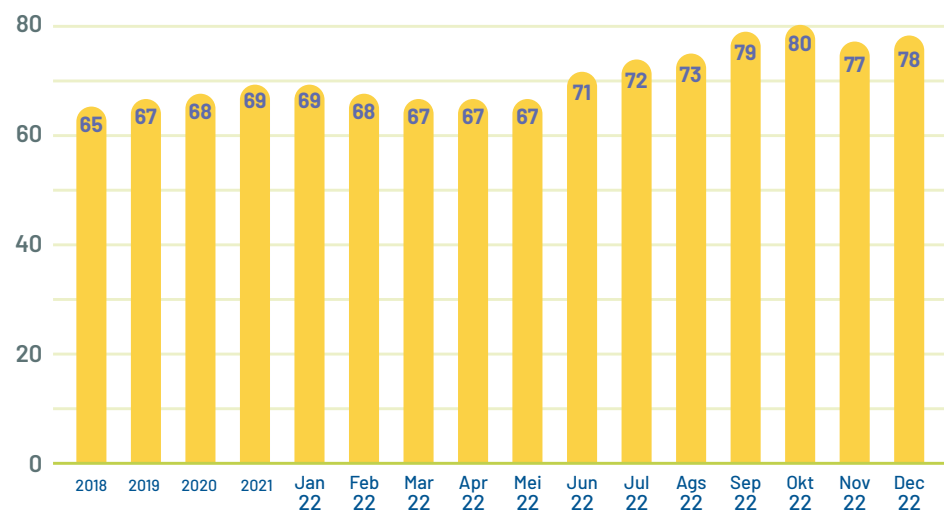
Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2022

Sukuk Outstanding



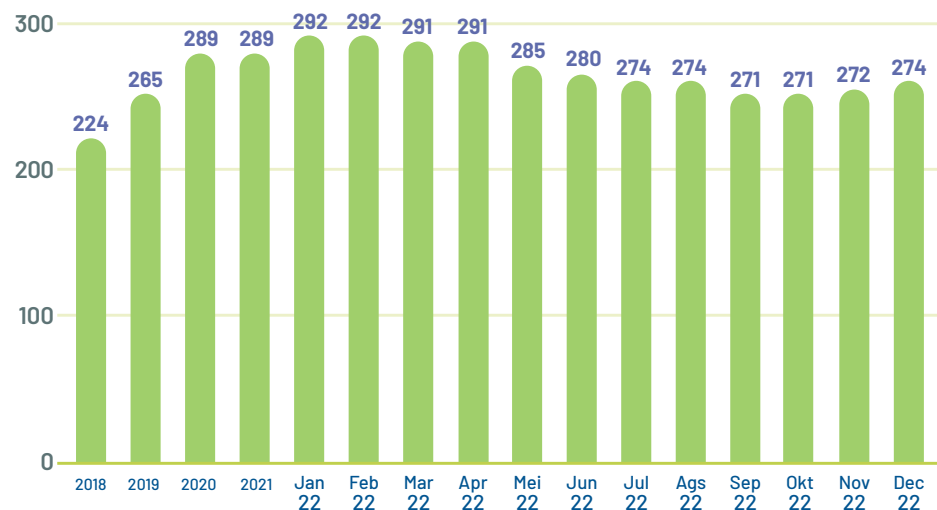
Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2022

Sukuk Negara Outstanding



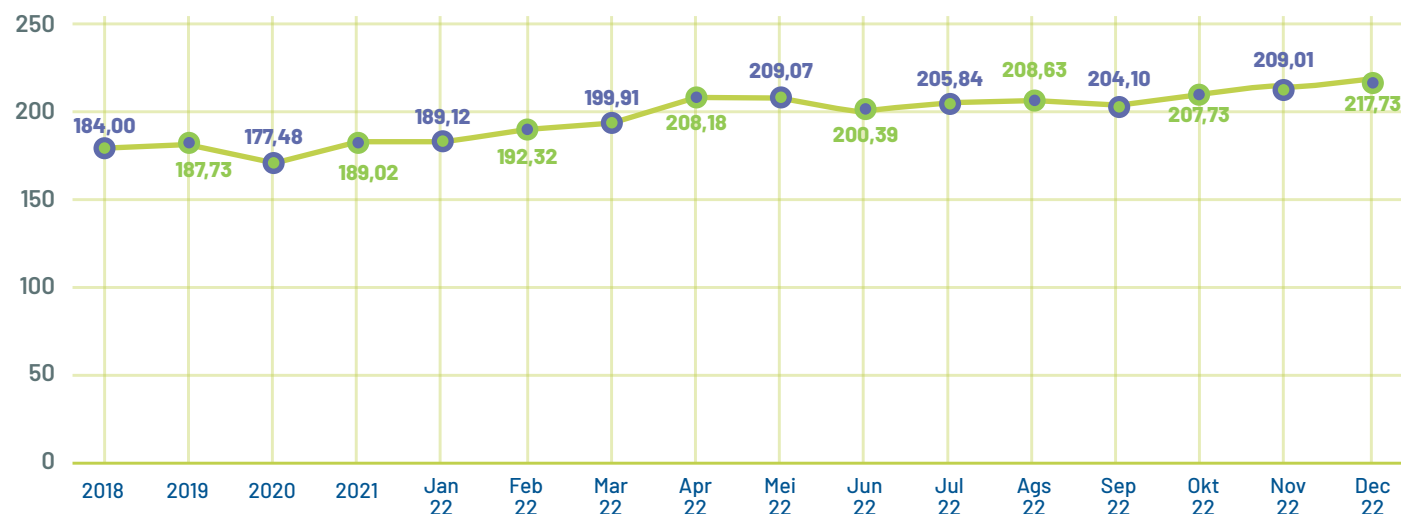
Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Reksa Dana Syariah

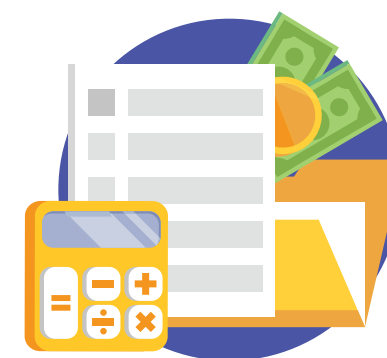


Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2022

Perkembangan Nilai Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (Rp. Triliun)

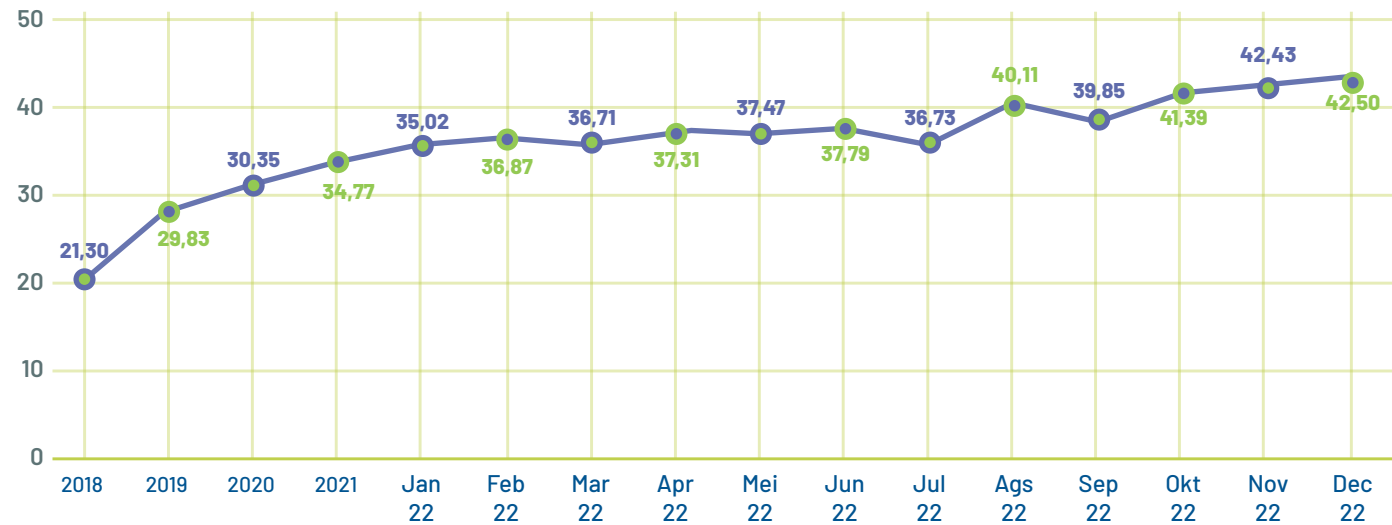


Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2022



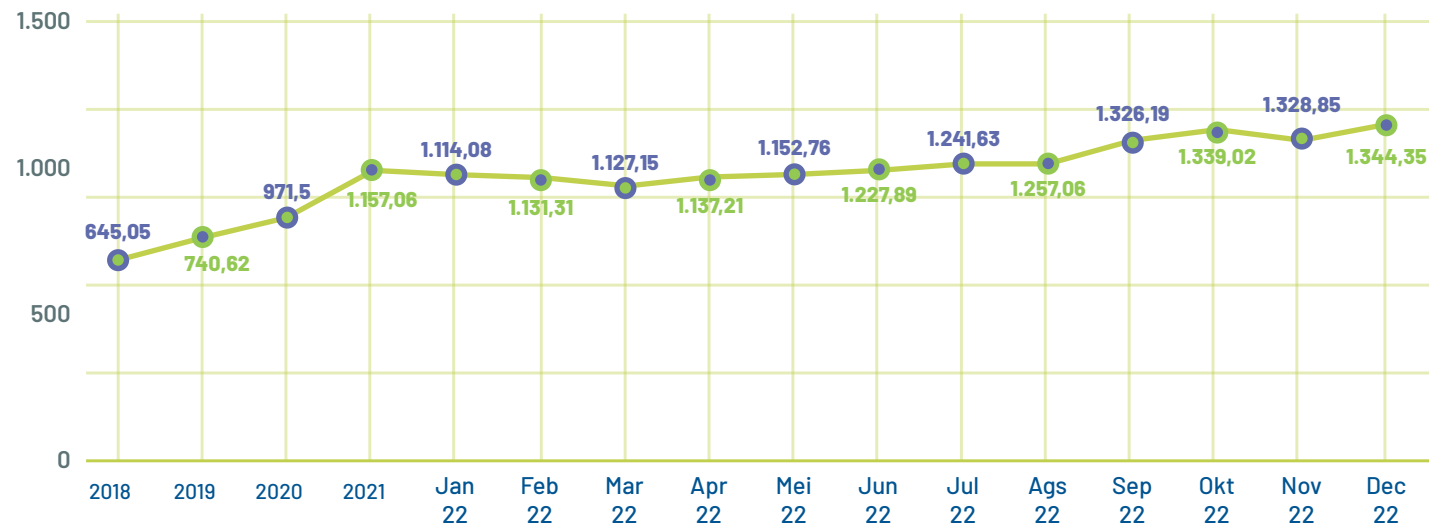
Perkembangan Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum (Rp. Triliun)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

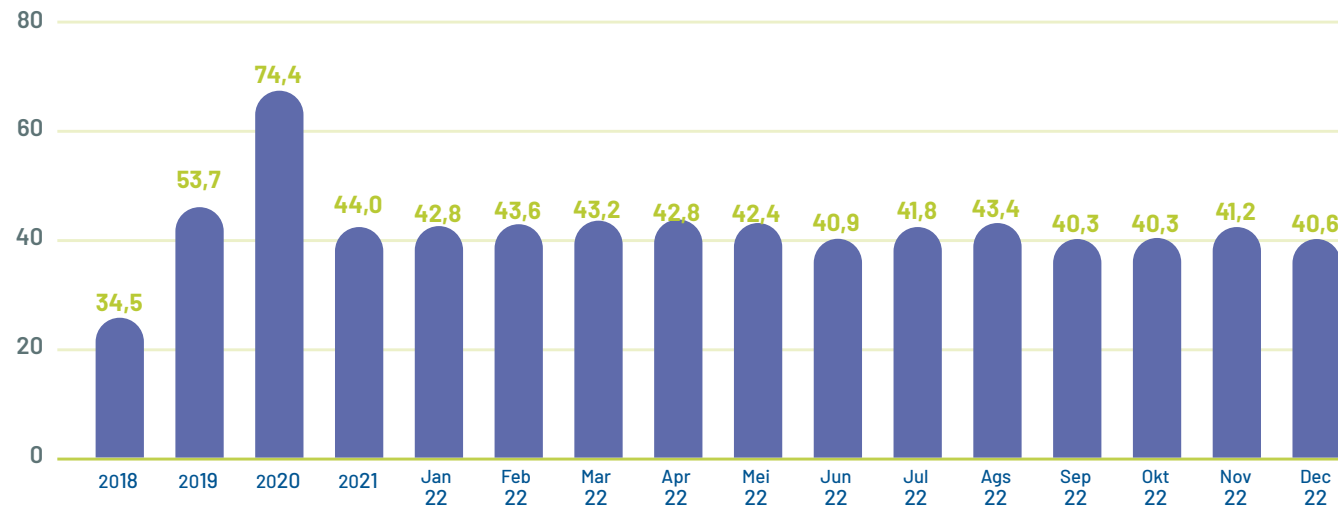


Perkembangan Nilai Sukuk Negara Outstanding (Rp. Triliun)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022
(Data per 30 Desember 2022)



Perkembangan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah (Rp. Triliun)

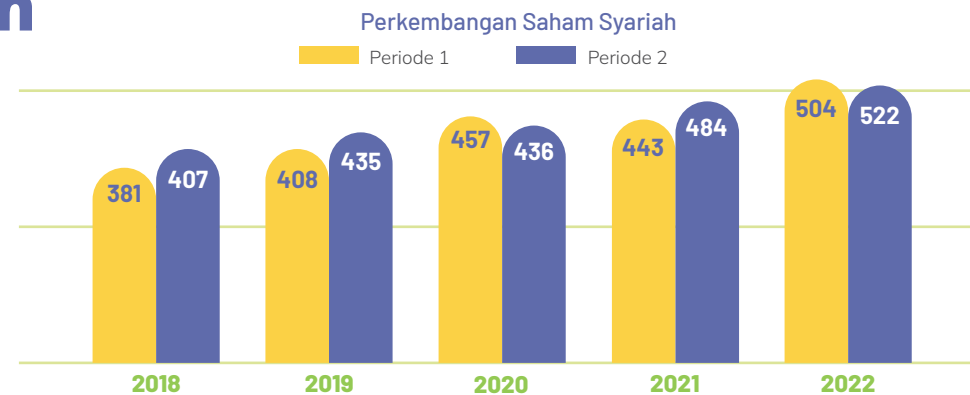


Selain dari jumlah produk, nilai saham syariah, sukuk korporasi, serta sukuk negara juga mengalami pertumbuhan positif. Nilai kapitalisasi pasar ISSI meningkat sebesar 20,14% (yoy) di tahun 2022 mencapai Rp4.786,02 triliun. Nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mengalami peningkatan sebesar 22,24% dibandingkan akhir tahun 2021. Nilai sukuk negara *outstanding* meningkat sebesar 16,19% dari sebelumnya Rp1.157,06 triliun menjadi Rp1.344,35 triliun di akhir tahun 2022. Namun, Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah mengalami penurunan sebesar 7,72% pada akhir tahun 2022, menjadi sebesar Rp40,61 triliun.

Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara periodik 2 kali dalam setahun serta menerbitkan DES secara insidentil di saat terdapat aksi korporasi khususnya penawaran perdana saham.

Pada periode I Tahun 2022 terdapat penyesuaian waktu penetapan DES berdasarkan surat nomor S-53/D.04/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Pemberitahuan atas Penyesuaian Waktu Penetapan DES Periode Pertama Tahun 2022.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Berdasarkan surat tersebut, penetapan DES periode pertama disesuaikan waktunya menjadi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juni tahun 2022 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2022.

Sehingga, pada tahun 2022, DES periode pertama diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-38/D.04/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang berlaku efektif 1 Juli 2022 sampai dengan 30 November 2022. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 504 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

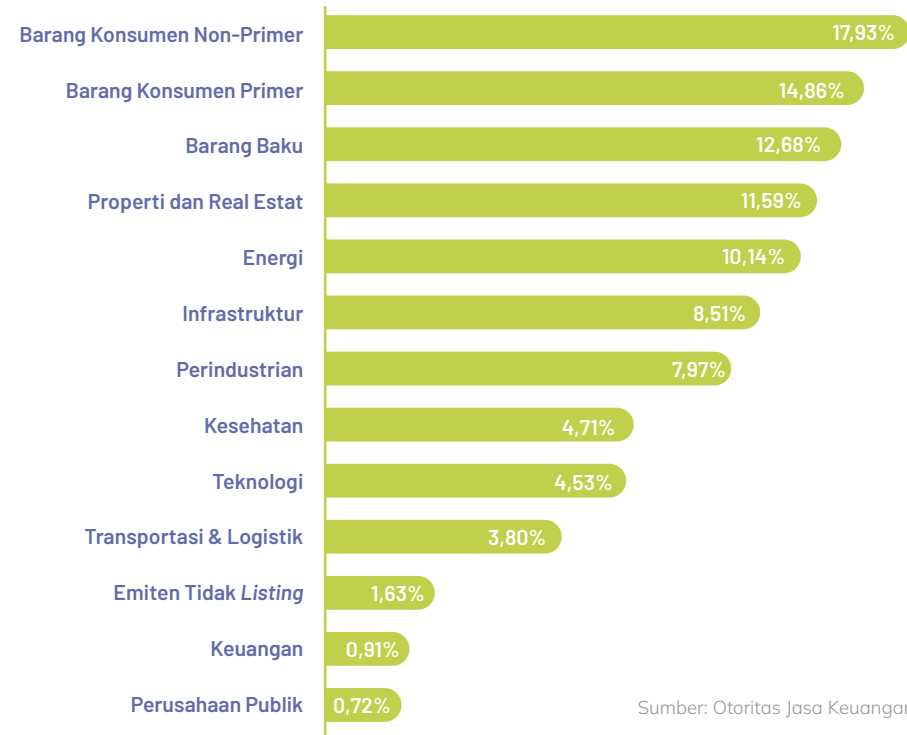
Selanjutnya, DES periode II terbit melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-81/D.04/2022 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2022, yang berlaku efektif sejak 1 Desember

2022 hingga penerbitan DES periode selanjutnya. Efek syariah yang termuat dalam DES periode II meliputi 542 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Sejak diterbitkannya DES Periode II pada tanggal 23 November 2022 sampai akhir tahun 2022, terdapat penambahan 10 saham yang baru masuk dalam DES, sehingga jumlah DES hingga akhir tahun 2022 berjumlah 552 saham.

Mayoritas emiten DES berasal dari sektor barang konsumen non-primer (17,93%), selanjutnya diikuti oleh sektor barang konsumen primer (14,86%), sektor barang baku (12,68%), sektor properti dan real estat (11,59%), sektor energi (10,14%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Proporsi Jumlah Saham Syariah berdasarkan Sektor Industri



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Indeks Saham Syariah

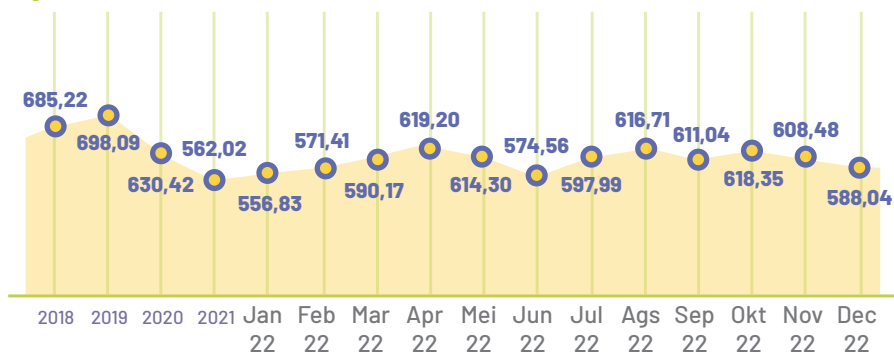
Sebagaimana digambarkan pada grafik di samping, hampir seluruh indeks saham syariah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada akhir tahun 2022, indeks ISSI ditutup pada **level 217,73** atau meningkat sebesar **15,19%** dibanding akhir tahun 2021.

ISSI

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2022

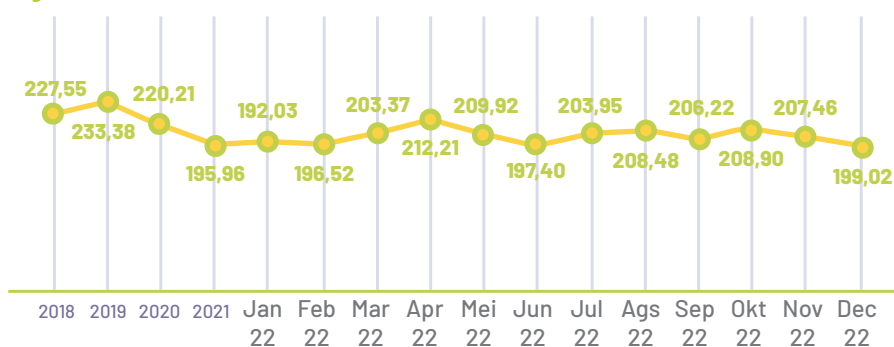


JII



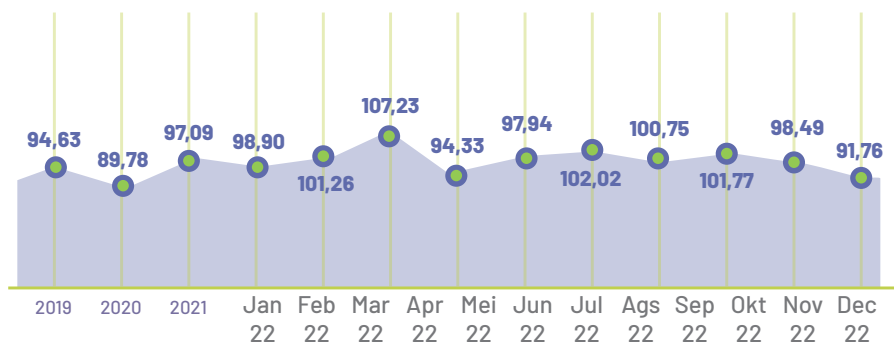
Pada periode yang sama, indeks JII meningkat sebesar 4,63%, dari sebelumnya 562,02 menjadi 588,04 di akhir tahun 2022.

JII70



Selanjutnya, indeks JII70 mengalami peningkatan sebesar 1,56% dari 195,96 pada akhir tahun 2021 menjadi 199,02 di akhir tahun 2022.

IDX-MES BUMN 17

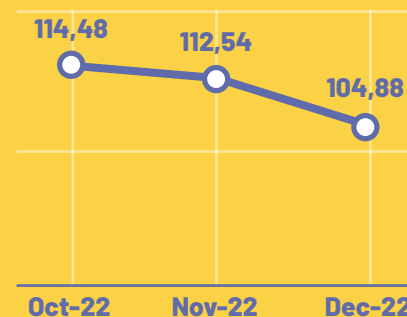


Pada akhir tahun 2022, indeks IDX-MES BUMN 17 berada pada level 91,76 mengalami penurunan sebesar 3,04% dibandingkan tahun 2021.

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2022



IDX-Sharia growth

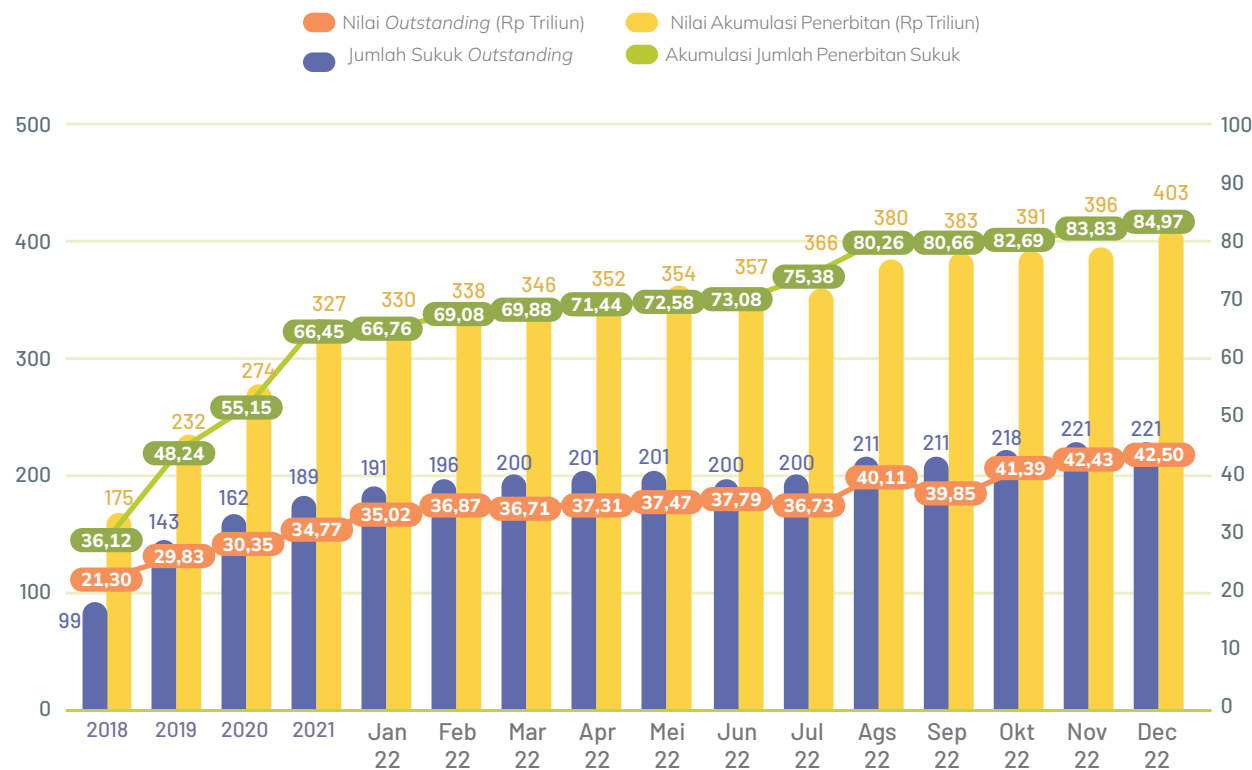


Pada tanggal 31 Oktober 2022, PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan indeks syariah baru, yaitu *IDX Sharia Growth*. Dengan adanya penambahan indeks ini; maka secara keseluruhan telah terdapat 5 indeks saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Perkembangan Sukuk Korporasi

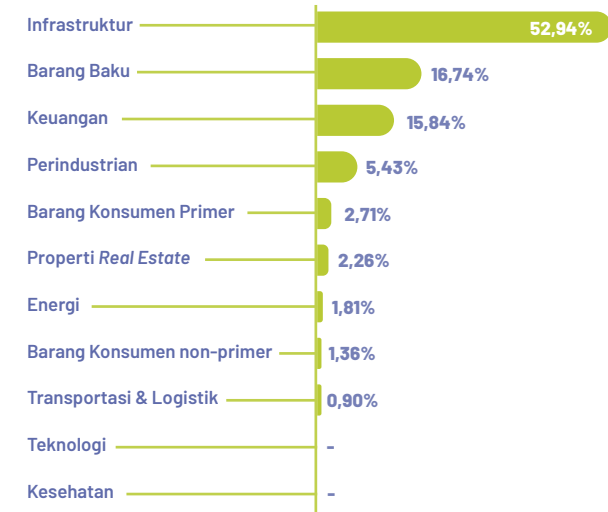
Selama tahun 2022, terdapat penerbitan 76 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp18,52 triliun. Pada periode yang sama, terdapat 44 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp12,26 triliun.

Perkembangan Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Proporsi Jumlah Penerbit Sukuk Korporasi berdasarkan Sektor Industri



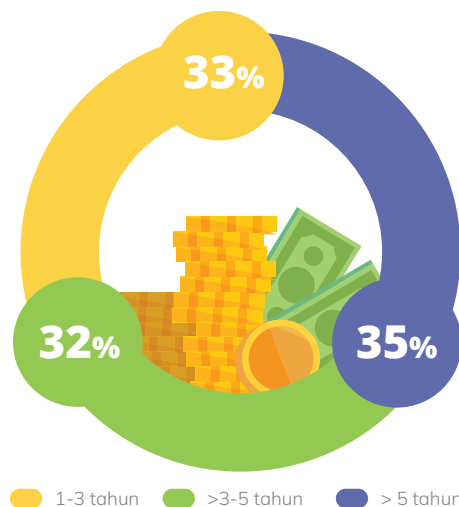
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Sampai akhir Desember 2022, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 221 seri meningkat 16,93% dibandingkan jumlah sukuk tahun sebelumnya sebesar 189 seri sukuk. Sedangkan dari sisi nilai meningkat 22,24% dibandingkan tahun lalu, menjadi sebesar Rp42,50 triliun.

Pada posisi akhir tahun 2022, terdapat 221 seri sukuk korporasi *Outstanding*. Dari 221 sukuk korporasi yang *outstanding* saat ini, mayoritas emiten merupakan emiten dari sektor infrastruktur (52,94%). Selanjutnya, sektor barang baku (16,74%), sektor keuangan (15,84%), serta sektor lainnya di bawah 10%.

Proporsi Tenor Suku Outstanding

Berdasarkan Jumlah Seri



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Berdasarkan data di samping, pada tahun 2022, jumlah sukuk *outstanding* 35% sukuk (77 seri) memiliki tenor 1-3 tahun, selanjutnya sebanyak 32% (70 seri) memiliki tenor lebih dari 3-5 tahun, dan 33% (74 seri) memiliki tenor lebih dari 5 tahun.

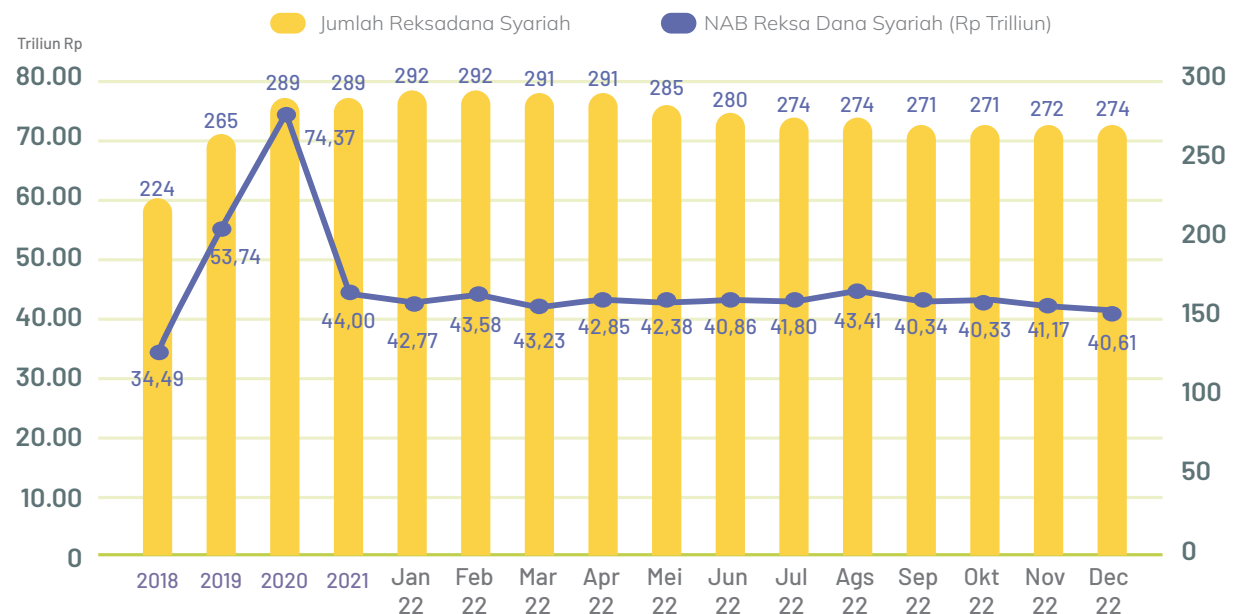
Perkembangan Reksa Dana Syariah

Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir tahun 2022 adalah Reksa Dana Syariah berbasis Efek Luar Negeri sebesar 35,24%. Pada posisi selanjutnya diikuti dengan Reksa Dana Syariah Pasar Uang sebesar 20,31%, Reksa Dana Syariah Saham sebesar 15,83%, Reksa Dana Syariah berbasis sukuk sebesar 11,89%, reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap sebesar 10,35% serta reksa dana syariah lainnya di bawah 10%.

Pada tahun 2022 terdapat 22 reksa dana syariah efektif yang telah terbit dan 40 reksa dana syariah lainnya yang telah bubar.

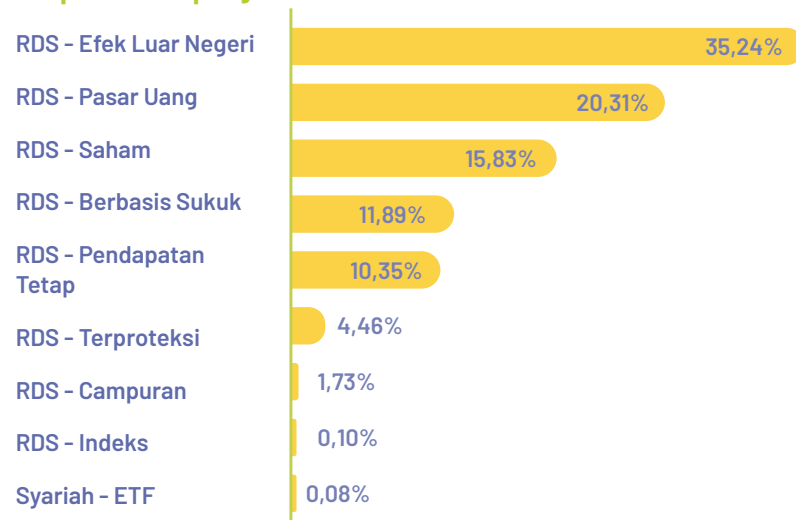
Sepanjang tahun 2022 terdapat 274 reksa dana syariah dengan total Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp40,61 triliun.

Perkembangan Reksa Dana Syariah

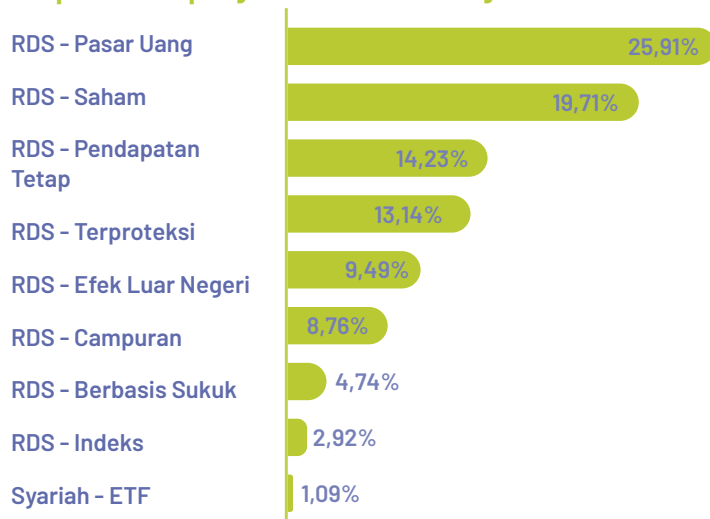


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Proporsi RDS per Jenis berdasarkan NAB



Proporsi RDS per Jenis berdasarkan Jumlah



Jumlah Reksa dana Syariah per 30 Desember 2022.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Layanan di Pasar Modal Syariah

Jumlah Investor Sistem Online Trading Syariah (SOTS)

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah Investor	85.891	105.174	117.942
Peningkatan Jumlah Investor	17.292	19.283	12.768
Pertumbuhan	25,21%	22,45%	12,14%

Sumber: Bursa Efek Indonesia

Layanan di Pasar Modal Syariah

Jenis Layanan	Jumlah
Bank Kustodian yang telah mengelola Reksa Dana Syariah	15
Perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia (Akumulasi)	33*
Wali amanat dalam penerbitan sukuk korporasi melalui penawaran umum di Indonesia	9
Pihak Penerbit DES	12
Anggota Bursa yang menyediakan layanan <i>Sharia Online Trading System</i> aktif	15
Administrator rekening dana nasabah syariah	2
Ahli Syariah Pasar Modal aktif	104
Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah	61
Manajer Investasi Syariah	1

*Termasuk 3 Perusahaan Efek yang telah dicabut izinnya.

*Sumber: OJK, KSEI, dan IDX Islamic

Selama tahun 2022, terdapat penambahan 12.768 investor syariah baru, sehingga jumlah investor SOTS meningkat sebesar 12,14% dibandingkan tahun 2021.

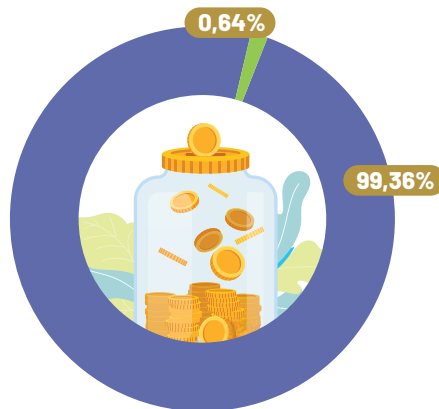
Sharia Online Trading System (SOTS) merupakan sistem transaksi saham syariah secara *online* yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Pada tahun 2022, jumlah SOTS aktif sebanyak 15 anggota bursa, termasuk penambahan 1 SOTS aktif, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia.

Fintech Pasar Modal Syariah

Sebagai salah satu bentuk kolaborasi OJK dengan industri usaha kecil menengah di Indonesia serta dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, pada tahun 2022 OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 3/SEOJK.04/2022 sebagai panduan pelaku dalam melakukan penerbitan efek syariah melalui skema pembiayaan untuk

UKM dengan menggunakan *Securities Crowdfunding* (SCF). SCF telah memperoleh fatwa DSN-MUI terkait Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*).

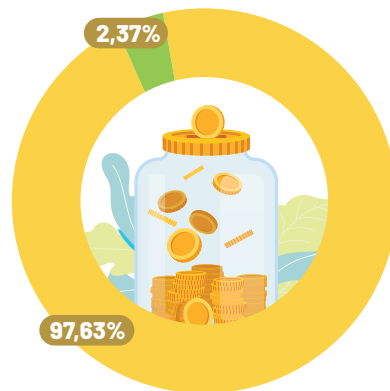
Proporsi Nilai Sukuk SCF



■ Sukuk SCF ■ Obligasi SCF

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Proporsi Nilai Saham Syariah SCF



■ Saham Non Syariah ■ Saham Syariah

	Saham Syariah	Sukuk	Jumlah
Jumlah Penerbit	4	85	89
Nilai Efek Syariah (Rp Miliar)	12,82	167,51	180,34

Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI), 2022

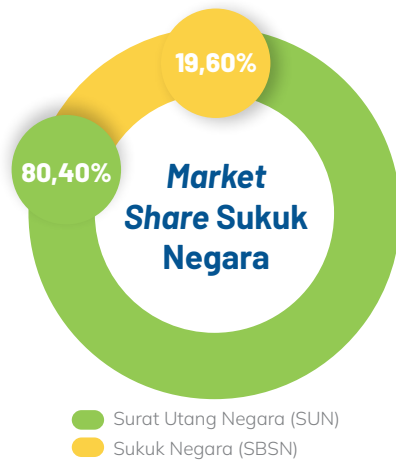


Pada akhir tahun 2022, sejumlah 85 penerbit yang merupakan usaha kecil menengah telah menerbitkan sukuk melalui skema SCF dengan total Rp167,52 miliar, serta 4 penerbit yang telah menerbitkan saham syariah melalui skema SCF dengan total penghimpunan dana sebesar Rp12,82 miliar.

Tercatat dari 14 penyelenggara SCF, telah terdapat 3 SCF yang berkegiatan berdasarkan prinsip syariah (*full fledged*). Selain dari penyelenggara SCF *full fledged*

tersebut, penyelenggara SCF secara umum tetap dimungkinkan menawarkan efek syariah berupa sukuk.

Perkembangan Sukuk Negara



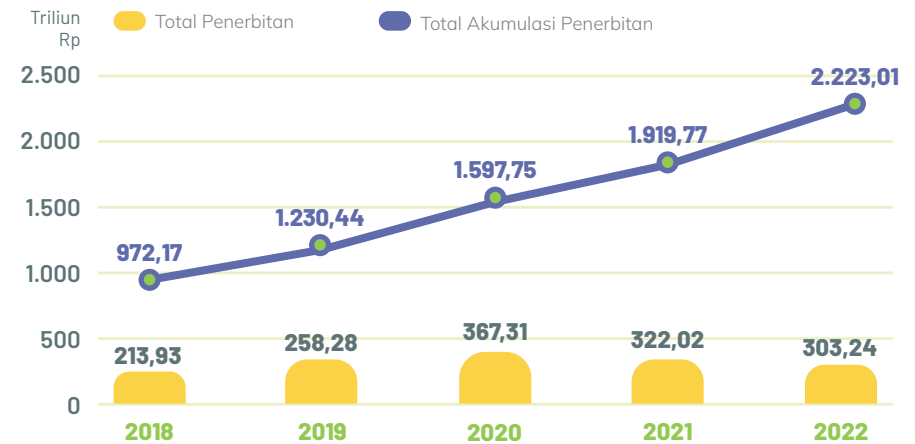
Sebagai upaya untuk memperluas sumber alternatif pembiayaan APBN dan mengembangkan pasar keuangan syariah, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Negara pada tahun 2008.

Dalam kurun waktu 14 tahun, Sukuk Negara telah berperan penting sebagai instrumen pembiayaan APBN dan sebagai katalisator perkembangan industri keuangan syariah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Keberhasilan penerbitan Sukuk Negara sejalan dengan upaya pengembangan pasar secara berkesinambungan, sebagai upaya untuk menciptakan pasar Sukuk Negara yang aktif, dalam, dan likuid. Berbagai infrastruktur pendukung penerbitan Sukuk Negara telah ditingkatkan, seperti kerangka hukum penerbitan dan pengelolaan, struktur sukuk dan *underlying asset*, metode penerbitan dan jenis instrumen, serta perkembangan pasar dan basis investor, baik domestik maupun internasional.

Sejak diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, hingga saat ini penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp2.223,01 triliun dengan berbagai metode penerbitan (lelang, *book building*, *private placement*), baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing (USD). Jumlah *outstanding* Sukuk Negara per 30 Desember 2022 mencapai Rp1.344,35 triliun atau sekitar 19,6% dari total Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Perkembangan penerbitan SBSN ini menunjukkan semakin besarnya peran SBSN dalam pembiayaan defisit APBN, pembiayaan proyek infrastruktur, dan juga pengembangan pasar keuangan syariah.

Penerbitan Sukuk Negara



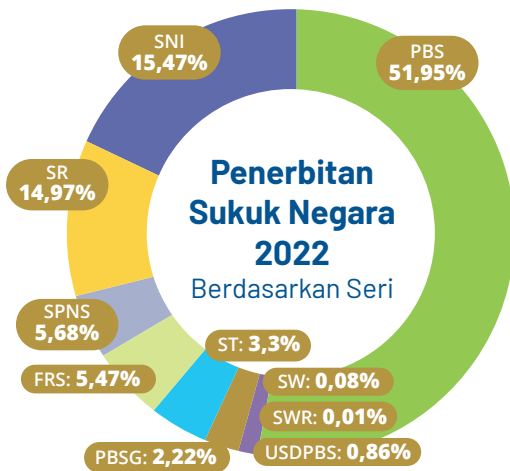
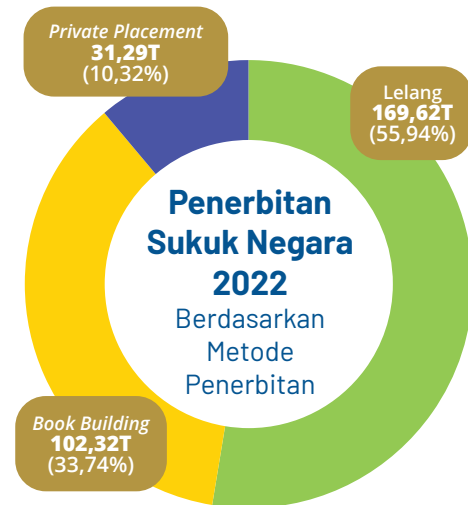
Nilai Outstanding Sukuk Negara



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Summary Penerbitan Sukuk Negara Tahun 2022

Target penerbitan SBSN pada awal tahun 2022 ditetapkan sebesar **Rp342,05 triliun**.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

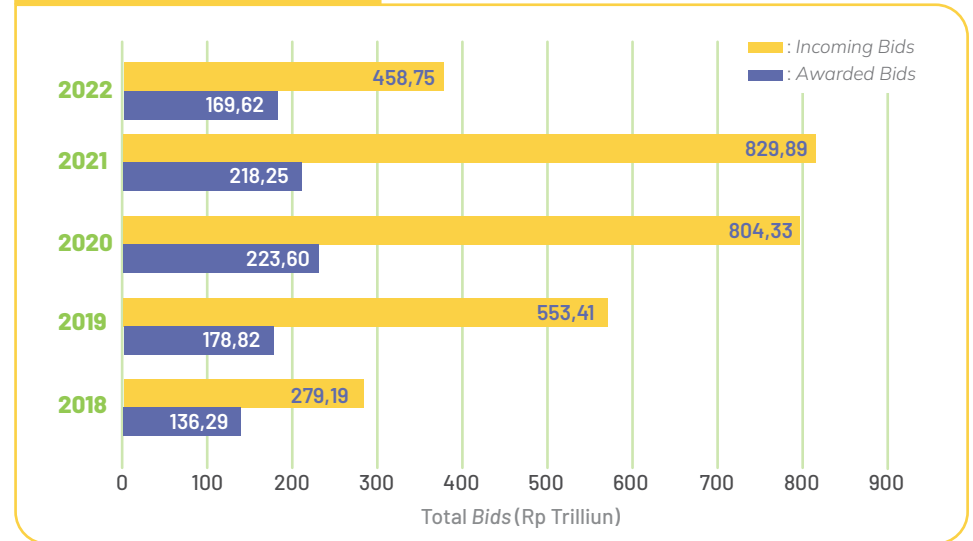
Namun seiring berjalannya perbaikan *outlook* kondisi market dan pembiayaan, target penerbitan SBSN berkurang dan dapat dipenuhi sebesar Rp303,24 Triliun.

Pada tahun 2022, Pemerintah melaksanakan penerbitan SBSN secara *bookbuilding* di pasar perdana domestik sebanyak 4 (empat) frekuensi, yakni 2 seri Sukuk Ritel (seri khusus untuk investor individu bersifat *tradable*), 1 seri Sukuk Tabungan (seri khusus untuk investor individu bersifat *non-tradable*), dan 1 seri *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (Sukuk wakaf bersifat *non-tradable*).

Seluruh seri Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan diterbitkan secara online melalui platform e-SBN. Sedangkan CWLS Ritel dapat dipesan secara *hybrid* (*online* dan *offline*) di Mitra Distribusi SBSN Ritel yang terdaftar sebagai LKSPWU. Selain metode *bookbuilding*, Pemerintah juga menerbitkan SBSN seri PBS (*Project Based Sukuk*) dan PBSG (PBS seri *green*), dan SPNS (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) melalui lelang reguler.

Pemerintah juga melakukan penerbitan SBSN secara *bookbuilding* di pasar perdana

Kinerja Lelang Sukuk Negara



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

internasional sebesar US\$ 3,25 miliar dengan tenor 5 dan 10 tahun. Penerbitan ini mendapat *Best Islamic Finance Deal* dari Lembaga Internasional *Finance Asia* yang secara keseluruhan *Green Sukuk Global Indonesia* telah mendapatkan 16 penghargaan internasional sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2018 dan menjadi penghargaan ke-46 untuk *Global Sukuk*. Sementara itu, transaksi *Private Placement* pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 13 kali dengan nilai nominal penerbitan sebesar Rp31,30 triliun.

Total *incoming bids* lelang SBSN selama tahun 2022 mencapai Rp458,75 triliun dengan total *awarded bids* mencapai Rp169,62 triliun. Dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, kinerja lelang SBSN pada tahun 2022 mengalami penurunan. Dari sisi *incoming bids* dan *incoming bid* yang masuk *benchmark* Hal tersebut disebabkan volatilitas pasar keuangan global yang berimbas pada pasar SBN domestik. Namun pada tahun 2022, kinerja penerimaan APBN sangat baik, sehingga kebutuhan pembiayaan melalui Sukuk Negara juga turun.

Penerbitan Sukuk Ritel Tahun 2022

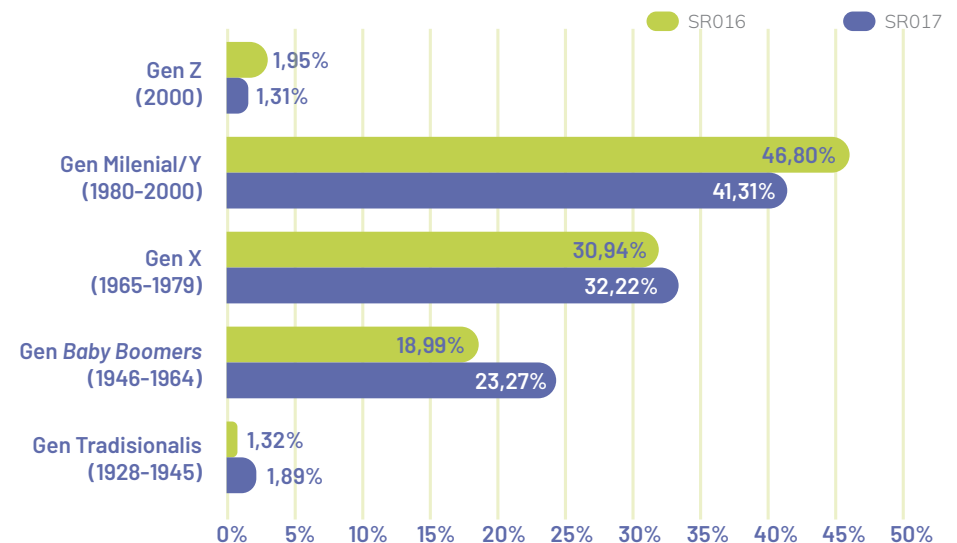
Hasil Pemesanan	SR016	SR17
Nominal Pemesanan (dalam miliar Rupiah)	18,41T	26,97T
Masa Penawaran	25 Feb s.d. 17 Mar 2022	19 Aug s.d. 14 Sept 2022
Tanggal Setelmen	23 Maret 2022	21 September 2022
Tanggal Jatuh Tempo	10 Maret 2025	21 September 2025
Tingkat Imbalan	4,95% (fixed)	5,9% (fixed)
Jumlah Mitra Distribusi	30 midis	31 midis
Jumlah Investor Baru	44.579 orang	66.362 orang
Akad	13.758 orang	24.038 orang
Tema	Ijarah Asset to be Leased	Ijarah Asset to be Leased
Tradability	Reguler	Reguler
Minimal Pemesanan	1 Juta	1 Juta
Maksimal Pemesanan	2 Miliar	5 Miliar

Pada tahun 2022, Pemerintah Sukuk Ritel sebanyak 2 kali yaitu Sukuk Ritel seri SR016 dan SR017. Penerbitan seluruhnya dilakukan secara *online* melalui platform e-SBN di 31 Mitra Distribusi, terdiri dari Bank Syariah, bank Konvensional, Perusahaan Efek Khusus, Perusahaan Efek dan *Fintech*.

SR016 merupakan seri Sukuk Ritel pertama yang diterbitkan di awal tahun dengan realisasi penjualan mencapai Rp18,4 triliun di tengah kondisi pasar keuangan yang relatif masih belum stabil dan adanya tren kenaikan *yield* di pasar SBN domestik.

Sementara itu SR017 diterbitkan di semester 2 tahun 2022. Hasil penjualan SR017 mencapai Rp26,976 triliun, dari 65.362 investor. Dalam seri ini, jumlah investor SR017 merupakan yang terbesar sepanjang penerbitan SBN Ritel. Hal ini mengindikasikan animo yang sangat

besar dari investor ritel domestik. Meskipun maksimum pemesanan mengalami peningkatan dari Rp2 miliar menjadi Rp5 miliar per investor, tingkat keritelan SR017 masih terjaga, yang diindikasikan oleh rata-rata pemesanan SR017 yang sebesar Rp412,7 juta.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Penerbitan *Green Retail* Sukuk Seri ST009

Pilihan Berharga Bersama Jaga Bumi Kita

Nominal Penjualan



Rp 10.000.000.000.000

Jumlah Investor



35.397 orang

Rata-rata Pemesanan per Investor



Rp282,51 juta

Jumlah Investor Baru



8.739 orang



Generasi

Jumlah investor terbesar merupakan **Generasi Y/Milenial** sebanyak **19.075** orang (**53,89%**).

Volume pemesanan didominasi Generasi **Gen X** dengan total volume sebesar **Rp 3,70 triliun (37,20%)**



Profesi

Pegawai swasta sebanyak **12.086 (34,14%)** mendominasi dari sisi jumlah investor.

Wiraswasta mendominasi dari sisi volume sebesar **Rp3,33 triliun (33,30%)**



Wilayah Pemesanan

Wilayah Indonesia Bagian Barat (selain DKI Jakarta) mendominasi dari sisi investor sebanyak **21.170 (59,81%)** dan sisi volume sebesar **Rp4,84 triliun (48,40%)**



Investor Baru

Investor baru sejumlah **8.739** atau **24,69%** dari total investor, dengan volume sebesar **Rp 1.640,42 miliar**.

Investor baru didominasi oleh **Generasi Y/Milenial** sebesar **67,75%**

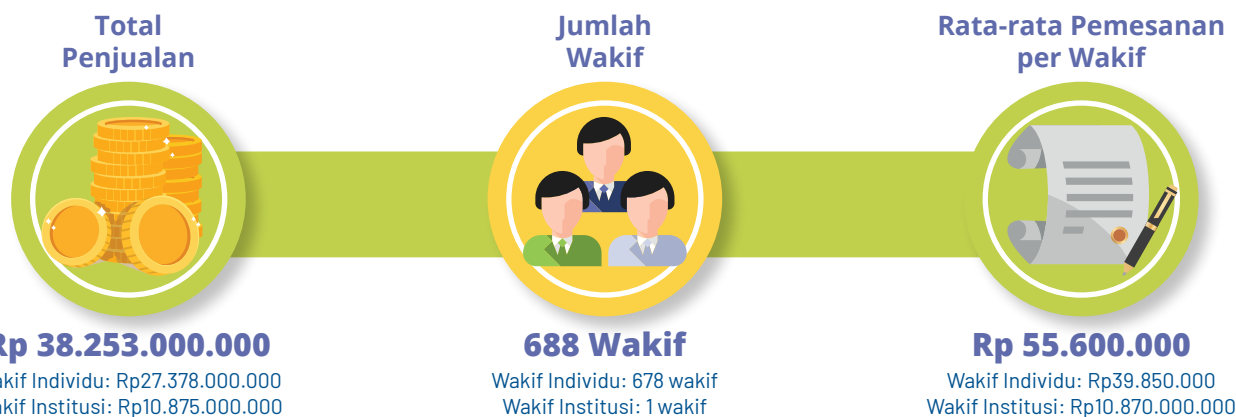
Pemerintah Indonesia memulai *green financing initiatives* pada tahun 2017 dengan peluncuran *Green Bond* dan *Green Sukuk Framework*. Inovasi tidak hanya dilakukan di pasar global tetapi juga di pasar domestik melalui penerbitan *Green Sukuk Ritel*, yaitu *Sukuk Tabungan (ST)* sejak tahun 2019.

Pada tahun 2022 Pemerintah kembali menerbitkan *Green Sukuk Ritel* melalui seri ST009.

Penerbitan *Green Sukuk Ritel* di 2019 ini juga mencatatkan sejarah sebagai *Green Sukuk Ritel* pertama di dunia yang diterbitkan oleh suatu negara.

Penjualan ST009 mampu menghasilkan total pemesanan sebesar Rp10 triliun dari 35.397 investor. Dari sisi nominal maupun jumlah investor, penjualan ST009 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penerbitan SBSN Ritel *Non-tradable*. ST009 mulai ditawarkan pada tanggal 11 November 2022 dan penawaran ditutup pada 30 November 2022. Minat investor yang sangat luar biasa menyebabkan target nasional ST009 sudah tercapai pada 28 November 2022, yaitu 2 hari sebelum masa penawaran ditutup.

Penerbitan CWLS Ritel seri SWR003: Pilihan Investasi, Berkah Tiada Henti



Penerbitan Sukuk Wakaf tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Selain itu, penerbitan CWLS yang telah dimulai sejak 2020, merupakan bentuk dukungan Pemerintah dalam menciptakan sinergi ekosistem keuangan Syariah dan keuangan sosial. Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Ritel seri SWR003 merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan Wakaf Nasional, membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Tahun 2022 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan penerbitan CWLS Ritel. Dalam penyaluran imbalan tiap bulan, LKSPWU bekerjasama dengan 10 Nazhir dengan program – program / kegiatan sosial.

Hasil pemesanan SWR003 sampai dengan berakhirnya masa penawaran adalah sebesar Rp38,25 miliar, yang

merupakan penjualan terbesar sepanjang penerbitan CWLS Ritel. Pemesanan berasal dari wakif individu sebesar Rp27,38 miliar dan wakif institusi sebesar Rp10,87 miliar dengan total wakif sebanyak 688 wakif, yang terdiri dari 687 wakif individu dan 1 wakif institusi. Berdasarkan keseluruhan hasil pemesanan SWR003, masih terlihat potensi yang sangat besar dari penerbitan CWLS Ritel yang dapat digali lebih dalam. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan infrastruktur yang diperlukan agar CWLS Ritel semakin mudah dijangkau masyarakat luas.

Selain Penerbitan CWLS Ritel, Pemerintah juga menerbitkan Sukuk Wakaf (CWLS) dengan cara *private placement*, yaitu seri SW003 dan SW004. Nilai nominal masing-masing seri Sukuk Wakaf adalah Rp100 miliar, sehingga total nominalnya Rp200 miliar.

Kerjasama LKSPWU dengan Nazir



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Realisasi Penerbitan SBSN Ritel

Penerbitan Sukuk Ritel terus meningkat dan mendukung kebijakan inklusi keuangan di Indonesia.

Sejak pertama kali diterbitkan tahun 2009, **penerbitan SBSN Ritel (termasuk CWLS) mencapai nominal Rp330,00 T dengan akumulasi investor seluruh penerbitan sebanyak 682.824 investor.**

 sukuk ritel INVESTASI RAKYAT PENUH MANFAAT	2009-2022 Rp292,79T	17 seri 541.739 Total investor yang telah berpartisipasi	Sukuk Ritel diterbitkan sejak 2009 Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah dan keuangan inklusif
 SI Sukuk Negara Tabungan	2016-2022 Rp37,14T	9 seri 138.765 Total investor yang telah berpartisipasi	Mendorong transformasi masyarakat menuju <i>investment-oriented society</i> Investor dapat membeli dengan unit pembelian kecil
 CWLS WAKAF BERINVESTASI	2020-2022 Rp77,31M	3 seri 2.320 Total investor yang telah berpartisipasi	Sejak tahun 2018 Sukuk Ritel diterbitkan secara <i>online</i>

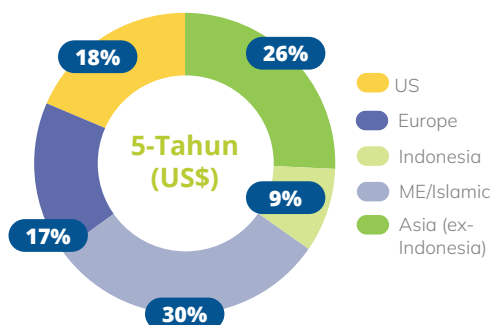
Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Sukuk Global (SNI) Tahun 2022: Sovereign Green Sukuk di Pasar Global

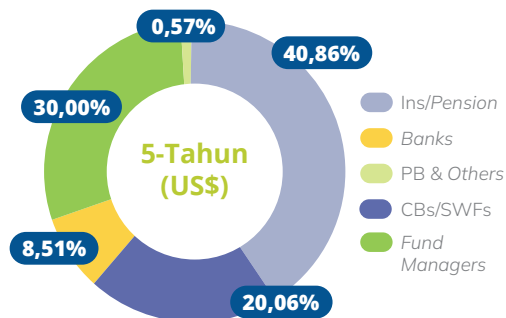
Distribusi Orderbook

5-Tahun US\$ **US\$ 5,7bn+**
dari 237 accounts

Investor berdasarkan Geografi (Alokasi)

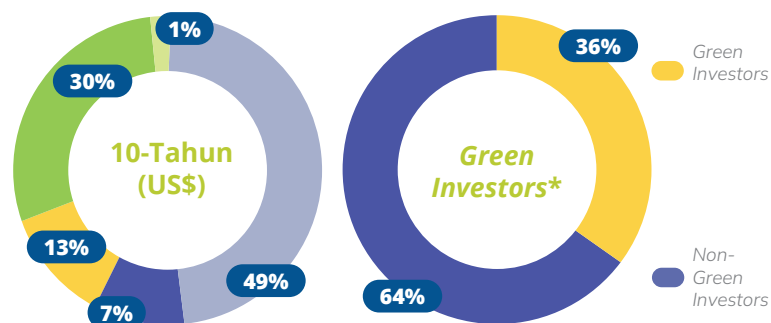
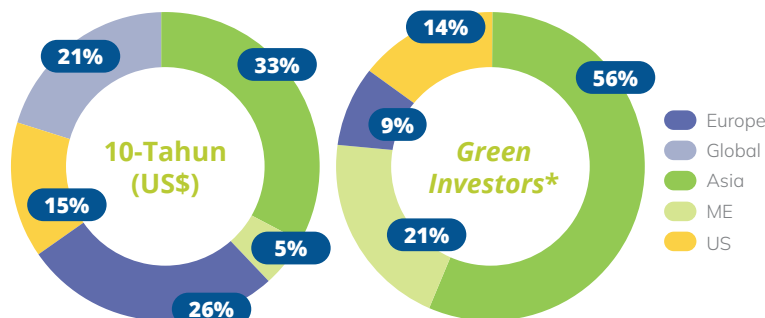


Investor berdasarkan Tipe (Alokasi)



*Penyangkalan: Klarifikasi *Green Investors* adalah berdasarkan penilaian internal HSBC terhadap profil investor ESG/SRI

10-Tahun US\$ **US\$ 5,1bn+** dari 225 accounts



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

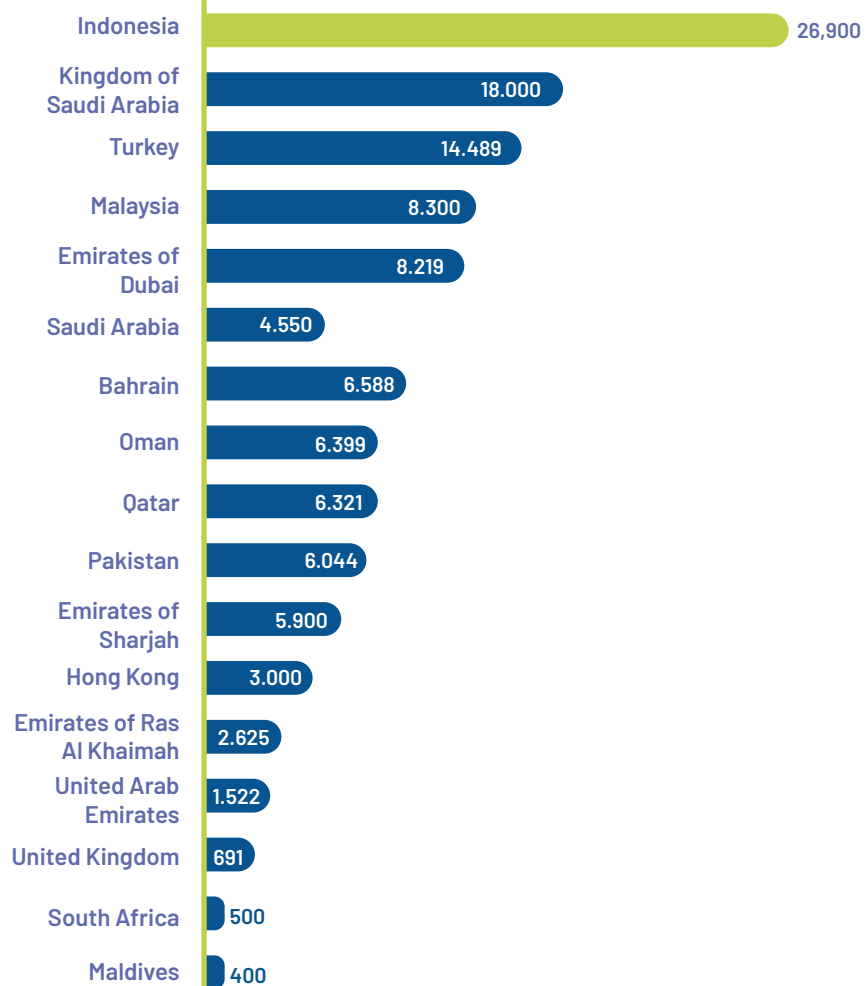
Di tengah-tengah kondisi pasar yang menantang, **Pemerintah sukses melakukan transaksi penjualan *Global Sukuk* sebesar US\$3,25 miliar yang terdiri atas US\$1,75 miliar dengan tenor 5 tahun dan US\$1,5 miliar dengan tenor 10 tahun (seri *Green* dengan akad Wakalah yang jatuh tempo pada tahun 2027 dan 2032).**

Transaksi tersebut menarik minat yang besar dari beragam jenis investor dari berbagai geografi. Hal ini menunjukkan minat investasi yang kokoh untuk Indonesia dikarenakan dukungan investor yang berkelanjutan dan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.

Beberapa capaian penting dari penerbitan ini antara lain transaksi Sukuk USD Global terbesar dari Pemerintah, *Green Sukuk* terbesar yang pernah dicetak secara global, penerbitan terbesar dari Indonesia pada tahun ini dan *Green Sukuk* pertama dengan tenor 10 tahun oleh Indonesia.

International Sovereign Sukuk Issuance

(Million USD)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Sebagai bagian dalam program penerbitan sukuk negara di pasar global, pada tahun 2022 ditawarkan pula *Green Sukuk* yang secara rutin telah dimulai sejak tahun 2018. Penerbitan pada tahun 2022 tersebut mencetak *record* sebagai *Green Sukuk* terbesar yang pernah dikeluarkan secara global. Penerbitan ini membuktikan dedikasi dan komitmen jangka panjang Pemerintah untuk pembiayaan hijau dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya dalam

melawan perubahan iklim. *Green Sukuk* yang diterbitkan pada penawaran kali ini adalah *Green Sukuk* global kelima dari Pemerintah dan yang pertama yang diterbitkan sejak Pemerintah mengeluarkan *SDGs Government Securities Framework* pada bulan Agustus 2021. Penerbitan *green sukuk* di pasar global tahun 2022 memantapkan posisi Indonesia sebagai penerbit *Green Sukuk* Global terbesar di dunia pada tahun 2022.

Top ESG Sukuk Issuers by Cumulative Issuance 2017-2022

Issuer	Cumulative Issuance (US\$ min)
Indonesia Govt	6.841,4
Islamic Development Bank (IsDB)	5.131,1
Malaysia Govt	1.766,4
Saudi Electricity Co	1.300,0
Majid Al Futtaim	1.200,0
Infracorp	900,0
Dubai Islamic Bank	750,0
Saudi National Bank	750,0
Riyad Bank	750,0
Etihad Airways	600,0
Other	5.072,8
Total	25.071,6

Sumber: Refinitiv

Berdasarkan *impact report Green Sukuk*, dari penerbitan *Green Sukuk* sejak tahun 2018, diproyeksikan terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 10,42 juta ton CO₂, tambahan kapasitas pembangkit

listrik ramah lingkungan sebesar 7,36 kWh, 8,51 juta rumah tangga yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan sampah yang lebih baik, serta proyek – proyek ramah lingkungan yang lain.

Capaian *Green Sukuk* tahun 2022

- *Global Sukuk* Indonesia sesuai dengan standar AAOIFI sehingga dapat diterima di pasar UEA.
- Sebaran investor *green* terus meningkat dari tahun ke tahun.
- Sukuk hijau *domestic* dijual menggunakan platform online (e-SBN) dengan imbalan *floating with floor*.
- Generasi Milenial memiliki tingkat partisipasi terbesar (48%) diikuti oleh Generasi X dan *Baby Boomers*.
- Pada tahun 2022, pertama kalinya Pemerintah menerbitkan *Green Sukuk* melalui lelang seri PBSG001 sebesar Rp4,4 triliun dari total *demand* sebesar Rp11,3 triliun.



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Internasional

2018	2019	2020	2021	2022
• Tenor 5 Tahun • USD 1,25 miliar • Investor Green: 29%	• Tenor 5,5 Tahun • USD 750 juta • Investor Green: 29%	• Tenor 5 Tahun • USD 750 juta • Investor Green: 34%	• Tenor 30 Tahun • USD 750 juta • Investor Green: 57%	• Tenor 10 Tahun • USD 1,5 juta • Investor Green: 36%



15 penghargaan internasional untuk green sukuk antara lain dari IFR Asia, Islamic Finance News, Finance Asia, Euromoney, The Asset Triple A, Climate Bond Initiative, dan Cambridge IFA.

Domestik

Ritel				Wholesale
2019	2020	2021	2022	2022
ST006 Rp 1,46T 7.735 Investor 2.908 Investor baru	ST007 Rp 5,42 T 16.992 Investor 4.276 Investor baru	ST008 Rp 5T 14.337 Investor 2.776 Investor Baru	ST009 Rp 10T 35.397 Investor 13.758 Investor Baru	PBSG001 Rp 4,4T Diterbitkan melalui lelang Investor terdiri dari perbankan dan institusi lainnya

Perkembangan *Project Financing Sukuk*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang khusus ditujukan untuk pembiayaan proyek (*Project Financing Sukuk*) telah muncul sebagai sumber pembiayaan proyek yang kreatif dan inovatif di Indonesia.



Dikembangkan sejak tahun 2013, penerbitan *Project Financing Sukuk* memiliki target utama untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang dialokasikan (*earmarked*) dalam APBN. Selain itu, juga ditujukan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia dengan keterbatasan sumber dana APBN.

Hingga saat ini, *Project Financing Sukuk* (PFS) telah mencapai Rp175,37 Triliun

pembiayaan proyek yang dialokasikan sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2013, meliputi pembiayaan 4.247 proyek pemerintah pusat yang tersebar di 34 wilayah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Proyek-proyek yang didanai sangat beragam, terutama mencakup sektor infrastruktur nasional yaitu transportasi, jalan dan jembatan, pendidikan, keagamaan, Taman Nasional, sumber daya air, pertanian, dan laboratorium penelitian.

Total 4.247 proyek dengan total alokasi Rp175,37 triliun



576 Proyek Infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp61,086 triliun



6 Proyek fasilitas pertanian senilai Rp206 miliar



19 Proyek laboratorium dan fasilitas riset senilai Rp30,94 triliun



1 Proyek fasilitas fitofarmaka dan 1 SMAK Perindustrian senilai Rp118 miliar



673 Proyek Infrastruktur SDA senilai Rp30,94 triliun



166 Proyek perumahan di Kemhan senilai Rp2,54 triliun



1 Proyek penyelenggaraan Jaminan Produk Halal senilai 148 miliar



130 Proyek Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara serta Diklat senilai Rp52,23 triliun



76 Proyek Gedung PTN & **2** LLDIKTI senilai Rp5,94 triliun



56 Proyek perumahan Polri senilai Rp508 miliar



25 Proyek taman nasional SMK kehutanan, dan Riset LH di KLHK senilai Rp624 miliar



226 Proyek embarkasi haji dan PLHUT senilai Rp3,36 triliun



937 Proyek gedung PTKIN dan madrasah senilai Rp12,82 triliun



1351 Proyek gedung balai nikah dan manasik haji senilai Rp1,81 triliun



1 Proyek Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika senilai Rp145 miliar

Kontribusi Nyata Sukuk Negara untuk Indonesia



**Jembatan Sei Alalak,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan**
(2020 - 2021)



**Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian
Bekasi s.d Cikarang, Jawa barat**
(2019-2022)



**Laboratorium Terpadu,
Universitan Pattimura, Maluku**
(2021)



**Sarana dan Prasarana UIN Sunan Ampel,
Surabaya, Jawa Timur**
(2021)



**Pelabuhan Penyebrangan Siompu,
Sulawesi Tenggara**
(2020-2022)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Kontribusi Nyata Sukuk Negara untuk Indonesia



**Bandung Advanced Sciences and Creative Engineering Space (BASICS),
Jawa Barat (2021-2023)**



**Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah
Terpadu Kab. Bone Bolago, Gorontalo
(2021)**



**Pembangunan Gedung Kuliah
Terpadu TIK Politeknik Negeri
LHokseumawe, Aceh
(2022)**



**Asrama Haji Indramayu,
Jawa Barat
(2021)**



**Ruang Kelas MTsN Karangasem,
Bali
(2021)**



**Laboratorium Merkuri dan Metrologi
Lingkungan Bogor, Jawa Barat
(2020)**



**Sanctuary Tarsius,
Taman Nasional Bantimurung
(2020)**

Sumber: Kementerian Keuangan, 2022



Kebijakan Strategis Pasar Modal Syariah

Pengembangan Aset Wakaf Melalui Pasar Modal Syariah

Sebagai upaya mendorong pemanfaatan produk pasar modal syariah dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif serta meningkatkan pemahaman nazir (pengelola wakaf) dan pelaku industri, sepanjang tahun 2022, OJK bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait menyelenggarakan program pengembangan aset wakaf melalui pasar modal syariah. Program tersebut diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan mulai dari koordinasi diseminasi, *business matching* hingga *one on one meeting* yang melibatkan nazir, pelaku industri, serta kementerian/lembaga terkait.

Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan terdapat beberapa nazir yang menunjukkan minatnya untuk memanfaatkan produk pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan atas proyek wakafnya. Salah satu penerbit yang berminat,

bergerak di bidang layanan kesehatan klinik. Penerbit tersebut telah menerbitkan sukuk *ijarah* melalui layanan urun dana (*securities crowdfunding*). Penawaran sukuk ini memiliki fitur sebagai *blended financing*, memadukan *commercial* dan *social financing*.

Underlying asset dari sukuk *ijarah* ini adalah nilai manfaat bangunan dan peralatan klinik penerbit. Dana hasil penerbitan sukuk digunakan untuk melakukan renovasi klinik, pembelian alat kesehatan penunjang layanan *Medical Check Up*, Operasi Katarak dan Hemodialisa, serta penguatan modal kerja untuk operasional. Dari penerbitan sukuk *ijarah* ini, terkumpul dana sebesar Rp2,6 miliar dari 26 investor yang terdiri dari 3 investor nazir dan 23 investor selain nazir dengan rata-rata usia 27 – 61 tahun.

Penerbitan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2022

tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah Dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Pada tanggal 23 Januari 2022, OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2022 tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Surat Edaran tersebut merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 16/

POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Penerbitan SEOJK ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan penerbit (UMKM) dalam menerbitkan saham syariah. Selain itu, dapat mengakomodir kebutuhan investor yang ingin berinvestasi pada saham yang memenuhi kriteria saham syariah.

No. Pokok Ketentuan mengatur antara lain:

1. Pihak yang dapat menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah
2. Cakupan efek syariah dalam layanan urun dana
3. Kriteria Efek Syariah
4. Kewajiban bagi Penyelenggara Syariah dan Penyelenggara yang memiliki Unit Layanan Urun Dana Syariah (ULUDS)
5. Prosedur penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana



04

Industri Keuangan Non-Bank Syariah



Overview Industri Keuangan Non-Bank Syariah

Sampai dengan akhir tahun 2022, total aset IKNB Syariah secara keseluruhan mencapai 146,12 triliun dengan laju pertumbuhan aset sebesar 20,88% (yoy).

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, yang terdiri atas Perasuransian Syariah (Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah), Dana Pensiun Syariah (Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun

Manfaat Pasti Syariah, Dana Pensiun Pemberi Kerja-Program Pensiun Iuran Pasti Syariah, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah), Lembaga Pembiayaan Syariah (Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah), Lembaga Keuangan Syariah Khusus (Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Pergadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah); Lembaga Keuangan Mikro Syariah; dan *Fintech* Syariah memiliki potensi untuk terus bertumbuh.

Perkembangan IKNB Syariah, baik dari sisi jumlah aset maupun entitas pelaku usaha tercatat tumbuh. Dari sisi aset, aset IKNB Syariah mencapai Rp141,12 triliun dengan laju pertumbuhan sebesar 20,88% (yoy). Namun demikian, jika dilihat dari jumlah entitas pelaku IKNB Syariah tercatat sebanyak 211 dengan laju pertumbuhan -0,054% (yoy) atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan laju pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya pengembalian izin usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Dana Pensiun Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan *spin off* Perusahaan Asuransi. Saat ini terdapat 121 perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh (*full-fledged*) dan 90 unit usaha syariah.

Perbaikan kondisi ekonomi pasca COVID-19 dan pemberlakuan kebijakan stimulus COVID-19, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2021, yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2021 mendorong kinerja sektor jasa keuangan terus bertumbuh dan berdampak positif pada laju pertumbuhan aset industri, di antaranya Perusahaan Asuransi Umum Syariah (16,80%), Perusahaan Reasuransi Syariah (22,51%), Perusahaan Dana Pensiun Syariah (9,29%), Perusahaan Pembiayaan (30,31%), Perusahaan Modal Ventura (21,40%), Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (21,40%), Perusahaan Penjaminan (6,61%), Pergadaian Syariah (14,35%), Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (49,61%), Perusahaan PNM (49,84%), LKM (7,72%) dan *Fintech* (80,27%) (yoy).

Seiring dengan meningkatnya kinerja industri, inovasi produk dan kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh industri bertujuan untuk upaya mengembangkan ekosistem syariah. Salah satunya kerja sama pemasaran produk asuransi melalui Badan Usaha Selain Bank (BUSB), yakni kerja sama antara perusahaan asuransi dengan badan usaha selain bank yang berbentuk badan hukum yang memiliki sistem elektronik yang dapat menyajikan produk/layanan dari beberapa perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan kerja produk asuransi. Pada tahun 2022, terdapat 1 perusahaan asuransi syariah yang melakukan kerja sama BUSB. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan *multiplier effect* kepada aset perusahaan asuransi dan meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan cepat.

Selain dari sisi kebijakan, dalam rangka mendorong pertumbuhan IKNB Syariah dan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap IKNB Syariah, OJK terus melakukan sosialisasi, seminar, *focus group discussion*, *workshop*, dan penelitian. Dalam melakukan kegiatannya, OJK bersinergi dengan kementerian, DSN-MUI dan lembaga-lembaga terkait.

Dengan adanya paket kebijakan yang dikeluarkan dan kegiatan-kegiatan pengembangan yang terus dilakukan, diharapkan IKNB Syariah dapat terus bertumbuh dan menjadi salah satu pilar kekuatan dalam menumbuhkembangkan ekosistem syariah di Indonesia.

Statistik dan Perkembangan IKNB Syariah

Perkembangan Market Share IKNB Syariah Tahun 2022

dalam Triliun Rp

Jenis Industri	Konvensional	Syariah	Jumlah	Market Share Syariah	Market Share Konvensional
Perasuransian	1.738,25	45,02	1.783	2,52%	97,48%
a. Perusahaan Asuransi Jiwa	585,86	34,89	621	5,62%	94,38%
b. Perusahaan Asuransi Umum	196,75	7,73	204	3,78%	96,22%
c. Perusahaan Reasuransi	33,81	2,41	36	6,64%	93,36%
d. Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan	163,87	0,00	164	0,00%	100,00%
e. Asuransi Sosial (BPJS)	757,95	0,00	758	0,00%	100,00%
Dana Pensiun	342,64	9,86	352	2,80%	97,20%
Lembaga Pembiayaan	614,66	33,10	648	5,11%	94,89%
a. Perusahaan Pembiayaan	466,04	21,88	488	4,48%	95,52%
b. Perusahaan Modal Ventura	21,71	4,23	26	16,30%	83,70%
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	126,91	6,99	134	5,22%	94,78%
Lembaga Keuangan Khusus	223,51	57,42	281	20,44%	79,56%
a. Perusahaan Penjaminan	34,03	5,09	39	13,01%	86,99%
b. Perusahaan Pergadaian	64,14	11,15	75	14,80%	85,20%
c. LPEI	78,16	8,88	87	10,20%	89,80%
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	29,07	3,87	33	11,75%	88,25%
e. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	18,12	28,44	47	61,09%	38,91%
Jasa Penunjang	17,50	0,00	17	0,00%	100,00%
a. Pialang Asuransi	10,39	0,00	10	0,00%	100,00%
b. Pialang Reasuransi	7,11	0,00	7	0,00%	100,00%
Lembaga Keuangan Mikro	905,13	570,06	81	38,64%	61,36%
Finansial Technology Syariah	5,38	0,13	6	2,42%	-
JUMLAH	2.937,41	146,12	3.084	4,74%	95,26%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022



Market Share IKNB

Konvensional
95,26%

Syariah
4,74%

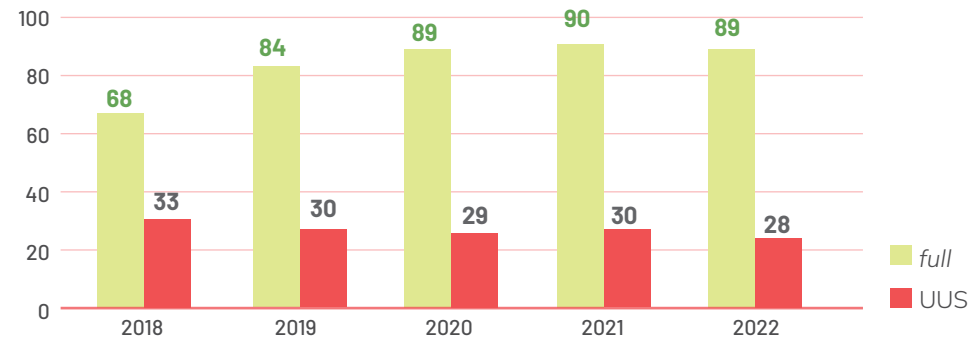
"Market share aset IKNB Syariah terhadap seluruh aset IKNB mencapai 4,74% pada akhir tahun 2022 atau mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu 4,25%"

Perkembangan Aset IKNB Syariah Tahun 2018 - 2022 (Miliar Rp)

JENIS INDUSTRI	2018	2019	2020	2021	2022
PERASURANSIAN SYARIAH	41.959	45.453	44.440	43.550	45.025
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	34.474	37.487	36.317	34.970	34.891
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5.621	5.903	6.014	6.616	7.728
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1.864	2.063	2.109	1.964	2.406
DANA PENSIUN SYARIAH	3.388	3.973	7.996	9.018	9.856
LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH	25.757	27.196	21.904	23.527	33.100
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	22.179	20.016	15.331	16.790	21.879
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	1.277	2.734	2.696	3.273	4.229
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	2.301	4.446	3.877	3.464	6.992
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KHUSUS	25.733	28.537	41.438	44.175	57.424
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	1.376	2.225	3.049	4.450	5.089
b. Perusahaan Pergadaian Syariah	7.783	11.253	10.670	8.684	11.146
c. LPEI Syariah (UUS)	14.660	13.383	14.041	9.471	8.876
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah (UUS)	1.914	1.676	3.824	2.588	3.872
e. PNM Syariah (UUS)	-	-	9.854	18.981	28.441
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	278	403	500	539	581
FINANSIAL TECHNOLOGY SYARIAH	2,3	50,62	74,67	74,13	133,64
JUMLAH	97.117	105.613	116.353	120.883	146.119

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Perkembangan Entitas IKNB Syariah Tahun 2018-2022



Jumlah entitas IKNB Syariah pada akhir tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,054% atau 5 entitas pelaku usaha

karena pegembalian izin usaha dan/atau pengembalian izin usaha karena *spin off*, apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan jumlah entitas pelaku usaha berasal dari sektor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Dana Pensiun Syariah, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

JENIS INDUSTRI	2018		2019		2020		2021		2022	
	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS	Full	UUS
PERASURANSIAN SYARIAH	13	49	13	49	13	47	14	45	15	43
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	7	23	7	23	7	23	7	23	8	21
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah	5	24	5	24	5	21	6	19	6	19
c. Perusahaan Reasuransi Syariah	1	2	1	2	1	3	1	3	1	3
DANA PENSIUN SYARIAH	2	2	3	3	4	4	4	6	4	6
LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH	7	37	9	32	9	31	9	31	9	30
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah	3	32	5	29	5	28	5	28	4	27
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah	4	4	4	2	4	2	4	2	5	2
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KHUSUS	8	7	5	8	5	9	4	12	5	11
a. Perusahaan Penjaminan Syariah	2	4	2	5	2	5	2	8	2	7
b. Perusahaan Pergadaian Syariah	6	1	3	1	3	1	2	1	3	1
c. LPEI Syariah (UUS)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah (UUS)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
e. PNM Syariah (UUS)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	59	0	75	0	80	0	82	0	81	0
FINTECH SYARIAH	12		10		7		7	0	7	0
JUMLAH	89	95	105	92	111	91	113	94	114	90

Sumber:
Otoritas Jasa
Keuangan,
2022



Asuransi Syariah

Pada tahun 2022, total aset asuransi syariah secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 4,36%.

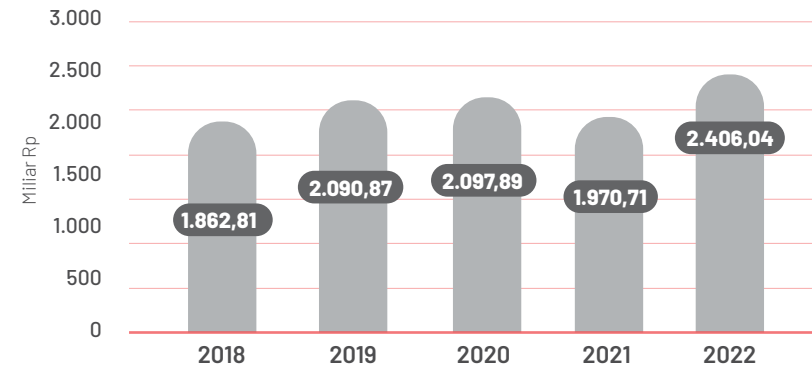
Peningkatan aset dialami oleh seluruh sub sektor yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah.

Total Aset Asuransi Syariah

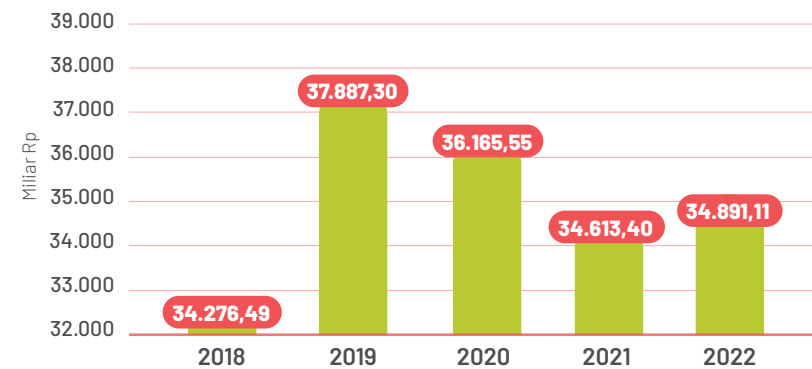


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

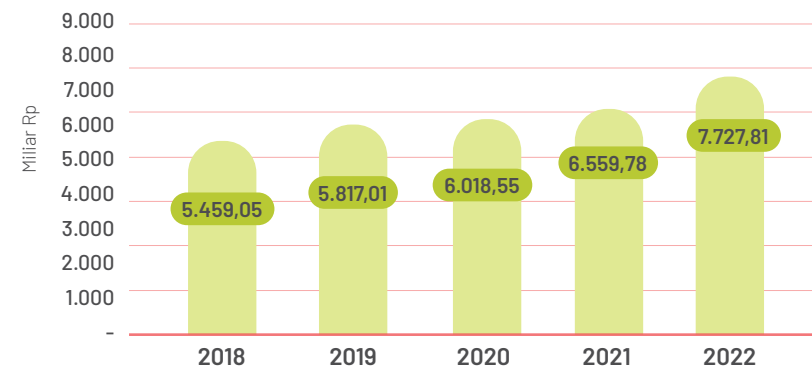
Total Aset Reasuransi Syariah



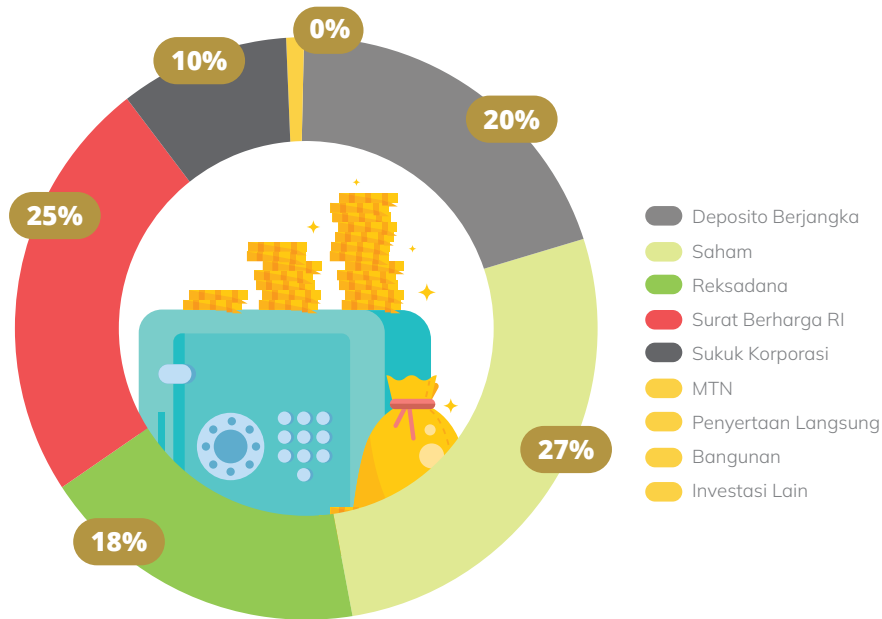
Total Aset Asuransi Jiwa Syariah



Total Aset Asuransi Umum Syariah

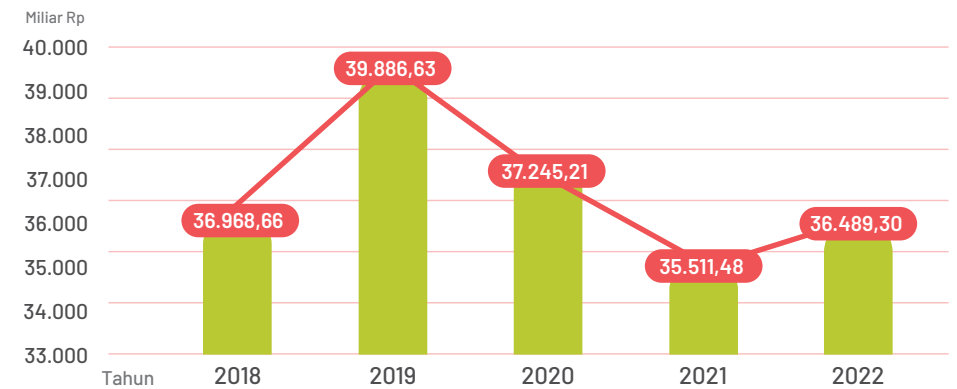


Portfolio Investasi Asuransi Syariah

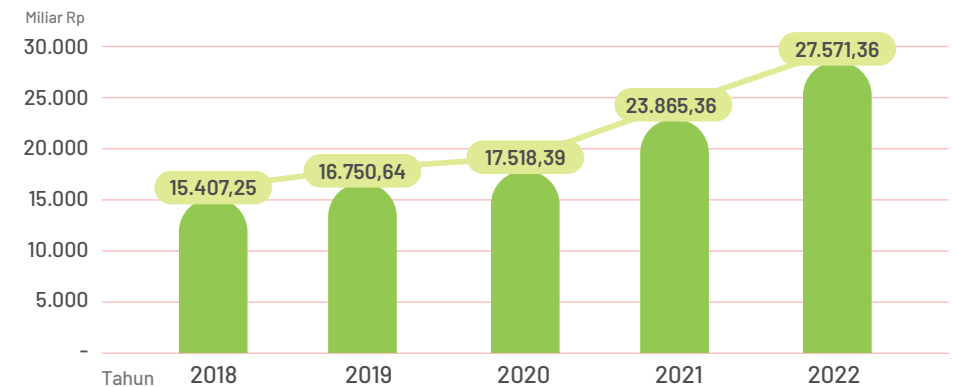


Sejalan dengan peningkatan aset, **investasi asuransi syariah juga mengalami peningkatan sebesar 2,75%**. Hal ini dikarenakan sebagian besar aset asuransi syariah ditempatkan pada instrumen investasi. Selanjutnya, **kontribusi bruto juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,67%**.

Total Investasi Asuransi Syariah



Total Kontribusi Bruto Asuransi Syariah



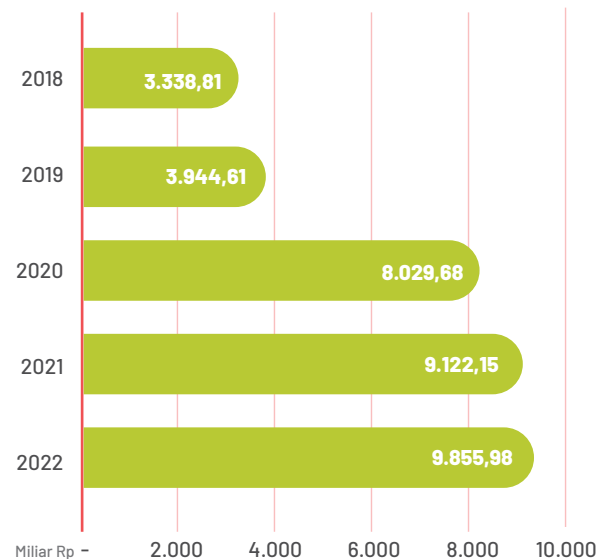
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Dana Pensiun Syariah

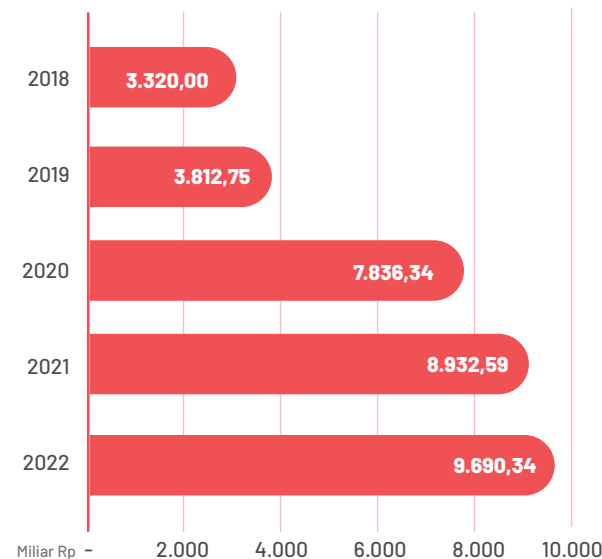
Total aset Dana Pensiun Syariah mengalami peningkatan sebesar 8,04% pada tahun 2022. Peningkatan aset tersebut juga sejalan dengan peningkatan investasi sebesar 8,48%.

Hal ini dikarenakan sebagian besar aset dana pensiun syariah ditempatkan pada instrumen investasi

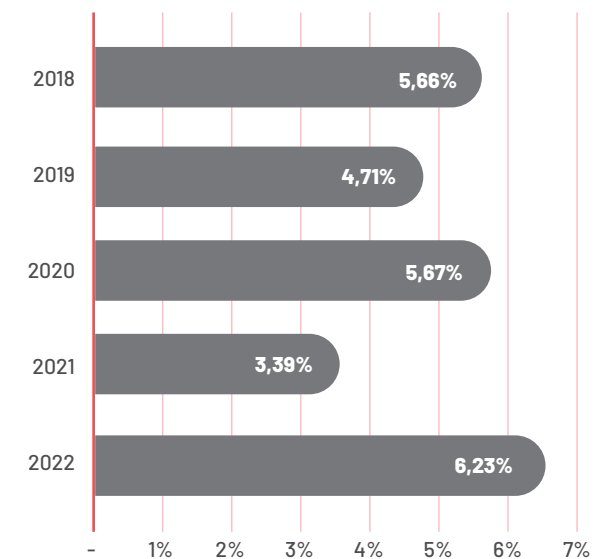
Total Aset Dana Pensiun Syariah



Total Investasi Dana Pensiun Syariah



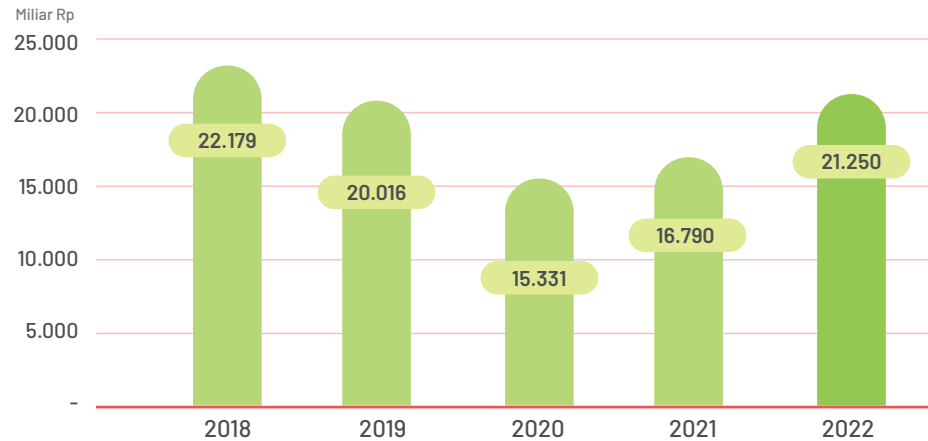
ROI (R) Dana Pensiun Syariah



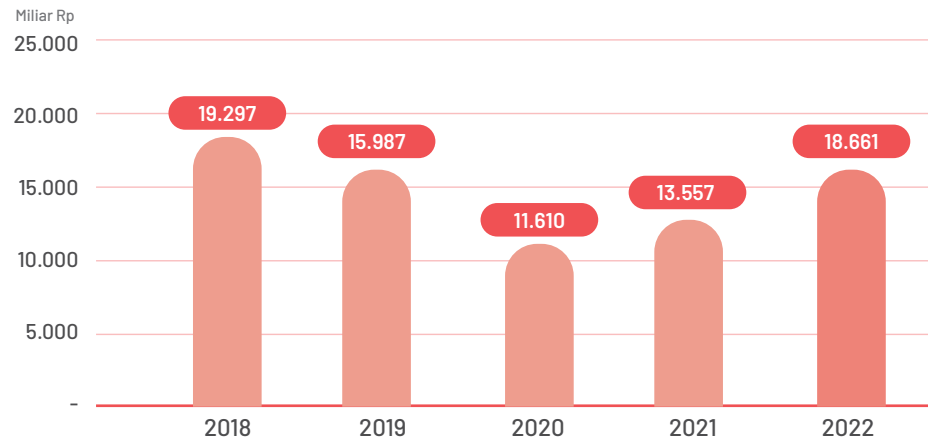
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Perusahaan Pembiayaan Syariah

Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah



Piutang Pembiayaan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,73% dalam lima tahun terakhir.

Aset tersebut perlahan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, setelah kondisi perekonomian mulai membaik pasca pandemi COVID-19. Aset perusahaan pembiayaan syariah mulai menggeliat naik, selain karena kembali normalnya aktivitas masyarakat, produk-produk baru juga mulai dikembangkan, yang salah satunya adalah pembiayaan umroh yang mulai dirambah oleh

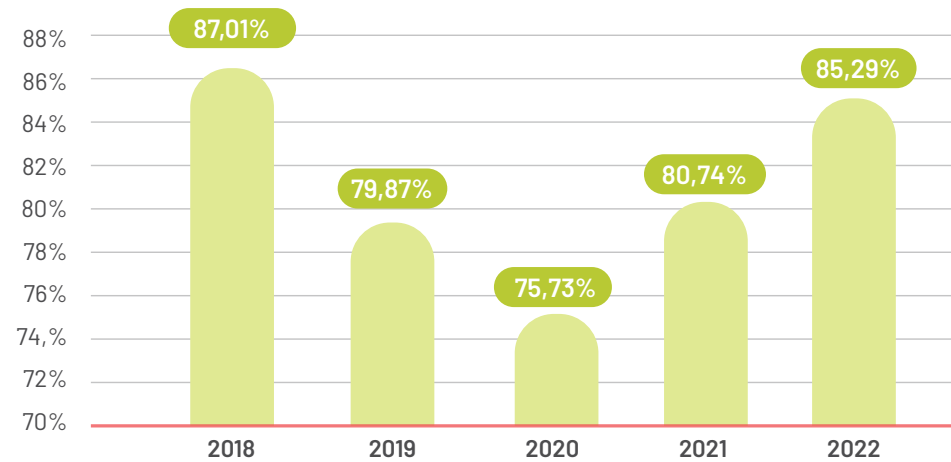
beberapa perusahaan pembiayaan syariah, mengingat mulai dibukanya pelaksanaan ibadah umroh setelah sebelumnya dilakukan pembatasan karena COVID-19 sebagaimana surat edaran dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI nomor B-04008/DJ/DT.II.3/Hj.9/01/2022 tentang penyelenggaraan ibadah Umrah 1443 H.

Seiring dengan perkembangan aset perusahaan pembiayaan syariah yang mulai meningkat,

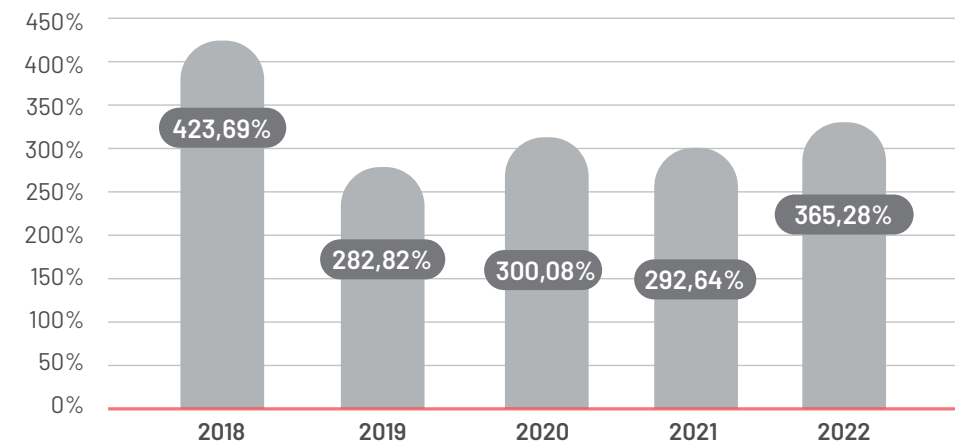
piutang pembiayaan syariah juga turut menunjukkan perkembangan positif setelah sebelumnya mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Peningkatan piutang tersebut sebagian besar terdiri

dari peningkatan piutang pembiayaan jual beli sebesar 85%, disusul piutang pembiayaan jasa sebesar 12%, sisanya piutang pembiayaan investasi sebesar 2% dan piutang pembiayaan syariah lainnya.

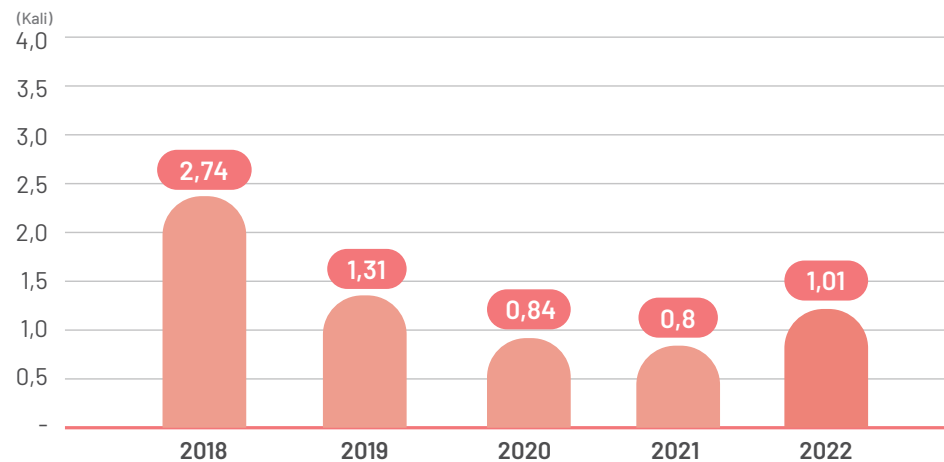
Financing to Asset Ratio (FAR)



Modal Sendiri Modal Disetor (MSMD)



Gearing Ratio



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022



Perbaikan kondisi juga ditampakkan pada besarnya rasio-rasio keuangan perusahaan pembiayaan syariah, antara lain *Financing to Asset Ratio (FAR)*, rasio modal dasar dibandingkan modal disetor (MSMD) serta *gearing ratio*.



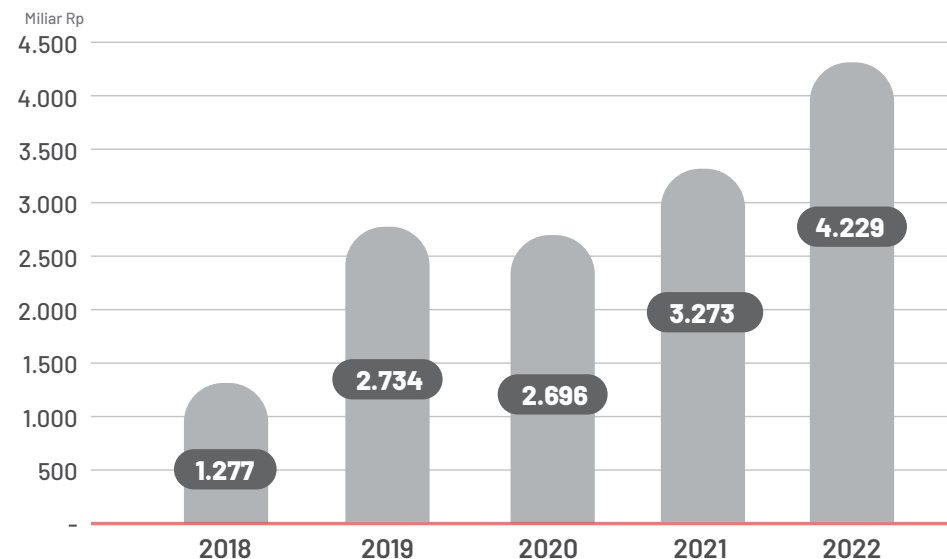
Perusahaan Modal Ventura Syariah

Aset dan Piutang/Penyertaan pada perusahaan modal ventura menunjukkan peningkatan pada lima tahun terakhir, yaitu sebesar 12% dan 42% dengan pertumbuhan 21,4% (yoy) dibanding dengan tahun sebelumnya.

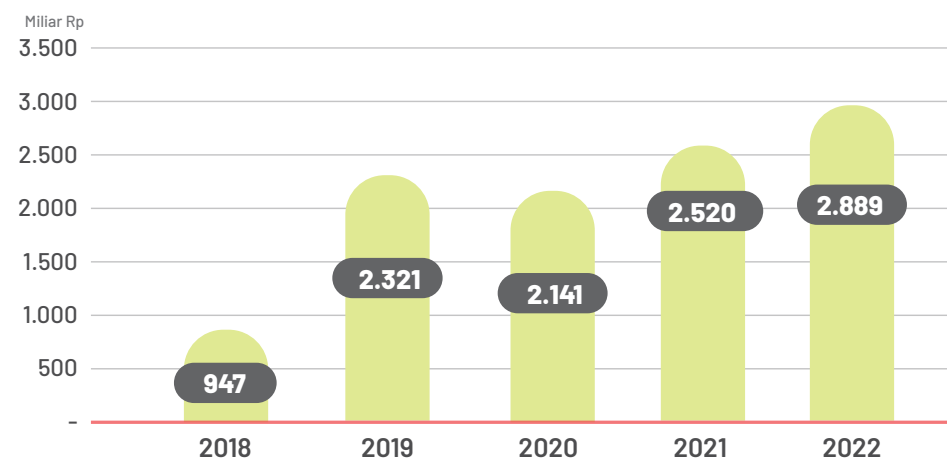
Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan kemudian mengalami penurunan dikarenakan pandemi COVID-19. Namun, aset mengalami kenaikan kembali seiring mulai pulihnya kondisi perekonomian Indonesia. Selain hal tersebut, peningkatan aset tersebut juga disebabkan

bertambahnya entitas baru pada industri modal ventura syariah. Sebagian besar kegiatan pembiayaan pada perusahaan modal ventura syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan syariah sebesar 95% dan sisanya sebesar 5% dilakukan melalui penyertaan saham.

Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

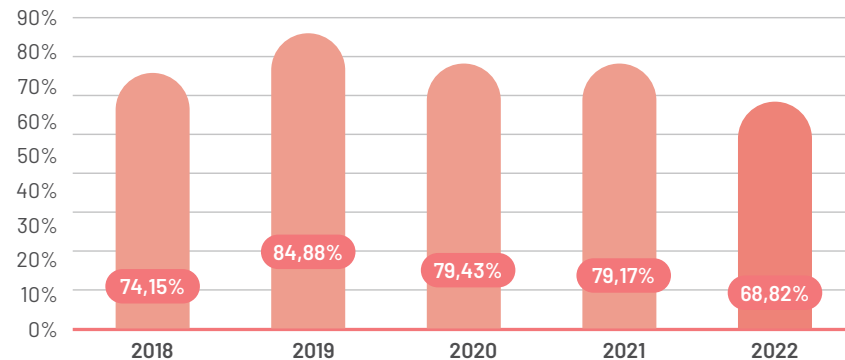


Piutang Pembiayaan dan Penyertaan Syariah



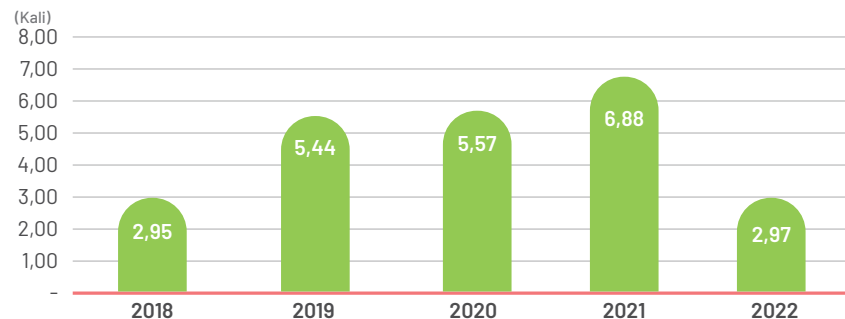
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Investment and Financing to Assets Ratio (IFAR)



IFAR perusahaan modal ventura menunjukkan penurunan beberapa tahun belakangan, di mana rata-rata penurunan mencapai minus 1,34%. Pergerakan yang tidak sesuai antara peningkatan piutang pembiayaan dan IFAR dikarenakan faktor lain yang membentuk komponen aset, di mana terjadi peningkatan signifikan pada penempatan deposito dan aset lain-lain.

Gearing Ratio

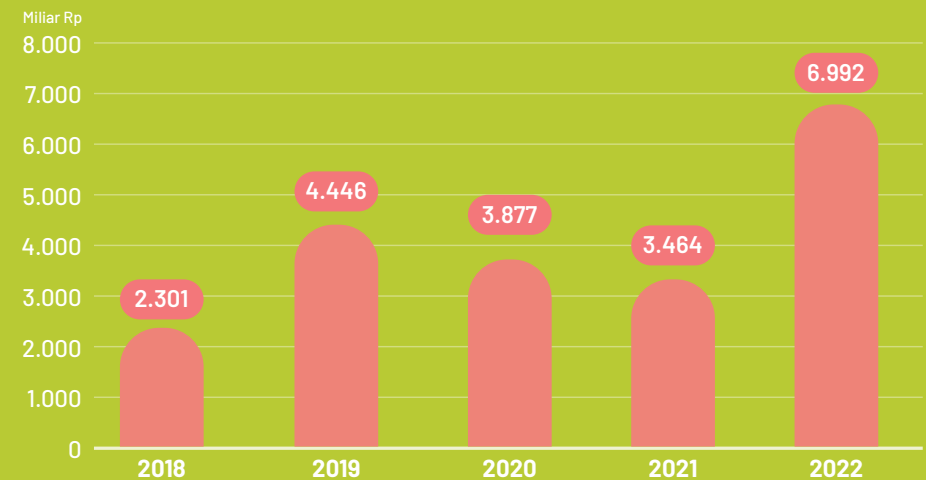


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Gearing ratio perusahaan modal ventura mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022, yaitu turun sebesar 57% menjadi 2,97 kali, yang merupakan titik terendah sejak lima tahun belakangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat dinilai kurang ekspansif.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah

Jumlah Aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS)



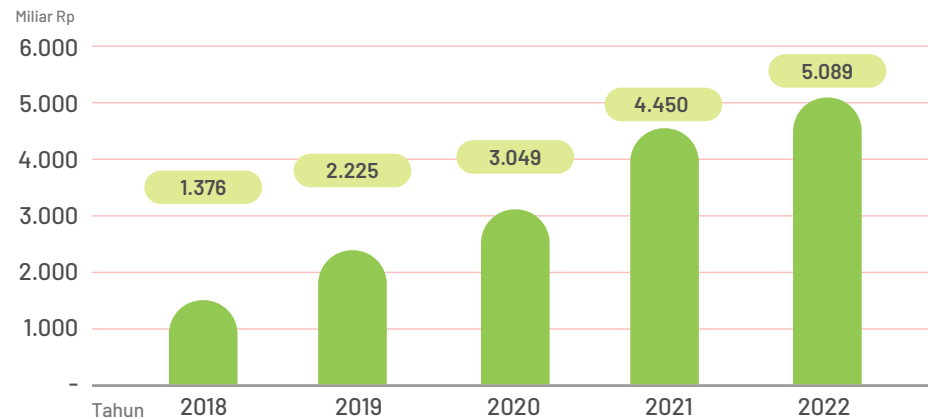
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Jumlah aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur atau PPI (UUS) mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Namun demikian, pada tahun 2022, jumlah aset tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 102%. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan pembiayaan pada produk *refinancing* atas infrastruktur dengan menggunakan akad MMQ.

Peningkatan jumlah aset PPI disebabkan karena adanya pembiayaan-pembiayaan sindikasi dengan badan usaha milik pemerintah untuk mendukung proyek pemerintah.

Lembaga Keuangan Syariah Khusus

Aset Perusahaan Penjaminan Syariah

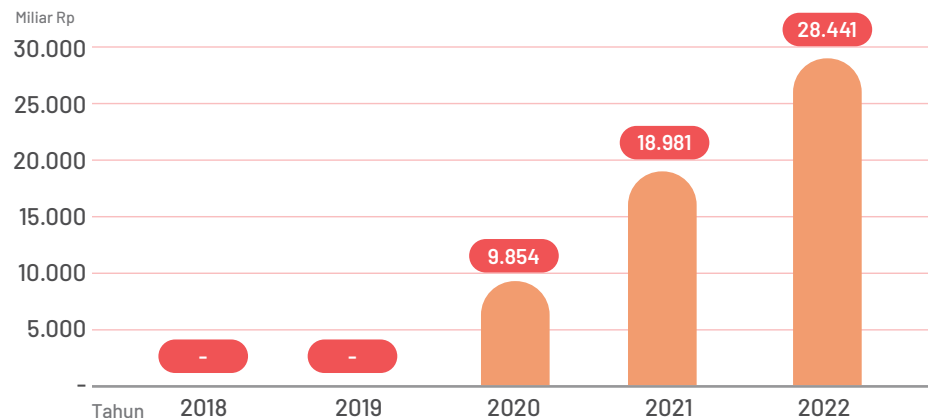


Seiring dengan kondisi perekonomian yang mulai membaik diikuti dengan pembiayaan syariah yang meningkat, perbaikan ekonomi juga berpengaruh baik kepada industri penjaminan.

Aset perusahaan penjaminan tumbuh rata-rata sebesar 40% selama lima tahun terakhir.

Selain karena perbaikan kondisi perekonomian, kenaikan aset tersebut juga disebabkan pada jumlah entitas penjaminan yang terus bertambah. Perusahaan penjaminan daerah mulai melirik pasar syariah karena permintaan masyarakat terhadap kegiatan penjaminan syariah mulai meningkat.

Aset PNM Syariah (UUS)

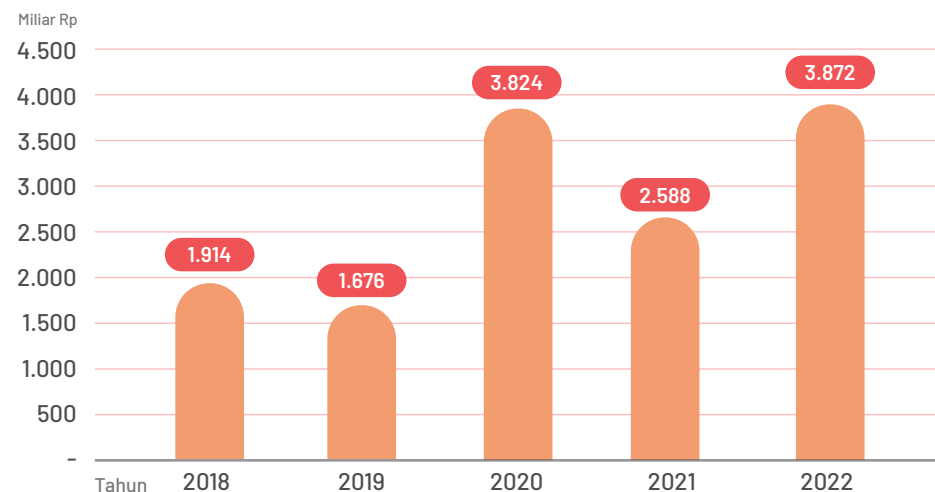


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

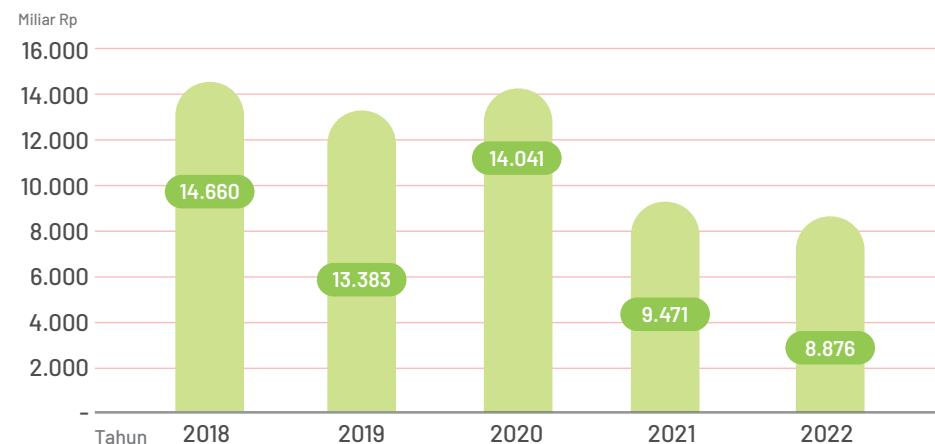
Aset PNM Syariah mengalami peningkatan sejak pembukaan UUS pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan sebesar 289%.

Adapun faktor yang menyebabkan peningkatan aset PNM Syariah dikarenakan terdapat peningkatan penyaluran pembiayaan, yaitu dari Ulamm dan Mekaar.

Aset Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah (UUS)

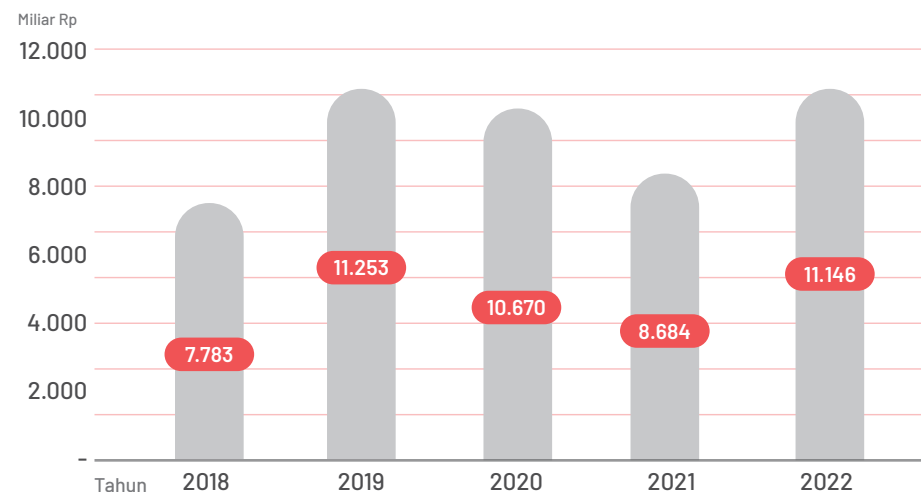


Aset LPEI Syariah (UUS)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Aset Perusahaan Pergadaian Syariah



Aset Lembaga Keuangan Syariah Khusus yang mengalami penurunan pada 5(lima) tahun terakhir adalah LPEI Syariah sebesar -11%, sedangkan untuk Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Syariah dan Perusahaan Pergadaian Syariah, masing-masing mengalami peningkatan rata-rata sebesar 33% dan 12%.



Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

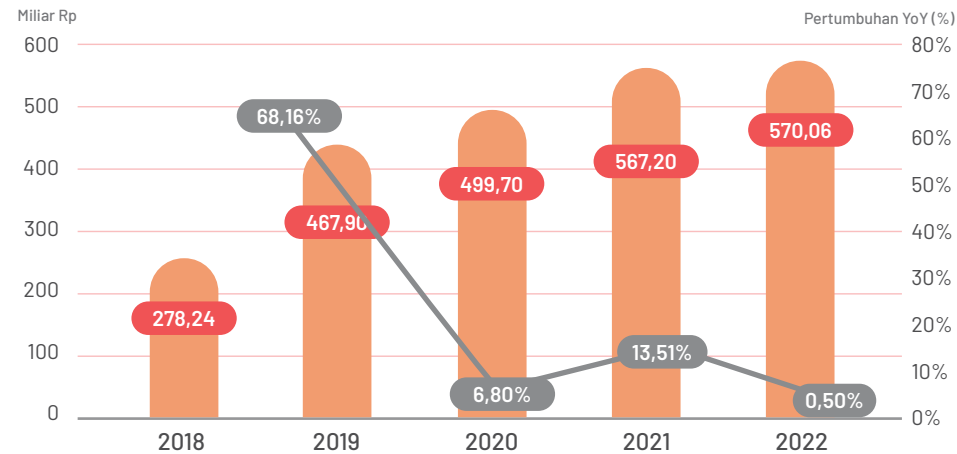
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui pembiayaan dengan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. LKMS memiliki peran aktif dalam mendukung pembiayaan mikro.

Pada posisi Desember 2022, jumlah LKMS mencapai 81 instansi atau 34% dari jumlah total industri LKM dengan nilai aset dan pembiayaan LKMS mencapai Rp570,06 miliar dan Rp246,58 miliar.

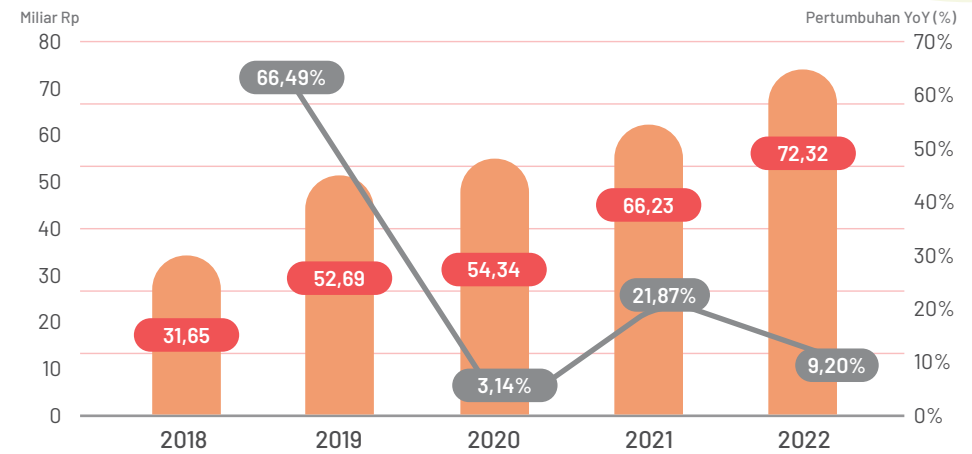
Pada tahun 2022, OJK telah menerbitkan 2 (dua) peraturan, yaitu SEOJK Nomor 2/SEOJK.05/2022 Tentang Akad yang Digunakan dalam Kegiatan Usaha dan Sumber Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Lembaga Keuangan Mikro yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (SEOJK 2 Tahun 2022) dan SEDK Nomor 2/SEDK.05/2022

Tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Keuangan Mikro (SEDK 2 Tahun 2022). Peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka mendukung penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan LKMS, dengan mempertimbangkan dinamika dan kondisi industri LKM, serta memperhatikan masukan dari seluruh *stakeholder*.

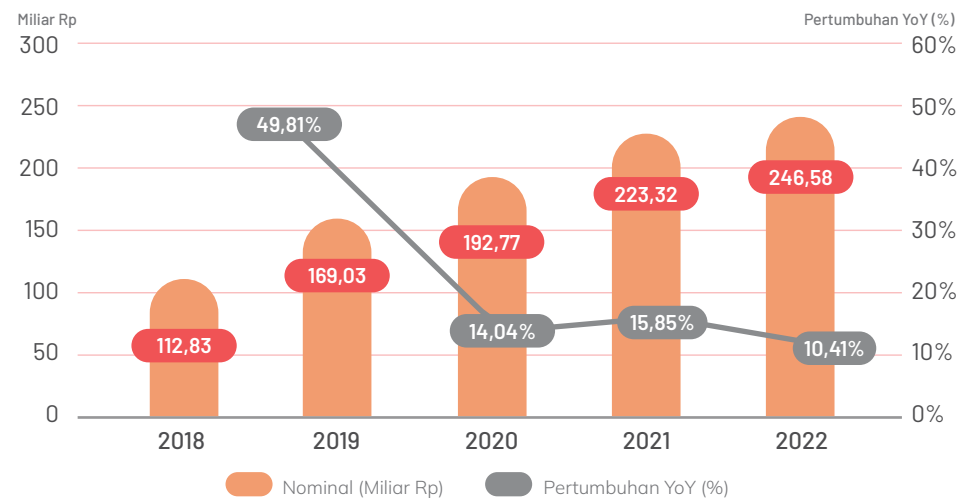
Perkembangan Aset LKMS



Perkembangan Simpanan LKMS



Perkembangan Pembiayaan LKMS



Dampak dan Kebijakan terkait COVID-19

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh OJK dalam hal mendukung keberlangsungan usaha dari nasabah LKM dan kinerja LKM, antara lain dengan penerbitan kebijakan restrukturisasi dan penilaian kualitas pembiayaan serta koordinasi untuk mendukung program pemberian bantuan sosial produktif terhadap nasabah LKM yang terdampak pandemi COVID-19. Relaksasi yang dilakukan pada tahun 2022 sebagai upaya penanganan dampak COVID-19 menunjukkan dampak positif pada aset dan pembiayaan LKMS yang naik sebesar 5,83% dan 11,89% (yoy).

Asosiasi LKM/LKMS Indonesia

Dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan usaha LKMS agar lebih efisien, efektif, dan inovatif, serta dapat mendukung koordinasi dengan *stakeholder* secara optimal dalam rangka pengawasan dan penyusunan kebijakan, pada tanggal 19 Desember 2022 telah dibentuk Asosiasi LKM/LKMS Indonesia (Aslindo). Aslindo sepakat mengusung misi menjadikan LKM/LKMS Indonesia sebagai lembaga keuangan mikro yang profesional, dinamis, aspiratif, inovatif, dan mandiri serta terdepan dalam sebuah forum kerjasama.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Perkembangan LKMS Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan LKMS yang bertujuan menyediakan akses permodalan melalui pembiayaan berbasis produktif untuk memberdayakan masyarakat sekitar pesantren yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan

Pada tahun 2022, jumlah entitas LKMS BWM sebanyak 62 BWM atau 76% dari jumlah total LKMS. LKMS BWM mengalami penurunan pembiayaan menjadi Rp12 miliar pada Desember 2022. Namun demikian, pada tahun 2022 terdapat beberapa pengembangan proses bisnis, produk, dan layanan LKMS BWM, antara lain:

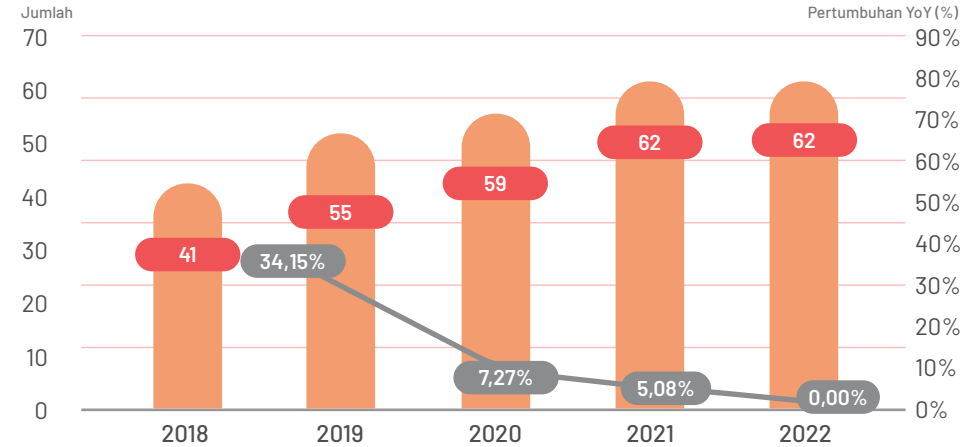
- Pengembangan proses bisnis berupa pengembangan kluster usaha peternakan dan pertanian, serta penempatan dana program BWM pada sukuk.
- Pengembangan ekosistem digitalisasi BWM yang mencakup fitur *virtual account*, kartu santri, penguatan data pada aplikasi *core system*, dan Laku Pandai.

formal dengan pola pendampingan. Sebagai LKMS, BWM menyalurkan pembiayaan tanpa agunan, *margin* 3% per tahun, dan dengan sistem tanggung renteng.

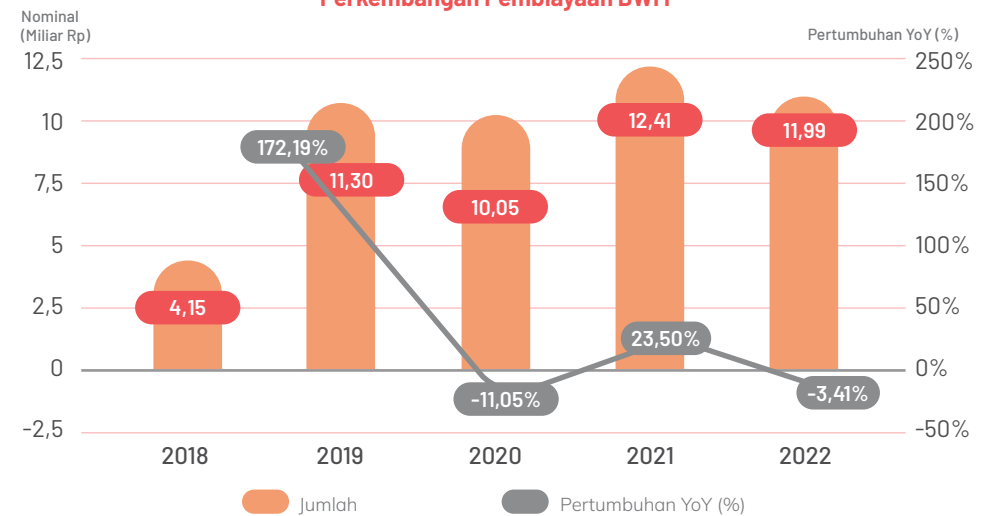
Terdapat kerjasama Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan 12 *pilot project* Bank Wakaf Mikro melalui produk BSI *Smart* dimana BWM sebagai agen Laku Pandai. Pada 5 Desember 2022, telah dilakukan Peluncuran Ekosistem Digital dengan Sinergi Pondok Pesantren dan Bank Syariah Indonesia melalui Laku Pandai pada 12 BWM dan program *virtual account* dengan 4 BWM.



Perkembangan Jumlah BWM



Perkembangan Pembiayaan BWM



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pengaturan IKNB Syariah Dampak dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan



UU Nomor 4 Tahun 2023



Peraturan OJK akan ditetapkan paling lambat TW II 2023



Perusahaan Asuransi*



Spin-off



Perusahaan Penjaminan*



Spin-off
atau
Permintaan Konsolidasi
Penjaminan oleh OJK

*Yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam POJK lanjutan

Penegasan Kebijakan Spin Off Unit Usaha Syariah

- Mengingat UU 40 Tahun 2014 dan UU No 4 Tahun 2023, OJK akan menetapkan peraturan lanjutan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang salah satunya memuat persyaratan bagi perusahaan asuransi dan reasuransi dan perusahaan penjaminan yang wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah (*spin off*). Adapun, Peraturan OJK mengenai perusahaan asuransi dan reasuransi, serta perusahaan penjaminan akan ditetapkan paling lambat pada TW II 2023.
- *Spin-off* atau konsolidasi merupakan upaya untuk memperkuat ekosistem syariah yang efektif, efisien, sehat, berdaya saing, serta memberikan daya dukung bagi perekonomian nasional.

Pengaturan terkait Pembiayaan Syariah

- Ketentuan pidana yang memuat *Restorative Justice*
Dengan diaturnya usaha jasa pembiayaan dalam UU P2SK, maka penyelenggara usaha jasa pembiayaan yang belum berizin di OJK wajib mengajukan izin usaha ke OJK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU P2SK diundangkan, termasuk kewajiban memperoleh izin usaha dari OJK
- Bentuk badan hukum
Perluasan bentuk badan hukum yang dapat melakukan kegiatan penyelenggara usaha jasa pembiayaan syariah dapat berbentuk koperasi

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/ POJK.05/2022

tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Latar Belakang

- UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan -> Kewenangan untuk mengatur LPEI
- Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Pengawasan LPEI -> Kebutuhan atas mekanisme penilaian tingkat kesehatan sebagai sarana bagi OJK dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan dan harmonisasi dengan ketentuan penilaian tingkat kesehatan IKNB
- Penyempurnaan POJK Eksisting-> POJK nomor 9/POJK.05/2022 tentang Pengawasan LPEI menggantikan POJK nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Perbedaan Struktur

Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum untuk mengatur tingkat Kesehatan LPEI sehingga telah disesuaikan beberapa pengaturan baru dengan penambahan Bab yang berkaitan dengan pendekatan tingkat

kesehatan LPEI. Selain itu, terdapat beberapa Bab pada POJK 40/2015, antara lain Bab V tentang Kualitas Aktiva, Bab VI tentang Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pembiayaan, Bab VII tentang BMPP, Bab VIII tentang Posisi Devisa Neto, Bab IX tentang Asuransi dan Penjaminan dan Bab X tentang Pelaporan telah disesuaikan menjadi Bab V tentang Penilaian Faktor Risiko.

Pokok Pengaturan Unit Usaha Syariah

1. Ketentuan Pembentukan UUS

- LPEI dapat menjalankan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah dengan membuka unit kerja khusus melalui pembentukan UUS
- Mengalokasikan modal tersendiri dan melakukan pembukuan secara terpisah
- Menunjuk dewan pengawas syariah dan pimpinan UUS

2. Penilaian Tingkat Kesehatan

- LPEI wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan UUS dengan menggunakan pendekatan Risiko secara individual
- Pendekatan secara individual dimaksud mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan UUS ditetapkan OJK
- Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat Kesehatan UUS memperoleh hasil penilaian faktor profil Risiko dengan peringkat 4 atau peringkat 5, LPEI wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan

3. Pelaporan

- Laporan Bulanan, laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik, dan laporan tahunan LPEI wajib memuat informasi mengenai UUS

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.05/2022

Tentang Perubahan atas POJK 4/ POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Latar Belakang

- Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder
- Dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dan perluasan kegiatan usaha PPSP
- Perubahan POJK Eksisting-> POJK nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan menjadi POJK nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pokok Pengaturan

1. Batas waktu penyampaian laporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang
 - Diperpanjang 5 (lima) hari kerja
2. Ketentuan struktur organisasi
 - Penambahan struktur organisasi pada fungsi kepatuhan sehubungan dengan implementasi risiko kepatuhan
3. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan UUS
 - Penambahan ketentuan tingkat kesehatan yang berlaku juga bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
4. Perluasan Kegiatan Usaha
 - Penyaluran Pinjaman dan/atau Penyaluran Pembiayaan untuk mendukung pembiayaan untuk keberlanjutan kepemilikan, kepemilikan, dan ketersediaan perumahan dan/atau permukiman
 - peningkatan kapasitas terhadap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembiayaan perumahan dan/atau permukiman
 - kegiatan usaha lain di bidang pembiayaan perumahan dan/atau permukiman untuk mendorong pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan sepanjang telah mendapat persetujuan Pemegang Saham
5. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
 - Mengacu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau pernyataan kesesuaian dengan prinsip syariah dari DSN MUI
 - Opini kesesuaian dengan prinsip syariah dari DPS atas penggunaan akad tertentu
6. Ketentuan Sekuritisasi
 - Penambahan ketentuan mengenai persyaratan aset yang dapat disekuritisasi



05

Financial Technology Syariah



Overview Fintech Syariah

Perkembangan teknologi disertai dengan perubahan kebiasaan masyarakat pascapandemi COVID-19, telah membangkitkan industri *Financial Technology (Fintech)* untuk terus berkembang. Beragam pilihan layanan dan produk industri *fintech* tanpa disadari telah merambah ke berbagai sektor.

Para pelaku *fintech* bersama dengan mitranya membentuk sebuah ekosistem keuangan yang memungkinkan konsumen untuk menikmati berbagai kemudahan dan manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, terdapat beberapa jenis industri *Fintech* Syariah di Indonesia, antara lain: *Fintech* Inovasi Keuangan Digital (IKD), *Fintech* Peer to Peer Lending (P2PL), dan *Fintech* Securities Crowdfunding (SCF).

10 Inovasi Keuangan Digital
(9 *full fledged* dan 1 *hybrid*)

7 Peer to Peer Lending Syariah

6 6 *Securities Crowdfunding*
(2 *full fledged* dan 4 Penerbit
saham syariah)

Indonesia memiliki potensi besar sebagai tempat perkembangan industri *fintech* syariah dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi ekonomi syariah sebesar Rp3 Triliun. Indonesia masuk dalam peringkat ke-2 destinasi wisata halal dunia 2022, Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah sebesar Rp3 Triliun dan menjadi peringkat ke-3 GIFT serta Indonesia merupakan pusat investasi syariah dan investasi hijau global.

238 Juta Muslim



Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa atau lebih dari 86% dari total penduduk Indonesia



Peringkat ke 3

Indonesia menempati peringkat ke-3 dalam *Global Islamic Fintech Report 2022* atau naik 1 peringkat di bandingkan pada tahun sebelumnya



Destinasi Wisata Halal

Indonesia merupakan Destinasi Wisata Halal ke-2 Dunia menurut standar *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022*



\$3T Ekonomi Syariah

Potensi ekonomi syariah Indonesia mencapai USD 3 triliun

Lebih lanjut, dengan adanya Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023 (UU No. 4/2023) yang disahkan oleh DPR tanggal 15 Desember 2022 dan disahkan Presiden pada tanggal 12 Januari 2023, pemerintah mengharapkan penyelenggara *Fintech* diharapkan dapat lebih leluasa dalam berkolaborasi dengan Industri Jasa

Keuangan dan membentuk ekosistem ekonomi syariah guna mewujudkan percepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023, OJK menyampaikan 3 (tiga) prioritas kebijakan dalam menjalankan mandat baru dalam UU P2SK.

3 Prioritas Kebijakan OJK



OJK akan melakukan sinergi dengan otoritas dan lembaga terkait dalam proses transisi untuk kewenangan yang baru dimandatkan serta mengharapkan keterlibatan aktif seluruh *stakeholders* dalam proses implementasinya.

Dengan optimalisasi peran sektor keuangan, OJK akan mendorong sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan minat investor terhadap instrumen investasi berkelanjutan dan hijau serta investasi syariah di Indonesia.

Indonesia Raih Peringkat-3 dalam *Global Islamic Fintech Index 2022*

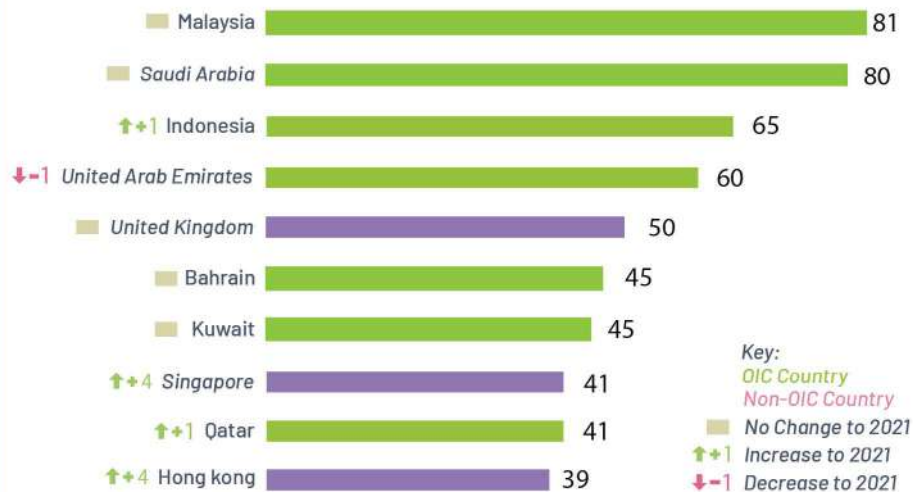
Dalam GIFT Indeks 2022, Indonesia menempati peringkat ke-3, meningkat satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan ekosistem yang siap untuk pertumbuhan *Fintech Syariah* dengan **pertumbuhan volume pembiayaan sebesar 130%+ year on year** sejak tahun 2020 hingga tahun 2021.

Pertumbuhan market size *Fintech Syariah* diperkirakan akan mencapai \$179 miliar pada tahun 2026 dengan *Compounded Annual Growth Rate* 17,9% dibandingkan dengan keseluruhan industri *Fintech* global. Selain itu, jumlah transaksi *fintech*

syariah di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari \$4.239,4 juta (2021) menjadi \$11.263,6 juta (2026) dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 21,6 persen.

Top 10 Countries by GIFT Index Scores



Global Islamic Fintech (GIFT) Index merupakan laporan yang menyajikan perbandingan negara-negara dengan ekosistem yang paling kondusif untuk perkembangan *Fintech Syariah* dengan

menggunakan 19 indikator dalam lima kategori yaitu *Talent*; *Regulasi*; *Infrastruktur*; *Pasar dan Ekosistem Fintech Syariah*; serta *Modal*.

Indikator Index Score GIFT 2022:

- 1 Talent:** Pekerjaan di layanan intensif pengetahuan, peringkat universitas
- 2 Regulasi:** Adanya regulasi *Fintech syariah*
- 3 Infrastruktur:** Penggunaan Teknologi Informasi, kredit domestik ke sektor swasta, kolaborasi universitas dengan industri
- 4 Pasar dan Ekosistem *Fintech Syariah*:** Jumlah *Fintech Syariah* di suatu negara dan jumlah lembaga keuangan syariah
- 5 Modal:** Jumlah bisnis baru dan jumlah permodalan

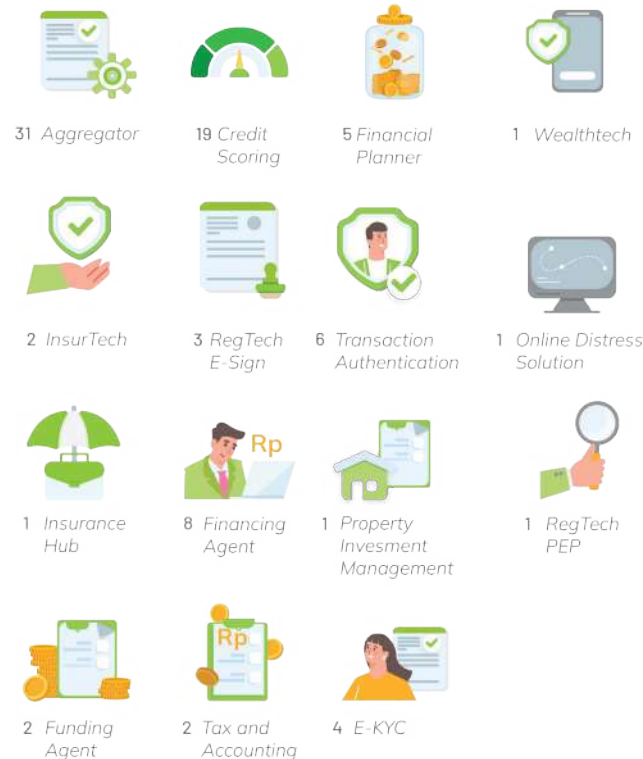
Perkembangan *Fintech* IKD Syariah

Inovasi Keuangan Digital (IKD) adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Penyelenggara IKD harus memenuhi 7 Kriteria IKD, yaitu:

1. Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan
2. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan
3. Mendukung inklusi dan literasi keuangan
4. Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas
5. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada
6. Menggunakan pendekatan kolaboratif
7. Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data

Inovasi Keuangan Digital



▲ 15 Cluster

Per 31 Desember 2022, OJK telah mencatatkan 98 Penyelenggara IKD yang masuk kedalam fase uji coba *regulatory sandbox*, terdiri dari 15 kluster model bisnis berbeda. Dari 98 penyelenggara tersebut, terdapat 10 Penyelenggara IKD berbasis syariah yang memiliki layanan/produk syariah yang tersebar ke beberapa kluster, diantaranya: *Aggregator, Funding Agent, Financing Agent, Insurtech* dan *Wealthtech*.

Perusahaan *Fintech*



Pada tahun 2022, jumlah penyelenggara Inovasi Keuangan Digital Syariah bertumbuh 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jumlah mitra menunjukkan kenaikan signifikan yaitu sebesar: 87% LJK, Fintech 160%, serta Penyelenggara Jasa Teknologi Informasi (PJTI) 11%.

Overview Financial Technology Syariah: Fintech Peer-to-Peer Lending

Industri Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Industri ini hadir di Indonesia sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi berbagai kalangan masyarakat.

Fintech P2P Lending Syariah tumbuh mengikuti kebutuhan pendanaan masyarakat mulai dari sektor UMKM, industri kreatif, properti, pembiayaan haji, konsumtif, dan sektor lainnya menggunakan bisnis model syariah.

Hingga akhir Desember 2022, terdapat 7 penyelenggara berdasarkan prinsip syariah atau 6,86% dari total sebanyak 102 penyelenggara Fintech P2P Lending. Sepanjang tahun 2022, jumlah penyelenggara Fintech P2P Lending berdasarkan prinsip syariah tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena OJK masih melakukan moratorium penerbitan izin usaha baru baik bagi penyelenggara Fintech P2P Lending konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Moratorium ini dilakukan untuk memberi waktu dalam menyempurnakan sistem pengawasan dan memastikan peningkatan kualitas industri Fintech P2P Lending.

Penyelenggara Fintech P2P Lending Berdasarkan Prinsip Syariah:



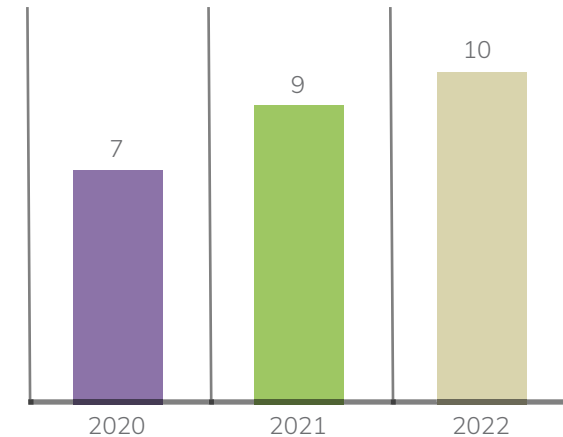
Kebijakan Strategis Fintech Syariah

POJK baru bagi Fintech P2P Lending:

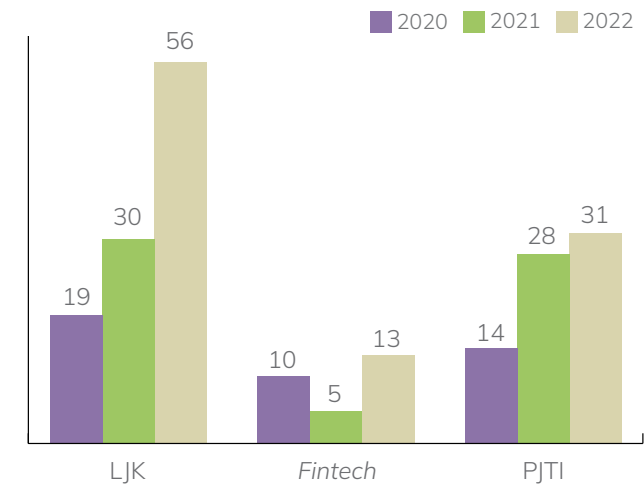
Pada tahun 2022, OJK menerbitkan POJK Nomor 10 / POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai pengganti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerbitan POJK 10/2022 tersebut salah satunya ditujukan untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan Fintech P2P Lending berdasarkan prinsip syariah yang sebelumnya

tidak diatur secara jelas pada POJK 77/2016. Adanya POJK 10/2022 juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Fintech P2P Lending syariah. Selain itu, OJK pada akhir 2022 juga telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2022 tentang Permohonan Perizinan, Permohonan Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Jumlah IKD Syariah

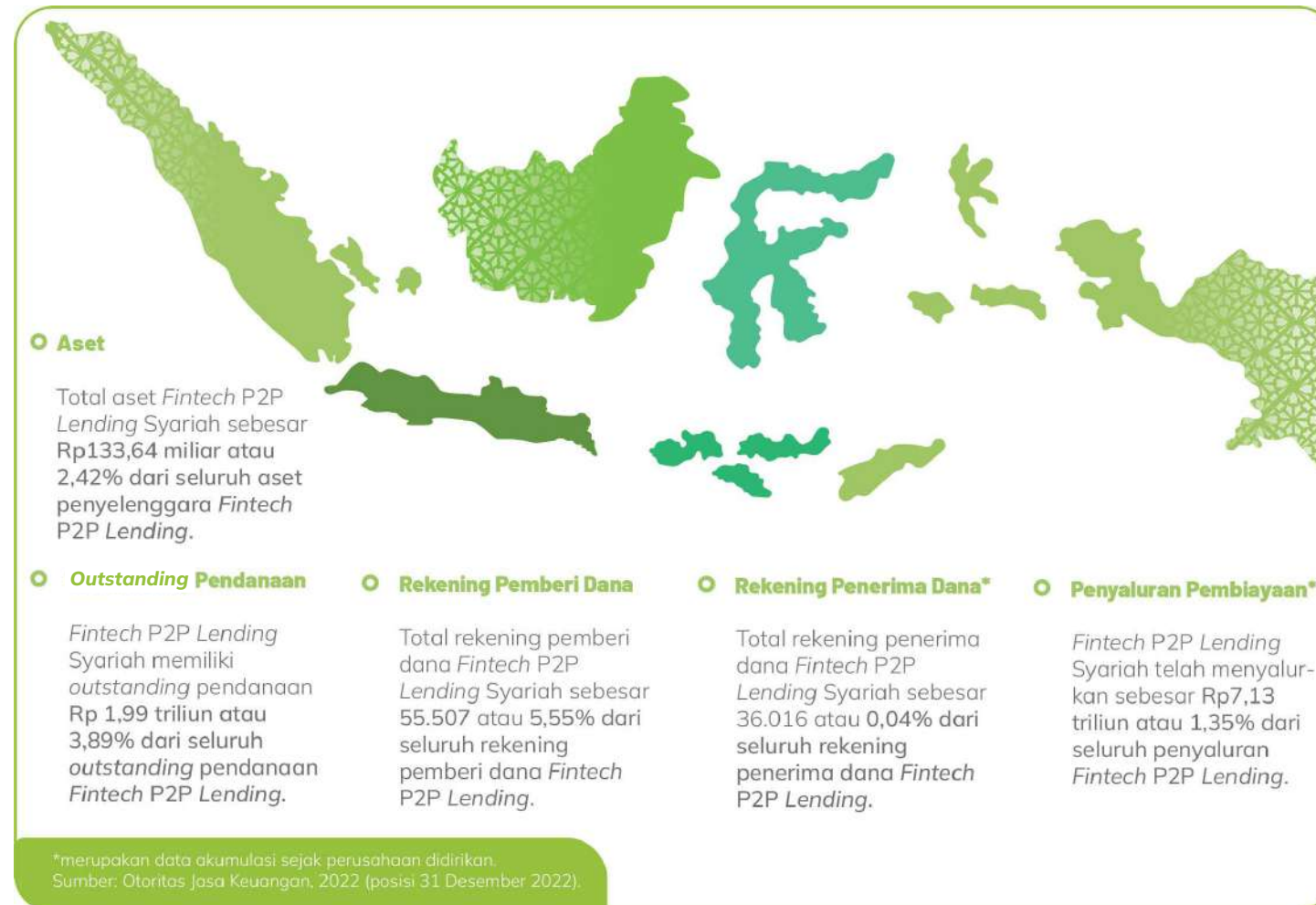


Jumlah Mitra



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Perkembangan *Fintech P2P Lending Syariah*



Kontribusi *P2P Lending Syariah* sampai dengan akhir tahun 2022 masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan seluruh industri, namun **potensi berkembangnya P2PL Syariah di masa yang akan datang sangat besar.**

Perkembangan *Fintech Securities Crowdfunding (SCF)*

Sebagai salah satu bentuk kolaborasi OJK dengan industri usaha kecil menengah di Indonesia dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, setelah sebelumnya telah diterbitkan POJK terkait layanan urun dana, pada tahun 2022 OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 3/SEOJK.04/2022 sebagai panduan pelaku dalam melakukan penerbitan efek

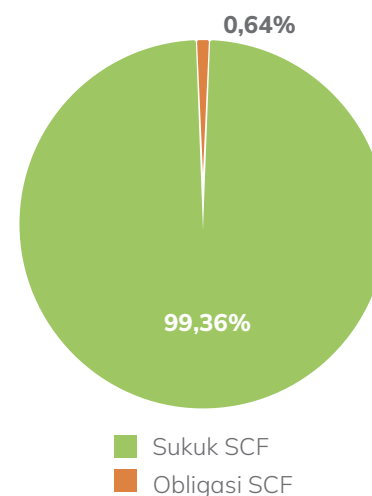
Pada akhir tahun 2022, sejumlah **85 penerbit** yang merupakan usaha kecil menengah telah menerbitkan sukuk melalui skema SCF dengan total **Rp167,52 miliar** serta **4 penerbit** yang telah menerbitkan saham syariah melalui skema SCF dengan total penghimpunan dana sebesar **Rp12,82 miliar**.

Tercatat dari 14 penyelenggara SCF telah terdapat 2 SCF yang berkegiatan berdasarkan prinsip syariah (*full fledged*), selain dari penyelenggara SCF *full fledged*

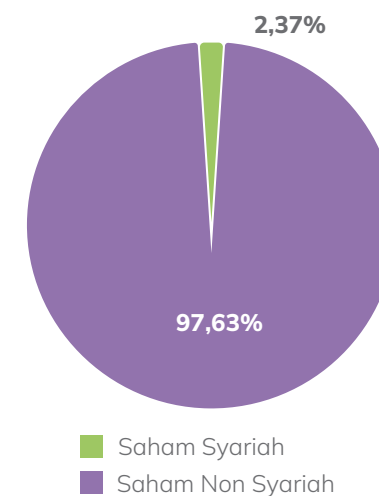
syariah melalui skema pembiayaan untuk UKM dengan menggunakan *Securities Crowdfunding (SCF)*. SCF telah memperoleh fatwa DSN-MUI terkait Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*).

tersebut, penyelenggara SCF secara umum tetap dimungkinkan menawarkan efek syariah berupa sukuk.

Proporsi Nilai Sukuk SCF



Proporsi Nilai Saham Syariah SCF



	Saham Syariah	Sukuk	Jumlah
Jumlah Penerbit	4	85	89
Nilai Efek Syariah (Rp Miliar)	12,82	167,52	180,34

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

06

Ekonomi Syariah



Overview Ekonomi Syariah

Kebijakan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi kebijakan nasional, yang diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan menjadi sumber pertumbuhan baru yang inklusif.

Hal ini dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem halal *value chain*, pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendorong pembiayaan syariah, serta penguatan riset, edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah.

Dalam menjalankan perannya sebagai regulator, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter, termasuk kebijakan moneter syariah untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan GWM Rupiah secara bertahap dengan tetap menjaga kondisi likuiditas dan kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan. Sementara itu, pada saat bersamaan kebijakan makroprudensial syariah diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*) melalui kebijakan pemberian insentif GWM Rupiah bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan ke sektor prioritas dan/atau memenuhi target RPIM.

Peran Bank Indonesia sebagai akselerator dan inisiator dijalankan melalui pengembangan ekosistem pada sektor prioritas ekonomi syariah, baik pada pelaku usaha pesantren maupun non-pesantren. Pengembangan ekosistem ini meliputi 5 sektor prioritas, yakni (i) pertanian terintegrasi, (ii) mamin halal, (iii) fesyen muslim, (iv) Energi Baru Terbarukan (EBT) dan (v) Pariwisata Ramah Muslim

(PRM), serta diarahkan agar dapat memperkuat rantai nilai dari hulu hingga hilir serta memastikan keterkaitan antar sektor. Prinsip pengembangan ekosistem dilakukan melalui proses *piloting* untuk mendapatkan model ekosistem yang utuh dan robust, untuk kemudian dapat direplikasi dan diimplementasikan secara nasional.

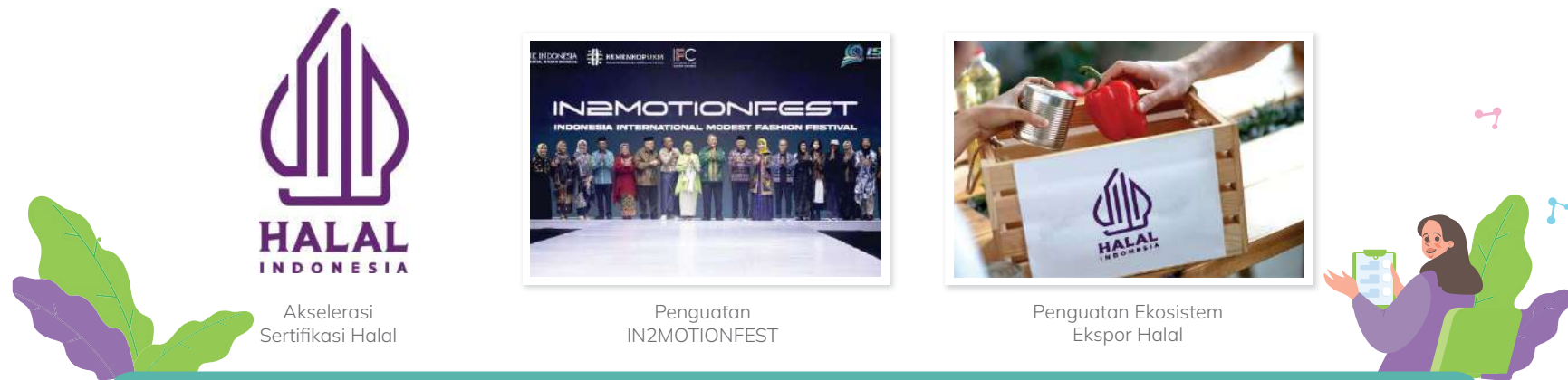
Lebih lanjut, Bank Indonesia juga terus mendorong literasi masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah, melalui penguatan riset dan asesmen ekonomi dan keuangan syariah serta berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi. Dari sisi riset dan asesmen, Bank Indonesia secara konsisten menerbitkan jurnal internasional ekonomi dan keuangan syariah, serta meningkatkan kualitas riset dan kajian untuk memperkuat formulasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Sementara itu, kegiatan edukasi dan sosialisasi dilaksanakan di tingkat daerah melalui Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2022 sebagai rangkaian kegiatan menjelang ISEF di tiga wilayah, yakni Makassar untuk wilayah Timur Indonesia, Aceh untuk wilayah Sumatera, dan Surabaya untuk wilayah Jawa. Sementara itu, pelaksanaan ISEF ke-9 diperkuat melalui penancangan program akselerasi ekonomi syariah nasional dan diselenggarakan dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), kementerian/ lembaga terkait, dan mitra strategis lainnya.

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan Sinergi KNEKS



Sinergi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Strategi Utama dan *Flagship* Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan dan Perkembangan Moneter Syariah

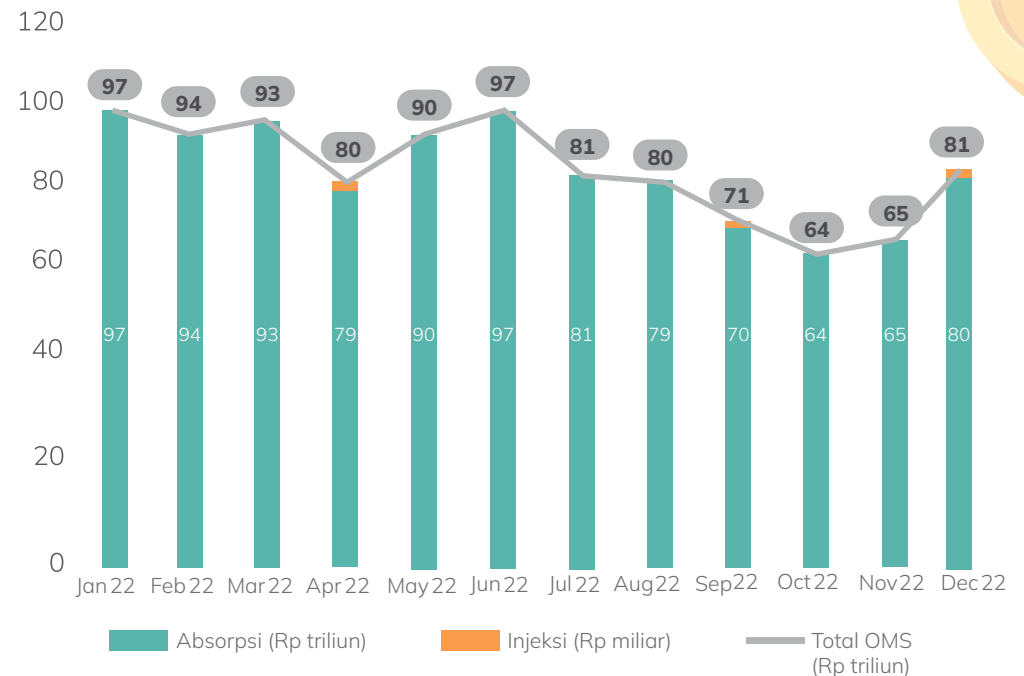
Kegiatan Operasi Moneter Syariah (OMS) sepanjang 2022 cenderung stabil dengan tren penurunan menjelang akhir tahun di tengah kondisi pandemi yang mulai mereda.

Penurunan kegiatan OMS rupiah utamanya dipengaruhi oleh penurunan excess likuiditas perbankan syariah seiring peningkatan permintaan pembiayaan ke sektor riil. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong penurunan penempatan perbankan syariah pada instrumen penyerapan likuiditas (absorpsi) seperti SukBI dan FASBIS. Kegiatan penambahan likuiditas (injeksi) OMS rupiah untuk pemenuhan likuiditas perbankan syariah tetap dilakukan melalui instrumen Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI) meskipun volumenya relatif kecil sepanjang tahun 2022. Di sisi

lain, dominasi instrumen OMS absorpsi mengindikasikan masih melimpahnya likuiditas perbankan syariah di tengah tren pengetatan likuiditas.

Kegiatan OMS pada tahun 2022 didominasi oleh instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI), yakni sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga telah menerbitkan instrumen SukBI inklusif sebesar Rp2 triliun pada bulan November dan Desember 2022.

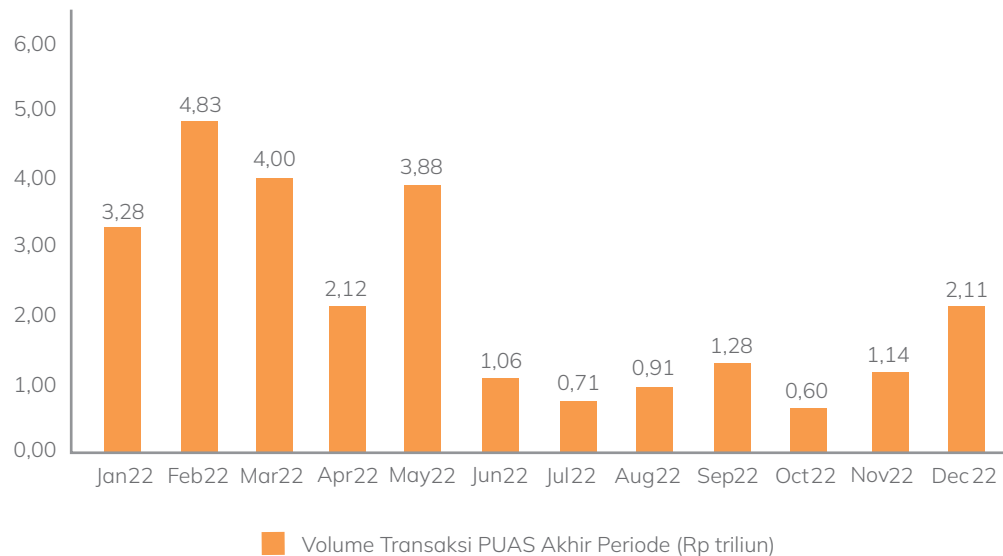
Perkembangan OMS Rupiah 2022 Berdasarkan Absorpsi dan Injeksi



Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

Kebijakan dan Perkembangan Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah

Perkembangan Transaksi PUAS



Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

Volume transaksi PUAS stabil dengan tren penurunan yang didorong oleh pengetatan likuiditas perbankan syariah.

Volume transaksi PUAS pada akhir periode Desember 2022 sebesar Rp2,11 triliun, menurun 35,6% dibandingkan akhir posisi Januari 2022 sebesar Rp3,28 triliun. Penurunan volume transaksi PUAS diperkirakan karena adanya pengetatan likuiditas perbankan syariah, sejalan dengan kenaikan BI7DRR dan normalisasi rasio Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah.

Dari sisi instrumen, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) masih mendominasi transaksi PUAS. Namun, sejak April 2022, beberapa bank syariah mulai melakukan transaksi Sertifikat

Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SiPA) sebagai alternatif transaksi keuangan yang bersifat *secured*. Transaksi SiPA oleh perbankan mengalami peningkatan sampai dengan akhir tahun seiring dengan bertambahnya bank syariah dan bank konvensional yang melakukan perjanjian kerja sama SiPA. Dari sisi tenor, volume PUAS pada tahun 2022 masih didominasi oleh tenor *overnight*, yang menggambarkan adanya kebutuhan likuiditas perbankan syariah yang mengarah pada kebutuhan jangka pendek.

Kebijakan dan Perkembangan Makroprudensial Syariah

Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial, termasuk kebijakan makroprudensial syariah, ikut mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pertama, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif berupa kebijakan RIM syariah dan PLM syariah. Bank Indonesia tetap mempertahankan target RIM syariah di kisaran 84% - 94% untuk mendukung fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta mempertahankan besaran PLM syariah sebesar 4,5% untuk memperkuat ketahanan likuiditas industri perbankan syariah.

Kedua, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) akomodatif, yakni mempertahankan rasio CCyB sebesar 0% sehingga tidak

terdapat kewajiban bagi bank untuk membentuk tambahan modal. Hal ini mempertimbangkan kondisi sistem keuangan yang tetap terjaga dan belum adanya indikasi pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan dan menimbulkan potensi sistemik.

Ketiga, Bank Indonesia melanjutkan pelonggaran rasio *Financing to Value* (FTV) untuk Pembiayaan Properti (PP) dan batasan Uang Muka untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan pelonggaran rasio FTV untuk PP menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti dan batasan uang muka untuk

PKB menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, yang semula berakhir pada 31 Desember 2022 diperpanjang menjadi 31 Desember 2023. Hal ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penyaluran pembiayaan perbankan kepada dunia usaha, khususnya di sektor properti dan otomotif.

Keempat, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan RPIM untuk mewujudkan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM dan Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) serta mendorong kontribusi bank secara optimal. Penyempurnaan ketentuan

RPIM meliputi kewajiban pemenuhan RPIM oleh bank dan penetapan target RPIM oleh bank berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dituangkan dalam rencana bisnis bank. Selain itu, penyempurnaan juga mencakup perluasan opsi bagi perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dan/atau PBR yang meliputi pembiayaan secara langsung dan rantai pasok, perluasan mitra penyaluran pembiayaan secara tidak langsung, dan perluasan opsi pembiayaan melalui Surat Berharga Pembiayaan Inklusif (SBPI).



Kelima, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif GWM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global maupun domestik. Kebijakan insentif bertujuan untuk mendorong intermediasi perbankan dengan fokus pada kegiatan ekonomi yang memiliki kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal ini diterapkan melalui pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah rata-rata diberikan kepada perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor prioritas dan/atau memenuhi target RPIM.

Sejak 1 September 2022, guna mendorong peranan perbankan termasuk perbankan syariah dalam pembiayaan kepada sektor prioritas, Bank Indonesia memperluas cakupan sektor prioritas yang sebelumnya mencakup 38 subsektor menjadi 46 subsektor serta meningkatkan besaran insentif dari yang semula maksimal sebesar 1% menjadi maksimal sebesar 2%.

Bauran Kebijakan Moneter dan Makroprudensial Syariah, Bank Indonesia



Kebijakan Moneter 2022 Pada Bank Syariah *Pro Stability*

1. Kenaikan GWM Rupiah BUS dan UUS:
 - 1) Juli 2022 menjadi 6%
 - 2) September 2022 menjadi 7,5%
2. Kenaikan BI7DRR

 Sumber: Bank Indonesia, diolah



Kebijakan Makroprudensial 2022 Pada Bank Syariah *Pro growth*

1. Penguatan kebijakan RPIM
2. Kebijakan insentif bagi bank syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada sektor prioritas dan inklusif
3. Penguatan kebijakan RIM dan PLM
4. Perpanjangan kebijakan relaksasi rasio *Financing to Value* (FTV) pembiayaan properti dan batas minimum uang muka pembiayaan kendaraan bermotor

Pengembangan Ekosistem *Halal Value Chain*

Bank Indonesia terus berkomitmen mendorong pemberdayaan ekonomi syariah melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal (*Halal Value Chain/HVC*) di lima sektor prioritas ekonomi syariah.

Berbagai program pengembangan ekosistem HVC menjadi bagian dari pelaksanaan program strategis Bank Indonesia yang bersinergi dengan KNEKS dan pihak lainnya. Program pengembangan ini dilakukan melalui penguatan kapasitas pelaku (baik pondok pesantren maupun non-pondok pesantren) dan model bisnis syariah, penguatan aspek kelembagaan, maupun penguatan infrastruktur pendukung, termasuk dukungan akselerasi proses sertifikasi halal.

Pada sektor pertanian, ekosistem telah terbangun lengkap, mulai dari aspek pelaku komunitas usaha Ponpes yang masif, didukung pendampingan penguatan kelembagaan dan SDI, pembangunan *distribution center* dan *center of excellence* (pusat kajian bersama), dukungan logistik dan jaringan, pasar *offline* dan *online*, salah satunya melalui *virtual market* seperti Alifmart Online (<https://alifmart.online>) dan *e-commerce* yang lain.

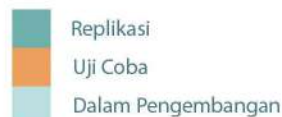
Sementara itu, penguatan sektor muslim fesyen serta sektor makanan dan minuman halal melalui penguatan program IKRA (Industri Kreatif Syariah) Indonesia. Pada tahun 2022, anggota IKRA yang berjumlah 669 pelaku usaha yang tersebar di 46 KPwDN dilibatkan dalam berbagai kegiatan di dalam dan luar negeri yang merupakan kolaborasi bersama K/L terkait. Kegiatan tersebut antara lain berupa berbagai *event* promosi perdagangan, *showcasing* produk pelaku usaha syariah, hingga *business meeting/matching* baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM), seiring dengan momentum peningkatan aktivitas pariwisata, Bank Indonesia bekerja sama dengan *Enhaili Halal Tourism Center* Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung melakukan riset terhadap kajian model bisnis PRM. Hasil dari kajian mencakup rekomendasi rencana uji coba model bisnis pengembangan pariwisata ramah muslim di Sumatera Barat.



Adapun pada sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pada tahun 2022 dilakukan melalui penguatan pelaku usaha syariah berbasis masjid melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Pemanfaatan PLTS Atap yang dikemas dalam program “Masjid Hijau Bank Indonesia” berdampak positif terhadap kegiatan ekonomi berbasis masjid melalui penghematan biaya operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan karena tidak akan menghasilkan emisi CO2 yang dapat menyebabkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Program Masjid Hijau Bank Indonesia pada tahun 2022 diimplementasikan di 12 (dua belas) masjid *beneficiaries*.

Di samping pengembangan yang bersifat model bisnis sektoral, untuk mendukung fondasi ekosistem HVC yang mulai terbentuk, Bank Indonesia juga memberikan dukungan bagi akselerasi sertifikasi halal melalui kolaborasi bersama berbagai pihak. Salah satu bentuk dukungan tersebut ialah program Sertifikasi Makanan dan Minuman Halal (SKALA) yang berkolaborasi dengan Asosiasi, Perguruan Tinggi dan K/L lainnya untuk mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya segmen Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi mendirikan kantin halal untuk mendukung program KNEKS yaitu Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman dan Sehat), yakni kawasan kuliner halal yang diharapkan mampu memberikan pelayanan dan jaminan kehalalan dan kualitas produk makanan dan minuman. Hal ini merupakan bentuk dukungan Bank Indonesia bagi program strategis KNEKS dan BPJPH dalam upaya meningkatkan tingkat sertifikasi halal nasional.



INDONESIA SEBAGAI PUSAT INDUSTRI HALAL DUNIA

- Peningkatan Kontribusi Eksyar terhadap Perekonomian Nasional
- Pemberdayaan dan Pengembangan Eksyar

Sektor Unggulan HVC

Dynamic Halal Value Chain

- Bahan Baku
- Proses
- Dist & Log
- Prod & Agregator
- Konsumen

Kelembagaan

Pertanian Terintegrasi	Mamin Halal	EBT	Fesyen Muslim	PRM
- Infratani - Juara Ekspor - Desa Berdikari	- IKRA INDONESIA - Rumpi - Desa Berdikari	- IKRA INDONESIA - Rumpi - Desa Berdikari - Kupas Talas	- Perlu - Perlu Desa Berdikari - Masjid Hijau	- SMART (Aceh, KotaTua) - Kerangka Ekosistem SMART MFT HUB (Kajian Selesai)
- Hebitren - Koperasi Juara Ekspor - Dasyarmas (PBNU, PP Muhammadiyah, MES, DMI, Bakomubin, Hidayatullah, dll)	- Koperasi IKRA Indonesia - PPUMI, PP Salimah, Persami, Bunda Wakaf, Shaliza, dll - PSPI, IHLC, MES, ISYEF, BPMI, APRINDO	- Koperasi IKRA Indonesia - PPUMI, PP Salimah, Persami, Bunda Wakaf, Shaliza, dll - IFC, IHLC, MES, ISYEF, BPMI, APRINDO	Uji Coba Koperasi /BMT Yogyakarta	Persiapan <i>piloting</i> kelembagaan Pokdarwis SUMBAR

Ekosistem Ekspor Halal

Infrastruktur Pendukung

GLOBAL HALAL HUB

(Pengembangan Produk-Pelaku Usaha-Sistem Berstandar Global)-Local To Global Value Chain

- Standarisasi dan Sertifikasi - Outlet/Pasar-Online/Offline - Pembiayaan - Logistik (Gudang, Transportasi, dll) - Sistem dan Digitalisasi	Rumah Kemas (HACCP, dll) ISEF-FESYAR-VM-Modern Market LPDB, KUR Syariah, Wakaf Produktif PINTER, Kolaborasi KL iOT, SuperApps, VM	SKALA ISEF-FESYAR-VM-Modern Market, I2HF, dll LPDB, KUR Syariah, Wakaf Produktif, Bank Syariah PINTER, (Rumah Kemas) VM, Website IKRA Indonesia, ETS (TL)	Fasilitas Standar Profesi Desainer ISEF-FESYAR-VM-Modern Market, I2HF, MUFFES, IN2MOTIONFEST, dll LPDB, KUR Syariah, Wakaf Produktif, Bank Syariah Dalam Penjajakan-Shipper VM, Website IKRA Indonesia	Dalam Proses Pengembangan Ekosistem -(Koord. ESDM-KLH)	Dalam Proses diselaraskan dengan sekber Pariwisata Nasional
--	--	--	---	--	---

Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Syariah Pesantren dan Non-Pesantren



07

Islamic
Financial
Awareness



Overview Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Keuangan Syariah

Sampai dengan periode Desember 2022, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan KNEKS telah melaksanakan serta mendukung berbagai kegiatan edukasi di bidang perbankan syariah, pasar modal syariah, IKNB syariah kepada masyarakat berupa penyuluhan dan publikasi digital dengan capaian kegiatan.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan meliputi kegiatan secara daring maupun luring, antara lain seminar, *Training of Trainers* (ToT), Webinar, *Workshop*, *Podcast*, *Talkshow Radio*, publikasi digital maupun melalui media sosial.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi telah bersinergi dengan lembaga maupun kementerian terkait pengembangan keuangan syariah. *Stakeholders* terkait antara lain DSN-MUI, Baznas, Bursa Efek Indonesia (BEI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), BP Tapera, perguruan tinggi, asosiasi pelaku dan profesi pasar modal, komunitas akademisi, serta lembaga lainnya.

Tujuan dari kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan umumnya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan memperdalam pemahaman masyarakat, pelaku industri, praktisi, hingga akademisi mengenai ekonomi dan keuangan syariah serta perkembangannya di Indonesia. Diharapkan dari berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan, terdapat peningkatan tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Sosialisasi dan Seminar Nasional IKNB Syariah 2022

Counterpart	Tema	Bentuk Kegiatan	Tanggal
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	"Mengenal Lebih Dekat Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia"	Sosialisasi IKNB Syariah dengan <i>Civitas Akademika</i> Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto secara virtual	31 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Kupang	"Mengenal Lebih Dekat Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia"	Sosialisasi IKNB Syariah dengan <i>Civitas Akademika</i> Universitas Muhammadiyah Kupang secara virtual	30 Juni 2022
Universitas Syiah Kuala Aceh	"Mengenal Lebih Dekat Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia"	Sosialisasi IKNB Syariah dengan <i>Civitas Akademika</i> Universitas Syiah Kuala Aceh	16 Agustus 2022
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin	"Mengenal Lebih Dekat Industri Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia"	Sosialisasi IKNB Syariah dengan <i>Civitas Akademika</i> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin secara virtual	26 September 2022
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	<i>Training Of Community</i> Bidang Asuransi Syariah dan Pembiayaan Syariah	Sosialisasi Asuransi Syariah dan Pembiayaan Syariah dengan <i>Civitas Akademika</i> Universitas Pendidikan Indonesia Bandung secara <i>offline</i>	18 Oktober 2022



Tema	Bentuk Kegiatan	Tanggal
Sosialisasi Asuransi Mikro 'Mari Kita ber-Asuransi Mikro'	Sosialisasi IKNB Syariah dengan Civitas Akademika Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto secara virtual	23 Maret 2022
Sosialisasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah 'Menyiapkan Program Pensiun yang Bermanfaat dan Penuh Berkah Bagi Diri dan Keluarga'	Sosialisasi IKNB Syariah dengan Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Kupang secara virtual	17 Februari 2022
Sosialisasi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Syariah	Sosialisasi IKNB Syariah dengan Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala Aceh secara virtual	12 Juni 2022



Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

KNEKS Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Live on Zoom & Youtube KNEKS

Webinar Sosialisasi & Edukasi Pasar Modal Syariah

Keynote Speech

Dr. Taufik Hidayat
Direktur Jasa Keuangan Syariah KNEKS

Dr. H. Surahman Amin, Lc., M.A.
Ketua IAIN Sorong

Narasumber

Doddy Prasetya Ardians
Ketua Unit Pengembangan Bisnis Syariah, Divisi Pasar Modal Syariah, PT Bursa Efek Indonesia

Ah. Azharuddin Latif, M.Ag., M.H.
Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi & Litbang DOK Multi-institusi

Dr. Hamzah, M.Ag.
Ketua IAIN Sorong

Moderator: Bazari Azhar Azizi
Analis Kebijakan Pasar Modal Syariah, Direktorat Jasa Keuangan Syariah-KNEKS

Selasa, **16** Agustus 2022

Pukul: **13.30 – 16.00 WIT**
(11.30 – 14.00 WIB)

<https://bit.ly/Webinarpms2022>

@kneks_id @kneks_id @kneks_id @kneks_id

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong menyelenggarakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Syariah dengan tema “Produk dan Investasi di Pasar Modal Syariah” pada 16 Agustus 2022. Acara ini bertujuan meningkatkan

pemahaman dan memperdalam pasar modal syariah di Indonesia, khususnya di kalangan perguruan tinggi dan mendorong pengembangan materi perkuliahan, baik modul mata kuliah, konsentrasi pasar modal syariah, serta media praktik berupa galeri investasi di perguruan tinggi yang sudah mempunyai program studi ekonomi dan keuangan syariah.

Tapi...Kenapa Perlu INVESTASI ?

- TUJUAN
- TIME FRAME
- KEBUTUHAN
- TARGET
- STRATEGI
- ALOKASI DANA
- TIMING
- KARAKTER DIRI

linistree/idxislamic | <https://idxislamic.idx.co.id>

IDX ISLAMIC

Launching Video Edukasi dan Sejarah Pasar Modal Syariah

Pada akhir tahun 2021, OJK bekerja sama dengan MES telah menyelesaikan produksi 13 video edukasi pasar modal syariah dan 8 video sejarah pasar modal syariah. Video tersebut dibuat sebagai bahan ajar pendukung modul pasar modal syariah serta untuk mempermudah masyarakat dalam mengenal pasar modal syariah secara lebih mendalam.

Pada 12 April 2022, kerja sama tersebut dilanjutkan dengan kegiatan *Launching* Video Edukasi Pasar Modal Syariah dan Video Sejarah Pasar Modal Syariah. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dengan menghadirkan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Bapak Hoesen, sebagai *keynote speech* dalam kegiatan tersebut.

Peserta kegiatan *launching* tersebut mencapai lebih dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan baik akademisi, profesional, maupun masyarakat umum.



▲ Peluncuran Video Edukasi dan Video Sejarah Pasar Modal Syariah, *Talkshow* "25 Tahun Perjalanan Pasar Modal Syariah" – 12 April 2022

Roadshow Pasar Modal Syariah Go International

Pada tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan kegiatan *Roadshow Pasar Modal Syariah Go International*.

Roadshow Pasar Modal Syariah Go International merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan mengenalkan Pasar Modal Syariah di Indonesia kepada dunia sebagai pilihan investasi masyarakat diaspora Indonesia.



▲ Roadshow Pasar Modal Syariah Go International dengan Diaspora Turki - 18 Juni 2022



▲ Roadshow Pasar Modal Syariah Go International dengan Diaspora Prancis - 15 Oktober 2022

Edukasi Keuangan Syariah

Pada tahun 2022, OJK telah menyelenggarakan 406 (empat ratus enam) kegiatan edukasi keuangan syariah baik secara *online*, *offline* maupun *hybrid* dalam bentuk edukasi masif, edukasi komunitas, pameran/expo dan *talkshow* radio.

Target penerima program kegiatan edukasi keuangan syariah tersebut ditujukan kepada beberapa komunitas seperti UMKM, perempuan, karyawan, pelajar, mahasiswa dan pemuda serta masyarakat umum, baik secara nasional maupun di beberapa wilayah di Indonesia.

Rangkaian kegiatan edukasi keuangan syariah tersebut telah menjangkau **4.931.941 peserta**.



Kegiatan edukasi secara *online*, *offline* dan *hybrid*

iB Vaganza

Gebyar Safari Ramadhan (GSR)

Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH)

Talkshow Radio Nusantara

Digitalisasi

LMS Edukasi Keuangan

Media Sosial Sikapi Uangmu

Edukasi Sukuk Negara Melalui Launching SBSN Ritel 2022

Pada tahun 2022, Pemerintah melaksanakan penerbitan SBSN Ritel sebanyak 4 kali sepanjang tahun.

Dimulai pada bulan Februari, Pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel seri SR016, kemudian pada pertengahan bulan April menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) seri SWR004. Kemudian pada Bulan Agustus bertepatan dengan menyambut semangat kemerdekaan Pemerintah menerbitkan Sukuk Ritel seri SR017 yang kemudian pada bulan November menerbitkan Sukuk Tabungan seri ST009.

Penerbitan seluruhnya dilakukan secara *online* melalui platform e-SBN di 33 Mitra Distribusi, terdiri dari Bank Syariah, Bank Konvensional, Perusahaan Efek Khusus, Perusahaan Efek, dan *Fintech*.



iB Vaganza

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya keuangan syariah, telah diselenggarakan kegiatan pameran tahunan terkait pengenalan produk/layanan jasa keuangan syariah (iB Vaganza) yang disinergikan bersama puncak perayaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022.

iB Vaganza terdiri dari edukasi keuangan syariah, pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah, serta akuisisi pembukaan rekening/polis/produk keuangan syariah lainnya.

Terdapat 20 perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah yang berpartisipasi pada Kegiatan iB Vaganza Tahun 2022 dengan membuka booth di *island* syariah (Mall Central Park Jakarta Lantai LG), yaitu terdiri dari Bank Syariah Indonesia, BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, Bank BJB Syariah, BTPN Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Aladin, UUS Sinarmas, UUS BTN, UUS Danamon, UUS Maybank, UUS Bank Jago, UUS BPD Jatim, Asuransi Jasindo Syariah, Askrindo Syariah, Pegadaian Syariah, dan BPRS Harta Insan Karimah.



PUJK syariah lainnya bergabung bersama dengan bank induk dan menempati area pameran PUJK konvensional seperti Bank Aceh, UUS Bank Permata, UUS BPD DKI, UUS Bank CIMB Niaga, dan Prudential Syariah.

Kegiatan edukasi keuangan syariah dalam penyelenggaraan iB Vaganza merupakan perpaduan antara pameran produk/layanan keuangan syariah, edukasi keuangan syariah dengan konsep *edutainment* yang dilakukan di mini stage area PUJK syariah atau area lainnya.

Sepanjang pelaksanaan iB Vaganza di BIK FinExpo 2022 pada periode tanggal 26 Oktober s.d. 30 Oktober 2022, telah dilakukan fasilitasi pembukaan rekening (inklusi keuangan) oleh PUJK Syariah dengan rincian capaian sebagai berikut:

- Memfasilitasi layanan pembukaan rekening di bank syariah sebanyak 158 rekening dengan nominal mencapai **Rp2.180.200.000,-**
- Memfasilitasi layanan transaksi keuangan sebanyak 111 transaksi dengan nominal mencapai **Rp2.124.050.000,-**

Gebyar Safari Ramadhan (GSR)

Gebyar Safari Ramadhan (GSR) merupakan rangkaian program literasi dan edukasi keuangan syariah selama bulan Ramadhan bekerja sama dengan *stakeholders* terkait dan PUJK di Sektor Jasa Keuangan syariah.

Pada rangkaian kegiatan Gebyar Safari Ramadhan 1443 H tahun 2022, telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan Webinar Edukasi Keuangan Syariah serta 3 (tiga) Kontes Keuangan Syariah di bulan Ramadhan (KURMA) dengan 3 kategori, yaitu Olimpiade Cerdas Cermat Keuangan Syariah, Lomba *Tiktok Vlog*, dan Lomba *Caption Reels*.

Olimpiade Cerdas Cermat Keuangan Syariah Tahun 2022 diselenggarakan secara *online*. Setiap tim yang berpartisipasi pada Olimpiade CCKS Tahun 2022 terdiri dari 2 (dua) orang siswa/i aktif tingkat SMP dan SMA sederajat se-Indonesia yang telah lolos seleksi dan mewakili wilayah kerja masing-masing KR/KOJK.

Gebyar Ramadhan Nusantara (GRN) merupakan kegiatan edukasi keuangan syariah yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK di seluruh Indonesia sebagai penutup rangkaian Gebyar Safari Ramadhan pada bulan Ramadhan 1443 H.



Terdapat 91 kegiatan Gebyar Safari Ramadhan yang terdiri dari webinar edukasi keuangan syariah, pelaksanaan edukasi keuangan syariah tatap muka, *talkshow* di radio dan televisi, *IG live*, berbagai jenis perlombaan dan lainnya.



Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan



Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan merupakan suatu sistem pembelajaran dan pelatihan terintegrasi yang menjadi pusat penghubung untuk pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan dalam mempelajari materi literasi keuangan secara mandiri berbasis teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait literasi keuangan syariah serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi literasi keuangan syariah melalui LMS, pada

tahun 2022 OJK telah mengembangkan fitur LMS Edukasi Keuangan dan menyusun modul Keuangan Syariah tingkat *basic* dan *intermediate* dan telah di luncurkan pada tanggal 29 Oktober 2022.

Sampai dengan 31 Desember 2022, modul Keuangan Syariah tingkat *basic* dan *intermediate* memiliki total akses masing-masing sebanyak 161 dan 110 kali akses, dengan jumlah sertifikat yang telah diterbitkan yaitu masing-masing sebanyak 124 (2% dari total sertifikat) dan 98 (2% dari total sertifikat).

LMS Edukasi Keuangan dapat diakses melalui link: lmsku.ojk.go.id



Adapun *outline* modul Keuangan Syariah adalah sebagai berikut :

Basic	Intermediate
1. Pengenalan keuangan syariah dan <i>fikih muamalah</i>	1. Hal-hal yang dilarang dalam keuangan syariah (lanjutan): Riba, <i>Gharar</i> , <i>Maysir</i> dan hal-hal yang dilarang lainnya
2. Tujuan keuangan syariah (<i>maqashid syariah</i>)	2. Akad-akad dasar dalam keuangan syariah: Pola titipan, Pola pinjaman, Pola bagi hasil, Pola jual beli, Pola sewa, Pola jasa
3. Sumber hukum <i>fikih muamalah</i>	3. Multi akad / <i>multi-contracts</i>
4. Konsep uang dan harta dalam pandangan syariah	4. Mengenal dana sosial pada keuangan syariah
5. Hal-hal yang dilarang dalam keuangan syariah	5. Akad-akad dasar Fatwa DSN-MUI dan implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah
6. Pengenalan akad dalam keuangan syariah	
7. Perbedaan keuangan syariah dan konvensional	
8. Contoh produk dan layanan keuangan syariah	



Kegiatan Edukasi Melalui *Talkshow* Radio Nusantara

Talkshow Radio Nusantara di 37 radio di seluruh Indonesia dalam rangka memperluas sasaran kegiatan edukasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, dengan tema

“Investasi Halal di Pasar Modal Syariah” pada tanggal 4-6 Oktober 2022 bersama narasumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK. Total pendengar pada kegiatan tersebut sebanyak 4.695.150 orang.

Edukasi Keuangan Syariah Melalui Konten Media Sosial Sikapiuangmu

Edukasi melalui media sosial menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Pada tahun 2022, terdapat 74 konten keuangan syariah baik berupa artikel maupun non artikel yang dipublikasikan melalui *minisite* dan media sosial Sikapiuangmu baik pada *Instagram*, *Twitter*, *Facebook* dan *Tiktok* dengan total pengunjung sebanyak 374.819 orang.

Evaluasi Kegiatan Edukasi Keuangan Syariah

OJK melakukan evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan edukasi keuangan syariah melalui *pre-test* dan *post-test* dengan mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan edukasi. Pemahaman peserta kegiatan edukasi keuangan syariah tahun 2022 meningkat dari rata-rata nilai *pre-test* sebesar 54,22% dan *post-test* sebesar 76,65%.

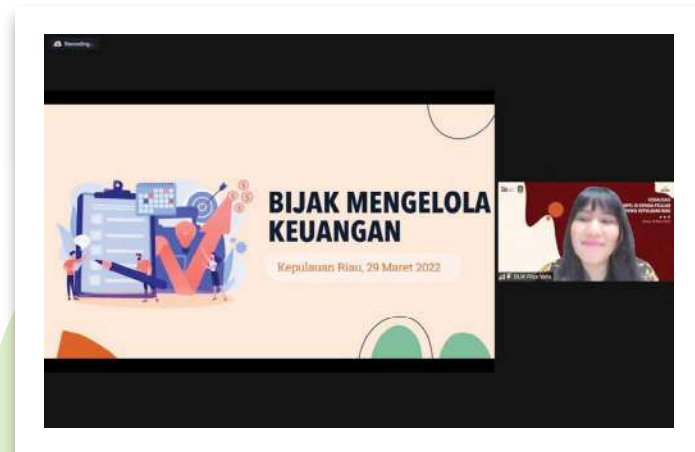
Sosialisasi SimPel iB kepada Pelajar di Kepulauan Riau

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang ditujukan bagi pelajar sejak PAUD hingga SMA ini diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Sebagai upaya menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya budaya menabung dan dalam rangka mendukung akselerasi Program SimPel iB, diselenggarakan kegiatan sosialisasi SimPel iB secara *virtual* bagi para siswa/i SD/SMP/SMA sederajat bekerja sama dengan bank peserta SimPel/SimPel iB yaitu Bank Riau Kepri Syariah.

Pada tahun 2022, terdapat pembukaan rekening SimPel iB sebanyak 516.874 rekening dengan jumlah nominal mencapai Rp93.756.665.663,-

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Rabu, 29 Maret 2022 dengan melibatkan 4 sekolah yaitu SMPN 1 Batam, SMPN 2 Batam, SMAN 5 Batam, dan SMK Teladan Batam. Kegiatan sosialisasi tidak hanya memberikan edukasi mengenai pentingnya menabung bagi para siswa/i, tetapi juga disertai dengan memfasilitasi pembukaan rekening SimPel dari Bank Riau Kepri Syariah secara langsung bagi 250 siswa/i yang mengikuti kegiatan sosialisasi. Sebagai bentuk apresiasi kepada peserta, OJK memberikan penambahan saldo ke rekening peserta masing-masing sebesar Rp100.000,-.





Webinar *Outlook* Industri Keuangan Syariah Indonesia 2022

Dalam rangka menyambut tahun 2022, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan Webinar *Outlook* Industri Keuangan Syariah Indonesia 2022 dengan tema **"Pengembangan Industri Keuangan Syariah yang Kuat, Inovatif, dan Berkelanjutan."**

Webinar ini diadakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perkembangan dan dinamika industri jasa keuangan syariah di Indonesia selama tahun 2021 dan memberikan pencerahan terhadap prospek dan arah perkembangan industri jasa keuangan syariah di Indonesia pada tahun

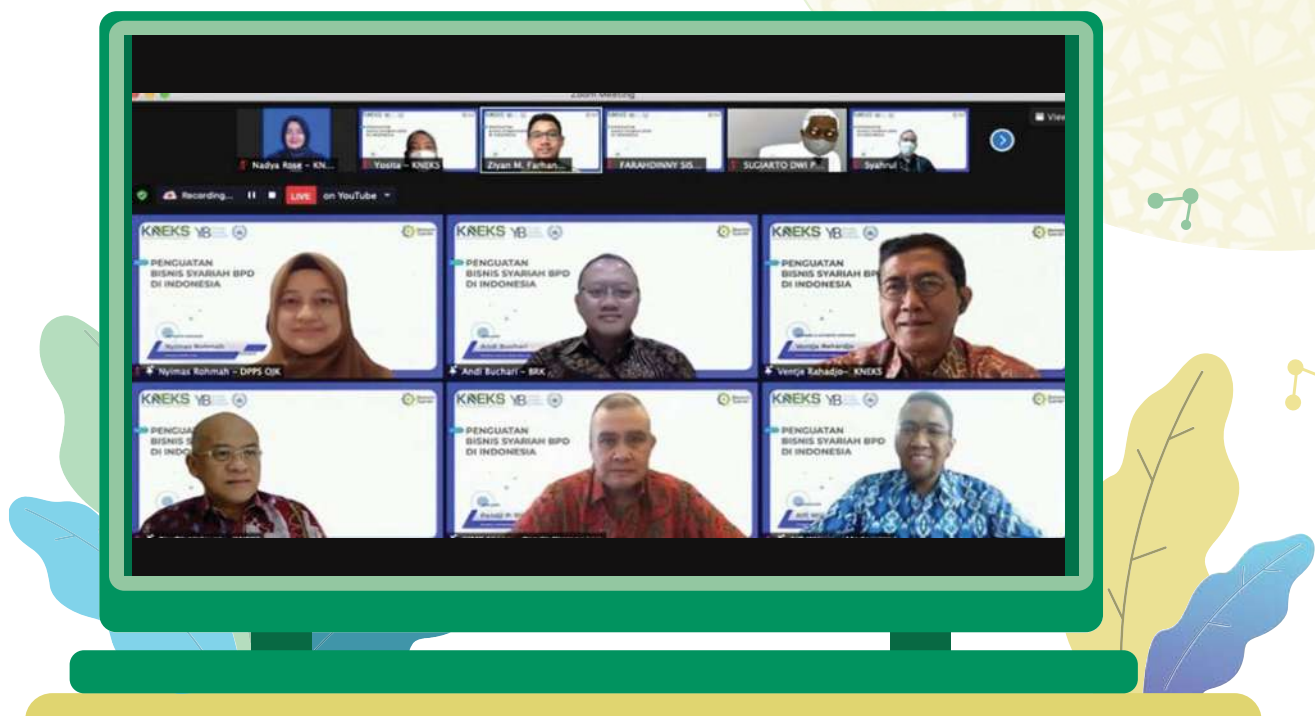
2022. Acara yang dilaksanakan pada hari Kamis 27 Januari 2022 ini diselenggarakan melalui platform zoom webinar, dan dihadiri oleh 5 narasumber yaitu Otoritas Jasa Keuangan, pelaku industri, EY Indonesia, dan asosiasi lembaga keuangan syariah.



Webinar Penguatan Bisnis Syariah BPD di Indonesia

KNEKS bersama Korps Alumni Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (Ka-FoSSEI), dan *Young Islamic Bankers* menyelenggarakan Webinar “Penguatan Bisnis Syariah BPD di Indonesia” pada 24 Februari 2022. Acara ini disaksikan oleh peserta via zoom *meeting* dan kanal Youtube KNEKS. Penyelenggaraan acara ditujukan untuk menindaklanjuti dorongan pemerintah terhadap penguatan BPD melalui arahan Wakil Presiden agar konversi/unifikasi/*merger* UUS BPD dapat ditindaklanjuti dengan adanya komitmen dan pernyataan kesiapan dari masing-masing BPD.

Penyelenggaraan webinar diharapkan dapat mendorong aksi korporasi yang melahirkan bank syariah yang kompetitif dan *sustainable*.





KNEKS Bersama BSI, MUI, dan Laznas BSMU Meluncurkan Buku Kultum Ekonomi Syariah

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Laznas BSMU berkolaborasi dalam peluncuran Buku Kultum Ekonomi Syariah *Series 4* pada Senin 18 April 2022. Peluncuran buku ini bertujuan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah sebagai energi baru pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk mengoptimalkan dan mengambil peran di perkembangan industri halal di Indonesia, Laznas BSMU mempunyai

program Literasi Keuangan dan Ekonomi Syariah (LIKES). Kedepannya program ini diharapkan dapat meningkatkan edukasi masyarakat serta indeks literasi dan inklusi ekonomi syariah Indonesia. Program ini juga bertujuan untuk mempersiapkan SDM *da'i* yang memiliki pemahaman mengenai keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri syariah dan keahlian digital. Selain itu, program ini juga diharapkan bisa membangun kesadaran kewajiban ibadah sosial.

Buku tersebut dapat diakses pada tautan berikut:

<https://kneks.go.id/storage/upload/1650890136-Kultum%202022%20rev%20C.pdf>



Komitmen Produk Halal Indonesia Untuk Dunia

KNEKS bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mengadakan webinar dengan tema “UKM Produk Halal, dari Indonesia untuk Dunia” pada 30 Juni 2022.

Webinar ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut kerja sama KNEKS-LPEI dan Program Literasi Pembiayaan Ekspor Syariah dari Sub-Pokja Pembiayaan dan Pembayaran Syariah, Kelompok Kerja (Pokja) Indonesia *Halal Export Incorporated*. LPEI bersama KNEKS dan BPJPH mendukung dalam pembiayaan ekspor produk halal, peran perkembangan syariah, dan sertifikasi halal serta program pendampingan program UMKM dan berkomitmen untuk terus menjalankan peran

nasional dalam ekspor, khususnya produk halal. LPEI akan memfasilitasi 100 UKM binaan untuk pengurusan sertifikasi halal. Terkait halal, BPJPH telah memverifikasi lembaga halal luar negeri dan bekerja sama dengan 88 lembaga dari 35 negara. Pembahasan di antaranya meliputi cara mengikuti kurasi LPEI, prosedur pengajuan Desa Devisa, dan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro dan kecil.



KNEKS, MES, dan BSI Ajak PMII Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke 62 Tahun, Pengurus Besar PMII mengadakan Seminar Nasional Ekonomi Syariah bertajuk “Penguatan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah menuju Indonesia Pusat Ekonomi Syariah 2024” pada 6 April 2022. Kegiatan tersebut membahas tentang Desain Besar Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia.



Kolaborasi BRIN-KNEKS Dalam Halal Tech Expo Dan Halal Tech Forum 2022

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan Halal Tech Expo dan Halal Tech Forum yang merupakan bagian dari kegiatan *Indonesia Research and Innovation (InaRI) Expo 2022* di BRIN Cibinong, Jawa Barat pada 27 – 30 Oktober 2022. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai sarana mempromosikan produk hasil riset dan inovasi BRIN kepada pengguna teknologi baik untuk pelaku industri/UMKM, masyarakat, dan pihak lainnya, agar terjadi peningkatan dalam pemanfaatan

dan kerjasama di sektor industri halal. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya menumbuhkembangkan dan memperkuat ekosistem riset dan inovasi di bidang produk halal (termasuk memperkuat jejaring dan kolaborasi baik antar pelaku riset dan inovasi, antar pengguna teknologi, maupun antara pihak pengguna dan penyedia teknologi), baik secara nasional maupun global. Topik diskusi yang diangkat antara lain “Teknologi Bahan Halal di Sektor Pertanian, Makanan, dan Minuman” dan “Teknologi Bahan Halal di Sektor Obat–Obatan dan Kosmetik.”



KNEKS Gaungkan Investasi Syariah di Yogyakarta

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai produk dan instrumen pasar modal syariah, KNEKS bekerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta mengadakan kegiatan “Islamic Economy Talks - Sosialisasi Sukuk Tabungan ST009” pada Rabu 23 November 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, civitas akademika, dan masyarakat umum di wilayah DI Yogyakarta. Selain itu, untuk meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pada kegiatan tersebut KNEKS melakukan penandatanganan MoU dengan Rektor UAD untuk mempererat kerjasama antar kedua lembaga.



Sinergi Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyelenggarakan kegiatan *Talkshow Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu* di Sektor Kelapa Sawit, sebagai salah satu peran atau partisipasi dalam sinergi pemberdayaan UMKM di Jakarta pada 8 Juni 2022. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan salah satu upaya yang dilakukan KNEKS

melalui Program Prioritas Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal. Kementerian Koperasi dan UKM juga turut berperan dalam pengembangan UMKM. Salah satunya lewat rumah produksi bersama di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Rumah produksi bersama menjadi tempat bagi para pelaku UMKM dengan produk berbahan dasar serupa untuk melakukan aktivitas produksi secara bersama-sama di kawasan yang dilengkapi dengan teknologi terbaru.



Alternatif Investasi UMKM Lewat *Securities Crowdfunding Syariah*

Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Jogja Halal Festival 2022 yang telah dibuka dan diresmikan secara daring oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma'ruf Amin pada 3 November 2022. Di dalam rangkaian kegiatan tersebut, diselenggarakan juga *Talkshow* yang mengusung tema “Investasi Cerdas dan Bijak Melalui *Securities Crowdfunding Syariah*”. Penghimpunan dana melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah mencatatkan tren peningkatan terutama di tahun ini. Walaupun SCF syariah ini baru tetapi peminatnya sangat tinggi, total dari saham/sukuk yang telah diterbitkan selama periode Desember 2021 – Oktober 2022 mencapai Rp146 miliar.

Terdapat 64 pelaku UMKM yang sudah menerbitkan saham ataupun sukuk melalui 4 platform penyelenggara SCF Syariah.

Empat penyelenggara SCF Syariah yang saat ini tercatat di OJK, antara lain PT Investasi Digital Nusantara (Bizhare), PT Shafiq Digital Indonesia (SHAFIQ), PT Dana Investasi Bersama (FundEx) dan PT LBS Urun Dana (LBS Urun Dana). Investor SCF Syariah dalam hal ini turut membantu pelaku UMKM agar naik kelas.



Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Peningkatan Ekspor Produk Halal

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkesempatan hadir dalam agenda *Talkshow "Business Matching dan Peluang Ekspor ke Malaysia"* di Jogja Expo Center pada **5 November 2022**.

Kegiatan ini merupakan serangkaian agenda Jogja Halal Festival (JHF) 2022 yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah (PW) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Istimewa Yogyakarta. Jogja Halal Festival ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup halal bagi setiap kalangan masyarakat terutama pelaku UMKM. Dalam mendukung percepatan ekspor produk halal di Indonesia, KNEKS telah membentuk Kelompok

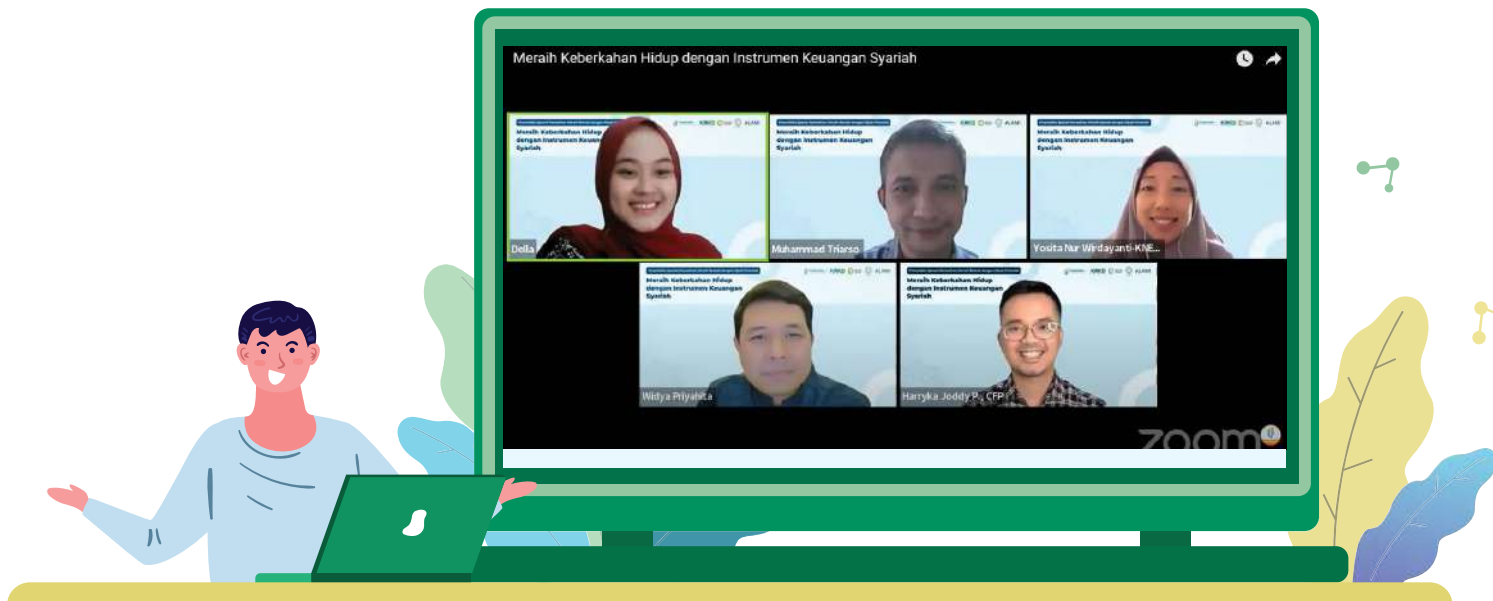
Kerja Indonesia *Halal Incorporated* yang melibatkan dua belas Kementerian dan Lembaga yang dikoordinatori oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN), Kementerian Perdagangan. Terdapat empat Sub Kelompok Kerja yang terdiri dari Akses Pasar Ekspor Produk Halal, Inkubasi dan Produksi Ekspor Produk Halal, Pembiayaan dan Pembayaran Ekspor Syariah serta MRA dan Perjanjian Perdagangan.



Hijrah Finansial dengan Instrumen Keuangan Syariah

KNEKS hadir dalam Webinar “Finansialku *Special* Ramadhan: Meraih Berkah dengan Hijrah Finansial” yang diselenggarakan oleh Finansialku pada Sabtu, 23 April 2023. Webinar tersebut ditujukan untuk memberi edukasi terkait pemahaman mengenai pengelolaan dan perencanaan keuangan serta cara pemilihan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip keuangan

syariah. Pada kesempatan tersebut, Perwakilan KNEKS menyampaikan perkembangan instrumen keuangan syariah untuk Generasi Milenial dan Gen Z. Selain itu, narasumber webinar pada agenda tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Alami Group, dan Finansialku.



Focus Group Discussion & Workshop

Pada tahun 2022, OJK dan Kementerian Lembaga telah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Workshop* yang dilakukan secara *offline* ataupun *online*. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai berbagai isu dan permasalahan yang ada pada industri keuangan syariah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bentuk/Tema Kegiatan	Tanggal	Narasumber	Tujuan Kegiatan
1.	<i>Focus Group Discussion</i> Analisis Pembiayaan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan berdasarkan Akad <i>Mudharabah</i>	24 Maret 2022	1. Sdr. Tri Baginda Kaisar selaku Hakim Yudistisial Mahakamah Agung; 2. Sdr. Rizky Dwinanto selaku Perwakilan Konsultan Hukum.	Mengetahui regulasi dan prosedur gugatan sederhana dalam hukum peradilan di Indonesia serta efektivitas gugatan sederhana dalam eksekusi barang jaminan dibandingkan dengan eksekusi jaminan fidusia serta contoh kasusnya
2.	<i>Focus Group Discussion</i> Regulasi dan Implementasi Pembebanan Jaminan Fidusia	30 Maret 2022	1. Sdr. Nurjanah selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM; 2. Sdr. Wawan Muliawan selaku perwakilan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia.	Mengetahui regulasi, pendaftaran, dan akibat hukum pembebanan jaminan fidusia serta eksekusi jaminan fidusia, implementasi dan permasalahannya
3.	<i>Focus Group Discussion</i> Implementasi Pemberdayaan Wakaf Melalui IKNB Syariah	25 Agustus 2022	1. Prof. Dr.H.Jaih Mubarak, SE., MH.,M.Ag selaku akademisi; 2. Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si selaku pengurus Bank Wakaf Indonesia.	Mengetahui terkait pengembangan wakaf dan cara implementasi pemberdayaan wakaf melalui IKNB Syariah.
4.	<i>Workshop</i> Perusahaan Pembiayaan Syariah Strategi Pemasaran Digital di Kalangan Generasi Milenial	31 Agustus 2022	1. Sdr. Abi Mangku Nagari selaku Managing Director PT Epilog Kreatif Indonesia; dan 2. Sdr. Anita Ekasari selaku <i>Digital Banking Acquisition Service & Marketing Head</i> PT Bank BTPN Tbk	Mengetahui cara yang tepat untuk menyusun strategi pemasaran digital untuk perusahaan pembiayaan syariah dengan target generasi milenial.
5.	<i>Focus Group Discussion</i> Mitigasi Risiko dan Strategi Dalam Rangka Kegiatan Pembiayaan Ulang (<i>Refinancing</i>) Syariah Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah	17 November 2022	1. Sdr. Dr. H. Asep Supyadillah, M.Ag selaku perwakilan DSN-MUI; 2. Sdr. Dr. H. Aminudin Yakub, M.A selaku perwakilan DSN-MUI; dan 3. Sdr. Yusron Hibrizie selaku perwakilan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.	Memberikan pemahaman terkait mitigasi risiko dan strategi yang tepat dalam rangka kegiatan pembiayaan ulang (<i>refinancing</i>) syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.



Ijtima' Sanawi DPS 2022

Kegiatan *Ijtima' Sanawi* DPS tahun 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Desember 2022 di Jakarta dengan diikuti oleh sekitar 300 orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, kompetensi, fungsi dan peran DPS dalam memberikan saran, nasihat serta pendampingan terhadap industri keuangan dan perekonomian syariah khususnya dalam bidang kepatuhan

prinsip syariah. Perkumpulan tahunan ini juga mendiskusikan isu-isu strategis perihal langkah-langkah pembangunan ekosistem ekonomi syariah.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Presiden Indonesia yang diwakili oleh Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) secara *virtual* lalu dilanjutkan sambutan oleh Bapak Mahendra Siregar (Ketua Otoritas Jasa Keuangan) dan Bapak Perry Warjiyo (Gubernur Bank Indonesia).



Pada pertemuan tersebut, OJK menyampaikan tentang perkembangan keuangan syariah di Indonesia dan kebijakan terkait *sustainable finance* serta keterkaitannya dengan keuangan syariah di Indonesia.

Focus Group Discussion Penyusunan Roadmap untuk Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Dengan berkolaborasi bersama Bidang Sosialisasi dan Edukasi, pada Jumat 10 Juni 2022, telah diselenggarakan *Focus Group Discussion* tentang Penyusunan Roadmap Untuk Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring dan dibuka oleh Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi DPP IAEI.

Bertindak sebagai *panelists* meliputi:

1. Prof. Dr. Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Islam kementerian Agama RI
2. Prof. Dr. Muhammad Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia
3. Dr. Ahmad Juwaini, Direktur KNEKS, dan
4. Bapak M. Anwar Basori, Direktur Eksekutif Bank Indonesia

Forum bersepakat bahwa momentum perubahan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang saat ini sedang berproses dengan inisiatif dari DPR, dapat dimanfaatkan untuk sekaligus melakukan perbaikan tata kelola kelembagaan wakaf nasional. Diharapkan setelah Undang-Undang perubahan Undang-Undang Wakaf tersebut selesai disusun, *roadmap* wakaf produktif nasional dapat segera disusun dan menjadi refensi bersama seluruh *shareholders* dan *stakeholders* perwakafan nasional, sehingga dapat mempercepat perkembangan perwakafan nasional.



Focus Group Discussion Wakaf Produktif CWLS: Mampukah Menjadi Booster Wakaf Produktif di Indonesia?

Focus Group Discussion tentang wakaf produktif dengan mengambil tema CWLS: Mampukah Menjadi Booster Wakaf Produktif di Indonesia? dilakukan secara daring dan dibuka oleh Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi DPP IAEI. Bertindak sebagai *panelists*, antara lain Bapak Guntur Mahardika, Asisten Deputi Sekretariat Wakil Presiden RI, Bapak Urip Budiarto - KNEKS, Prof. Dr. Raditya – UNAIR, Rahmatina Kasri Ph.D – Ekonom UI, dan dihadiri oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan kalangan *Nazhir*.

Penerbitan CWLS dipandang positif sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan pengembangan wakaf produktif berbasis wakaf uang di tanah air. CWLS di desain sebagai instrumen yang mendukung untuk pengembangan wakaf produktif, melalui pemanfaatan hasil investasi dana wakaf uang tersebut untuk pembentukan *asset* wakaf baru dan pembiayaan berbagai proyek atau kegiatan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh *Nazhir*, dan hasilnya dimanfaatkan untuk masyarakat yang berkebutuhan.



Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek SBSN pada *Stakeholders Gathering* Kementerian Keuangan Tahun 2022

Diselenggarakan pada tanggal **21 Desember 2022** di *Aula Mezzanine, Gedung Juanda Kemenkeu*.

Acara ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh DJPPR dalam rangka penguatan sinergi dan apresiasi kepada *stakeholders*.

Acara ini juga diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan pembiayaan proyek SBSN yang membahas arahan kebijakan Menteri Keuangan terkait pembiayaan SBSN proyek, *kick-off* pelaksanaan SBSN Proyek TA 2023 dan penyiapan bahan pagu indikatif SBSN Proyek tahun 2024, serta kegiatan lainnya. Acara ini mengundang para pejabat Eselon I K/L Pelaksana SBSN Proyek.



Workshop Sukuk Daerah dan KPBU Syariah kepada Pemerintah Kota Bandung

KNEKS bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan acara *Workshop Sukuk Daerah dan KPBU Syariah* pada 30-31 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan 13 Dinas Pemerintah Kota Bandung dan 7 BUMD Kota Bandung, termasuk RSUD Kota Bandung, Perumda Pasar dan Air Minum,

serta PT Agro Jabar dan PT Bandung Infra Investama. Acara ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai ruang lingkup Sukuk Daerah dan KPBU Syariah bagi perangkat Pemerintah Kota Bandung. Melalui agenda ini, diharapkan penerbitan Sukuk Daerah dan KPBU Syariah dapat terimplementasi di Kota Bandung.



Workshop BPD to the Next Level: Strategi Aksi Korporasi Menjelang Kewajiban Spin-off 2023

KNEKS menyelenggarakan acara *workshop BPD* secara *hybrid* selama dua hari di Jakarta pada 28 Juli – 29 Juli 2022. Acara ini dihadiri oleh perwakilan 13 Bank Perwakilan Daerah (BPD) yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dari berbagai daerah di Indonesia. *Workshop BPD to the next level: Strategi Aksi Korporasi Menjelang Kewajiban Spin-off 2023* merupakan lanjutan dari rangkaian program BPD *Syariah to the next level*. Penyelenggaraan rangkaian kegiatan ditujukan untuk

menindaklanjuti dorongan pemerintah terhadap penguatan BPD melalui arahan Wakil Presiden agar konversi/unifikasi/*merger* UUS BPD dapat ditindaklanjuti. Adapun penyelenggaraan *workshop* kali ini ditujukan untuk menguatkan kapasitas SDM mengenai strategi aksi korporasi dalam menghadapi kewajiban *spin-off*, yaitu melalui strategi unifikasi/*merger*, *spin-off*, konversi BPD Syariah, serta penguatan kinerja melalui strategi sinergi perbankan.



Workshop Penguatan Bisnis BPD Syariah di Bandung

Dalam Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah 2020-2024, KNEKS memiliki fokus dalam penguatan perbankan syariah, termasuk di dalamnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), baik BUS ataupun UUS. KNEKS bersama KA-FoSSEI, *Young Islamic Bankers* (YIB) dan ASBANDA berupaya untuk mendorong BPD melalui program “BPD Syariah to the next level” dengan mengadakan rangkaian kegiatan webinar dan *workshop* peningkatan kompetensi

BPD. Agenda *Workshop* diselenggarakan pada 17 November – 18 November 2022 dengan mengusung topik “Penguatan Bisnis BPD Syariah yang Lebih Kompetitif untuk Meningkatkan Daya Saing Industri”. Penyelenggaraan *Workshop* kali ini bertujuan untuk memperkuat bisnis Syariah BPD agar lebih kompetitif. Penguatan tersebut melalui strategi digitalisasi perbankan dalam memperkuat ekosistem digital, strategi pemasaran dan pengembangan produk.



KNEKS Mendukung BAZNAS dalam Memperkuat Digitalisasi Pelaporan Zakat Nasional

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan *Workshop* Digitalisasi Pelaporan Pengelolaan Zakat Melalui Sistem Informasi Manajemen Baznas Bagi LAZ Nasional. Acara ini diselenggarakan pada 25 - 26 Oktober 2022 dan dihadiri lebih dari 30 perwakilan LAZ tingkat nasional. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas pelaporan zakat melalui pengenalan dan pendampingan

secara intensif terkait penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS pada modul pelaporan bagi pengelola zakat. Materi *workshop* yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan digitalisasi pelaporan pengelolaan zakat nasional, pengenalan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA), akuntansi zakat dan aplikasinya dalam sistem pelaporan SiMBA, serta praktik pengisian laporan triwulan I, II, dan III dalam SiMBA.



Edukasi dan Penyelarasan Kurikulum Ekonomi Syariah di Kalimantan Timur

KNEKS menyelenggarakan *Workshop Sinergi Edukasi dan Penyelarasan Kurikulum Ekonomi Syariah* dengan Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Timur pada 24 - 25 Mei 2022. *Workshop* ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program kerja strategis terkait peningkatan kualitas SDM ekonomi syariah di Indonesia. Kegiatan ini setidaknya dihadiri oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda, serta dihadiri pula oleh beberapa lembaga dan industri di sektor

ekonomi dan keuangan syariah seperti *Muamalat Institute*, *Alami Institute*, Bank Syariah Indonesia Kalimantan Timur, dan Baznas Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan *workshop* ini diharapkan dapat memberikan peluang dan strategi yang dapat dilakukan berkaitan dengan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta dapat membuka peluang antara kebutuhan industri dan SDM ekonomi syariah di Indonesia.

Dengan mendorong penerapan MBKM di perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Timur, KNEKS berharap dapat mendorong *link and match* kebutuhan industri dan meningkatkan kualitas SDM ekonomi dan keuangan syariah.



Workshop Securities Crowdfunding (SCF) Syariah: Semakin Mudah UMKM Menerbitkan Saham

KNEKS bersama OJK, ALUDI, IDX Jabar, PW MES Jabar, KADIN Jabar dan BPD HIPMI Jabar menyelenggarakan *Workshop Securities Crowdfunding (SCF) Syariah* bertempat di Bandung pada 02 Juli 2022. Pelatihan diikuti oleh peserta yang merupakan pelaku usaha dan perwakilan dari Inkubator UMKM di Jawa Barat. *Workshop* ini ditujukan untuk meningkatkan literasi pelaku usaha dan pengelola inkubator mengenai sumber permodalan/pendanaan berbasis digital melalui

SCF syariah. *Workshop* juga membantu meningkatkan jumlah partisipasi pelaku usaha industri halal yang menerbitkan saham dan sukuk melalui SCF syariah. Dalam *Workshop* SCF Syariah, materi disampaikan oleh berbagai narasumber yaitu OJK dan penyelenggara SCF syariah yaitu Bizhare, Shafiq dan Fundex. Materi yang disampaikan berupa pengenalan SCF syariah, persiapan penerbitan saham dan sukuk serta pelaporan usaha dan pembagian dividen/imbal hasil.



Training of Trainers Industri Keuangan Non-Bank Syariah 2022

Pada tahun 2022, OJK dan Kementerian/Lembaga telah melaksanakan kegiatan *Training of Trainers*, kegiatan ini dilakukan dalam rangka melanjutkan penyebaran informasi serta peningkatan pengetahuan mengenai Industri Keuangan Syariah.

Salah satunya di sektor IKNB Syariah, bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan literasi terkait IKNB Syariah, khususnya Pembiayaan Syariah dan Asuransi Syariah bagi para dosen di sekitar wilayah kampus *counterpart*. Narasumber dalam kegiatan ini berasal dari pihak eksternal yang terdiri dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia serta perwakilan OJK sebagai narasumber internal.

1

Counterpart: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 19-20 April 2022




Training of Trainers Industri Keuangan Non Bank Syariah
Keynote Speech
Dr. H. Nihayatul Masykuroh
Dekan FEBI UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Kris Ibnu Roosmawati
Direktur IKNB Syariah OJK

Hari I: Selasa, 19 April 2022
Narasumber:
Tatang Nurhidayat AASI
Dr. H. Asep Supyadillah, MAg DSN MUI
Nur Hasanah OJK
Utariningsih Putri OJK
Ratna Dewi Puspita Sari OJK

Hari II: Rabu, 20 April 2022
Narasumber:
Arri Cahyono APPI
Prof. Dr. H. Jaih, SE, MH DSN MUI
Asadullah Sefnado OJK
Dian Maya Kurniawati OJK

Selasa - Rabu 19 - 20 April 2022 08.00 - 15.15 WIB
Live Zoom Meeting Meeting ID: 996 9462 2473 Passcode: OJK2022
Link Registrasi: <https://bit.ly/TOTIKNB5-APRIL2022>

2

Counterpart: Universitas Pendidikan Indonesia 7-8 September 2022




TRAINING OF TRAINERS
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah
Meningkatkan Literasi dan Pengetahuan Syariah

Lokasi: Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Pelaksanaan: Rabu & Kamis 7 - 8 September 2022

Materi:
- Pemahaman IKNB Syariah
- Penerapan Fikih dan Prinsip Syariah
- Produk Syariah dan Keunggulan
- Perilaku, Tata Kelola dan Praktik
- Pengembangan Sistem Risiko

Strategi Peningkatan Kompetensi Ekonomi Syariah pada Pelajar Sekolah Menengah

KNEKS bersama DPP Asosiasi Guru PAI Indonesia (AGPAI) menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) Guru Pelopor Ekonomi Syariah kepada guru Pendidikan Agama Islam utusan 34 perwakilan provinsi dari seluruh Indonesia pada 30 - 31 Maret 2022. Agenda ini merupakan hasil dari rumusan persoalan KNEKS bersama Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia (AGEI), Asosiasi Guru Ekonomi Syariah Indonesia (AGESI) dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAI) yang melihat kondisi siswa tingkat sekolah menengah pada usia 16-18 tahun yang masih belum optimal mendapatkan materi mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini karena materi ekonomi syariah saat ini hanya tersedia pada bahan ajar di kelas

XI pada 1 bab pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan memuat materi secara umum. Oleh karena itu, KNEKS bersama pemangku kepentingan lainnya berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru dan tenaga pengajar tentang ekonomi dan keuangan syariah, melalui rangkaian kegiatan ToT Guru Pelopor Ekonomi Syariah di Pendidikan Menengah. Adapun pelaksanaan ToT Guru Pelopor Ekonomi Syariah ini dilaksanakan selama tiga sesi. Pada setiap sesi membawa tema materi yang berbeda-beda. Sesi pertama mengupas topik prinsip dasar ekonomi syariah, sedangkan sesi kedua adalah *Fiqh Muamalah*, *Ushul Fiqh*, dan Kaidah *Fiqhiyah* dan sesi ketiga adalah Prinsip Dasar dan Praktik Industri Keuangan Syariah.



Literasi dan Inklusi

Online Roadshow Multifinance Syariah 2022

Kegiatan *Online Roadshow Multifinance Syariah* (ORMS) tahun 2022 dengan tema “Mudahnya Bermuamalah dengan Pembiayaan Multiguna Syariah” yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan PT Adira Dinamika Multifinance (Unit Usaha Syariah) di beberapa kota, baik secara *online* ataupun *offline*. Dalam kegiatan tersebut membahas mengenai berbagai jenis akad dan produk pembiayaan syariah yang dapat digunakan oleh masyarakat

dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan berbagai jenis akad yang digunakan oleh *multifinance* syariah kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pilihan dalam menggunakan produk-produk perusahaan pembiayaan.

Dalam kegiatan ini OJK yang diwakili oleh Direktorat IKNB Syariah turut berpartisipasi menjadi salah satu narasumber dalam rangkaian kegiatan dimaksud.

Adapun untuk kegiatan ORMS yang diselenggarakan di Cirebon dan Jember dilakukan secara *offline*.

No.	Hari/Tanggal	Bentuk Kegiatan	Area	Narasumber OJK
1.	Kamis, 14 April 2022	Online	Bandung	Asadulloh Sefnado
2.	Kamis, 19 Mei 2022		NTB	Asadulloh Sefnado
3.	Rabu, 22 Juni 2022		Sulawesi Tengah	Yana Triyana
4.	Kamis, 14 Juli 2022		Martapura	Muhammad Musa
5.	Kamis, 18 Agustus 2022		Aceh	Yana Triyana
6.	Sabtu, 17 September 2022		Bengkulu	Anita Primadani
7.	Selasa, 11 Oktober 2022	Offline	Cirebon	Muhammad Musa
8.	Kamis, 13 Oktober 2022		Jember	KOJK Jember



Online Roadshow Asuransi Syariah

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi mengenai asuransi syariah kepada masyarakat, Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan PT Prudential Life Assurance menyelenggarakan Kegiatan Online Roadshow Asuransi Syariah tahun 2022 dengan mengangkat berbagai tema.

Dalam hal ini OJK turut berpartisipasi menjadi salah satu narasumber dalam rangkaian kegiatan dimaksud. Adapun kegiatan Online Roadshow Asuransi Syariah selama tahun 2022, antara lain:



Nama Program	Waktu	Narasumber
<i>Talkshow Online Asuransi Syariah</i> "Berkah Rejeki, Damai Hatinya"	21 April 2022	Utariningsih Putri
<i>Talkshow Online Asuransi Syariah</i> "Ikhtiar Mewujudkan Rasa Aman Bersama Asuransi Syariah"	16 Juni 2022	Ratna Dewi P.S
<i>Talkshow Online Asuransi Syariah</i> "Siapa Bilang Asuransi Syariah Hanya Istilah"	12 Juli 2022	Nia Sevy
<i>Talkshow Online Asuransi Syariah</i> "Berbagi Kebaikan bersama Asuransi Syariah"	7 September 2022	Utariningsih Putri
<i>Talkshow Online Asuransi Syariah</i> "Hijrah Finansial: Tren Kekinian Generali Milenial"	14 Oktober 2022	M. Amin
<i>Talkshow Online Asuransi Syariah</i> "Ikhtiar Untuk Melindungi Diri dan Keluarga"	25 Oktober 2022	Asadullah Sefnado

Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Sepanjang tahun 2022, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi tematik syariah sebagai berikut:

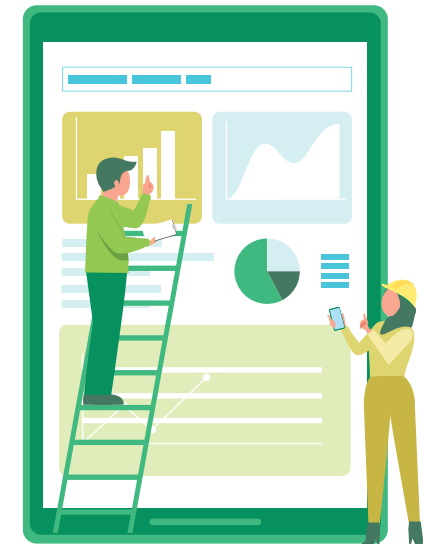
1. Pelaksanaan di Daerah

- Pelaksanaan edukasi keuangan dengan tematik syariah telah dilaksanakan oleh TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan total 100 peserta. Pelaksanaan kegiatan edukasi tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung program Klinik Bisnis Syariah yang diluncurkan pada hari yang sama.
 - Kegiatan tersebut bertema Tata Kelola Bisnis Syariah yang bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Sulawesi Selatan.
 - Selanjutnya, Klinik Bisnis Syariah ini menyediakan layanan konsultasi seputar keuangan Syariah oleh PT Bank Sulselbar Syariah dan PT Bank Syariah Indonesia.
 - Selain menyediakan layanan konsultasi terkait seputar keuangan syariah, Klinik Bisnis Syariah juga menyediakan beberapa *stand* bagi UMKM Binaan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.
- ## 2. Pelaksanaan di Pusat
- TPAKD pusat telah menyelenggarakan kegiatan *capacity building* pada tanggal 3 Agustus 2022 yang bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman terkait TPAKD secara umum serta implementasi program kerja yang selaras dengan tematik program tahun 2023, yaitu “Akselerasi Pemanfaatan Produk dan Layanan Keuangan Syariah”.

- Pada kegiatan tersebut, terdapat sesi terkait tematik syariah, yaitu “Mendorong Perluasan Akses Keuangan Syariah di Indonesia” dengan narasumber:
- Kegiatan ini diikuti oleh 1.448 peserta dari 376 TPAKD yang telah terbentuk di seluruh Indonesia.

Bapak Ahmad Juwaini selaku Direktur Keuangan Sosial Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dengan materi Peran Layanan Keuangan Syariah Dalam Mendukung Akses Keuangan di Daerah dan Tantangan yang Dihadapi; dan

Bapak Erdiriyo selaku Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan materi Strategi Akselerasi Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia



Kegiatan Literasi dan Inklusi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Sepanjang tahun 2022, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah melaksanakan berbagai program dalam rangka mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat yang dilakukan oleh 12 TPAKD sebagai berikut:

1. 9 TPAKD di wilayah Sumatera Utara

TPAKD Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batubara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Binjai, Kabupaten Labuhanbatu, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang memiliki program kerja K/PMR melalui KUR Syariah. Program ini mendukung para pelaku UMKM yang memprioritaskan akses pembiayaan yang berprinsip syariah dalam mengembangkan usahanya. Selama tahun 2022, pembiayaan telah disalurkan kepada 3.688 UMKM dengan nominal Rp127,1 miliar.

2. TPAKD Kota Padang

Telah dilakukan program kerja pembukaan rekening syariah yang ditujukan bagi UMKM di Kota Padang. Program ini telah menyalurkan pembiayaan selama tahun 2022 kepada 51 UMKM.

3. TPAKD Kabupaten Way Kanan

- Program kerja Akad Syariah Industri Kreatif (ASYIK) merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pelaku usaha atau UMKM bagi perorangan maupun kelompok. Selama tahun 2022 telah disalurkan pembiayaan kepada 61 debitur dengan nominal sebesar Rp1,2 miliar
- Program kerja Talangan Kita Basmi Rentenir (TAKBIR) merupakan pembiayaan talangan untuk pelaku usaha yang terilit rentenir dan pengembangan ultra mikro UMKM. Program ini bekerja sama dengan Bank Syariah Way Kanan. Selama tahun 2022 telah disalurkan pembiayaan kepada 11 debitur dengan nominal Rp22 juta.

- Program Wakaf Uang merupakan wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif lalu kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf Alaih*. Hingga periode pelaporan, telah terkumpul Rp140 juta.

4. TPAKD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program K/PMR Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) merupakan pembiayaan ultra mikro yang murah dan mudah, ditujukan kepada kelompok ibu-ibu jamaah masjid dengan jumlah 15-30 orang dan tergolong kurang mampu. Proses penyaluran menggandeng Masyarakat Ekonomi Syariah dan Takmir Masjid. Selama tahun 2022, pembiayaan telah disalurkan kepada 195 debitur dengan nominal Rp230 juta.

Digital Financial Literacy (DFL)

Realisasi Program



Dalam rangka mendorong percepatan literasi dan inklusi Keuangan digital di Indonesia, OJK meluncurkan modul-modul *Digital Financial Literacy*. Penerbitan Modul DFL bertujuan untuk memberikan edukasi terkait layanan keuangan digital yang dikemas secara interaktif, menarik dan mudah dipahami dalam bentuk media buku, e-book, video animasi, dan *games*. Beberapa modul yang telah dipublikasikan, antara lain: Modul *Choosing Services For You*, *Self-protection (Be the Cyber Ninja)*, *Customer Support Channel*, *Yuk Kenalan dengan Fintech Lending*.

OJK juga telah melakukan sosialisasi modul-modul tersebut dalam upaya publikasi kepada masyarakat. Selama tahun 2022, OJK telah mensosialisasikan DFL kepada 1.416 *civitas* akademika dari 14 sekolah dan perguruan tinggi. Antusiasme terbesar atas kegiatan sosialisasi DFL berasal dari UIN Ar-Raniry Aceh dengan total peserta sebanyak 412 orang. Selain itu, dalam upaya meningkatkan DFL, OJK juga menyelenggarakan kegiatan *Virtual Innovation*

Day (VID) setiap tahunnya. Pada tahun 2022, kegiatan VID dilaksanakan secara *hybrid* yang mengusung tema “*Building Trust System in the Digital Financial Ecosystem*” pada tanggal 10 Oktober 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisiner OJK, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Anggota Dewan Komisiner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Ketua Dewan Audit



Dalam rangkaian OVID 2022, OJK meluncurkan 3 inisiatif yang dipersiapkan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan yakni:

Chatbot-CST OJK (untuk peningkatan kualitas penyelesaian pertanyaan/keluhan masyarakat pelanggan secara otomatis), Modul Literasi Keuangan Digital (*Customer Support Channel*) serta Program Peningkatan Kapasitas *Suptech* dan *Regtech*. Kegiatan diikuti oleh lebih dari 4 (empat) ribu peserta dari perwakilan internal OJK, Industri, Asosiasi dan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan stakeholder dalam Akselerasi Literasi Keuangan Syariah Digital, Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI), sebagai asosiasi yang ditunjuk oleh OJK, secara rutin menyelenggarakan kegiatan literasi dan edukasi *fintech* syariah ke berbagai kelompok masyarakat dari pelaku bisnis hingga *civitas* akademika. Selama tahun 2022, AFSI telah menyelenggarakan 70 kegiatan edukasi, baik secara *online* maupun *offline*, serta menginisiasi program “*Academic Partner*”

Program AFSI *Academic Partner* (AAP) yang merupakan program kerja sama pendidikan dan pelatihan antara perguruan tinggi dengan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI). Kerjasama ini merupakan bentuk kerja sama AFSI dan *civitas* akademika bertujuan untuk memberi dukungan kepada institusi akademik dalam mempersiapkan sumber daya dengan pembekalan kompetensi di bidang *fintech* syariah serta meningkatkan kegiatan penelitian guna mendorong kemajuan *fintech* syariah di Indonesia.



Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH)

OJK menyelenggarakan program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022 bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah, Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah serta *stakeholders* terkait.

Rangkaian kegiatan pada program SAKINAH diawali dengan Edukasi Keuangan Syariah dalam rangka *Road to* Hari Santri Nasional 2022 di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang pada tanggal 1 Oktober 2022.

Selanjutnya, OJK menyelenggarakan program SAKINAH secara serentak pada tanggal 23 Oktober 2022 di lima pondok pesantren

dan terpusat di Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta serta pondok pesantren Syubbanul Wathon Magelang, pondok pesantren Darunnajah Jakarta, pondok pesantren Mathla'ul Anwar Pandeglang dan pondok pesantren Al-Anwar Bangkalan.

Program SAKINAH juga diselenggarakan oleh 12 Kantor Regional dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan lainnya. Kegiatan edukasi pada program SAKINAH diikuti oleh 21.204 orang peserta.

Selain itu, OJK juga meluncurkan program Gerakan Santri Menabung yang ditandai dengan pembukaan rekening santri sebanyak 2.909 rekening.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan acara penutupan bersama Wakil Presiden RI, Bapak KH. Ma'ruf Amin di Masjid At Thohir pada tanggal 31 Oktober 2022.



Opening Ceremony FESyar Tahun 2022



ISEF 2022

Road To ISEF 2022: Pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2022

Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) tahun 2022 merupakan salah satu upaya peningkatan literasi ekonomi syariah di daerah dan sebagai bentuk *Road to ISEF 2022*. Penyelenggaraan FESyar 2022 diselenggarakan di tiga wilayah, yaitu FESyar KTI pada 28-30 Juli di Makassar, FESyar Sumatera pada 4-6 Agustus 2022 di Aceh, dan FESyar Jawa pada 8-10 Agustus 2022 di Jawa Timur dengan mengangkat tema secara umum “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk memperkuat Ekonomi Daerah yang Inklusif”. Penyelenggaraan FESyar merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). FESyar memiliki *alignment* erat dengan salah satu tujuan penyelenggaraan ISEF, yaitu dukungan terhadap pencapaian visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Rangkaian kegiatan FESyar terdiri atas berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan edukasi

dan meningkatkan literasi masyarakat terkait ekonomi dan keuangan syariah. Bentuk program tersebut antara lain *Sharia Forum* FESyar, menggelar beragam webinar, *talkshow virtual*, *business coaching* hingga *coaching clinic*, yang mengangkat topik-topik terkini terkait ekonomi syariah seperti pengelolaan ekonomi daerah berbasis ekonomi syariah, pemberdayaan usaha dan ekonomi pesantren, optimalisasi *Islamic Social Finance* (ZISWAF), serta penguatan implementasi *halal value chain* dan literasi *halal lifestyle*. Selain itu, terdapat pula *Sharia Fair* FESyar menjadi ajang *showcase* produk usaha syariah unggulan, yang disertai dengan kegiatan *business matching* dengan Perbankan Syariah, Lembaga Wakaf, dan juga *Business to Business* (B2B).

Pada penyelenggaraan FESyar 2022, seluruh pimpinan daerah yang berpartisipasi menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi syariah di daerah sebagai bagian dari pemulihan

ekonomi nasional. Digitalisasi dan hilirisasi produk pelaku usaha syariah menjadi tema sentral FESyar di 3 wilayah. Pada FESyar KTI (Kawasan Timur Indonesia), Bank Indonesia melaksanakan program digitalisasi di 106 Pesantren dan *launching* penggunaan QRIS pada 5.000 masjid di wilayah KTI. Sementara itu, FESyar Sumatera menjadi ajang *launching* platform digital Aceh *Sharia Funding Agregator* (ASIFA) sebagai platform digital keuangan sosial syariah, yang menjembatani pemilik dana yang ingin menyalurkan Infak, Sedekah, dan Wakaf (ISWAF) ataupun investasi kepada pelaku usaha dan kegiatan produktif lainnya. Di Fesyar Jawa, dilakukan antara lain inisiasi Hilirisasi Produk Rempah serta peningkatan peran pesantren guna mendukung ketahanan pangan di antaranya melalui *Social Partnership for Food Security*.

ISEF 2022

FESyar Sumatera 2022

"Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera untuk memperkuat Ekonomi Sumatera yang Inklusif"

Tuan Rumah : Aceh
Tanggal : 4- 6 Agustus 2022
Jumlah Pengunjung : ±120.857
Total Transaksi : ±Rp 7,9 Miliar
Total *Business Matching* : ±53,4 Miliar
Total sebanyak 20 kegiatan telah dilaksanakan terdiri dari :
(i) 7 Webinar
(ii) 3 *talkshow/ business coaching* ekonomi dan keuangan syariah
(iii) Festival Kuliner
(iv) *Tabligh Akbar*

FESyar KTI 2022

"Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah KTI untuk memperkuat Ekonomi KTI yang Inklusif"

Tuan Rumah : Sulawesi Selatan (Makasar)
Tanggal : 28 - 30 Juli 2022
Jumlah Pengunjung : ±94.047
Total Transaksi : ±Rp 48,78 Miliar
Total *Business Matching* : ±108,93 Miliar
Total sebanyak 17 kegiatan telah dilaksanakan terdiri dari :
(i) 4 Webinar
(ii) 5 *talkshow/ business coaching* ekonomi dan keuangan syariah
(iii) Perlombaan
(iv) *Tabligh Akbar*

FESyar Jawa 2022

"Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa untuk memperkuat Ekonomi Jawa yang Inklusif"

Tuan Rumah : Jawa Timur (Surabaya)
Tanggal : 8-10 September 2022
Jumlah Pengunjung : ±208.982
Total Transaksi : ±Rp 4,47 Triliun
Total sebanyak 15 kegiatan telah dilaksanakan terdiri dari :
(i) 3 Webinar
(ii) 6 *talkshow/ business coaching* ekonomi dan keuangan syariah
(iii) 5 Perlombaan
(iv) *Tabligh Akbar*



Pelaksanaan Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) 2022

Penyelenggaraan Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) 2022 merupakan bentuk komitmen seluruh *stakeholder* di Indonesia untuk bersama mengakselerasi upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pada ISEF 2022, pemberdayaan ekonomi syariah diwujudkan melalui pengembangan ekosistem HVC, mulai dari pelaku usaha syariah dari pondok pesantren hingga tingkat industri.

Sementara itu, pengembangan keuangan syariah ditujukan untuk memperluas produk dan akses keuangan, mulai dari perbankan dan lembaga keuangan lain, serta mobilisasi zakat, shodaqoh dan wakaf. Dari sisi edukasi dan literasi, hal ini juga diperkuat melalui penguatan kurikulum ekonomi keuangan syariah, kewirausahaan, hingga kampanye gaya hidup halal. Rangkaian kegiatan ISEF 2022 terdiri atas berbagai kegiatan sejak April hingga Oktober 2022, dimulai dari *Road to ISEF*, *Road to Festival Ekonomi Syariah* (Fesyar), Fesyar di 3 (tiga) wilayah, *Side Event G20*, dan ditutup dengan *Main Agenda ISEF 2022*.

Sebagai wujud dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia, ISEF 2022 mengusung tema “*Recover Together Recover Stronger: Optimizing Sharia Economy and Finance for Inclusive Recovery*”. Melalui tema tersebut, ISEF 2022 bermaksud menunjukkan peran ekonomi dan keuangan syariah (eksyar) dalam mendukung pemulihan bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi COVID-19. Tema tersebut kemudian diturunkan dalam 3 (tiga) sub-tema, yaitu:

- (i) *Economic Inclusion*
- (ii) *Halal and Green Lifestyle*, dan
- (iii) *Digitalization of Sharia Economy*



Alignment Fesyar-ISEF 2022



28-30 Juli
FESYar 1 Makassar



04-06 Agustus
FESYar 2 Aceh



08-10 Agustus
FESYar 3 Surabaya



MAIN AGENDA ISEF
05-09 Oktober

Workstreams Conference

Mukernas Hebitren

Workshop/Talkshow

*Exhibition Business
Matching & Coaching*

Cultural Performance Fashion Show



Topik Utama Green & Halal Lifestyle*):
Zona Halal di Regional**

Seminar Model Usaha/Ekonomi Pesantren

Seminar Sertifikasi Halal/Aktivasi Lembaga Zakat/Wakaf

Workshop/Talkshow Pelaku Usaha Halal/Business Coaching

Lomba Kesenian Daerah Islami

Pelaksanaan Indonesia *Sharia Economic Festival (ISEF) 2022*

Main Agenda ISEF ke-9 2022 tetap menjadi salah satu agenda eksyar internasional yang menjadi daya tarik berbagai stakeholder domestik maupun internasional.

ISEF 2022 memiliki keunikan internasional karena merupakan *platform* yang mengintegrasikan berbagai kegiatan, mulai dari *exhibition (expo)*, *conference (webinar)*, sidang fora internasional, musyawarah nasional, *workshop*, *business matching*, dan berbagai jenis kegiatan lain.

Seluruh rangkaian kegiatan *Main Agenda* ISEF ke-9 tahun 2022 difokuskan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan melibatkan berbagai kalangan. Pada gelaran ISEF 2022 telah diselenggarakan 163 kegiatan yang terdiri dari Webinar (*National & International*), *Workshop*, *Talkshow*, *Business Coaching*, *Business Meeting Matching*, *Tabligh Akbar*, dan *Fashion Show*, yang mencatat partisipasi sebanyak 566.181 peserta mulai dari FESyar hingga Puncak ISEF 2022. Selain itu, pada rangkaian Kompetisi di ISEF 2022, telah diikuti oleh 4.553 peserta dari

4 kompetisi yang diselenggarakan selama tahun ini (*Hijrahpreneur 3.0*, Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional (KESN), *Youth Sharia Sociopreneur Competetition (YSSC)*, dan *Modest Young Designer Competition (MYDC)*). Pada kegiatan ini juga terdapat 106.355 pengunjung dari 92 negara yang mengakses *website* ISEF 2022 yang dihitung mulai 1 September 2022 hingga 9 Oktober 2022. ISEF 2022 juga diikuti oleh 950 pelaku usaha (283 peserta *offline* dan 667 peserta *online*). Selama ISEF 2022 terdapat total transaksi sebesar Rp27,6 triliun, yang berasal dari *business matching*, pengumpulan wakaf, sampai transaksi pada *exhibition* ISEF 2022. Di antara *exhibitor* tersebut, terdapat 163 desainer nasional dan internasional yang turut memeriahkan *exhibiton* ISEF 2022.

Hal lain yang menjadi keunikan ISEF tahun 2022 adalah peluncuran *flagship program*

pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Tiga *flagship program* yang diluncurkan Bapak Wakil Presiden RI selaku Ketua Harian KNEKS pada pembukaan *Main Agenda* ISEF 2022 terdiri atas

(i) **Pencanangan Ekosistem Ekspor Halal**, yang merupakan ekosistem sinergi untuk mempercepat pengembangan produk halal unggulan lokal berorientasi global sehingga mendukung upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terkemuka di dunia;

(ii) **Akselerasi Sertifikasi Halal**, melalui sinergi erat antar pemangku kebijakan; dan

(iii) **Penyelenggaraan the 1st Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST)** yang diarahkan untuk menjadi *event modest fashion* rujukan dunia.

Outcome Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan ISEF 2022





Sinergi OJK dengan *Stakeholder*

Dalam Pertemuan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa Anggota Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Bapak Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun menyampaikan mengenai kinerja sektor IKNB terhadap ekonomi nasional pada tahun 2022.

Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi asuransi lebih tinggi dibanding dengan tingkat inklusinya, yaitu sebesar 31,27% dan 16,63%.

Penguatan perlindungan konsumen dan peningkatan literasi keuangan merupakan pilar penting dari sisi *demand* yang dapat menopang pertumbuhan dan perkembangan sektor asuransi nasional, khususnya syariah. Asosiasi memegang peran penting sebagai mitra strategis OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat sehingga pemanfaatan produk asuransi oleh masyarakat dapat optimal.

Business Matching IKNB Syariah dengan UMKM

Kegiatan *Business Matching* IKNB Syariah dengan UMKM pada tahun 2022 dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 31 Agustus 2022 dan 21 November 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam mendapatkan informasi dan akses yang lebih luas kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), khususnya LJK Syariah. Kegiatan *Business Matching* ini juga dilakukan dalam rangka mendorong pengenalan IKNB Syariah kepada UMKM serta mendukung pengembangan bisnis IKNB Syariah di Indonesia. Agenda pada kegiatan *Business Matching* ini diisi oleh

sharing session dari narasumber mengenai tips dan trik pengelolaan bisnis serta *success story* dari pelaku UMKM yang berhasil menjalankan bisnisnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa perusahaan IKNB Syariah yang dapat mendukung kegiatan UMKM antara lain Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Perusahaan Penjaminan Syariah, *Fintech* Syariah, PT PNM (Persero) dan LPEI serta UMKM di Indonesia.

BUSINESS MATCHING
UMKM dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah
UMKM Export tanpa Rapor bersama IKNB Syariah

Keynote Speech:
Kris Iman Rasmawati
Direktur IKNB Syariah

Narasumber Sharing Knowledge:
Arya Mubart
Penyuluh Pemasaran & Logistik
Perusahaan Pembiayaan Syariah

Success Story:
Sundari Puhungan
CEO Sinar Jaya Mandiri

Moderator:
Nanang Wahyudi
Pradiksaner Sharda Rindhi

GRATIS!
Semua Peserta
18 Nov 2022

PENDAFTARAN:
bit.ly/daftarBusinessMatching2

Senin, 21 November 2022
08.00 - 16.00 WIB
Virtual Zoom Meeting

Dapatkan hadiah menarik untuk 100 orang terpilih!

ROUNDUP BUSINESS MATCHING
UMKM Export tanpa Rapor bersama IKNB Syariah

Senin, 21 November 2022

08.00 - 08.15 Meeting room dibuka (peserta dipersilahkan masuk)

08.15 - 08.45 Opening oleh MC
Pembukaan lagu Indonesia Raya
Pembacaan doa

08.45 - 09.00 Keynote Speech oleh Direktur IKNB Syariah - OJK

09.00 - 10.30 Sharing Knowledge: A to Z Berbisnis Syariah: Kemandirian dan Logistik di Bidang Ekspor oleh Bapak Arya Mubart

10.30 - 11.15 Produk Jasa Keuangan Syariah untuk UMKM oleh LPEI

11.15 - 12.00 Produk Jasa Keuangan Syariah untuk UMKM oleh PT Asuransi Tabahul Ummah

12.00 - 12.10 Quiz 1

12.10 - 12.30 Istirahat islahi

12.30 - 13.00 Produk Jasa Keuangan Syariah untuk UMKM oleh PT BFI Finance Indonesia

13.00 - 13.45 Quiz 2

13.45 - 14.00 Success Story: Ekspor Berhasil Lancar Produk Berkelanjutan oleh Ibu Sundari Puhungan

14.00 - 15.30 Pengumuman Pememenng Quiz

15.30 - 16.00 Penutupan

Business Matching
Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan UMKM
14-15 JUNI 2022

GRATIS!
Semua Peserta
14-15 Juni 2022

SHARING KNOWLEDGE:
08.00 - 08.15 Opening dan Pembacaan lagu Indonesia Raya
08.15 - 08.30 Pembacaan dan Penyerahan Rapor
08.30 - 09.00 Keynote Speech: A to Z Berbisnis Syariah: Kemandirian dan Logistik di Bidang Ekspor oleh Bapak Arya Mubart

Success Story:
09.00 - 10.30 Produk Jasa Keuangan Syariah untuk UMKM oleh LPEI

Moderator:
Nanang Wahyudi
Pradiksaner Sharda Rindhi

IKNB SYARIAH PT/LEMBAGA:
Perusahaan Pembiayaan Syariah
Perusahaan Asuransi Syariah
Perusahaan Modal Ventura Syariah
Perusahaan Penjaminan Syariah
Perusahaan *Fintech* Syariah

Online Via Zoom Meeting
Pendaftaran s.d 13 Juni 2022
bit.ly/daftarBusinessMatching2

Dapatkan hadiah menarik untuk 100 orang terpilih!

Roundup Business Matching
Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah dan UMKM
14-15 JUNI 2022

GRATIS!
Semua Peserta
14-15 Juni 2022

SHARING KNOWLEDGE:
08.00 - 08.15 Opening dan Pembacaan lagu Indonesia Raya
08.15 - 08.30 Pembacaan dan Penyerahan Rapor
08.30 - 09.00 Keynote Speech: A to Z Berbisnis Syariah: Kemandirian dan Logistik di Bidang Ekspor oleh Bapak Arya Mubart

Success Story:
09.00 - 10.30 Produk Jasa Keuangan Syariah untuk UMKM oleh LPEI

Moderator:
Nanang Wahyudi
Pradiksaner Sharda Rindhi

IKNB SYARIAH PT/LEMBAGA:
Perusahaan Pembiayaan Syariah
Perusahaan Asuransi Syariah
Perusahaan Modal Ventura Syariah
Perusahaan Penjaminan Syariah
Perusahaan *Fintech* Syariah

Online Via Zoom Meeting
Pendaftaran s.d 13 Juni 2022
bit.ly/daftarBusinessMatching2

Dapatkan hadiah menarik untuk 100 orang terpilih!

08

Riset Keuangan Syariah 2022



Pengembangan Indikator Kinerja dan Manajemen Risiko Terhadap Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel/parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan bank dalam menjalankan fungsi sosial, mengidentifikasi jenis-jenis risiko bank syariah yang dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan fungsi sosial, menganalisis pengaruh implementasi fungsi sosial terhadap profil risiko bank syariah, menganalisis pengaruh pelaksanaan

fungsi sosial terhadap kebutuhan modal minimum bank syariah, menganalisis pengaruh kinerja sosial bank syariah terhadap kinerja komersial dari bank syariah dan menganalisis mekanisme integrasi pengukuran kinerja fungsi sosial ke dalam penilaian tingkat kesehatan bank syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil *Focus Group Discussion* (FGD), *in-depth interview*, survei kepada seluruh BUS dan UUS, kajian pustaka serta data sekunder berupa laporan bulanan bank syariah (BUS dan UUS). Data tersebut diolah menggunakan beberapa metodologi penelitian secara berurutan dengan tahap 1, yaitu penyusunan indeks kinerja fungsi sosial bank syariah menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) dan *Analytical Network Process* (ANP). Selanjutnya, tahap 2 yaitu analisis pengaruh implementasi fungsi

sosial terhadap profil risiko bank syariah, kebutuhan modal minimum bank syariah dan kinerja komersial bank syariah menggunakan regresi panel data. Dan terakhir tahap 3 yaitu mengintegrasikan indeks fungsi sosial ke dalam penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah menggunakan metode ANP untuk mendapatkan bobot kepentingan antara indikator atau indeks penilaian kinerja bank syariah yang sudah ada saat ini dengan indeks kinerja fungsi sosialnya.





Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh aktivitas fungsi sosial bank syariah terhadap kinerja komersial bank syariah (Profitabilitas dan Risiko kredit), pengaruh aktivitas sosial terhadap kinerja komersial lebih besar (Profitabilitas dan Permodalan) pada BUS dibandingkan dengan UUS, fungsi sosial

tidak hanya terkait dengan penyaluran ZISWAF, namun juga 10 (sepuluh) indikator lainnya dan insentif bagi bank syariah yang melaksanakan fungsi sosial dengan bank dapat berupa Peningkatan Peringkat Komposit (PK) satu level dan Insentif pajak korporasi/perusahaan.

Rekomendasi Penelitian

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk

1. Memberikan insentif bagi bank yang memiliki kinerja fungsi sosial yang baik.
2. Membuat aturan yang mewajibkan bank menginformasikan kinerja sosial kepada masyarakat sebagai bagian dari laporan tahunan publikasi. Hal ini akan memunculkan karakteristik unik bank syariah.
3. Untuk kajian selanjutnya, penelitian ini menyarankan kajian khusus mengenai transformasi strategis yang harus dikelola baik oleh OJK sebagai otoritas keuangan maupun lembaga perbankan syariah sebagai pelaku keuangan. Bagi OJK, akan mengubah pendekatan pengukuran tingkat kesehatan dan pemantauan kegiatan perbankan syariah karena fungsi sosial diukur. Bagi bank syariah, masuknya fungsi sosial akan mengubah pendekatan mereka dalam menyusun rencana bisnis tahunan bank, pelaksanaan program, dan sistem pelaporan.

Pengembangan Asuransi Syariah Indonesia

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dan *market share* industri asuransi syariah di Indonesia dan menganalisis produk asuransi yang belum dimiliki oleh asuransi syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data individu perusahaan asuransi syariah periode 2016-2021 periode triwulanan dengan metodologi berupa analisis kualitatif berdasarkan *Study Desk* dan *Focus Group Discussion* (FGD) dan pengolahan data kuantitatif menggunakan pendekatan *statistical significance* berupa pendekatan *Panel Data* (GMM dan *Random Effect*).

Hasil Penelitian

Secara kuantitatif penelitian ini menunjukkan hasil bahwa asuransi jiwa syariah lebih rendah mempengaruhi profitabilitas dan *market share* dibandingkan dengan asuransi umum syariah, variabel CAP (rasio total modal terhadap total aset untuk mencerminkan peran pendanaan internal), LEV (rasio total kewajiban terhadap total *asset*), (rasio efisiensi atau *rasio overhead* (rasio total pengeluaran dibagi dengan total aset), RBC (risiko kebangkrutan perusahaan yang diukur dengan rasio modal berbasis risiko), dan SIZE (aset perusahaan yang diukur dengan logaritma total *asset*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, variabel CAP, LEV, dan OVER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pangsa Pasar (MSHARE), variabel RBC tidak berpengaruh terhadap Pangsa Pasar (MSHARE) dan variabel SIZE berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pangsa Pasar (MSHARE). Sedangkan secara kualitatif penelitian menunjukkan hasil bahwa variasi produk asuransi syariah di Indonesia cukup bersaing dengan asuransi syariah di luar negeri, terdapat 2 (dua) lini produk yang belum dimiliki oleh asuransi syariah di Indonesia yaitu *suretyship* dan satelit dan beberapa produk asuransi syariah yang belum terdapat di Indonesia, disebabkan:

- Risiko yang besar yang tidak dapat ter-cover oleh permodalan asuransi di dalam negeri,
- Tidak memungkinkan secara ketentuan dan Fatwa DSN-MUI.

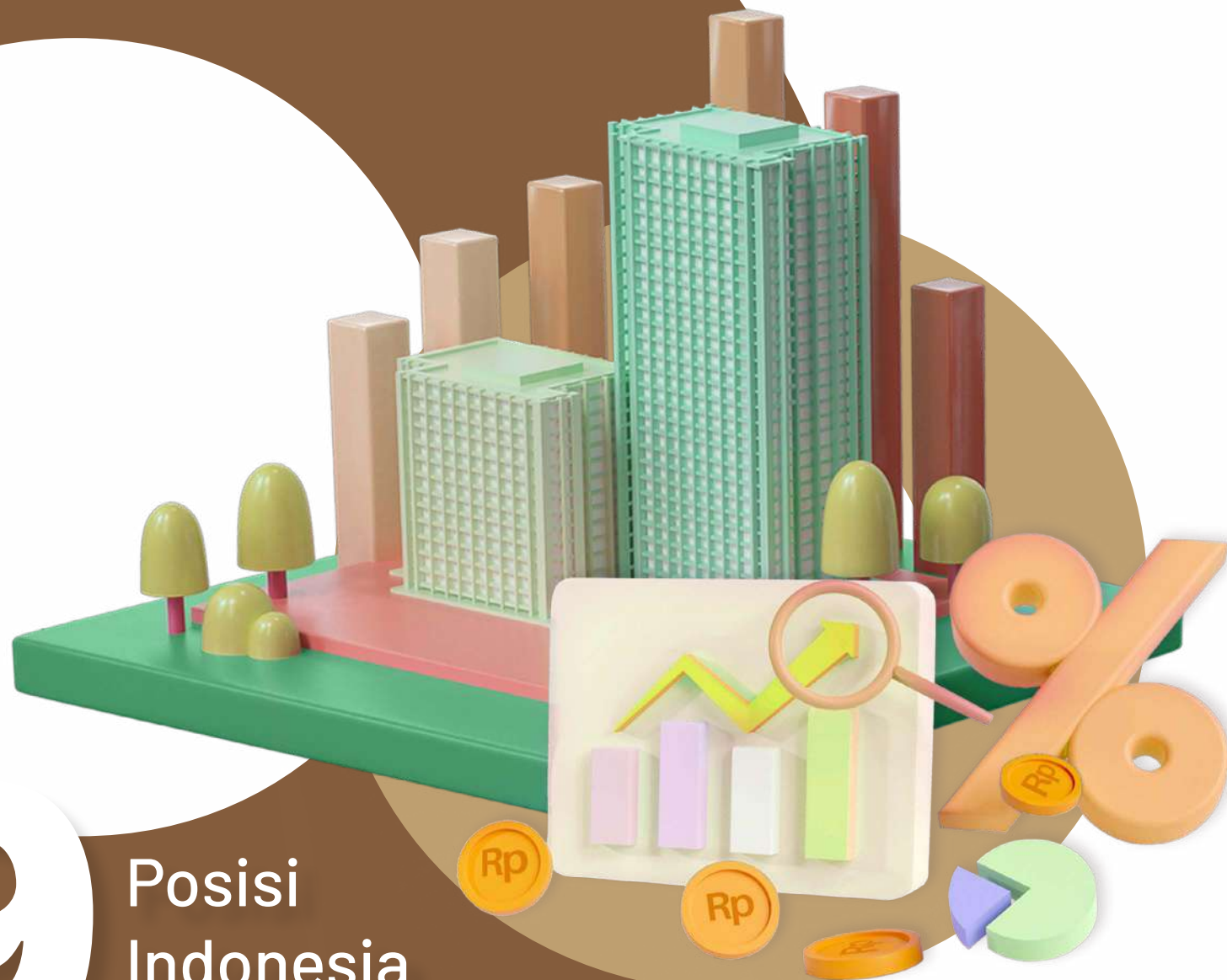
Rekomendasi Penelitian

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi bahwa merujuk pada besarnya pengaruh ukuran perusahaan baik terhadap profitabilitas maupun *market share*, maka industri asuransi syariah perlu didorong untuk meningkatkan ukuran perusahaan secara an-organik baik melalui merger, konsolidasi dan akuisisi. Di samping itu, hasil kuantitatif dari riset kuantitatif ini masih sejalan dengan Riset Kualitatif OJK 2021 yaitu asuransi jiwa syariah lebih rendah mempengaruhi profitabilitas dan *marketshare* dibandingkan dengan asuransi umum syariah, maka terobosan dalam literasi asuransi syariah masih penting dilakukan.



09

Posisi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global



Posisi Indonesia Dalam Keuangan Syariah Global

Indonesia semakin mengukuhkan posisinya dalam keuangan syariah global. Berdasarkan *Islamic Finance Development Report 2022*, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai US\$139 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US\$119 miliar. Posisi Indonesia pada peta keuangan syariah global juga tidak berubah, masih menempati posisi ke-7 untuk total aset keuangan syariah terbesar di dunia.

Peningkatan aset didominasi oleh instrumen sukuk dari sebelumnya US\$73 miliar menjadi US\$84 miliar pada tahun 2021. Instrumen sukuk juga menjadi alternatif instrumen keuangan yang diminati untuk Indonesia dalam rangka melonggarkan tekanan anggaran negara akibat perlambatan ekonomi saat pandemi COVID-19.

Secara aspek kualitatif, keuangan syariah Indonesia juga masih mencatatkan prestasi yang baik di masa pandemi, dibuktikan dengan mempertahankan peringkat ke-3 dalam *Islamic Finance Development Indicator 2022* yang dipublikasikan oleh *Islamic Finance Development Report 2021*. Indonesia juga menempati peringkat ke 5 teratas pada beberapa indikator, seperti sukuk, regulasi, ESG, edukasi,

penelitian dan event. Indonesia dapat mengoptimalkan potensi di indikator lain untuk meningkatkan peringkat seperti indikator perbankan syariah, takaful, dana syariah, tata kelola dan tata kelola syariah, CSR, dan pemberitaan terkait keuangan syariah.



Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2022

Indonesia menduduki peringkat ke-3 dari 136 negara di dunia pada tahun 2022.

*Berdasarkan data tahun 2021



Keuangan Syariah

Ranking Global

#7

Total Aset
US \$139
(dalam miliar USD)

Perbankan Syariah

Ranking Global

#9

Total Aset
US \$48
(dalam miliar USD)

Asuransi Syariah

Ranking Global

#5

Total Aset
US \$3
(dalam miliar USD)

Sukuk

Ranking Global

#3

Total Aset
US \$84
(dalam miliar USD)

Reksadana Syariah

Ranking Global

#7

Total Aset
US \$3
(dalam miliar USD)

Posisi Indonesia
dalam Keuangan
Syariah Global
secara total aset

Sumber:
Islamic Finance
Development
Report 2022

Posisi Indonesia dalam Indikator IFDI 2022

#5

Event

Jumlah seminar, konferensi,
dan acara *online* terkait
keuangan syariah

#1

Regulasi

Regulasi terkait perbankan
syariah, akuntansi, tata kelola
syariah, takaful, sukuk, dana
syariah, *fintech sandbox*

#5

ESG

Jumlah dan nilai sukuk dan
dana syariah ESG yang
beredar, adanya pedoman
terkait keuangan syariah
berkelanjutan, skor indeks
pelaporan ESG

#1

Edukasi

Jumlah pendidikan tinggi
yang memiliki jurusan
terkait keuangan syariah

#2

Penelitian

Jumlah penelitian dan
jurnal yang di terbitkan
terkait keuangan syariah

#3

Sukuk

Jumlah dan volume sukuk
yang terbit dan beredar,
jumlah sukuk yang tercatat
di bursa, *bid/ask spread*

* 9 Negara memiliki skor tertinggi yang sama pada indikator regulasi*

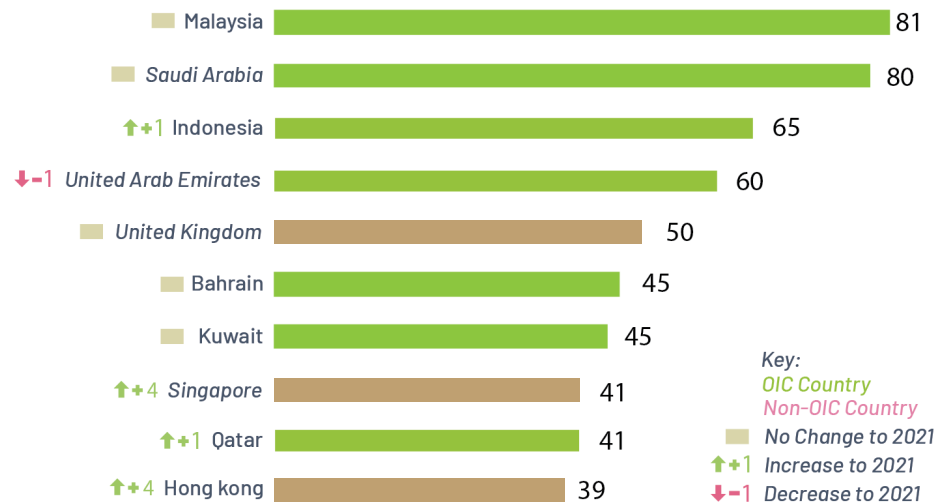
Capaian Global

Indonesia Raih Peringkat-3 dalam *Global Islamic Fintech Index* 2022

Dalam GIFT Indeks 2022, Indonesia menempati peringkat ke-3, meningkat satu peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan ekosistem yang siap untuk pertumbuhan *Fintech* Syariah dengan pertumbuhan volume pembiayaan sebesar 130%+ *year on year* sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Pertumbuhan *market size Fintech* Syariah diperkirakan

akan mencapai \$179 miliar pada tahun 2026 dengan *Compounded Annual Growth Rate* 17,9% dibandingkan dengan keseluruhan industri *Fintech* global. Selain itu, jumlah transaksi *fintech* syariah di Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari \$4.239,4 juta (2021) menjadi \$11.263,6 juta (2026) dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 21,6 persen.

Top 10 Countries by GIFT Index Scores

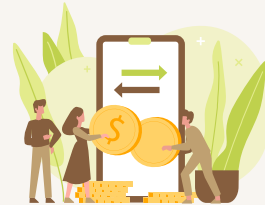


Global Islamic Fintech (GIFT) Index merupakan laporan yang menyajikan perbandingan negara-negara dengan ekosistem yang paling kondusif untuk perkembangan *Fintech* Syariah dengan menggunakan 19 indikator dalam lima kategori yaitu *Talent*; Regulasi; Infrastruktur; Pasar dan Ekosistem *Fintech* Syariah; serta Modal.

Pada tahun 2022, **Pemerintah sukses melakukan transaksi penjualan Global Sukuk sebesar US\$3,25 miliar yang terdiri atas US\$1,75 miliar dengan tenor 5 tahun dan US\$1,5 miliar dengan tenor 10 tahun (seri *Green* dengan akad Wakalah yang jatuh tempo pada tahun 2027 dan 2032).**

Penerbitan ini membuktikan dedikasi dan komitmen jangka panjang Pemerintah untuk pembiayaan hijau dan berkelanjutan. Penerbitan *Green* sukuk di pasar global tahun 2022 memantapkan posisi Indonesia sebagai penerbit *Green* Sukuk Global terbesar di dunia pada tahun 2022.

Beberapa capaian penting dari penerbitan ini antara lain:



Transaksi Sukuk USD Global terbesar dari Pemerintah

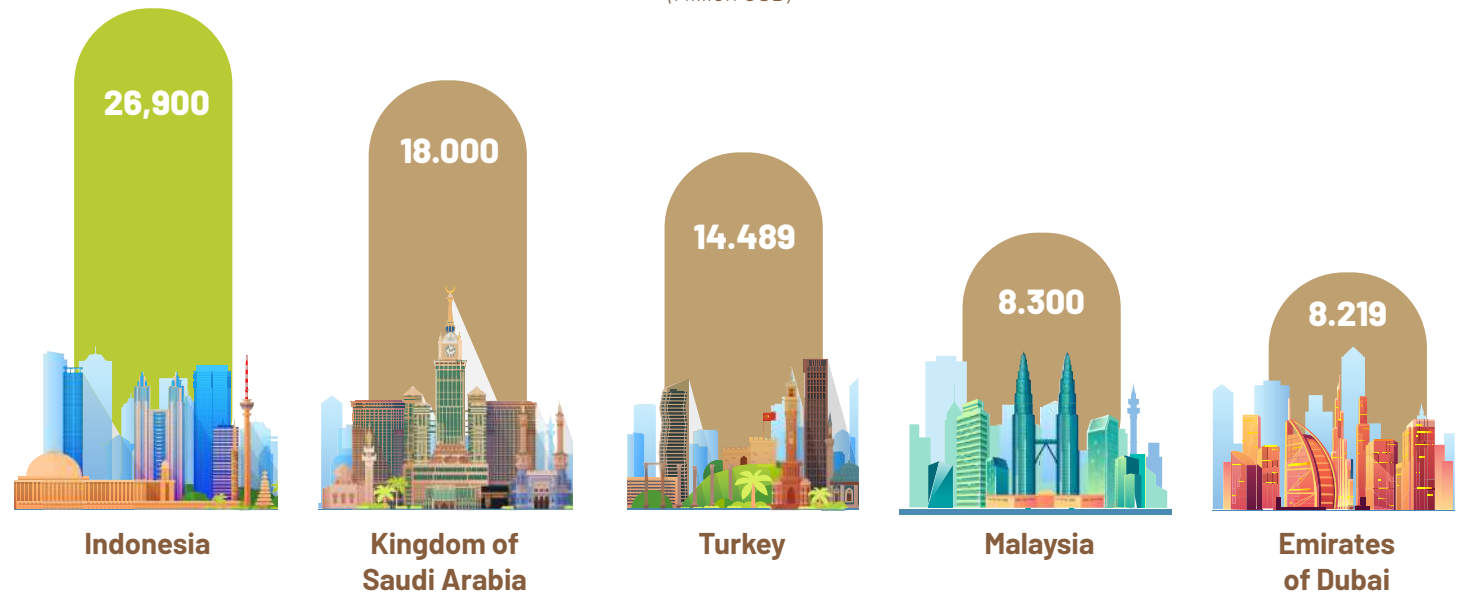


Green Sukuk terbesar yang pernah dicetak secara global



Green Sukuk pertama dengan tenor 10 tahun oleh Indonesia

International Sovereign Sukuk Issuance
(Million USD)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

Partisipasi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global



Islamic Financial Services Board (IFSB)

- OJK resmi menjadi anggota penuh *The Islamic Financial Services Board* (IFSB) dan diwakili Ketua Dewan Komisiner hadir dalam pertemuan IFSB di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 25-27 Maret 2014
- Gubernur Bank Indonesia sebagai *Chairman of IFSB Executive Chairman* (EC)
- Direktur Perbankan Syariah OJK sebagai *Deputy Chairman* untuk *IFSB Task Force for the Guidance Note on Climate-related Financial Risks for IIFS (Banking Segment)* dan anggota dari *Technical Committee* IFSB
- Keanggotaan *Task Force* oleh:
 - o Bank Indonesia dalam *Technical Note On Recovery And Resolution For Institutions Offering Islamic Financial Services*
 - o OJK dalam penyusunan *Macroprudential Tools of Islamic Banking Standar, Climate-related Financial Risks for Institutions offering Islamic Financial Services (Banking Segment) Standard*, dan *Prudential and Structural Islamic Financial Indicators* (PSIFIs)
- Keanggotaan *Working Group*:
 - o Bank Indonesia dalam penyusunan *Standar Shari'ah-Compliant Liquidity Management Tools*
 - o OJK dalam penyusunan *Revised Guiding Principles on Corporate Governance*



Islamic International Liquidity Market (IILM)

- Bank Indonesia terlibat sebagai *Chairperson* pada *Board of Risk Management Committee* (BRMC), serta anggota pada *Governing Board* (GB), *Board Executive Committee* (BEC), dan *Board Audit Committee* (BAC)
- Bank Indonesia saat ini tengah menginisiasi upaya *Scaling-up Business Operation* melalui penyusunan *Blueprint* dan *Roadmap* Pengembangan IILM



General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI)

- KNEKS terlibat dalam Keanggotaan *Task Force* and *Working Group* terkait penyusunan standar di bidang *Sustainability Working Group* (SWG) CIBAFI

Partisipasi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global



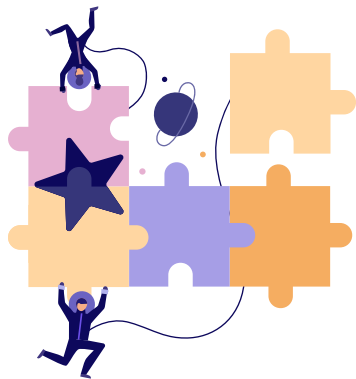
Islamic International Financial Market (IIFM)

- Bank Indonesia terlibat dalam penyusunan standar IIFM yaitu *Syndication Documentation Standardization Initiative* dan *Islamic Liquidity Management Tool's Documentation*
- Bank Indonesia menginisiasi beberapa penguatan dalam proses pengambilan keputusan di IIFM, melalui pelaksanaan survei kebutuhan standar kepada para member IIFM, perluasan partisipasi anggota IIFM pada *working group*, dan upaya penguatan organisasi lainnya



Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

- KNEKS sebagai partner dari AAOIFI dan anggota *Working Group* dalam penyusunan standar:
 - o *Exposure draft - Financial reporting for Zakah*
 - o *Development and Governance of Shari'ah Compliant Benchmark Rates*
 - o *Exposure draft - Shari'ah and Fiduciary Ratings of Sukuk and Other Islamic Finance Instruments*
 - o *Exposure draft - Mudaraba and Musharaka Financing.*



World Zakat & Waqf Forum (WZWF)

- Direktur KNEKS terlibat sebagai *Advisor* dalam *World Zakat and Waqf Forum*



10

Prospek Keuangan Syariah 2023

Arah Kebijakan OJK atas Implementasi UU P2SK terkait Keuangan Syariah

Fokus OJK dalam implementasi Undang-Undang P2SK a.l. penguatan yang dilakukan melalui penataan *landscape* sektor keuangan untuk mendorong perkembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) syariah, terutama terkait pelaksanaan *spin off* unit usaha syariah (UUS) pada industri perbankan dan asuransi yang dikaitkan dengan program konsolidasi serta memperhatikan persyaratan yang ditetapkan OJK, seperti skala ekonomi dan kapasitas individu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), yang selanjutnya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).



Pidato Ketua Dewan Komisiner OJK pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, 6 Februari 2023

Arah Kebijakan Prioritas OJK Tahun 2023

1. Penguatan Sektor Jasa Keuangan

- Penguatan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan industri jasa keuangan
- Peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pengelolaan investasi
- Peningkatan perlindungan konsumen dan masyarakat

2. Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

- Indonesia menjadi pusat investasi syariah dan investasi hijau global
- Meningkatkan daya tarik investasi pasar keuangan domestik
- Dukungan reformasi perekonomian dan Program Strategis Pemerintah
- Perluasan akses keuangan kepada UMKM

3. Peningkatan Layanan dan Penguatan Kapasitas OJK

- Penguatan layanan OJK
- Penguatan kapasitas kelembagaan baik OJK maupun di SJK



Indonesia Menjadi Pusat Investasi Syariah dan Berkelanjutan di Dunia

Mendorong penerbitan instrumen investasi yang baru dan inovatif sesuai dengan kebutuhan para investor dengan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah, otoritas lain, dan seluruh pemangku kepentingan

OJK akan mendorong sumber pendanaan yang akan dioptimalkan melalui peningkatan minat investor terhadap instrumen investasi berkelanjutan dan hijau serta investasi syariah di Indonesia

Arah Pengembangan Perbankan Syariah di Tahun 2023



RP2SI disusun sebagai arah pengembangan yang bersifat *living document* atau dapat disesuaikan dalam menjawab tantangan dan dinamika industri perbankan syariah. Oleh karenanya, semenjak disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada 15 Desember 2022 yang secara formal diundangkan melalui UU Nomor 4 tahun 2023 pada tanggal 12 Januari 2023, maka OJK akan terus melakukan pengkinian arah pengembangan perbankan syariah Indonesia ke depan.

Berdasarkan pencapaian selama 2 tahun terakhir dimana perbankan syariah telah semakin baik dalam efisiensi dan penguatan modalnya serta mengembangkan produknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang didukung dengan ketentuan yang mengedepankan *outcome* dan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas bank syariah, maka di tahun 2023 OJK akan terus mendorong upaya Sinergi Perbankan Syariah dalam Ekosistem Ekonomi Syariah. Secara khusus di tahun 2023, OJK akan mendorong Implementasi

Sinergi Perbankan Syariah dengan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya Termasuk Sinergi Perbankan (dengan Bank Induk) dalam rangka Perluasan Akses Layanan Perbankan Syariah.

Selain itu, di tahun 2023 OJK juga akan fokus dalam penguatan identitas perbankan syariah, melalui penyusunan kajian dan ketentuan *Sharia Governance Framework* (SGF), standar kompetensi bankir syariah, serta implementasi salah satu amanat UU PPSK yaitu

pembentukan Komite Perbankan Syariah. OJK juga akan terus mendorong kebijakan penguatan dan konsolidasi perbankan syariah dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah. OJK akan terus berkomitmen dalam mewujudkan perbankan syariah yang *resilient*, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional serta pembangunan sosial sesuai dengan visi RP2SI.

Arah Pengembangan Industri Keuangan Non Bank Syariah



Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Ekonomi Syariah



Sinergi Industri Jasa Keuangan Syariah dengan Pelaku Ekonomi Syariah (Industri Halal)



Peningkatan Kebutuhan Pendanaan Industri Halal dan Pengelolaan Dana Sosial



Peningkatan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah



Diferensiasi Model Bisnis/Produk yang Signifikan untuk Produk Keuangan Syariah



Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Keuangan Syariah

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah menunjukkan kinerja yang positif selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), **aset IKNB Syariah selama 2 tahun terakhir tumbuh rata-rata sebesar 11,6% per tahun.**

Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar IKNB Syariah dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Untuk mendorong pertumbuhan aset IKNB Syariah, pada tahun 2023 OJK akan terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan peran IKNB Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendalaman pasar IKNB Syariah melalui kerjasama dengan lembaga jasa keuangan lainnya atau pelaku industri dalam rangka memperkuat ekosistem

keuangan syariah. Pendalaman pasar ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas keuangan syariah bagi masyarakat.

Selain itu, OJK juga mengupayakan perluasan produk pembiayaan syariah dan asuransi syariah melalui kerjasama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan/atau pesantren. Kerjasama ini bertujuan untuk memberdayakan sektor riil yang berbasis nilai-nilai syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Kajian untuk Penguatan Pengaturan

Penguatan pengaturan di sektor IKNB Syariah pada industri modal ventura syariah, sindikasi penjaminan syariah dan bank wakaf mikro melalui kegiatan kajian. Penguatan pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah.



Penyusunan Roadmap IKNB

Saat ini OJK juga sedang menyusun *roadmap* IKNB termasuk *roadmap* sektoral (termasuk asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan penjaminan) yang termasuk di dalamnya mengenai arah pengembangan IKNB Syariah 5 tahun ke depan. Dalam melakukan penyusunan *roadmap*, OJK melakukan diskusi dengan asosiasi dan industri.

Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah



Rencana Aksi Penambahan Variasi dan Layanan Produk, Termasuk Produk Syariah



Meningkatkan Penerbitan Sukuk Korporasi di Indonesia, melalui Optimalisasi Penerbitan Sukuk Korporasi oleh Korporasi (termasuk BUMN).

Mengembangkan Sekuritisasi Melalui Produk Investasi Berupa Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (termasuk Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi) ataupun Surat Utang dan Efek Beragun Aset Syariah.

- Kajian indeks saham syariah berbasis ESG pada tahun 2021
- Kajian *green* sukuk pada tahun 2021
- Penerbitan produk syariah berbasis wakaf
- pada tahun 2022 (penerbitan sukuk ijarah RS Panacea Batam, sukuk ijarah, *underlying assetnya* renovasi RS, melalui skema *securities crowdfunding*)

- Penyusunan pojok terkait *green* sukuk yang digabungkan dgn pojok *thematic bond* sehingga merevisi pojok 60 menjadi pojok mengenai ebus berlandaskan keberlanjutan –pada tahun 2023
- Mendorong penerbitan produk syariah berbasis wakaf pada tahun 2023

Rencana Aksi Penyiapan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan di Pasar Modal

Menyiapkan Landasan Hukum Penerbitan *Green* Sukuk.

Menerbitkan Instrumen Syariah yang Sejalan dengan Nilai-Nilai *Environmental, Social, and Governance*.

Rencana Aksi Penguatan Peran Intermediasi dan Potensi Perluasan Intermediasi Jasa Keuangan

Meningkatkan Peran Lembaga Keuangan Syariah di Pasar Modal dalam rangka Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah.



Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Penerbitan Efek Berupa Sukuk berlandaskan Keuangan Keberlanjutan dan Sukuk Daerah

Sesuai dengan target *Nationally Determined Contribution (NDC)*, pembangunan ekonomi Indonesia ke depan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Hal ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan tersebut, serta memperbesar porsi kerja sama pemerintah dan badan usaha guna menurunkan beban kontribusi pendanaan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan tersebut, pemerintah akan memperbesar pemanfaatan skema-skema pembiayaan yang bersumber dari berbagai skema pembiayaan tematik (*thematic financing windows*) termasuk di dalamnya adalah skema pembiayaan hijau (*green financing*).

Berkaitan dengan hal tersebut, instrumen Pasar Modal syariah memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk investasi syariah berwawasan lingkungan yang dapat mendanai pembangunan berkelanjutan tersebut, salah satunya *green sukuk*. Di sisi lain, minat investor pada efek berwawasan lingkungan semakin meningkat. Hal ini tercermin dari permintaan *green sukuk* ritel negara yang melebihi dari nilai nominal yang ditawarkan (*over subscribe*) pada tahun 2020 lalu.

Hal tersebut juga merupakan peluang potensial yang dapat dikembangkan. Pengembangan produk investasi syariah

berwawasan lingkungan (*green sukuk*) ini juga sejalan dengan arah pengembangan yang tertuang di dalam *Road Map Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2021-2025* dan *Road Map Pasar Modal Syariah 2020-2024*.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari *Road Map Keuangan Berkelanjutan* yang disusun OJK, di Pasar Modal telah terdapat pengaturan Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*) yang tertuang di dalam POJK Nomor 60/POJK.04/2017 yang tujuan penerbitannya untuk menjaga atau meningkatkan kelestarian lingkungan hidup. Namun demikian, POJK dimaksud belum mencakup aturan mengenai *green sukuk*. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK akan melakukan perubahan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 sesuai dengan kajian yang telah dilakukan pada tahun 2021.

Melihat perkembangan tren positif di pasar saat ini, sukuk diperkirakan akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang.

Meningkatnya penerimaan investasi berbasis Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) oleh investor, dan sektor bisnis juga telah menciptakan peluang bagi Pemerintah sebagai penerbit sukuk negara untuk memanfaatkan tren ini melalui penerbitan *Green Sukuk* maupun Sosial Sukuk seperti CWLS. Selain itu, pemerintah saat ini sedang menyiapkan legal infrastruktur untuk pengembangan pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN terkait dengan perluasan cakupan Pemrakarsa Proyek SBSN yang selama ini hanya di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat menjadi untuk membiayai proyek yang juga diinisiasi oleh Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui skema investasi Pemerintah. Lebih lanjut, sehubungan dengan meningkatnya target penerbitan SBN kepada investor ritel, pemerintah juga berupaya mengembangkan strategi penerbitan *dual tranche* untuk meningkatkan penerbitan sukuk ritel, sekaligus sebagai langkah untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.

Peluang Penerbitan Efek Daerah Berupa Sukuk Daerah

01



Dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, pada 5 Januari 2022 disahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (HKPD). Salah satu aturan mengenai pasar modal syariah yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai Sukuk Daerah yang belum diatur pada undang-undang sebelumnya, dan hanya memuat pengaturan Obligasi Daerah. Melalui penambahan pengaturan Sukuk Daerah di undang-undang tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan penerbitan Sukuk Daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah, termasuk sarana dan prasarana daerah.

02



Selain itu, untuk menyempurnakan pengaturan Sukuk Daerah yang telah diatur dalam pasal 157, 158, 159, dan 163 undang-undang HKPD, pemerintah tengah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (HKFN). Dalam RPP tersebut, diatur secara lebih rinci mengenai norma-norma berikut prinsip-prinsip utama yang perlu dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka menerbitkan Sukuk Daerah. Melalui RPP ini, penerbitan Sukuk Daerah dapat diatur melalui Peraturan Kepala Daerah, setelah disepakati besaran defisit anggaran daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah mengenai APBD. RPP tersebut diharapkan untuk dapat segera terbit pada awal tahun 2023 supaya dapat segera dipelajari oleh pemerintah daerah yang berminat untuk menerbitkan Sukuk Daerah.

03



Diharapkan melalui penerbitan RPP HKFN, pemerintah daerah dapat mengacu pada peraturan tersebut dalam menginisiasi menerbitkan Sukuk Daerah. Kemudian, dari sisi peraturan OJK sendiri, telah terdapat beberapa peraturan teknis mengenai penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Daerah yaitu POJK 61, 62, dan 63 tahun 2017.

04



Dari sisi kesiapan, Kemenko Perekonomian, bersama dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan KNEKS terus berkolaborasi bersama dalam persiapan penerbitan Sukuk Daerah, termasuk pemberian dukungan atau bimbingan kepada pemerintah daerah yang berkeinginan menerbitkan Sukuk Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak serta daerah yang telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk dapat mengkaji peluang penerbitan Sukuk di daerahnya masing-masing.



Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022

Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro, Lantai 21
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

(021) 2960 0000
www.ojk.go.id

Penulis

Otoritas Jasa Keuangan

Farid Faletahan

Helmi Harris

Ardiansyah Rakhmadi

Intan Natasha Putri

Nada Fajriah

Alfado Agustio

Galih Adhidharma

Wildana Ramadhani

Nur Sa'diyah

Fatimah Azzahra

Astiwin

Salma Maryam

Arif Widodo

Alif Khuwarazmi Maulana
Julendra

Mega Rachma Kurniaputri

Pungkas Widyatmodjo

Gita Armitawati

Muhammad Musa

Utariningsih Putri

Wiryoharjono

Anita Primadani

Nalissa

Mega Tiara Cecaria

Ulis Fajar Choiratun Hisan

Kurniatul Khasanah

Annisa Ika Rahmawati

Bagas Setiaji

Sri Nur Elita Ermis

Sulistyoningsih

Rosyidah Rahmadini

Putri Amanda

Gabi Haifa Nadhira

DJPPR – Kementerian Keuangan RI

Ihwan Hadi Sunarno

Muhammad Iqbal Balative

Adhi Wicaksono

Athius Solikhah

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah – RI

Bazari Azizi

Nadya Rose

Raihan Aulia Firdausi

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia

Imam Wahyudi Indrawan

Halaman ini sengaja dikosongkan



**Departemen
Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan**

Menara Radius Prawiro, Lantai 21
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

(021) 2960 0000
www.ojk.go.id